



BP BATAM
Badan Pengusahaan Batam

2022

**LAPORAN KEUANGAN
BADAN PENGUSAHAAN BATAM**



LK BLU BP BATAM

untuk periode yang berakhir
31 Desember 2022

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
AUDITED

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya. Mengacu pada ketentuan tersebut, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Badan Pengusahaan Batam) berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan PSAP 13 serta kaidah-kaidah yang terkait pengelolaan keuangan negara. Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2022, menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.977.960.885.866,00 atau 116,47%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp1.698.316.558.000,00. Realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Kawasan otorita berupa Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp1.963.164.846.917,00, dan Pendapatan PNPB Lainnya

- sebesar Rp14.796.038.949,00. Pendapatan PNPB Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp2.432.359.160,00, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp9.336.055.495,00, Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp3.027.624.294,00.
2. Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.637.864.718.393,00** atau **74,78%** dari alokasi anggaran sebesar Rp2.190.218.258.000,00 Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp1.071.099.979.083,00 atau 90,94% dari anggaran sebesar Rp1.177.861.655.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp566.764.739.310,00 atau sebesar 55,98% dari pagu anggaran sebesar Rp1.012.356.603.000,00.
 3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2022 adalah sebesar **Rp499.527.578.061,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar 340.096.167.473,00 penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp34.445.841.745,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp49.241.880.694,00 dan Penyetoran PNPB ke kas negara sebesar (Rp14.796.038.949,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp374.542.009.218,00** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp874.069.587.279,00**.
 4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas yang berakhir Per 31 Desember 2022. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset Badan Pengusahaan Batam adalah sebesar **Rp54.906.867.518.168,00** dan Kewajiban sebesar **Rp4.031.983.922.321,00** sehingga Ekuitas (kekayaan bersih) Per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp50.874.883.595.847,00**.
 5. Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan

surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.186.138.586.553,00** sedangkan beban operasional adalah sebesar **1.987.334.805.497,00** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp801.196.218.944,00** selain itu jumlah defisit dari kegiatan non operasional adalah sebesar **Rp104.386.807.821,00** Dengan demikian total defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp696.809.411.123,00**

6. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2022 adalah sebesar **Rp51.502.116.780.170,00** sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp689.809.411.123,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp75.143.747.611,00** yang terdiri Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,00 Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp72.500,00 ditambah Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi sebesar Rp34.397.337.641,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp40.746.337.470,00 Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp5.567.520.811,00**. Dengan demikian terdapat penurunan Ekuitas sebesar **Rp627.233.184.323,00** sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp50.874.883.595.847,00**.
7. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022. **Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp640.490.924.179,00**. Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.024.770.407.400,00, penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.085.896.018.032,00 kenaikan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp2.432.359.160,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp566.764.739.310,00, dan kenaikan dari aktivitas transitoris sebesar Rp77.551.530.310,00, penurunan dari aktivitas transitoris sebesar Rp28.606.059.321,00 Sehingga kenaikan kas total adalah sebesar Rp423.487.480.207,00 dengan demikian **Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar**



Rp1.063.978.404.386,00 (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp874.069.587.279,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp189.908.817.107,00).

8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas Badan Pengusahaan Batam.

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam

Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	xi
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	xii
RINGKASAN.....	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	6
II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	7
III. NERACA	8
IV. LAPORAN OPERASIONAL	10
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	11
VI. LAPORAN ARUS KAS	12
VII.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	14
A. PENJELASAN UMUM	14
A.1. Dasar Hukum	14
A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	15
A.3.Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	19
A.4. Basis Akuntansi.....	20
A.5. Dasar Pengukuran.....	21
A.6. Kebijakan Akuntansi	22
B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	37
B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	37
B.2. Belanja Negara.....	49
B.2.1. Belanja Barang	53
B.2.2. Belanja Modal	61
B.2.3. Realisasi Belanja Prioritas Nasional.....	64
B.2.4. Belanja Modal PHLN	65
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH	67
(LP SAL)	67
C.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal.....	67
C.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	68

C.3. Penyesuaian SiLPA/SiKPA	68
C.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	69
C.5. Penyesuaian Lain-lain	69
C.6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir.....	69
D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	71
D.1. Aset Lancar	71
D.1.1. Kas dan Bank	71
D.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid).....	80
D.1.3. Pendapatan yang Masih Harus Diterima.....	80
D.1.4. Piutang Bukan Pajak.....	81
D.1.5. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum.....	82
D.1.6. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional	93
D.1.7. Persediaan	94
D.2. Aset Tetap	116
D.2.1. Tanah.....	116
D.2.2. Peralatan dan Mesin.....	121
D.2.3. Gedung dan Bangunan	130
D.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138
D.2.5. Aset Tetap Lainnya	145
D.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	147
D.2.7. Akumulasi Penyusutan	148
D.2.8. Aset Konsesi Jasa	149
D.2.9. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	150
D.2.10. Properti Investasi	151
D.2.11. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	151
D.3 Aset Lainnya	152
D.3.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	152
D.3.2. Aset Tak Berwujud	155
D.3.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.....	166
D.3.4 Aset Lain-lain.....	167
D.3.4.1. Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan.....	168
D.3.4.2. Piutang Tidak Lancar	171
D.3.4.3. Panjar Tidak Lancar.....	173
D.3.4.4. Piutang Pegawai Tidak Lancar	174

D.3.4.5. Piutang TGR.....	175
D.3.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain).	175
D.4. Kewajiban.....	176
D.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga.....	176
D.4.1.1. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar.....	177
D.4.1.2 Utang Usaha.....	178
D.4.1.3. Titipan Pihak Ketiga.....	179
D.4.1.4 Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU.....	185
D.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka.....	185
D.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya.....	188
D.5 Ekuitas.....	188
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	190
E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	190
E.1.2.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan.....	191
E.1.2.2 Pendapatan Usaha Lainnya.....	197
E.1.2.3. Keuntungan Lainnya.....	213
E.2. Beban Pegawai.....	213
E.3. Beban Persediaan.....	215
E.4. Beban Barang dan Jasa.....	215
E.5. Beban Pemeliharaan.....	216
E.6. Beban Perjalanan Dinas.....	216
E.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	217
E.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	218
E.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar.....	218
E.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar.....	218
E.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	218
E.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	219
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	220
F.1. Ekuitas Awal.....	220
F.2. Surplus (Defisit) LO.....	220
F.3. Koreksi Nilai Persediaan.....	220
F.4. Koreksi Atas Reklasifikasi.....	220
F.5. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi.....	220
F.6. Koreksi Lain-lain.....	221



F.7. Transaksi Antar Entitas	221
F.8. Ekuitas Akhir	222
G. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN ARUS KAS	223
G.1 Arus Kas Aktivitas Operasi	223
G.2 Arus Kas Aktivitas Investasi	225
G.3 Arus Kas Aktivitas Transitoris	227
G. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	228
G.1 IKATAN DAN KONTIJENSI	228

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1a : Daftar Rincian Kas
- Lampiran 1b : Daftar Rincian Saldo Bank Giro Rupiah dan Rekonsiliasi Bank
- Lampiran 1c : Daftar Rekening Bersama KSO
- Lampiran 1d : Daftar Rincian Surat Berharga
- Lampiran 2 : Daftar Rincian Mutasi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
- Lampiran 2a : Daftar Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BUBU Hang Nadim
- Lampiran 2b : Daftar Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Badan Pengelola Pelabuhan Batam
- Lampiran 3 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Infrastruktur Kawasan
- Lampiran 4 : Daftar Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Lahan
- Lampiran 5 : Daftar Piutang Usaha Pusat Data dan Sistem Informasi
- Lampiran 6 : Daftar Piutang Usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
- Lampiran 7 : Daftar Piutang Usaha BUBU Hang Nadim
- Lampiran 8 : Daftar Piutang Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam
- Lampiran 9 : Daftar Piutang Usaha RSBP
- Lampiran 10 : Daftar Piutang Usaha Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum
- Lampiran 11 : Daftar Rincian Persediaan
- Lampiran 12 : Daftar Rincian Aset Tetap Tanah
- Lampiran 12a : Daftar Rincian Tanah di Bawah Rumah Negara
- Lampiran 12b : Daftar Rincian Tanah di Bawah Jalan
- Lampiran 13 : Daftar Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin
- Lampiran 14 : Daftar Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan
- Lampiran 15 : Daftar Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Lampiran 16 : Daftar Rincian Aset Tetap Lainnya
- Lampiran 17 : Daftar Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan
- Lampiran 18 : Daftar Rincian Aset Konsesi Jasa
- Lampiran 19 : Daftar Lampiran Aset Properti Investasi
- Lampiran 20 : Daftar Rincian Aset Tak Berwujud
- Lampiran 21 : Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan
- Lampiran 22 : Daftar Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 23 : Kronologis Piutang Royalti Pasir dan Daftar Piutang Tidak Lancar Kantor Pusat
- Lampiran 23 : Daftar Piutang Tidak Lancar Kantor Pusat
- Lampiran 24 : Daftar Piutang Tidak Lancar BUBU Hang Nadim
- Lampiran 25 : Daftar Piutang Tidak Lancar Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam
- Lampiran 26 : Daftar Piutang Tidak Lancar Rumah Sakit BP Batam
- Lampiran 27 : Daftar Rincian Panjar Tidak Lancar
- Lampiran 28 : Rincian Piutang Pegawai Tidak Lancar
- Lampiran 29 : Rincian Mutasi Utang Usaha
- Lampiran 29 : Rincian Mutasi Utang Kepada Pihak Ketiga
- Lampiran 30 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Kantor Pusat (Penerimaan Sementara)
- Lampiran 30 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Lainnya
- Lampiran 30 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)
- Lampiran 30 : Daftar Titipan Uang Muka UWT (UM UWT)
- Lampiran 30 : Titipan Jaminan Lainnya
- Lampiran 31 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
- Lampiran 32 : Daftar Titipan Pihak Ketiga BUBU Hang Nadim
- Lampiran 33 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Pelabuhan
- Lampiran 34 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Rumah Sakit (Deposit)
- Lampiran 34 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Badan Usaha Rumah Sakit (Penerimaan Sementara)
- Lampiran 34 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Lainnya Badan Usaha Rumah Sakit
- Lampiran 35 : Daftar Titipan Pihak Ketiga Kantor Perwakilan Jakarta
- Lampiran 36 : Daftar Pendapatan Diterima Dimuka
- Lampiran 37 : Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya
- Lampiran 38 : Rincian Pendapatan Hasil Kerjasama dengan Pihak Lainnya (KSO)
- Lampiran 39 : Rincian Pendapatan Sewa



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

JALAN IBNU SUTOWO NO. 1, BATAM CENTRE, PULAU BATAM 29400
KOTAK POS 151; TELEPON (0778) 462047, 462048
FAKSIMILE (0778) 462240, 462456; SITUS [www.bpbatam.go.id](http://www.bpb Batam.go.id)

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGGUNA ANGGARAN**

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir Per 31 Desember 2022 (*Audited*) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam

Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2022 (*Audited*) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Batam, Mei 2023

Kepala

Satuan Pemeriksaan Intern



Konstantin Siboro

NIP.196608151987031001

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.977.960.885.866,00** atau **116,47%** dari yang ditetapkan dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp1.698.316.558.000,00. Realisasi Penerimaan Negara Bukan pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita berupa Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp1.963.164.846.917,00 dan Pendapatan PNBP Lainnya sebesar Rp14.796.038.949,00. Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp2.432.359.160,00, Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp9.336.055.495,00, Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu sebesar Rp3.027.624.294,00.

Realisasi Belanja Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.637.864.718.393,00** atau **74,78%** dari alokasi

anggaran sebesar Rp2.190.218.258.000,00. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja barang sebesar Rp1.071.099.979.083,00 atau 90,94% dari anggaran sebesar Rp1.177.861.655.000,00 dan realisasi belanja modal sebesar Rp566.764.739.310,00 atau sebesar 55,98% dari pagu anggaran sebesar Rp1.012.356.603.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 disajikan sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022 (Audited)		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.698.316.558.000,00	1.977.960.885.866,00	116,47
Belanja Negara	2.190.218.258.000,00	1.637.864.718.393,00	74,78
1 Belanja Barang	1.177.861.655.000,00	1.071.099.979.083,00	90,94
2 Belanja Modal	1.012.356.603.000,00	566.764.739.310,00	55,98

PN II Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Pelaksanaannya diantaranya melalui program prioritas pembangunan wilayah sumatera, kegiatan prioritas pengembangan Kawasan strategis yang tersebar di Satker Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp249.399.539.696,00 atau sebesar 53,27% dari Pagu Rp468.207.871.000,00 dengan ringkasan sebagai berikut:

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
BP BATAM	01.Pembangunan Wilayah Sumatera/ 01. Pengembangan Kawasan Strategis	468.207.871.000,00	249.399.539.696,00	53,27				
	5124.RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut							
	RBD.001 Alat Bongkar Muat Pelabuhan Batu Ampar	123.579.019.000,00	71.337.927.927,00	57,73		1 unit		
	5126.RAB OM Sarana Bidang Kesehatan							
	RAB.001 Pengadaan Peralatan Penanganan Cancer/ Radiotherapy RSBP	57.280.960.000,00	-	0,00		1 paket		
	5127.RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)							
	RBC.001 Jalan Gajah Mada-Baloi Tanah Mas (Ruas Pura Agung-Jembatan Baloi Tanah Emas)	16.000.000.000,00	-	0,00		1.50 km		
	RBC.002 Jalan RE. Martadinata Tahap 1	41.870.263.000,00	41.854.412.250,00	99,96		3.30 km		
	RBC.003 Jalan YO5 Susarso Tahap 1	20.000.000.000,00	15.265.089.000,00	76,33		1.20 km		
	5127.RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut							
	RBD.001 Penataan Container Yard (CY) Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahap 2	36.971.000.000,00	-	0,00		1 unit		
	RBD.002 Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar	30.000.000.000,00	10.893.861.557,00	36,31		1 unit		
	RBD.003 Revitalisasi Container Yard (CY) Dermaga Selatan (Ex- SPIL)	31.930.000.000,00	-			1 unit		
	RBD.004 Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1	70.000.000.000,00	69.672.497.402,00	99,53		1 unit		
	5127.RBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara							
	RBE.001 Pembangunan Jalan Akses Terminal Kargo Bandara Hang Nadim	40.576.629.000,00	40.375.751.560,00	99,50		1 unit		

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2022 adalah sebesar **Rp499.527.578.061,00**, penggunaan SAL sebesar Rp0.00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **340.096.167.473,00** penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp34.445.841.745,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp49.241.880.694,00 dan Penyetoran PNPB ke kas negara sebesar (Rp14.796.038.949,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp374.542.009.218,00** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp874.069.587.279,00**.

3. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2022. Jumlah Aset adalah sebesar **Rp54.906.867.518.168,00** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.484.385.579.841,00, Aset Tetap sebesar Rp50.038.828.288.215,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp3.385.467.081.800,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar **Rp4.031.983.922.321,00** yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan jumlah Ekuitas sebesar **Rp50.874.883.595.847,00** sehingga jumlah Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar **Rp54.906.867.518.168,00**. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan/(Penurunan)	
	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)	Jumlah	%
Asset				
Aset Lancar	1.483.870.232.688,00	1.203.035.398.059,00	280.834.834.629,00	23,34
Aset Tetap	52.745.924.990.570,00	52.928.779.723.338,00	(182.854.732.768,00)	(0,35)
Aset Lainnya	677.072.294.910,00	665.101.882.722,00	11.970.412.188,00	1,80
JUMLAH ASET	54.906.867.518.168,00	54.796.917.004.119,00	109.950.514.049,00	0,20
Kewajiban				
Kewajiban jangka pendek	4.031.983.922.321,00	3.294.800.223.949,00	737.183.698.372,00	22,37
JUMLAH KEWAJIBAN	4.031.983.922.321,00	3.294.800.223.949,00	737.183.698.372,00	22,37
Ekuitas				
Ekuitas	50.874.883.595.847,00	51.502.116.780.170,00	(627.233.184.323,00)	(1,22)
JUMLAH EKUITAS	50.874.883.595.847,00	51.502.116.780.170,00	(627.233.184.323,00)	(1,22)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	54.906.867.518.168,00	54.796.917.004.119,00	109.950.514.049,00	0,20

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyajikan unsur pendapatan, beban, surplus/(defisit) dari operasional dan non operasional, surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa dan surplus/(defisit) tahun berjalan. Pendapatan Operasional Badan Pengusahaan Batam untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.186.138.586.553,00** sedangkan beban operasional adalah sebesar **Rp1.987.334.805.497,00** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp801.196.218.944,00** selain itu jumlah defisit dari kegiatan non operasional adalah sebesar **Rp104.386.807.821,00** Dengan demikian total defisit-LO periode berjalan sebesar **Rp696.809.411.123,00**.

5. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2022 adalah sebesar **Rp51.502.116.780.170,00** sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp689.809.411.123,00**. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar **Rp75.143.747.611,00** yang terdiri Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp0,00 Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp72.500,00 ditambah Koreksi Nilai Aset Non

Revaluasi sebesar Rp34.397.337.641,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp40.746.337.470,00 Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp5.567.520.811,00**. Dengan demikian terdapat penurunan Ekuitas sebesar **Rp627.233.184.323,00** sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai **Rp50.874.883.595.847,00**.

6. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022. **Saldo awal Kas dan setara Kas sebesar Rp640.490.924.179,00** Kenaikan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp2.024.770.407.400,00, penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.085.896.018.032,00, kenaikan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp2.432.359.160,00, penurunan kas dari aktivitas investasi sebesar Rp566.764.739.310,00, dan kenaikan dari aktivitas transitoris sebesar Rp77.551.530.310,00, penurunan dari aktivitas transitoris sebesar Rp28.606.059.321,00 Sehingga kenaikan kas total adalah sebesar Rp423.487.480.207,00 dengan demikian Saldo Akhir Kas dan Setara Kas sebesar Rp1.063.978.404.386,00 (Saldo Akhir Kas BLU sebesar Rp874.069.587.279,00 dan Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara kas Rp189.908.817.107,00).

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2022			31 Desember 2021
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		1.698.316.558.000,00	1.977.960.885.866,00	116,47	1.425.794.999.692,00
1. Pendapatan Jasa Layanan Umum			1.963.164.846.917,00	115,59	1.423.077.691.807,00
2. Pendapatan PNBP Lainnya			14.796.038.949,00	0,87	2.717.307.885,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.698.316.558.000,00	1.977.960.885.866,00	116,47	1.425.794.999.692,00
BELANJA NEGARA	B.2				
Belanja Barang					
1. Belanja Pegawai		550.567.070.000,00	511.335.228.111,00	92,87	520.196.633.879,00
2. Belanja Barang		140.868.489.000,00	127.909.976.656,00	90,80	162.339.940.679,00
3. Belanja Jasa		342.145.373.000,00	306.047.692.960,00	89,45	316.287.607.001,00
4. Belanja Pemeliharaan		94.101.343.000,00	87.885.450.609,00	93,39	297.781.264.114,00
5. Belanja Perjalanan		46.179.380.000,00	34.054.716.170,00	73,74	23.741.158.021,00
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa		4.000.000.000,00	3.866.914.577,00	96,67	4.577.682.609,00
Sub Total Belanja Barang (1 s.d 6)		1.177.861.655.000,00	1.071.099.979.083,00	90,94	1.324.924.286.303,00
Belanja Modal					
1. Belanja Tanah		32.673.815.000,00	899.600.975,00	2,75	1.537.260.370,00
2. Belanja Peralatan dan Mesin		214.328.034.000,00	101.317.527.089,00	47,27	148.396.240.387,00
3. Belanja Gedung dan Bangunan		288.455.144.000,00	198.119.857.503,00	68,68	190.050.029.409,00
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		473.753.001.000,00	265.041.869.443,00	55,95	351.950.400.501,00
5. Belanja Aset Tetap Lainnya		3.146.609.000,00	1.385.884.300,00	44,04	12.320.856.651,00
6. Belanja Aset Lainnya				0,00	
Sub Total Belanja Modal (1 s.d 6)		1.012.356.603.000,00	566.764.739.310,00	55,98	704.254.787.318,00
JUMLAH BELANJA		2.190.218.258.000,00	1.637.864.718.393,00	74,78	2.029.179.073.621,00

-Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini-

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam

Muhammad Rudi

NUP/1963102020092997



II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Catatan	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	C.1	499.527.578.061,00	772.002.615.335,00
2	Penggunaan SAL		0,00	0,00
3	Subtotal (1-2)		499.527.578.061,00	772.002.615.335,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (9-6)	C.2	340.096.167.473,00	(603.384.073.929,00)
5	Penyesuaian SiLPA/SiKPA	C.3	0,00	0,00
6	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	C.3.1	34.445.841.745,00	330.909.036.655,00
7	a. Pendapatan dari APBN	C.3.1.1	49.241.880.694,00	333.626.344.540,00
8	b. Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	C.3.2.1	(14.796.038.949,00)	(2.717.307.885,00)
9	SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian (4+6)		374.542.009.218,00	(272.475.037.274,00)
10	Subtotal (3+9)		874.069.587.279,00	499.527.578.061,00
11	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	C.4	0,00	0,00
12	Penyesuaian Lain-Lain	C.5	0,00	0,00
13	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (10+11+12)	C.6	874.069.587.279,00	499.527.578.061,00

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam

Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997



III. NERACA

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
ASET			
Aset Lancar	D.1		
Kas dan Bank	D.1.1	1.063.978.404.386,00	640.490.924.179,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.1.1.1	189.908.817.107,00	140.963.346.118,00
Kas pada Badan Layanan Umum	D.1.1.2	874.069.587.279,00	499.527.578.061,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	D.1.2	205.900.000,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus diterima	D.1.3	13.661.594.091,00	18.701.678.188,00
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	D.1.4	1.613.847.101,00	1.613.847.101,00
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	D.1.5	557.781.931.042,00	700.889.732.738,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Piutang dari kegiatan Operasional BLU	D.1.6	(167.594.446.680,00)	(175.508.488.770,00)
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)		390.187.484.362,00	525.381.243.968,00
Persediaan	D.1.7	14.223.002.748,00	16.847.704.623,00
Jumlah Aset Lancar		1.483.870.232.688,00	1.203.035.398.059,00
Aset Tetap	D.2		
Tanah	D.2.1	39.995.077.574.175,00	41.907.260.224.875,00
Peralatan dan Mesin	D.2.2	1.515.345.456.774,00	1.874.091.635.480,00
Gedung dan Bangunan	D.2.3	3.609.752.504.035,00	3.509.429.070.007,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	D.2.4	10.911.853.838.741,00	11.506.196.976.816,00
Aset Tetap Lainnya	D.2.5	10.860.155.632,00	9.637.618.122,00
Kontruksi Dalam Pengerjaan	D.2.6	779.654.087.090,00	767.370.239.040,00
Akumulasi Penyusutan	D.2.7	(6.498.645.065.044,00)	(6.645.206.041.002,00)
Aset Konsesi Jasa	D.2.8	3.314.318.784.424,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa	D.2.9	(1.013.775.631.527,00)	0,00
Properti Investasi	D.2.10	122.068.810.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.2.11	(585.523.730,00)	0,00
Jumlah Aset Tetap		52.745.924.990.570,00	52.928.779.723.338,00
Aset Lainnya	D.3		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	D.3.1	39.015.979.867,00	72.437.831.953,00
Aset Tak Berwujud	D.3.2	672.996.735.102,00	600.459.430.707,00
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	D.3.3	-	27.094.239.651,00
Aset Lain-Lain	D.3.4	223.478.000.764,00	223.215.272.298,00
Akum Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	D.3.5	(258.418.420.823,00)	(258.104.891.887,00)
Jumlah Aset Lainnya		677.072.294.910,00	665.101.882.722,00
JUMLAH ASET		54.906.867.518.168,00	54.796.917.004.119,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -




NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	221.581.816.233,00	149.563.753.288,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	3.810.384.986.340,00	3.145.231.138.151,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.4.3	17.119.748,00	5.332.510,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		4.031.983.922.321,00	3.294.800.223.949,00
JUMLAH KEWAJIBAN		4.031.983.922.321,00	3.294.800.223.949,00
EKUITAS			
EKUITAS	C.5	50.874.883.595.847,00	51.502.116.780.170,00
JUMLAH EKUITAS		50.874.883.595.847,00	51.502.116.780.170,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		54.906.867.518.168,00	54.796.917.004.119,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam



Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997



IV. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021


(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.1	1.186.138.586.553,00	1.347.743.362.271,00
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK		1.186.138.586.553,00	1.347.743.362.271,00
BEBAN			
Beban Pegawai	E.2	524.154.255.606,00	521.658.494.810,00
Beban Persediaan	E.3	14.384.704.292,00	66.919.278.404,00
Beban Barang dan Jasa	E.4	448.238.429.813,00	430.020.306.377,00
Beban Pemeliharaan	E.5	87.500.749.689,00	289.284.681.026,00
Beban Perjalanan Dinas	E.6	33.984.336.410,00	23.755.518.373,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.7	878.503.359.255,00	888.223.890.778,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.8	568.970.432,00	24.713.096.027,00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		1.987.334.805.497,00	2.244.575.265.795,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(801.196.218.944,00)	(896.831.903.524,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	E.9	2.432.359.160,00	1.845.035.051,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	E.10	16.393.580.739,00	189.320.721.803,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(13.961.221.579,00)	(187.475.686.752,00)
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.11	133.347.458.508,00	14.173.512.767,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.12	14.999.429.108,00	3.417.537.205,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		118.348.029.400,00	10.755.975.562,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		104.386.807.821,00	(176.719.711.190,00)
SURPLUS/(DEFISIT) LO		(696.809.411.123,00)	(1.073.551.614.714,00)

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam


Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997



V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
EKUITAS AWAL	F.1	51.502.116.780.170,00	51.879.818.437.894,00
SURPLUS/(DEFISIT) LO	F.2	(696.809.411.123,00)	(1.073.551.614.714,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		75.143.747.611,00	276.968.458.735,00
Koreksi Nilai Persediaan	F.3	0,00	3.516.500,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	F.4	72.500,00	8.448.551.583,00
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	F.5	34.397.337.641,00	183.412.226.767,00
Koreksi Lain-Lain	F.6	40.746.337.470,00	85.104.163.885,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	F.7	(5.567.520.811,00)	418.881.498.255,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(627.233.184.323,00)	(377.701.657.724,00)
EKUITAS AKHIR	F.8	50.874.883.595.847,00	51.502.116.780.170,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam

Muhammad Rudi

NUP.1963102020092997



VI. LAPORAN ARUS KAS

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

LAPORAN ARUS KAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Arus Masuk Kas		
Pendapatan APBN	49.241.880.694,00	333.626.344.540,00
Pendapatan Jasa Layanan Masyarakat	1.963.164.846.917,00	1.423.077.691.808,00
Pendapatan Hasil Kerjasama	0,00	0,00
Pendapatan Usaha Lainnya	0,00	0,00
Pendapatan PNBPN Umum	12.363.679.789,00	872.272.834,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.024.770.407.400,00	1.757.576.309.182,00
Arus Keluar Kas		
Pembayaran Pegawai	511.335.228.111,00	520.196.633.880,00
Pembayaran Barang	127.909.976.656,00	162.339.940.680,00
Pembayaran Jasa	306.047.692.960,00	316.287.607.001,00
Pembayaran Pemeliharaan	87.885.450.609,00	297.781.264.114,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	34.054.716.170,00	23.741.158.020,00
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	3.866.914.577,00	4.577.682.609,00
Pembayaran Lainnya	0,00	0,00
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	14.796.038.949,00	2.717.307.885,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.085.896.018.032,00	1.327.641.594.189,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	938.874.389.368,00	429.934.714.993,00
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	2.432.359.160,00	1.845.035.051,00
Jumlah Arus Masuk Kas	2.432.359.160,00	1.845.035.051,00
Arus Keluar Kas		
Perolehan atas Tanah	899.600.975,00	1.537.260.370,00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	101.317.527.089,00	148.396.240.387,00
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	198.119.857.503,00	190.050.029.409,00
Perolehan atas Jalan Irigasi dan Jaringan	265.041.869.443,00	351.950.400.501,00
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	1.385.884.300,00	12.320.856.651,00
Jumlah Arus Kas Keluar	566.764.739.310,00	704.254.787.318,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(564.332.380.150,00)	(702.409.752.267,00)

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -



Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Arus Kas Dari Aktivitas Transistoris		
Arus Masuk Kas		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	77.551.530.310,00	109.617.946.729,00
Jumlah Arus Masuk Kas	77.551.530.310,00	109.617.946.729,00
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	28.606.059.321,00	46.295.824.316,00
Jumlah Arus Keluar Kas	28.606.059.321,00	46.295.824.316,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris	48.945.470.989,00	63.322.122.413,00
Kenaikan /Penurunan Kas	423.487.480.207,00	(209.152.914.861,00)
Saldo Awal Kas	640.490.924.179,00	849.643.839.040,00
Rincian Saldo Awal Kas antara Lain :		
Saldo Awal Kas BLU	640.490.924.179,00	772.002.615.335,00
Saldo Awal Kas Lainnya dan Setara Kas	0,00	77.641.223.705,00
Saldo Akhir Kas	1.063.978.404.386,00	640.490.924.179,00
Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain :		
Saldo Akhir Kas BLU	874.069.587.279,00	499.527.578.061,00
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	189.908.817.107,00	140.963.346.118,00

- Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini -

Batam, Mei 2023

Kepala Badan Pengusahaan Batam

Muhammad Rudi
NUP.1963102020092997

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penjelasan Umum

A. PENJELASAN UMUM

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam BA.112 Per 31 Desember 2022 disajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dasar Hukum

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Batam;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Yang Telah terdapat perubahan melalui PP Nomor 50 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 telah dicabut melalui PMK Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat telah dicabut dengan PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (BAS);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga telah dicabut dengan PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang perubahan atas PMK Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan keuangan Badan Layanan Umum.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi.

A.2. Kebijakan Teknis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

A.2.1. Dasar Hukum

Badan Pengusahaan Batam didirikan sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam. Berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007, kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Pada tahun 2011 dikeluarkan lagi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 dimana wilayah kerja tersebut ditambah dengan Pulau Janda berhias dan gugusannya. Kegiatan utama pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam ditujukan dalam bidang ekonomi yang meliputi sektor **perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan pariwisata**. Pada ketentuan dimaksud ditetapkan juga bahwa hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Batam.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang revisi PP 46 Tahun 2007 maka Wilayah Kerja dan kelembagaan yang dahulunya adalah Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berubah menjadi **Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau disingkat dengan Badan Pengusahaan Batam**.

Badan Pengusahaan Batam mempunyai visi “ **Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara**” . Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam menetapkan Misi sebagai berikut: Badan Pengusahaan Batam mempunyai visi “**Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia**

Tenggara” . Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pengusahaan Batam menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang profesional;
2. Memantapkan Pengelolaan Kawasan Investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

A.2.2. Struktur Organisasi Badan Pengusahaan Batam

Pada tanggal 27 September 2020 sesuai surat perintah Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor PRIN-71M.EKON/09/2020, personil pimpinan adalah sebagai berikut:

1	Kepala	: Muhammad Rudi
2	Wakil Kepala	: Purwiyanto
3	Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan	: Wahjoe Triwidijo Koentjoro
4	Anggota Bidang Kebijakan Strategis	: Enoch Suharto Pranoto
5	Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi	: Sudirman Saad
6	Anggota Bidang Pengusahaan	: Shahril Japarin

A.2.3. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016, ditetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Dewan Kawasan) yang terdiri dari:

1	Ketua merangkap Anggota	: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
2	Anggota	: Menteri Dalam Negeri
3	Anggota	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4	Anggota	: Menteri Keuangan
5	Anggota	: Menteri Perdagangan
6	Anggota	: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
7	Anggota	: Panglima Tentara Nasional Indonesia
8	Anggota	: Kepala Kepolisian Republik Indonesia
9	Anggota	: Sekretaris Kabinet
10	Anggota	: Gubernur Kepulauan Riau
11	Anggota	: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
12	Anggota	: Walikota Batam

A.2.4. Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

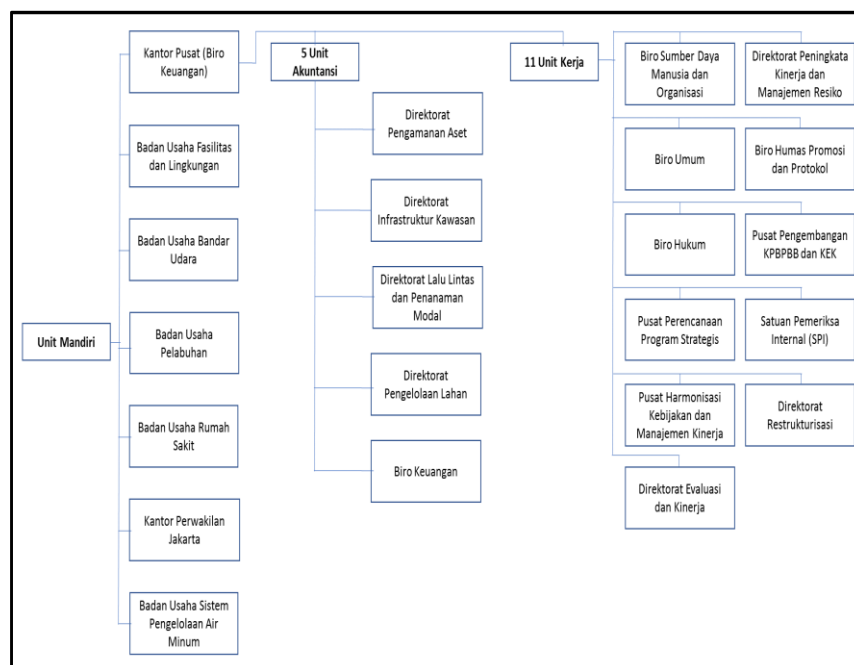
Kemudian terjadi beberapa kali penggantian struktur Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Batam sampai dengan perubahan terakhir adalah berdasarkan Surat Keputusan Dewan Kawasan Nomor SR-15/K.05/2019 tanggal 7 Januari 2019 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Pengawas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga struktur Dewan Pengawas

Badan Pengusahaan Batam periode 2019-2024 adalah sebagai berikut:

•	Ketua	:	Susiwijono
•	Anggota	:	Elen Setiadi
•	Anggota	:	Satya Bhakti Parikesit
•	Anggota	:	Oentarto Wibowo
•	Anggota	:	Sofandi Arifin

A.2.5. Unit Pelaporan dan Unit Akuntansi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Berdasarkan SOTK baru yang berdasar dari SAKBA terakhir Nomor 7 Tahun 2018, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memiliki 11 Unit Kerja dan 5 Akuntansi, Adapun unit Pelaporan meliputi :



A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Badan Pengusahaan Batam. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem Aplikasi SAKTI Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan sebuah solusi terpadu pengelolaan keuangan negara di tingkat Satuan Kerja sehingga pengelolaan keuangan negara diharapkan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut :

Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Basis Akuntansi

A.4. Basis Akuntansi

Badan Pengusahaan Batam menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan meliputi Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas

untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Basis akrual adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengusahaan Batam dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan Badan Pengusahaan Batam.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Batam adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA

(1) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Badan Pengusahaan Batam yang menambah saldo Kas BLU dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Badan Pengusahaan Batam dan tidak perlu dibayar kembali, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan penggunaan dana APBN yang disetorkan ke Kas Negara.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas BLU Badan Pengusahaan Batam atau disetorkan ke Kas Negara.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
Operasional

(2) Pendapatan Operasional

- Pendapatan Operasional adalah hak Badan Pengusahaan Batam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan Operasional dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran Kas BLU Badan Pengusahaan Batam yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Pengusahaan Batam.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas BLU Badan Pengusahaan Batam.
- Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi asset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, belanja dibayar dimuka, pendapatan yang masih harus diterima, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Belanja dibayar dimuka merupakan pengeluaran yang telah dikeluarkan dari Kas/Bank Badan Pengusahaan Batam tetapi dan

belum membebani pagu anggaran.

Pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum diterima Karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh Badan Pengusahaan Batam maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022 berdasarkan harga perolehan dan/atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); dan
- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan*

c. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; dan
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; dan
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

*Aset
Properti
Investasi*

d. Aset Properti Investasi

Aset Properti Investasi menurut PMK No 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual No 17 Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative; atau
- b) Dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Aset Konsesi
Jasa*

e. Aset Konsesi Jasa

Aset Konsesi Jasa menurut PMK No 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- a) Disediakan oleh mitra, yang:
 - I. Dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - II. Merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- b) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - I. Merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau merupakan peningkatan aset pemberi konsesi

f. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

g. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Badan Pengusahaan Batam selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset Kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), kas yang dibatasi penggunaannya dan Aset Lain-lain.

Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Tidak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tidak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer;	4
Franchise;	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain, Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim;	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan;	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Prosedur Fonogram;	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

Hak Pengelolaan memenuhi definisi sebagai aset sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang penyajian Laporan Keuangan dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang belum diserahkan kepada/dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- b. Aset Lainnya untuk Hak Pengelolaan yang sudah dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
- c. Aset Tetap untuk Hak Pengelolaan yang dipergunakan sendiri oleh BP Batam; dan
- d. Dikeluarkan dari Aset Lainnya atas Hak Pengelolaan yang diserahkan ke instansi pemerintah lainnya.

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke kemitraan dengan pihak ketiga, maupun dana yang dibatasi, penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset

tetap Badan Pengusahaan Batam yang dihentikan dari penggunaan aktif.

Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Badan Pengusahaan Batam. Kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Badan Pengusahaan Batam. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Badan Pengusahaan Batam pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Ekuitas Dana

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan Badan Pengusahaan Batam. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam (SAKBA) tentang Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Pengusahaan Batam. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut.

No	Uraian	Penyisihan
1	Piutang dengan umur 0 - 6 bulan	0%
2	Piutang dengan umur 6 - 12 bulan	25%

No	Uraian	Penyisihan
3	Piutang dengan umur 12 - 18 bulan	50%
4	Piutang dengan umur 18 - 24 bulan	75%
5	Piutang dengan umur > 24 bulan	100%

Kebijakan tersebut dikecualikan atas piutang UWTO pada Kantor Pengelolaan Lahan karena dikategorikan sebagai piutang lancar dengan umur piutang adalah 6 bulan.

Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap

- Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2013, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK/06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014, Badan Pengusahaan Batam menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 1/PMK/.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Perubahan PMK tersebut menambahkan ketentuan pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sepanjang Aset Tetap diperoleh sebelum Tahun 2005, maka sebagai tindak lanjut dari hasil inventarisasi dan penilaian:

- Penghitungan penyusutan dilakukan sejak Semester II Tahun 2010 sampai dengan berakhirnya masa manfaat aset tetap; dan
- Pencatatan penyusutan dalam Neraca dilakukan sejak perhitungan penyusutan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan aset tetap tersebut dihapuskan.”
- Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk aset tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
- Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Tahun 2016 merupakan pertama kalinya mulai diterapkan penyusutan aset tak berwujud dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tak berwujud secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Pada Tahun 2017 dan 2020 Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.

Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi barang milik negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020.

Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

Pada Laporan Keuangan Tahun 2020 penilaian kembali (revaluasi) BMN tahun 2017-2020 sesuai Surat Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) Nomor S-35/KN/2020 tanggal 29 Januari 2020 tidak disajikan dalam LKKL. Hasil penilaian kembali akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK RI.

- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa

manfaat tersebut adalah sebagai berikut.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

*Implementasi
Akuntansi
Berbasis
Akrual
Pertama Kali*

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan.

Pertama, pos-pos ekuitas dana pada Neraca per 1 Januari 2015 yang berbasis *cash toward accrual* (CTA) direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dibuat perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Mulai tahun 2016, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mulai pertama kali mengimplementasikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai komponen laporan keuangan sesuai PSAP 13.

B. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Rp1.977.960.885.866

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.977.960.885.866,00** atau **116,47%** dari yang ditetapkan dalam DIPA Tahun 2022 sebesar **Rp1.698.316.558.000,00**.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut terdiri dari Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita sebesar Rp1.963.164.846.917,00, Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp2.432.359.160,00, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp9.336.055.495,00, Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp400.373.805,00 dan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp2.627.250.489,00 atau 116,47% dari pagu anggaran sebesar Rp1.698.316.558.000,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan dan hibah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.698.316.558.000,00	1.963.164.846.917,00	115,59
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	2.432.359.160,00	0,14
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	9.336.055.495,00	0,55
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	400.373.805,00	0,02
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	2.627.250.489,00	0,15
	Jumlah	1.698.316.558.000,00	1.977.960.885.866,00	116,47

Realisasi PNPB untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	1.963.164.846.917,00	1.423.077.691.807,00
2	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	2.432.359.160,00	1.845.035.051,00
3	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	9.336.055.495,00	0,00
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	400.373.805,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu	2.627.250.489,00	872.272.834,00
	Jumlah	1.977.960.885.866,00	1.425.794.999.692,00

a. Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita

Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp1.963.164.846.917,00 dibandingkan dengan anggaran unit per tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Kantor Pusat	640.147.958.000,00	1.001.549.169.672,00	156,46
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	34.366.030.000,00	22.404.030.249,00	65,19
3	Badan Usaha Bandar Udara	172.423.890.000,00	155.277.724.465,00	90,06
4	Badan Usaha Pelabuhan	345.528.620.000,00	326.580.600.016,00	94,52
5	Badan Usaha Rumah Sakit	253.891.320.000,00	163.592.105.987,00	64,43
6	Kantor Perwakilan Jakarta	269.450.000,00	688.174.058,00	255,40
7	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	251.689.290.000,00	293.073.042.470,00	116,44
	Jumlah	1.698.316.558.000,00	1.963.164.846.917,00	115,59

Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.963.164.846.917,00 dan sebesar Rp1.423.077.691.807,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Kantor Pusat	1.001.549.169.672,00	499.851.568.341,00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	22.404.030.249,00	259.402.321.598,00
3	Badan Usaha Bandar Udara	155.277.724.465,00	128.076.256.525,00
4	Badan Usaha Pelabuhan	326.580.600.016,00	317.233.724.226,00
5	Badan Usaha Rumah Sakit	163.592.105.987,00	218.269.483.737,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	688.174.058,00	244.337.380,00
7	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	293.073.042.470,00	0,00
	Jumlah	1.963.164.846.917,00	1.423.077.691.807,00

Jenis Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita Badan Pengusahaan Batam pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
A. Direktorat Pengelolaan Pertanahan			
1	Pendapatan UWTO	934.688.550.041,00	459.246.407.310,00
2	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	7.829.243.232,00	1.972.121.990,00
3	Pendapatan Administrasi Peralihan	6.813.657.785,00	7.244.509.951,00
4	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	30.700.000,00	20.900.000,00
5	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	408.800.000,00	1.116.700.000,00
6	Pendapatan Penggantian Dokumen	58.900.000,00	21.400.000,00
7	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	990.300.000,00	851.900.000,00
8	Pendapatan Jasa Giro	0,00	239.020.757,00
9	Pendapatan Denda UWTO	1.080.350,00	61.704.837,00
10	Pendapatan Lain - Lain	23.736.464,00	2.382.613,00
Jumlah (A)		950.844.967.872,00	470.777.047.458,00
B. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal			
1	Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	162.450.000,00	118.850.000,00
2	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar	2.300.000,00	300.000,00
3	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	987.225.000,00	823.950.000,00
4	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	110.100.000,00	91.800.000,00
5	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	117.100.000,00	92.800.000,00
6	Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	29.800.000,00	63.200.000,00
7	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian ROHS pada Logam, Polimer dan Komponen Elektronika	4.070.000,00	24.930.000,00
8	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening RoHS dengan menggunakan X-Ray	0,00	3.300.000,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
9	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening Unsur (Dari Carbon sampai unsur Uranium)	0,00	1.100.000,00
10	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang Lainnya	6.900.000,00	6.600.000,00
11	Pendapatan Lain-Lain	500.000,00	0,00
Jumlah (B)		1.420.445.000,00	1.226.830.000,00
C. Biro Keuangan			
1	Pendapatan Jasa Giro	15.425.066.289,00	15.589.890.753,18
2	Pendapatan Bunga Jangka Pendek	7.911.137.703,00	9.329.027.527,00
3	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	0,00	43.792.000,00
4	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	3.732.059.351,00	161.105,00
5	Pendapatan Lain-Lain	8.833.854.609,00	1.306.178.073,70
Jumlah (C)		35.902.117.952,00	26.269.049.459,00
D. Direktorat Infrastruktur Kawasan			
1	Perizinan Pematangan Lahan	721.500.000,00	710.000.000,00
2	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	1.264.550.500,00	834.930.260,00
3	Pendapatan dari Sewa Lahan Reklame	984.699.348,00	7.700.000,00
4	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	0,00	26.211.164,00
Jumlah (D)		2.970.749.848,00	1.578.841.424,00
E. Pusat Data dan Sistem Informasi			
1	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	10.410.889.000,00	0,00
Jumlah (E)		10.410.889.000,00	0,00
Jumlah (A+B+C+D+E)		1.001.549.169.672,00	499.851.568.341,00

2. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
A. Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan			
1	Air Baku	0,00	52.432.307.938,00
2	Pendapatan Pemeliharaan Meter Air	0,00	33.988.685.307,00
3	Pendapatan Pemasangan Baru	0,00	4.496.535.894,00
4	Pendapatan Penggantian Meter	0,00	2.516.320.000,00
5	Pendapatan Penyambungan Kembali	0,00	173.390.250,00
6	Pendapatan SPAM Lainnya	0,00	63.700.166,00
7	Pengolahan Air Limbah	485.297.600,00	611.100.000,00
8	Pengelolaan Penyedotan	16.200.000,00	26.600.000,00
9	Pass Masuk Harian KPLI B3	79.310.000,00	61.965.000,00
10	Pass Masuk Bulanan KPLI B3	85.875.000,00	34.030.000,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
11	Pass Masuk Tahunan KPLI B3	144.910.000,00	204.450.000,00
12	Pendapatan Sewa Lahan KPLI B3	1.996.711.080,00	956.947.740,00
13	Sewa Gudang Tertutup	36.232.608,00	61.411.200,00
14	Jembatan Timbang	97.500.000,00	106.900.000,00
15	Sewa Forklift	18.424.000,00	66.864.000,00
16	Jasa Pemakaian Loading Bay	27.600.000,00	15.150.000,00
17	Jasa Pengelolaan kawasan KPLI-B3	383.400.000,00	304.800.000,00
18	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Air	0,00	146.368.150.826,00
19	Pendapatan Sewa Tanah/Lahan	0,00	123.276.000,00
20	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	0,00	85.243.200,00
21	Pendapatan Jasa Giro	0,00	1.027.000.440,00
22	Pendapatan Denda Kantor Air	0,00	50.843.247,00
23	Pendapatan Lain-Lain	0,00	146.615.741,00
24	Pendapatan Sewa Gudang KPLI B3	115.948.800,00	0,00
25	Sewa Ruang Kantor	19.360.000,00	0,00
Jumlah (A)		3.506.769.088,00	243.922.286.949,00
B. Unit Usaha Hunian, Gedung, Agribisnis dan			
1	Pendapatan Retribusi Tiket	0,00	215.640.000,00
2	Pendapatan Retribusi Tiket Temenggung Abdul Jamal (TAJ)	158.522.000,00	0,00
3	Pendapatan Retribusi Tiket Camp Vietnam Galang	503.530.000,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Tiket Taman Rusa Sekupang	2.265.783.701,00	0,00
5	Pendapatan Retribusi Tiket Taman Edukasi Agribisnis	9.730.000,00	0,00
6	Pendapatan Retribusi Tiket Taman Kolam Sekupang	56.255.000,00	0,00
7	Pendapatan Retribusi Lainnya	350.000,00	117.046.000,00
8	Pendapatan dari Bida Sekupang	0,00	1.266.841.174,00
9	Pendapatan dari Bida Ampar	1.633.083,00	1.885.237.872,00
10	Pendapatan dari Bida Kuning	0,00	3.690.206.316,00
11	PIUTANG (Pendapatan dari Bida Kabil)	0,00	16.918.651,00
12	Pendapatan dari Bida Kabil	0,00	2.543.143.866,00
13	Pendapatan dari Rusun Sekupang	1.457.181.108,00	0,00
14	Pendapatan dari Rusun Batu Ampar	1.933.291.592,00	0,00
15	Pendapatan dari Rusun Muka Kuning	3.606.689.522,00	0,00
16	Pendapatan dari Rusun Kabil	2.449.853.300,00	0,00
17	Pendapatan dari Rusun Tanjung Uncang	464.470.635,00	0,00
18	Pendapatan dari Rumah Susun Lainnya	2.976.946,00	114.456.000,00
19	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	302.156.250,00	392.362.019,00
20	Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	725.000,00	11.743.160,00
21	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	108.869.750,00	72.047.250,00
22	Pendapatan Sewa Kandang Ternak	60.000.000,00	150.000.000,00
23	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	226.005.000,00	402.785.822,00
24	Pendapatan Jasa Pemotongan Ternak	28.350.000,00	91.500.000,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
25	Pendapatan Jasa Kunjungan Wisata	0,00	1.800.000,00
26	Pendapatan Hasil Produksi Agribisnis	2.349.000,00	3.097.500,00
27	Pendapatan Jasa Kunjungan Agrowisata	5.575.000,00	0,00
28	Pendapatan Agribisnis lainnya	500.000,00	120.075.000,00
29	Pendapatan Sewa Tanah/Lahan	0,00	4.208.500,00
30	Pendapatan Asrama Haji	1.841.411.000,00	0,00
31	Pendapatan Sporthall	634.235.000,00	0,00
32	Pendapatan Gudang PCI	186.989.880,00	0,00
33	Pendapatan Sewa Lahan Untuk Tower	600.894.000,00	0,00
34	Pendapatan Gazebo Taman Rusa	16.450.000,00	0,00
35	Pendapatan Sewa Kantin Lantai 4 Anex 2	28.677.000,00	0,00
36	Pendapatan Sewa Kantin Lantai 1 Gedung Bida Utama	65.917.440,00	0,00
37	Pendapatan Guest House	215.336.250,00	0,00
38	Pendapatan Sewa Ruang Bank Mandiri	1.277.475.473,00	0,00
39	Pendapatan Sewa Ruang ATM PT. Bank BNI	113.256.000,00	0,00
40	Pendapatan Sewa Kios Taman Rusa Sekupang	21.050.000,00	0,00
41	Pendapatan Sewa Food Truck Taman Rusa Sekupang	4.000.000,00	0,00
42	Pendapatan Sewa Kios Tenda Temenggung Abdul Jamal	2.400.000,00	0,00
43	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang Lainnya	123.500.000,00	0,00
44	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	31.050.000,00	0,00
45	Pendapatan Denda Pengelolaan Lingkungan	5.470.868,00	0,00
46	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	11.677.628,00	0,00
47	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	0,00	3.325.429.760,00
48	PIUTANG (Pendapatan Sewa Listrik)	0,00	3.885.936,00
49	Pendapatan Sewa Listrik	0,00	40.315.975,00
50	Pendapatan Sewa Lainnya	4.393.300,00	975.053.000,00
51	Pendapatan Jasa Giro	37.709.757,00	7.987.933,00
52	Pendapatan Denda Pemukiman	22.645.178,00	26.654.915,00
53	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	0,00	1.498.000,00
54	Pendapatan Lain-Lain	7.925.500,00	100.000,00
Jumlah (B)		18.897.261.161,00	15.480.034.649,00
Jumlah (A+B)		22.404.030.249,00	259.402.321.598,00

Terjadi penurunan pada tahun 2022 ini dikarenakan telah berpindahya beberapa pendapatan seperti Piutang Usaha Perusahaan, Pendapatan Air Baku, Pendapatan Sewa Lahan Tower, Pendapatan hasil kerjasama/ KSO kantor Air, KSO Pengelolaan Air Bersih, KSO Pemeliharaan air bersih, KSO Pemeliharaan meter air, KSO Pemasangan baru, KSO Penggantian meter, KSO penyambungan kembali, KSO Non Air SPA, Hilir lainnya, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Denda Kantor air, Pendapatan Lain-lain yang merupakan pendapatan BU SPAM . krn tahun 2022 BU Fasling dipecah menjadi BU Baru yaitu Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum.

3. Badan Usaha Bandar Udara

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
A. Unit Usaha Bandar Udara Hang Nadim Batam			
1	PIUTANG (Pendaratan Dalam Negeri)	21.520.020,00	0,00
2	Pendaratan Dalam Negeri	3.097.958.650,00	5.634.165.811,00
3	PIUTANG (Pendaratan Luar Negeri)	1.163.500,00	0,00
4	Pendaratan Luar Negeri	525.587.101,00	504.740.950,00
5	PIUTANG (Penempatan Dalam Negeri)	2.951.300,00	0,00
6	Penempatan Dalam Negeri	732.388.820,00	1.471.618.860,00
7	PIUTANG (Penempatan Luar Negeri)	24.100,00	0,00
8	Penempatan Luar Negeri	225.984.449,00	76.146.705,00
9	Penyimpanan Dalam Negeri	0,00	65.484.000,00
10	Pelayanan Jasa Penerbangan Dalam Negeri (PJP)	283.500,00	0,00
11	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam negeri (JP2U)	48.433.991.700,00	51.214.468.900,00
12	Pelayanan Jasa Penumpang Luar Negeri / Haji (JP2U)	80.000.000,00	113.140.000,00
13	PIUTANG (Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Dalam Negeri)	1.200.000,00	0,00
14	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Dalam Negeri	1.271.012.900,00	2.579.210.800,00
15	Fasilitas Aviobridge (Garbarata) Luar Negeri	244.803.900,00	41.650.650,00
16	PIUTANG (Fasilitas Counter Dalam Negeri)	7.503.200,00	0,00
17	Fasilitas Counter Dalam Negeri	971.788.800,00	1.452.902.540,00
18	Fasilitas Counter Luar Negeri	2.782.500,00	36.465.600,00
19	Flight Approval/Local	100.000,00	26.600.000,00
20	Pendapatan GSE	56.395.450,00	241.056.250,00
21	PIUTANG (Pendapatan Sewa Counter)	8.400.000,00	0,00
22	Pendapatan Sewa Counter	11.792.060,00	0,00
23	Pendapatan Konsesi Fee	0,00	0,00
24	PIUTANG (Pendapatan Listrik)	1.701.450,00	0,00
25	Pendapatan Listrik	4.500.000,00	3.000,00
26	Pendapatan Air	0,00	0,00
27	PIUTANG (Pendapatan Sewa Perkantoran)	0,00	58.462.600,00
28	Pendapatan Sewa Perkantoran	1.563.387.989,00	3.259.974.562,00
29	PIUTANG (Pendapatan Sewa Usaha)	17.500.000,00	26.000.000,00
30	Pendapatan Sewa Usaha	5.608.443.444,00	4.115.788.199,00
31	Pendapatan Sewa Jasa Pergudangan	119.723.310,00	1.155.134.690,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
32	Pendapatan Sewa Fasilitas X-Ray	1.039.584.000,00	720.000.000,00
33	Pendapatan Sewa Bus Apron	1.500.000,00	6.150.000,00
34	Pendapatan Sewa Tanah	730.636.651,00	397.762.889,00
35	PIUTANG (Pendapatan Konsesi Perkantoran)	1.889.963,00	0,00
36	Pendapatan Konsesi Perkantoran	898.024.926,00	1.060.474.018,00
37	PIUTANG (Pendapatan Konsesi Usaha)	1.671,00	20.851.100,00
38	Pendapatan Konsesi Usaha	5.834.496.076,00	6.645.426.090,00
39	Pendapatan Konsesi Pergudangan	7.512.988.020,00	11.027.946.895,00
40	Layanan Konsesi Lainnya	54.005.700,00	416.713.600,00
41	Pendapatan Promosi/ Pemotretan	0,00	0,00
42	PIUTANG (Pendapatan Sewa Space Reklame/Iklan)	675.778,00	0,00
43	Pendapatan Sewa Space Reklame/ Iklan	298.872.100,00	381.057.504,00
44	Layanan Jasa Kargo & Pos Pesawat Udara Barang Impor	933.473.367,00	1.378.628.457,00
45	Layanan Jasa Kargo & Pos Pesawat Udara Barang Ekspor	0,00	0,00
46	Layanan Pergudangan Domestik	33.727.290,00	
47	Layanan Pergudangan Internasional	0,00	0,00
48	Layanan Jasa Kargo & Pos Pesawat Udara Barang Antar Bandara Dalam Negeri	0,00	22.268.691,00
49	PIUTANG (Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik KWH)	587.757,00	3.176.717,00
50	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik KWH	1.267.417.213,00	1.712.423.673,00
51	PIUTANG (Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik Catu Daya)	10.123.477,00	21.759.902,00
52	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik Catu Daya	1.029.545.120,00	3.196.345.640,00
53	PIUTANG (Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air)	270.600,00	774.840,00
54	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air	306.959.242,00	366.668.681,00
55	Pendapatan Porter	65.970.000,00	119.970.000,00
56	Pendapatan Taxi (Biaya Pangkalan)	368.460.000,00	240.300.000,00
57	Pendapatan Pas Bandara	251.425.000,00	631.135.003,00
58	Pendapatan FDS	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
59	Layanan Usaha - Parkir Kendaraan	0,00	0,00
60	Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (Fuel Throughput)	2.130.503.494,00	908.622.360,00
61	Pendapatan Non Aeronautika Lainnya	0,00	35.000.000,00
62	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Kantor Bandara	980.176.150,00	1.661.437.300,00
63	KSO Pendapatan Kargo Umum	1.009.329.281,00	0,00
64	KSO Pendapatan Operasional Umum	50.000.180.000,00	0,00
65	Pendapatan Jasa Giro	81.190.519,00	186.762.967,00
66	Pendapatan Denda Jasa Non-aeronautika	613.214.694,00	378.300.157,00
67	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	1.809.428.189,00	36.378.450,00
68	Pendapatan Lain-Lain	0,00	0,00
69	Pendapatan Konsesi Lainnya	0,00	3.478.200,00
70	PIUTANG (Usaha Perusahaan)	0,00	11.527.900,00
71	Keuntungan Lainnya	180.044,00	276.098,00
	Jumlah (A)	155.277.724.465,00	118.664.631.249,00
B. Pusat Data dan Sistem Informasi			
1	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	0,00	9.411.625.276,00
	Jumlah (B)	0,00	9.411.625.276,00
	Jumlah (A+B)	155.277.724.465,00	128.076.256.525,00

4. Badan Pengelola Pelabuhan Laut

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
1	PIUTANG (Pendapatan Jasa Labuh)	819.444.717,00	150.408.029,00
2	Pendapatan Jasa Labuh	101.080.744.404,00	94.423.039.447,00
3	PIUTANG (Pendapatan Jasa Tambat)	285.117.850,00	218.407.635,00
4	Pendapatan Jasa Tambat	25.448.507.616,00	74.326.332.066,00
5	PIUTANG (Pendapatan Jasa Air Tawar)	0,00	0,00
6	Pendapatan Jasa Air Tawar	3.041.802.000,00	2.904.708.000,00
7	Pendapatan Jasa Pandu	1.400.504,00	0,00
8	Pendapatan Jasa Dermaga	0,00	0,00
9	PIUTANG (Pendapatan Jasa Penumpukan Barang)	24.094.866,00	178.810.300,00
10	Pendapatan Jasa Penumpukan Barang	10.785.232.303,00	8.587.045.490,00
11	Pendapatan Jasa Chasis	0,00	0,00
12	PIUTANG (Pendapatan Jasa Throughput)	22.750.000,00	15.736.000,00
13	Pendapatan Jasa Throughput	14.282.138.923,00	6.131.406.451,00
14	PIUTANG (Pendapatan Jasa Bongkar Muat)	64.478.027,00	44.696.571,00
15	Pendapatan Jasa Bongkar Muat	50.875.552.479,00	50.903.420.571,00
16	Pendapatan Jasa Yacht	254.662.000,00	269.505.000,00
17	Pendapatan Imbalan Layanan Bongkar Muat	0,00	0,00
18	Pendapatan Retribusi Alat/ Kendaraan	0,00	0,00
19	PIUTANG (Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan)	657.071.000,00	452.147.000,00
20	Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan	5.200.860.000,00	4.216.333.000,00
21	PIUTANG (Pendapatan Pass Untuk Orang)	0,00	6.300.000,00
22	Pendapatan Pass Untuk Orang	978.950.000,00	1.248.970.000,00
23	PIUTANG (Pendapatan Seaport Tax)	2.277.720.000,00	1.694.900.000,00
24	Pendapatan Seaport Tax	13.942.148.802,00	6.878.607.917,00
25	PIUTANG (Pendapatan Retribusi Kebersihan)	50.000,00	0,00
26	Pendapatan Retribusi Kebersihan	0,00	0,00
27	Pendapatan Pungutan Kebersihan	0,00	0,00
28	Pendapatan Retribusi Lainnya	147.658.876,00	18.200.924,00
29	Pendapatan Sewa Tanah	4.521.173.748,00	14.096.879.568,00
30	PIUTANG (Pendapatan Sewa Ruangan)	789.760.566,00	436.637.280,00
31	Pendapatan Sewa Ruangan	1.339.307.857,00	252.524.064,00
32	Pendapatan Sewa Tangki	10.290.795.319,00	10.290.795.319,00
33	Pendapatan Sewa Rak	0,00	251.950.000,00
34	Pendapatan Iklan	67.286.000,00	13.548.000,00
35	Pendapatan Sewa Gudang	240.000.000,00	432.000.000,00
36	Layanan Penggunaan Perairan	3.989.473.193,00	0,00
37	PIUTANG (KSO Pandu)	3.108.446,00	1.302.000,00
38	KSO Pandu	9.415.222.341,00	8.620.306.685,00
39	PIUTANG (KSO Seaport Tax/Pass Orang)	8.749.000,00	0,00
40	KSO Seaport Tax/Pass Orang	7.361.813.250,00	132.257.800,00
41	KSO Sewa Ruangan / Bangunan	191.388.970,00	6.880.830,00
42	KSO Iklan	22.458.750,00	0,00
43	KSO Parkir	122.336.200,00	18.801.300,00
44	PIUTANG (KSO Tunda)	7.090.010,00	0,00
45	KSO Pass Kendaraan	0,00	0,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
46	PIUTANG (KSO Tunda)	0,00	576.810.093,00
47	KSO Tunda	16.202.352.240,00	13.622.545.200,00
48	KSO Tambat	5.017.760.047,00	2.548.388.595,00
49	KSO Alat	0,00	0,00
50	KSO Fee Bongkar Muat	803.883.953,00	299.153.608,00
51	KSO Pelayanan Air Bersih Property	0,00	249.240,00
52	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	45.133.200,00	28.207.200,00
53	KSO Sampah	40.537.000,00	16.125.000,00
54	KSO Royalti	25.549.290.217,00	3.833.676.001,00
55	PIUTANG (KSO Chasis)	0,00	1.887.000,00
56	KSO Chasis	8.057.849.850,00	8.047.003.500,00
57	KSO Throughput	0,00	2.546.600,00
58	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	520.799.680,00	355.230.563,00
59	Pendapatan Sewa Forklift	2.000.000,00	3.720.000,00
60	PIUTANG (Pendapatan Sewa Listrik)	45.699.964,00	19.528.605,00
61	Pendapatan Sewa Listrik	501.675.897,00	393.773.411,00
62	Pendapatan Jasa Giro	110.565.334,00	54.616.054,00
63	Pendapatan Bunga Jangka Pendek	0,00	0,00
64	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	14.451.935,00	2.332.404,00
65	Pendapatan Denda Jasa Pelabuhan	3.000.000,00	71.031.107,00
66	Pendapatan Denda KSO	927.966.460,00	182.846,00
67	Pendapatan Lainnya dari Pengadaan Barang dan Jasa	63.766.945,00	24.500.000,00
68	Pendapatan Denda Pengadaan Barang dan Jasa	6.193.800,00	0,00
69	PIUTANG (Pendapatan Air Bersih untuk Property)	1.047.840,00	113.280,00
70	Pendapatan Air Bersih Untuk Property	93.605.875,00	108.376.200,00
71	Pendapatan Lain-Lain	12.671.762,00	870.472,00
	Jumlah	326.580.600.016,00	317.233.724.226,00

5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
1	Registrasi Rawat Inap	106.037.079.489,00	50.278.523.699,00
2	Kamar Klas VIP	0,00	0,00
3	Kamar Klas I	44.206.252,00	0,00
4	Kamar Klas II	81.282.898,00	1.007.239.688,00
5	Kamar Klas III	0,00	0,00
6	Kamar ICU	0,00	56.063.422,00
7	Kamar HCU	0,00	0,00
8	Visit Dokter/ Konsultasi	40.993.139,00	6.320.584.391,00
9	Tindakan medis non operatif	35.890.891,00	1.402.095.047,00
10	Obat	340.500.916,00	27.452.039.396,00
11	Material	1.130.554,00	478.615.263,00
12	Alat	7.402.920,00	1.601.869.539,00
13	Pendapatan Rawat Inap Lainnya	16.837.140.892,00	63.266.771.842,00
14	Registrasi Rawat Jalan	27.401.966.165,00	16.061.420.635,00
15	Poliklinik	80.000,00	1.542.889.443,00

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
16	Tindakan Medis Non Operatif	0,00	261.492.516,00
17	Medical Check Up	157.104.000,00	88.828.388,00
18	Obat	145.570,00	6.085.320.547,00
19	Material	0,00	7.905.971,00
20	Alat	0,00	35.877.325,00
21	Pendapatan Rawat Jalan Lainnya	6.978.668.254,00	19.593.639.312,00
22	Registrasi	17.981.253,00	51.053.776,00
23	Konsultasi Umum/Spesialis	0,00	128.339.009,00
24	Tindakan medis non operatif	0,00	26.219.035,00
25	Obat	0,00	285.200.580,00
26	Material	0,00	210.000,00
27	Alat	0,00	847.122,00
28	Pendapatan IGD Lainnya	2.495.866.802,00	2.394.457.955,00
29	Sewa Kamar Operasi	0,00	60.476.281,00
30	Tindakan Medis	451.728.614,00	9.864.464.105,00
31	Obat	0,00	28.471.887,00
32	Pendapatan Operasional Tindakan Medis Lainnya	0,00	0,00
33	Radiologi	4.795.430,00	1.483.008.747,00
34	Laboratorium	90.208.369,00	4.435.572.879,00
35	Farmasi	842.714.788,00	457.206.402,00
36	Pemulasaran Jenazah	2.097.100,00	32.374.557,00
37	CSSD (Central Sterilisasi dan Supply Dept)	66.478.142,00	1.002.534,00
38	Pendapatan Operasional Unit Penunjang Lainnya	44.581.706,00	2.049.408.080,00
39	Pendidikan dan Latihan	0,00	0,00
40	Pendapatan Denda	1.817.677,00	2.798.695,00
41	Pendapatan Operasional Lainnya	199.356.475,00	65.039.059,00
42	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang	861.403.568,00	300.976.162,00
43	Pendapatan Sewa Rak	0,00	0,00
44	Pendapatan Sewa Listrik	27.315.795,00	5.426.887,00
45	Pendapatan Sewa Lainnya	5.739.312,00	34.511.000,00
46	Pendapatan Jasa Giro	91.659.988,00	205.290.323,00
47	Pendapatan Lain-Lain	423.514.829,00	815.151.638,00
48	Piutang Tak Tertagih	1.254.199,00	440.600,00
49	Sewa Ruang Kantor	0,00	360.000,00
Jumlah		163.592.105.987,00	218.269.483.737,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
1	Pendapatan Sewa Kamar	268.417.305,00	129.475.000,00
2	Pendapatan Sewa Usaha Kuningan Guest House Lainnya	410.939.017,00	109.514.537,00
3	Pendapatan Jasa Giro	2.200.512,00	5.345.014,00
4	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	93.252,00	0,00
5	Pendapatan Lain-Lain	6.523.972,00	2.829,00
Jumlah		688.174.058,00	244.337.380,00

7. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

No	Jenis Pendapatan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
1	Piutang Usaha Perusahaan	4.277.180.958,00	0,00
2	Pendapatan Air Baku	53.980.875.305,00	0,00
3	Pendapatan Sewa Lahan Tower	272.011.200,00	0,00
4	Pendapatan hasil kerjasama/KSO Kantor Air	35.769.185.779,00	0,00
5	KSO Pengelolaan air bersih	149.150.647.327,00	0,00
6	KSO Pemeliharaan meter air	38.853.839.500,00	0,00
7	KSO Pemasangan baru	8.016.425.668,00	0,00
8	KSO Penggantian meter	1.090.129.400,00	0,00
9	KSO Penyambungan kembali	153.004.500,00	0,00
10	KSO Non Air SPAM Hilir lainnya	302.070.524,00	0,00
11	Pendapatan Jasa Giro	1.055.886.687,00	0,00
12	Pendapatan Denda Kantor Air	142.772.060,00	0,00
13	Pendapatan Lain-lain	9.013.562,00	0,00
Jumlah		293.073.042.470,00	0,00

b. Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp2.432.359.160,00 merupakan pendapatan lelang Badan Pengusahaan Batam Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. NTPN	Tgl.Dok.	Keg.	KPPN	Rupiah
1	8CD0F6U8EBH2U5QB	17-01-22	5114	137	16.000.000
2	D07501JNFCC001ST	27-04-22	5114	137	69.099.994
3	2C8CD8N3E0V38NV3	27-04-22	5114	137	19.600.000
4	E51BA2G4V70R3J26	10-05-22	5114	137	42.650.000
5	04F0F8N3E14B2CCF	03-06-22	5114	137	325.230.000
6	EE0A455DEMTSB8UV	07-07-22	5114	137	398.500.000
7	10E6555DEMU6RE1R	18-07-22	5114	137	155.139.000
8	329E48N3E1JTOJPT	25-11-22	5114	137	88.233.333
9	3D1A361QUHSS1DLK	30-11-22	5114	137	1.007.333.333
10	F2D2B61QUHVOCAA4	26-12-22	5114	137	310.573.500
JUMLAH TOTAL:					2.432.359.160,00

c. Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp9.336.055.495,00 merupakan pendapatan denda keterlambatan 85 hari kalender (8,5% dari kontrak) atas proyek pengembangan *pavement runway service performance* Bandara Hang Nadim Batam.

d. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp400.373.805,00 merupakan Penerimaan kembali atas temuan BPK RI karena terdapat selisih nilai kontrak yang harus dikembalikan oleh pihak kontraktor pelaksana akibat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan proyek pengembangan *pavement runway service performance* Bandara Hang Nadim Batam.

e. Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Badan Pengusahaan Batam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar Rp2.627.250.489,00 merupakan penerimaan kembali dana akibat selisih nilai pekerjaan tambah kurang (CCO) – final addendum atas proyek pengembangan *pavement runway service performance* Bandara Hang Nadim Batam.

Belanja Negara
Rp1.637.864.718.393

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Badan Pengusahaan Batam periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp1.637.864.718.393,00** atau 74,78% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.190.218.258.000,00

Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menurut program adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.5 68717.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam	861.632.752.000,00	783.023.628.265,00	90,88
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5113	Penyusunan Kebijakan Strategis, Perencanaan Program Dan Teknis	5.865.804.000,00	5.225.501.552,00	89,08
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5114	Pelayanan Kerumahtanggaan, Kesekretariatan Dan Pengadaan Barang/Jasa	120.596.659.000,00	112.586.778.761,00	93,36
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5115	Penyusunan Pengelolaan Dan Pelayanan Kepegawaian	573.535.114.000,00	522.647.083.434,00	91,13
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5116	Penyusunan Perencanaan Anggaran Dan Pengelolaan Administrasi Keuangan	7.356.236.000,00	5.835.958.445,00	79,33
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5117	Penyusunan Regulasi Dan Pelayanan Hukum	11.064.496.000,00	7.607.134.132,00	68,75
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5118	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Maupun Swasta	7.298.010.000,00	6.784.847.063,00	92,97
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dan Kelembagaan	1.753.142.000,00	1.705.746.085,00	97,30
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5978	Penyusunan Dan Penyelarasan Kebijakan, Pentarifan Serta Pengelolaan Teknologi Informasi	6.992.357.000,00	5.830.396.623,00	83,38
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5979	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Usaha kawasan	5.084.816.000,00	4.428.007.329,00	87,08
112.01.3200.5 68717.KP. 01.5980	Pelayanan Kehumasan, Pemasaran dan Keprotokolan	23.983.655.000,00	22.495.439.294,00	93,79
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 640	Dukungan Manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di kawasan PBPB-Batam	6.449.340.000,00	5.741.466.103,00	89,02
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 641	Dukungan Manajemen Internal Pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut	6.333.835.000,00	6.000.837.683,00	94,74

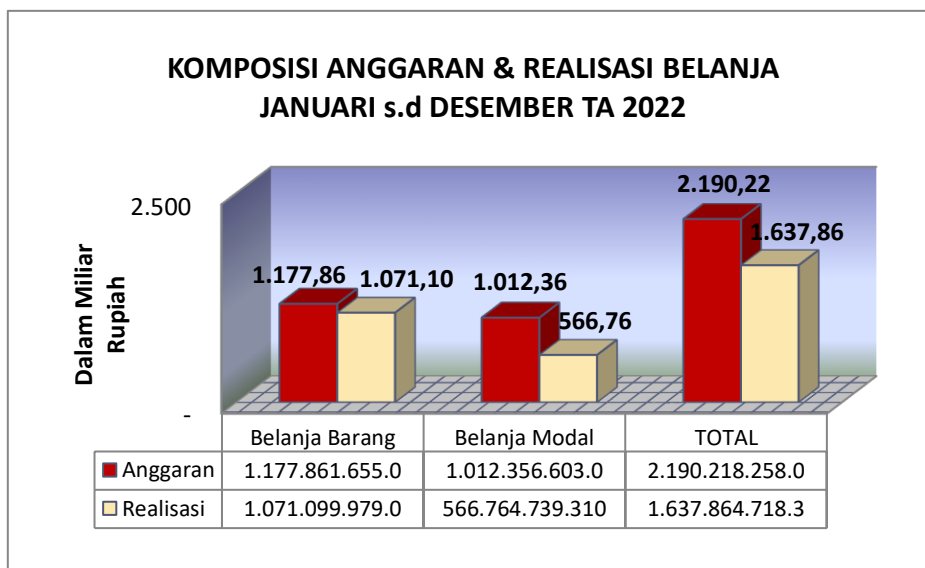
Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 642	Dukungan manajemen internal pengelolaan, penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara	4.240.000.000,00	3.694.853.537,00	87,14
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 643	Dukungan manajemen internal pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan	13.325.207.000,00	12.225.322.347,00	91,75
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 644	Dukungan manajemen internal pengelolaan dan penyelenggaraan serta pengendalian mutu	7.145.546.000,00	6.164.427.070,00	86,27
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 645	Dukungan manajemen internal pelayanan lalu lintas barang dan penanaman modal	652.048.000,00	645.878.508,00	99,05
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 646	Dukungan manajemen internal pengelolaan dan penyelenggaraan aset lainnya dan lingkungan	2.980.227.000,00	2.525.303.562,00	84,74
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 647	Dukungan manajemen internal pengelolaan pengamanan lahan dan aset investasi	3.526.045.000,00	3.057.276.446,00	86,71
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 648	Dukungan manajemen internal penyusunan, pembinaan dan perumusan kinerja Badan Usaha BP	367.710.000,00	353.444.530,00	96,12
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 649	Dukungan manajemen internal penyusunan evaluasi dan pengendalian Badan Usaha BP Batam	61.710.000,00	61.621.100,00	99,86
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 650	Dukungan manajemen internal penyusunan rumusan restrukturisasi Badan Usaha BP Batam	271.710.000,00	251.859.802,00	92,69
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 671	Dukungan manajemen internal pelayanan perizinan terpadu kawasan PBPB Batam	1.956.097.000,00	1.865.800.205,00	95,38
112.01.3200.5 68717.KP.01.6	Pengelolaan dan penyelenggaraan data center dan sistem informasi	44.393.989.000,00	42.403.567.695,00	95,52
112.01.3200.5 68717.KP.01.6 674	Dukungan manajemen internal pengelolaan dan penyelenggaraan air minum	6.398.999.000,00	2.885.076.959,00	45,09
112.01.3200.5 68717.KP.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB. Batam	1.328.585.506.000,00	854.841.090.128,00	64,34
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5123	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pertanahan Di Kawasan PBPB-Batam	48.967.210.000,00	12.994.010.804,00	26,54
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5124	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	152.717.350.000,00	99.127.160.165,00	64,91

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5125	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Bandar Udara Dan Teknologi Informasi Dan Komunikasi	27.736.036.000,00	22.514.866.763,00	81,18
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5126	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	208.318.923.000,00	144.561.376.107,00	69,39
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5127	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Serta Pengendalian Mutu Infrastruktur Kawasan	634.075.957.000,00	464.049.505.183,00	73,19
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Dan Penanaman Modal	2.106.270.000,00	1.982.697.788,00	94,13
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5130	Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Aset Lainnya Dan Lingkungan	171.440.731.000,00	34.908.586.419,00	20,36
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan Dan Aset Investasi	43.746.625.000,00	40.419.289.078,00	92,39
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5981	Penyusunan Strategi Peningkatan Kinerja Dan Manajemen Risiko Unit Usaha BP Batam	2.351.031.000,00	2.164.460.880,00	92,06
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5982	Penyusunan Evaluasi Dan Pengendalian Unit Usaha BP Batam	952.952.000,00	858.601.817,00	90,10
112.01.3200.5 68717.KP. 06.5983	Penyusunan Rumusan Strategi Restrukturisasi Dan Budaya Unit Usaha BP Batam	1.358.533.000,00	1.094.466.537,00	80,56
112.01.3200.5. 68717.KP.06.6 651	Penyusunan Perencanaan Teknis Pendukung Pengembangan Infrastruktur Kawasan	12.083.054.000,00	9.954.833.244,00	82,39
112.01.3200.5. 68717.KP.06.6 652	Promosi KPBPB Batam	6.368.606.000,00	4.721.275.318,00	74,13
112.01.3200.5. 68717.KP.06.6 672	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	963.489.000,00	869.132.393,00	90,21
112.01.3200.5. 68717.KP.06.6 675	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air Minum	15.398.739.000,00	14.620.827.632,00	94,95
Jumlah Belanja		2.190.218.258.000,00	1.637.864.718.393,00	74,78

Anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menurut klasifikasi belanja dapat dilihat berikut ini:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
52	Belanja Barang	1.177.861.655.000,00	1.071.099.979.083,00	90,94
53	Belanja Modal	1.012.356.603.000,00	566.764.739.310,00	55,98
		2.190.218.258.000,00	1.637.864.718.393,00	74,78

Komposisi anggaran dan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut ini.



Daftar Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 berdasarkan jenis belanja, terdiri dari:

No	Uraian Jenis Belanja	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Belanja Barang	1.071.099.979.083,00	1.324.924.286.303,00
2	Belanja Modal	566.764.739.310,00	704.254.787.318,00
	Jumlah	1.637.864.718.393,00	2.029.179.073.621,00

Belanja Barang
Rp1.071.099.979.083

B.2.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.071.099.979.083,00 dan Rp1.324.924.286.303,00 dengan rincian menurut jenisnya adalah sebagai berikut ini:

Nama Belanja	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	511.335.228.111,00	520.196.633.879,00
Belanja Barang	127.909.976.656,00	162.339.940.679,00
Belanja Jasa	306.047.692.960,00	316.287.607.001,00
Belanja Pemeliharaan	87.885.450.609,00	297.781.264.114,00
Belanja Perjalanan	34.054.716.170,00	23.741.158.021,00
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BL	3.866.914.577,00	4.577.682.609,00
Jumlah Realisasi Belanja	1.071.099.979.083,00	1.324.924.286.303,00

Rincian Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menurut jenisnya sebagai berikut:

No.	Keterangan	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
A. Beban Pegawai - Usaha		
1	Biaya Gaji/Upah	124.220.832.199,00
2	Biaya Gaji/Upah Lainnya	0,00
3	Biaya Tunjangan Jabatan	3.561.415.000,00
4	Biaya Tunjangan Uang Makan	8.338.595.000,00
5	Biaya Tunjangan Pajak	0,00
6	Biaya Tunjangan Uang Duka	13.376.737,00
7	Biaya Tunjangan Hari Raya	2.249.670.392,00
8	Biaya Tunjangan Lainnya	99.138.251.433,00
9	Biaya Lembur	1.831.088.000,00
10	Biaya Bantuan Uang Duka	16.776.701,00
11	Biaya BPJS Kesehatan	0,00
12	Biaya BPJS Tenaga Kerja	418.776.624,00
13	Biaya Honor Tetap	28.608.000,00
	Jumlah (A)	239.817.390.086,00
B. Beban Pegawai Umum dan Adm.		
14	Biaya Gaji/Upah	132.923.323.138,00
15	Biaya Gaji/Upah Lainnya	-
16	Biaya Tunjangan Jabatan	4.380.530.000,00
17	Biaya Tunjangan Uang Makan	8.543.356.000,00
18	Biaya Tunjangan Pajak	158.933.730,00
19	Biaya Tunjangan Lainnya	117.138.199.918,00
20	Biaya Honor Tetap	-
21	Biaya Lembur	3.718.401.000,00
22	Biaya Uang Duka	61.304.679,00
23	Biaya BPJS Tenaga Kerja	1.478.673.247,00
24	Biaya BPJS Kesehatan	3.115.116.313,00
	Jumlah (B)	271.517.838.025,00
	Jumlah Beban Pegawai (A+B)	511.335.228.111,00

No.	Keterangan	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
C. Belanja Barang		
25	Obat	45.401.023.366,00
26	Oksigen	593.189.019,00
27	Alat Tulis Kantor	6.933.248.172,00
28	Bahan Cetak	2.196.072.000,00
29	Bahan Kelontong	311.630.700,00
30	Bahan Bangunan dan Alat Listrik	1.179.655.500,00
31	Persediaan Alat Tulis Kantor Dsb Lainnya	145.794.000,00
32	Suku Cadang	390.528.500,00
33	Persediaan Obat Lainnya	127.626.500,00
34	Bahan untuk Operasional Lainnya	811.476.900,00
35	Bahan Baku	825.369.000,00
36	Persediaan Lainnya	1.135.013.500,00
37	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	208.467.135,00
38	Biaya Bahan Cetak	212.586.250,00
39	Biaya Bahan Komputer	69.361.000,00
40	Biaya Inventaris Kantor	6.980.000,00
41	Biaya Keperluan Perkantoran Lainnya	3.624.333.088,00
42	Biaya Pengadaan Bahan Makanan Pasien	2.154.600.561,00
43	Biaya Obat dan Konsumsi Orang Sakit	3.007.415.816,00
44	Biaya Makanan dan Minuman	124.977.000,00
45	Biaya Obat	4.000.000,00
46	Biaya Makan Ternak	167.074.000,00
47	Biaya Obat dan Makan Ternak Lainnya	43.750.000,00
48	Biaya Pengiriman Surat Dinas/Dokumen/Barang	776.050,00
49	Biaya Bahan dan Alat Pembersih	15.675.500,00
50	Biaya Peralatan Listrik	12.096.000,00
51	Biaya Bahan Untuk Pemeliharaan Kantor Lainnya	146.091.200,00
52	Biaya Suku Cadang Alat Pertanian	61.799.000,00
53	Biaya Suku Cadang Alat Bengkel	34.145.000,00
54	Biaya Bahan Untuk Suku Cadang Lainnya	230.130.700,00
55	Biaya Bahan Bakar Minyak	965.301.291,00
56	Biaya Bahan Kimia	186.500.000,00
57	Biaya transport	260.000,00
58	Biaya Operasional Lainnya	646.816.780,00
59	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	24.117.000,00
60	Biaya Kertas dan Cover	600.000,00
61	Biaya Bahan Cetak	75.305.000,00
62	Biaya Konsumsi	2.306.499.737,00

No.	Keterangan	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
63	Biaya Dokumentasi	15.450.000,00
64	Biaya Bahan Untuk Kegiatan Tertentu Lainnya	1.639.230.600,00
65	Biaya Obat dan Konsumsi Orang Sakit - COVID - 19	2.587.049.148,00
66	Biaya Bahan Untuk Kegiatan Tertentu Lainnya - COVID - 19	21.840.000,00
67	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	61.896.500,00
68	Biaya Bahan Cetak	508.811.683,00
69	Biaya Inventaris/Perlengkapan Kantor	15.095.000,00
70	Biaya Perlengkapan Kedinasan	2.581.090.000,00
71	Biaya Keperluan Perkantoran Lainnya	6.657.452.291,00
72	Biaya Makanan dan Minuman	68.723.000,00
73	Biaya Obat	639.223.139,00
74	Biaya Pengiriman Barang/Dokumen Kedinasan	1.492.870,00
75	Biaya Tamu	558.611.212,00
76	Biaya BBM	1.300.318.001,00
77	Biaya Keperluan Perkantoran Lainnya	680.141.455,00
78	Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	82.224.500,00
79	Biaya Bahan Cetak	1.219.741.140,00
80	Biaya Konsumsi	27.549.243.536,00
81	Biaya Dokumentasi	178.520.000,00
82	Biaya Fotokopi	10.883.000,00
83	Biaya Bahan Untuk Kegiatan Tertentu Lainnya	1.932.943.880,00
84	Biaya Barang Untuk Kegiatan Tertentu Lainnya	4.649.756.636,00
85	Biaya Konsumsi - COVID - 19	5.460.000,00
86	Biaya Barang Untuk Kegiatan Tertentu Lainnya - COVID - 19	28.767.000,00
87	Biaya Administrasi Perkantoran Lainnya	290.676.800,00
88	Biaya Umum dan Administrasi Lainnya	6.050.000,00
89	Biaya Bantuan Sosial	239.000.000,00
	Jumlah Belanja Barang (C)	127.909.976.656,00
D. Belanja Jasa		
90	Bagian Lancar Utang Usaha Biaya Jasa	181.500.000,00
91	Biaya Cleaning Service	21.057.557.946,00
92	Biaya Penyedia tenaga kerja	8.069.626.466,00
93	Biaya Pemasaran	135.820.000,00
94	Biaya Jasa Medik	39.588.826.788,00
95	Biaya Jasa lainnya	39.837.408.866,00
96	Biaya Air	4.419.374.855,00
97	Biaya Listrik	27.595.986.203,00
98	Biaya Telepon	134.991.437,00
99	Biaya Internet	446.438.144,00
100	TV Cable	14.232.200,00
101	Biaya Surat Kabar	5.396.900,00
102	Biaya Daya dan Jasa Lainnya	42.392.162,00
103	Biaya Listrik	11.618.024.450,00

No.	Keterangan	31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
104	Biaya Telepon	811.870.270,00
105	Biaya Air	909.014.780,00
106	Biaya Surat Kabar	155.937.000,00
107	Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya	711.192.702,00
108	Biaya Jasa Konsultan	16.413.507.803,00
109	Biaya Sewa Peralatan dan Mesin	17.555.238.020,00
110	Biaya Sewa Gedung/Bangunan/Ruangan/Gudang/Rumah Dinas	456.422.096,00
111	Biaya Sewa Lainnya	1.388.402.646,00
112	Biaya Narasumber, Praktisi, Pembicara dan atau Pakar	1.349.250.000,00
113	Biaya Jasa Profesi Lainnya	147.470.000,00
114	Biaya Jasa Cleaning Service	11.855.580.339,00
115	Biaya Penyedia Tenaga Kerja	36.695.065.818,00
116	Biaya Jasa Lainnya	43.341.014.522,00
117	Biaya Jasa Lainnya - COVID - 19	17.293.000,00
118	Biaya Listrik	5.586.770.449,00
119	Biaya Telepon	484.077.955,00
120	Biaya Air	556.591.900,00
121	Biaya Surat Kabar	50.237.800,00
122	Biaya Daya dan Jasa Lainnya	6.551.925.842,00
123	Biaya Publikasi	6.424.187.599,00
124	Biaya Iklan	1.090.968.500,00
125	Biaya Administrasi Bank	347.467.502,00
126	Biaya Administrasi Bank	30.000,00
127	Biaya Lain-Lainnya	600.000,00
	Jumlah Belanja Jasa (D)	306.047.692.960,00
E. Belanja Pemeliharaan		
128	Suku Cadang (Pemeliharaan)	580.682.100,00
129	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	47.400.000,00
130	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	121.360.000,00
131	Biaya Pemeliharaan Investaris Kantor	1.639.778.425,00
132	Biaya Pemeliharaan Mesin	635.309.000,00
133	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2	4.810.000,00
134	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4	221.810.000,00
135	Biaya Pemeliharaan Alat Berat	49.255.000,00
136	Biaya Pemeliharaan Kapal	526.900.900,00
137	Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan	2.478.077.018,00
138	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.978.886.237,00
139	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	5.551.606.400,00
140	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	692.355.500,00
141	Biaya Pemeliharaan Dermaga	1.166.874.600,00
142	Biaya Pemeliharaan Waduk	37.695.000,00
143	Biaya Pemeliharaan Landasan	808.877.000,00

No.	Keterangan	31 Desember 2022 (audited) (Rp)
144	Biaya Pemeliharaan Lift	128.600.000,00
145	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	4.831.506.900,00
146	Biaya Pemeliharaan Jalan	608.926.900,00
147	Biaya Pemeliharaan Irigasi	58.610.000,00
148	Biaya Pemeliharaan Jaringan	913.616.800,00
149	Biaya Pemeliharaan Jalan/Jembatan/Irigasi dan Jaringan Lainnya	1.052.657.400,00
150	Biaya Pemeliharaan Aset Lainnya	1.448.335.600,00
151	Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor	9.360.647.903,00
152	Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	571.883.000,00
153	Biaya Pemeliharaan Mess/Wisma/Asrama	976.894.204,00
154	Biaya Pemeliharaan Bangunan Gudang	88.415.500,00
155	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	845.874.384,00
156	Biaya Pemeliharaan Alat Besar	23.000.000,00
157	Biaya Pemeliharaan Alat Angkutan	586.905.000,00
158	Biaya Pemeliharaan Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	94.735.000,00
159	Biaya Pemeliharaan Alat Laboratorium	427.823.866,00
160	Biaya Pemeliharaan Komputer	447.952.950,00
161	Biaya Pemeliharaan Alat Deteksi	499.250.000,00
162	Biaya Pemeliharaan Sepeda Motor (R2)	230.655.000,00
163	Biaya Pemeliharaan Mobil (R4)	10.147.351.102,00
164	Biaya Pemeliharaan Speed Boat	19.035.000,00
165	Biaya Pemeliharaan Lift	538.667.640,00
166	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.150.596.850,00
167	Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	159.642.000,00
168	Biaya Pemeliharaan Jaringan	5.651.373.572,00
169	Biaya Pemeliharaan Lainnya	14.480.816.858,00
	Jumlah Belanja Pemeliharaan (E)	87.885.450.609,00
F. Belanja Perjalanan		
170	Biaya Perjalanan Dalam Negeri	80.805.000,00
171	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.865.587.349,00
172	Biaya Transportasi Dalam Kota	246.840.000,00
173	Perjalanan Dinas Jakarta - Batam (PP)	2.317.155.369,00
174	Perjalanan Dinas Batam - Jakarta (PP)	14.068.584.310,00
175	Perjalanan Dinas Batam - Tanjung Pinang (PP)	941.183.095,00
176	Perjalanan Dinas Batam - Pekan Baru (PP)	232.983.590,00
177	Perjalanan Dinas Jakarta - Tanjung Pinang (PP)	88.993.800,00
178	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	467.485.000,00
179	Biaya Perjalanan Dalam Negeri Lainnya	6.983.994.787,00
180	Perjalanan Dinas Batam - Singapore (PP)	547.324.853,00
181	Biaya Perjalanan Luar Negeri Lainnya	4.213.779.017,00
	Jumlah Belanja Perjalanan (F)	34.054.716.170,00
G. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya		
182	Biaya Pengembalian UWTO	3.866.914.577,00
	Jumlah Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya (G)	3.866.914.577,00
	Jumlah (A+B+C+D+E+F+G)	1.071.099.979.083,00

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 menurut unit disajikan sebagai berikut:

Nama Belanja	31 Desember 2022 (audited) (Rp)	31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
Kantor Pusat	811.734.285.073,00	1.006.386.274.940,00
Badan Usaha Bandar Udara	24.935.589.420,00	91.998.088.324,00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	25.992.504.847,00	44.071.800.026,00
Badan Usaha Pelabuhan	32.740.264.198,00	33.582.968.737,00
Badan Usaha Rumah Sakit	152.045.954.971,00	142.118.474.116,00
Kantor Perwakilan Jakarta	6.601.179.983,00	6.766.680.160,00
Badan Usaha SPAM	17.050.200.591,00	0,00
Jumlah Realisasi Belanja	1.071.099.979.083,00	1.324.924.286.303,00

Rincian belanja barang menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kantor Pusat

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	511.144.386.196,00	520.010.425.202,00
525112	Belanja Barang	55.961.557.517,00	79.236.355.667,00
525113	Belanja Jasa	160.643.771.852,00	167.865.026.927,00
525114	Belanja Pemeliharaan	50.785.850.655,00	214.842.238.123,00
525115	Belanja Perjalanan	29.331.804.276,00	19.854.546.412,00
525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya	3.866.914.577,00	4.577.682.609,00
Total Belanja Barang		811.734.285.073,00	1.006.386.274.940,00

2. Badan Usaha Bandar Udara

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	3.628.668.196,00	7.495.272.818,00
525113	Belanja Jasa	12.506.485.233,00	36.869.288.294,00
525114	Belanja Pemeliharaan	8.368.640.400,00	46.611.319.228,00
525115	Belanja Perjalanan	431.795.591,00	1.022.207.984,00
Total Belanja Barang		24.935.589.420,00	91.998.088.324,00

3. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	4.009.111.441,00	5.618.139.130,00
525113	Belanja Jasa	17.088.940.195,00	28.520.622.059,00
525114	Belanja Pemeliharaan	4.189.340.000,00	8.487.375.652,00
525115	Belanja Perjalanan	705.113.211,00	1.445.663.185,00
Total Belanja Barang		25.992.504.847,00	44.071.800.026,00

4. Badan Usaha Pelabuhan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	2.397.717.771,00	3.203.881.622,00
525113	Belanja Jasa	19.860.680.239,00	16.946.318.354,00
525114	Belanja Pemeliharaan	9.391.148.300,00	12.833.328.085,00
525115	Belanja Perjalanan	1.090.717.888,00	599.440.676,00
Total Belanja Barang		32.740.264.198,00	33.582.968.737,00

5. Badan Usaha Rumah Sakit

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	59.189.663.562,00	65.754.109.267,00
525113	Belanja Jasa	79.998.076.839,00	63.023.711.510,00
525114	Belanja Pemeliharaan	12.012.397.380,00	13.180.275.016,00
525115	Belanja Perjalanan	845.817.190,00	160.378.323,00
Total Belanja Barang		152.045.954.971,00	142.118.474.116,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	190.841.916,00	186.208.677,00
525112	Belanja Barang	1.175.932.518,00	1.032.182.175,00
525113	Belanja Jasa	3.208.563.626,00	3.062.639.857,00
525114	Belanja Pemeliharaan	1.433.351.874,00	1.826.728.010,00
525115	Belanja Perjalanan	592.490.049,00	658.921.441,00
Total Belanja Barang		6.601.179.983,00	6.766.680.160,00

7. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
525112	Belanja Barang	1.547.325.650,00	0,00
525113	Belanja Jasa	12.741.174.976,00	0,00
525114	Belanja Pemeliharaan	1.704.722.000,00	0,00
525115	Belanja Perjalanan	1.056.977.965,00	0,00
Total Belanja Barang		17.050.200.591,00	0,00

Belanja Modal
Rp566.764.739.310

B.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp566.764.739.310,00 dan Rp704.254.787.318,00.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 menurut unit disajikan sebagai berikut:

Nama Belanja	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
	(Rp)	(Rp)
Kantor Pusat	476.281.375.084,00	511.398.683.403,00
Badan Usaha Bandar Udara	1.274.130.880,00	10.383.638.650,00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	11.441.385.134,00	99.968.683.561,00
Badan Usaha Pelabuhan	72.387.733.650,00	2.958.521.780,00
Badan Usaha Rumah Sakit	4.740.743.482,00	79.020.129.097,00
Kantor Perwakilan Jakarta	183.667.080,00	525.130.827,00
Badan Usaha SPAM	455.704.000,00	0,00
Jumlah Realisasi Belanja	566.764.739.310,00	704.254.787.318,00

Rincian belanja modal menurut jenisnya pada masing-masing unit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
537111	Belanja Modal Tanah	899.600.975,00	1.537.260.370,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.317.527.089,00	144.043.378.446,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.119.857.503,00	114.272.788.011,00
537114	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	265.041.869.443,00	255.907.391.164,00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	1.385.884.300,00	12.320.856.651,00
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Khusus Penanganan COVID 19	0,00	4.352.861.943,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	74.812.419.397,00
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00	22.450.000,00
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	942.372.000,00
534111	Belanja Modal Jalan, Jembatan & Irigasi	0,00	43.021.823.730,00
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	0,00	40.750.000,00
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0,00	956.165.000,00
534121	Belanja Modal Irigasi	0,00	51.718.016.068,00
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja & Honor	0,00	128.340.000,00
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	0,00	177.914.538,00
Total Belanja Modal		566.764.739.310,00	704.254.787.318,00

1. Kantor Pusat

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
537111	Belanja Modal Tanah	899.600.975,00	1.537.260.370,00
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.202.770.797,00	38.012.224.375,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	197.132.687.703,00	112.323.813.748,00
537114	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	255.996.095.309,00	228.092.441.132,00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	1.050.220.300,00	11.633.663.651,00
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Khusus Penanganan COVID 19	0,00	3.300.000,00
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	74.812.419.397,00
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0,00	22.450.000,00
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0,00	942.372.000,00
534111	Belanja Modal Jalan, Jembatan & Irigasi	0,00	43.021.823.730,00
534113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jalan dan Jembatan	0,00	40.750.000,00
534115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan	0,00	956.165.000,00
Total Belanja Modal		476.281.375.084,00	511.398.683.403,00

2. Badan Usaha Bandar Udara

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.103.212.880,00	9.820.796.750,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	170.918.000,00	198.341.900,00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	0,00	364.500.000,00
Total Belanja Modal		1.274.130.880,00	10.383.638.650,00

3. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.703.511.000,00	18.176.812.560,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	692.100.000,00	1.629.957.363,00
537114	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.045.774.134,00	27.814.950.032,00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	0,00	322.693.000,00
534121	Belanja Modal Irigasi	0,00	51.718.016.068,00
534123	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja & Honor	0,00	128.340.000,00
534128	Belanja Modal Perjalanan Irigasi	0,00	177.914.538,00
Total Belanja Modal		11.441.385.134,00	99.968.683.561,00

4. Badan Usaha Pelabuhan

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.263.581.850,00	2.958.521.780,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.151.800,00	0,00
Total Belanja Modal		72.387.733.650,00	2.958.521.780,00

5. Badan Usaha Rumah Sakit

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.405.079.482,00	74.549.892.154,00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	120.675.000,00
537115	Belanja Modal Fisik Lainnya	335.664.000,00	0,00
537122	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Khusus Penanganan Covid-19	0,00	4.349.561.943,00
Total Belanja Modal		4.740.743.482,00	79.020.129.097,00

6. Kantor Perwakilan Jakarta

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.667.080,00	525.130.827,00
Total Belanja Modal		183.667.080,00	525.130.827,00

7. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Kode Belanja	Nama Belanja	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	455.704.000,00	0,00
Total Belanja Modal		455.704.000,00	0,00

B.2.3. Realisasi Belanja Prioritas Nasional

Badan Pengusahaan Batam memiliki alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada PN II Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Pelaksanaannya diantaranya melalui program prioritas

pembangunan wilayah sumatera, kegiatan prioritas pengembangan Kawasan strategis yang tersebar di Satker Badan Pengusahaan Batam. Pagu Anggaran PN II adalah sebesar Rp468.207.871.000,00 dan total realisasi sebesar dengan Rp249.399.696,00 atau sebesar 53,27% dengan rincian sebagai berikut :

Nama Satker	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
BP BATAM	01.Pembangunan Wilayah Sumatera/ 01. Pengembangan Kawasan Strategis	468.207.871.000,00	249.399.539.696,00	53,27				
	5124.RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut							
	RBD.001 Alat Bongkar Muat Pelabuhan Batu Ampar	123.579.019.000,00	71.337.927.927,00	57,73		1 unit		
	5126.RAB OM Sarana Biang Kesehatan							
	RAB. 001 Pengadaan Peralatan Penanganan Cancer/ Radiotherapy RSBP	57.280.960.000,00	-	0,00		1 paket		
	5127.RBC Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)							
	RBC.001 Jalan Gajah Mada-Baloi Tanah Mas (Ruas Pura Agung-Jembatan Baloi Tanah Emas)	16.000.000.000,00	-	0,00		1.50 km		
	RBC.002 Jalan RE. Martadinata Tahap 1	41.870.263.000,00	41.854.412.250,00	99,96		3.30 km		
	RBC.003 Jalan YOs Susarso Tahap 1	20.000.000.000,00	15.265.089.000,00	76,33		1.20 km		
	5127.RBD Prasarana Bidang Konektivitas Laut							
	RBD.001 Penataan Container Yard (CY) Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar Tahap 2	36.971.000.000,00	-	0,00		1 unit		
	RBD.002 Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar	30.000.000.000,00	10.893.861.557,00	36,31		1 unit		
	RBD.003 Revitalisasi Container Yard (CY) Dermaga Selatan (Ex- SPIL)	31.930.000.000,00	-			1 unit		
	RBD.004 Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1	70.000.000.000,00	69.672.497.402,00	99,53		1 unit		
	5127.RBE Prasarana Bidang Konektivitas Udara							
	RBE.001 Pembangunan Jalan Akses Terminal Kargo Bandara Hang Nadim	40.576.629.000,00	40.375.751.560,00	99,50		1 unit		

B.2.4. Belanja Modal PHLN

Pada tahun 2021 Badan Pengusahaan Batam mendapatkan anggaran dari PHLN sebesar Eqv. USD50.000.000 berupa kegiatan *The Development of Sewerage System In Batam Island* yang sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp571.998.606.674,00 adapun ikhtisar PHLN sebagai berikut:

No	Keterangan	LK PLN
1	Nama Pinjaman Luar Negeri	The Development Of Sewerage System In Batam Island
2	Pemberi Pinjaman	The Export-Import Bank Of Korea
3	Nama Proyek	The Development Of Sewerage System In Batam Island
4	<i>Loan ID</i>	INA-20
5	<i>No. Register</i>	21687101
6	<i>Date Sign</i>	21 Maret 2014
7	<i>Date Effective</i>	29 Desember 2014
8	<i>Closing Date</i>	30-Sep-24
9	<i>Loan Amount</i>	Eqv. USD 50,000,000
10	<i>Disburstment s.d 2021</i>	Rp564.954.867.320,00
11	<i>Disburstment pada tahun 2022</i>	Rp7.043.739.354,00
12	<i>Belanja Tahun 2021 (Rupiah)</i>	
	a. Belanja Pegawai	
	b. Belanja Barang	
	c. Belanja Modal	Rp7.043.739.354,00
	d. Belanja Bansos	
13	<i>Neraca (Rupiah)</i>	
	a. Aset Lancar	
	b. Aset Tetap	
	c. Aset Lainnya	
	d. Kewajiban	
14	<i>Executing Agency</i>	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan
15	<i>Pemeriksaan (BPK/BPKP/KAP)</i>	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022. Berdasarkan laporan tersebut, SAL Awal tahun 2022 adalah sebesar **Rp499.527.578.061,00** penggunaan SAL sebesar Rp0,00, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SILPA/SIKPA tahun berjalan sebesar **Rp340.096.167.473,00** penyesuaian SILPA/SIKPA yang merupakan Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN sebesar **Rp34.445.841.745,00** yang terdiri dari pendapatan dari Alokasi APBN sebesar Rp49.241.880.694,00 dan Penyetoran PNBPN ke kas negara sebesar (Rp14.796.038.949,00), sehingga Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar **Rp374.542.009.218,00** yang menambah Saldo Anggaran Lebih Awal sehingga menyajikan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir sebesar **Rp874.069.587.279,00**

C.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal per 1 Januari 2022 sebesar Rp499.527.578.061,00 merupakan Saldo Awal Kas dan Bank-BLU pada Badan Pengusahaan Batam yang telah dilakukan rekonsiliasi pengesahan saldo tersebut dengan KPPN Kota Batam. Saldo Anggaran Lebih meliputi Kas Operasional Penerimaan, Operasional Pengeluaran, dan Pengelolaan kas (Deposito).

Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan
Anggaran
Rp340.096.167.473

C.2. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang pendapatan–LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp340.096.167.473,00.

No	Uraian	Jumlah
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Januari s/d Desember 2022)	1.977.960.885.866,00
2	Belanja RM dan PNBP (Januari s/d Desember 2022)	1.637.864.718.393,00
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) (3=1-2)	340.096.167.473,00

Penyesuaian
SiLPA/SiKPA

C.3. Penyesuaian SiLPA/SiKPA

Penyesuaian SiLPA/SiKPA merupakan penyesuaian untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah nihil.

Penyesuaian
Transaksi BLU
dengan BUN
Rp34.445.841.745

C.3.1. Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp34.445.841.745,00 merupakan penyesuaian atas Pendapatan atas Alokasi APBN yang diberikan Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan dari APBN Alokasi Rupiah Murni (RM)	49.241.880.694,00
2	Pendapatan atas PNBP yang disetorkan ke Kas Negara	(14.796.038.949,00)
	Jumlah	34.445.841.745,00

Pendapatan dari APBN
Rp49.241.880.694

C.3.1.1. Pendapatan dari APBN

Penyesuaian Pendapatan dari APBN selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp49.241.880.694,00 merupakan pendanaan atas realisasi belanja modal yang bersumber dari pendanaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan tidak merupakan bagian dari pengurangan saldo anggaran lebih awal.

No	Uraian	Tahun 2022 (Audited) (RP)
1	Belanja Barang yang berasal dari PHLN	49.241.880.694,00
	Jumlah	49.241.880.694,00

Penyetoran PNBPN
ke Kas Negara
Rp14.796.038.949

C.3.2. Penyetoran PNBPN ke Kas Negara

Penyesuaian penyetoran PNBPN ke Kas Negara selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah (Rp14.796.038.949,00) merupakan penyetoran PNBPN ke Kas Negara (BUN) yang diperoleh oleh BP Batam.

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

C.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan penyesuaian selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah nihil.

Penyesuaian Lain-lain

C.5. Penyesuaian Lain-lain

Penyesuaian lain-lain selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah nihil.

Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp874.069.587.279

C.6. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir

Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp874.069.587.279,00 merupakan penambahan SAL awal sebesar Rp499.527.578.061,00. SiLPA/SiKPA tahun berjalan sebesar Rp340.096.167.473,00 dan penyesuaian transaksi BLU dengan BUN sebesar Rp34.445.841.745,00 yang

merupakan pendapatan dari APBN. SAL akhir pada Badan Pengusahaan Batam telah dilakukan rekonsiliasi dan pengesahan saldo dengan KPPN Kota Batam.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar D.1. Aset Lancar

Kas dan Bank D.1.1. Kas dan Bank Rp1.063.978.404.386

Saldo kas dan bank Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.063.978.404.386,00 dan Rp640.490.924.179,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
I. KAS LAINNYA DI BLU	189.908.817.107,00	140.963.346.118,00
II. KAS & BANK BLU	679.069.587.279,00	304.527.578.061,00
III. SETARA KAS LAINNYA - BLU	195.000.000.000,00	195.000.000.000,00
JUMLAH KAS DAN BANK (I+II+III)	1.063.978.404.386,00	640.490.924.179,00

Mutasi Kas dan Bank adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Kas Lainnya di BLU	140.963.346.118,00	66.223.074.383,00	17.277.603.394,00	189.908.817.107,00
Kas & Bank BLU	304.527.578.061,00	2.152.155.679.120,00	1.777.613.669.902,00	679.069.587.279,00
Setara Kas Lainnya BLU	195.000.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000.000,00
Jumlah	640.490.924.179,00	2.218.378.753.503,00	1.794.891.273.296,00	1.063.978.404.386,00

Saldo Kas dan Bank per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.063.978.404.386,00 merupakan saldo rekening yang dimiliki Badan Pengusahaan Batam. Sesuai hasil rekonsiliasi terhadap saldo tersebut masih terdapat cek beredar sebesar Rp628.870.917,00 dan belum termasuk saldo rekening bersama sebesar Rp58.289.484.782,16 yang terdiri dari:

- Sebesar Rp919.307.898,84 dan USD7.063,58 (Ekuivalen Rp111.117.176,98) yang merupakan pendapatan dari Kerjasama Operasional (KSO) antara Badan Usaha Pelabuhan dan Para Mitra Kerjasama dimana nilai tersebut akan diperhitungkan dan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan perjanjiannya ([rincian terlampir 1.c](#)).

- Sebesar Rp9.639.541.775,77 yang merupakan saldo pada rekening giro bersama Bank Mandiri Nomor 109-00-5255666-9 per 31 Desember 2022 yang belum dilakukan pembagian porsi antara PT ATB, PT Moya Indonesia dan BP Batam dengan rincian:
 - Pembayaran ke ATB Tahap II sebesar Rp6.928.116.977,00
 - Pembayaran ke BP Batam dan PT Moya Indonesia Rp2.711.424.798,77

Berdasarkan Perjanjian Rekening Giro Bersama tersebut, rekening ini akan ditutup pada tanggal 31 Januari 2023 untuk penyelesaian kewajiban dan hak antar pihak.

- Sedangkan berdasarkan perjanjian kerja sama penyelenggaraan SPAM Nomor 36/SPJ/KA/7/2022 dan ABHILIR-BP/PJ/22.07/041 tanggal 29 Juli 2022 dan Perjanjian Kerja Sama Rekening Giro Bersama Nomor ABHILIR-BP/PJ/22.07/041 29 Juli 2022 dibuka 1 (satu) Rekening Giro Bersama pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 109-005655778-8 a.n. KSO BP Batam– PT Air Batam Hilir dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.619.517.930,57 yang belum dilakukan pembagian hak dan kewajiban antara BP Batam, PT Air Batam Hilir dan PT Air Batam Hulu.

D.1.1.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan setara kas adalah kas lainnya di BLU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp189.908.817.107,00 dan Rp140.963.346.118,00 merupakan dana yang tersedia atas saldo titipan pihak ketiga maupun dana pihak ketiga yang ada di Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
I. KAS LAINNYA DI BLU		
a. Kantor Pusat		
Giro Dana Kelolaan	134.920.526.333,00	86.487.005.148,00
Jumlah (a)	134.920.526.333,00	86.487.005.148,00
b. Kantor Perwakilan Jakarta		
Giro Dana Kelolaan	74.759.689,00	13.133.935,00
Jumlah (b)	74.759.689,00	13.133.935,00
c. Badan Usaha Rumah Sakit		
Giro Rupiah	-	-
Giro Dana Kelolaan	881.832.916,00	566.598.699,00
Jumlah (c)	881.832.916,00	566.598.699,00
d. Badan Usaha Pelabuhan		
Giro Rupiah	-	-
Jumlah (d)	-	-
e. BUBU dan TIK		
Giro Dana Kelolaan	1.291.581.145,00	3.217.760.494,00
Jumlah (e)	1.291.581.145,00	3.217.760.494,00
f. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan		
Giro Dana Kelolaan	738.231.935,00	50.678.847.842,00
Jumlah (f)	738.231.935,00	50.678.847.842,00
g. Badan Usaha SPAM		
Giro Dana Kelolaan	52.001.885.089,00	-
Jumlah (g)	52.001.885.089,00	-
Jumlah Kas Lainnya di BLU	189.908.817.107,00	140.963.346.118,00
Jumlah Kas Lainnya di BLU setelah Rekonsiliasi	189.908.817.107,00	140.963.346.118,00

Rincian kas lainnya di BLU masing-masing unit pelaporan terdiri atas:

D.1.1.1.a. Kantor Pusat

Giro dana kelolaan pada Kantor Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp134.920.526.333,00 merupakan dana titipan yang masih berada di rekening giro rupiah Kantor Pusat, yang terdiri dari Penerimaan Sementara Direktorat Pertanahan sebesar Rp324.497.420,00, Titipan Penerimaan Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp11.873.220.748,00, Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) sebesar Rp102.831.126.708,00, Titipan Uang Muka UWTO sebesar Rp18.746.393.250,00 dan Titipan Jaminan Lainnya sebesar Rp1.145.288.207,00.

D.1.1.1.b. Kantor Perwakilan Jakarta

Giro dana kelolaan pada Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp74.759.689,00 terdiri dari:

- Service charge yang belum dibagi kepada karyawan Kuningan Guest House sebesar Rp22.820.615,00
- Pajak pembangunan (PB1) sebesar Rp11.939.074,00
- Titipan Jaminan Mitra Kerjasama PT Graha Wisata Kita (GWA) sebesar Rp40.000.000,00 tentang sewa bangunan dan ruang operasional lainnya pada Kuningan Guest House sesuai perjanjian Nomor: 978/SPJ/A1/10/2022 dan Nomor: 01/SPJ-GWA/X/2022 tanggal 1 November 2022.

D.1.1.1.c. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Giro dana kelolaan pada Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp881.832.916,00 terdiri dari Titipan pihak ketiga dalam bentuk Deposit/Uang Jaminan Pasien terhadap Pelayanan Kesehatan sebesar Rp398.353.630,00, Titipan Pihak Ketiga Lainnya (Titipan Perusahaan) sebesar Rp449.573.961,00 dan Penerimaan Sementara sebesar Rp33.905.325,00.

D.1.1.1.d. Badan Usaha Bandar Udara

Giro dana kelolaan pada Badan Usaha Bandar Udara per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.291.581.145,00 merupakan Titipan Jaminan Jasa Layanan Kebandarudaraan sesuai kontrak.

D.1.1.1.e. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Giro Dana Kelolaan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2022 sebesar Rp738.231.935,00 merupakan dana atas titipan pembayaran pihak ketiga lainnya.

D.1.1.1.f. Badan Usaha SPAM

Giro Dana Kelolaan pada Badan Usaha SPAM per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.001.885.089,00 merupakan jaminan pelanggan Air Bersih dan akan dikembalikan kepada pelanggan apabila tidak menjadi pelanggan dengan air minum Badan Usaha SPAM, serta dapat diperhitungkan apabila pelanggan menunggak tagihan pemakaian air bersih.

D.1.1.2. Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp874.069.587.279,00 dan Rp499.527.578.061,00. Terdiri dari kas dan bank-BLU sebesar Rp679.069.587.279,00 setara kas lainnya-BLU sebesar Rp195.000.000.000,00. Saldo tersebut berada pada rekening operasional penerimaan, pengeluaran maupun pengelolaan kas Badan Pengusahaan Batam yang telah disahkan.

Uraian		31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
II. KAS & BANK BLU			
a.	Kantor Pusat		
	Giro Rupiah	678.883.816.008,00	304.280.319.853,00
	Jumlah (a)	678.883.816.008,00	304.280.319.853,00
b.	Kantor Perwakilan Jakarta		
	Kas Tunai	-	
	Giro Rupiah	1.377.186,00	1.483.960,00
	Giro Dana Kelolaan		
	Jumlah (b)	1.377.186,00	1.483.960,00
c.	Badan Usaha Rumah Sakit		
	Kas Tunai	39.882.015,00	62.998.433,00
	Giro Rupiah	9.790.799,00	29.795.238,00
	Jumlah (c)	49.672.814,00	92.793.671,00
d.	Badan Usaha Pelabuhan		
	Giro Rupiah	15.219.021,00	12.302.519,00
	Jumlah (d)	15.219.021,00	12.302.519,00
e.	BUBU dan TIK		
	Giro Rupiah	6.087.771,00	29.022.268,00
	Jumlah (e)	6.087.771,00	29.022.268,00
f.	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan		
	Giro Rupiah	13.203.967,00	111.655.790,00
	Jumlah (f)	13.203.967,00	111.655.790,00
g.	Badan Usaha SPAM		
	Giro Rupiah	100.210.512,00	-
	Jumlah (g)	100.210.512,00	-
Jumlah Kas & Bang BLU		679.069.587.279,00	304.527.578.061,00
III. SETARA KAS LAINNYA - BLU			
a.	Kantor Pusat		
	Deposito Rupiah	195.000.000.000,00	195.000.000.000,00
	Jumlah Setara Kas Lainnya - BLU	195.000.000.000,00	195.000.000.000,00
JUMLAH KAS & BANK (I+II+III)		874.069.587.279,00	499.527.578.061,00

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 sebesar Rp874.069.587.279,00 berdasarkan jenisnya terdiri dari :

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	39.882.015,00
2	Giro Rupiah	679.029.705.264,00
4	Setara Kas Lainnya - Deposito Rupiah	195.000.000.000,00
	Total Kas dan Bank setelah rekonsiliasi	874.069.587.279,00

(Rincian Kas, Saldo Bank, Rekonsiliasi Bank, Rekening Bersama, Surat Berharga serta Rincian Kas dan Bank berdasarkan rekening BLU dapat dilihat pada Lampiran 1.a, 1.b, 1.c, dan 1.d).

Saldo tersebut merupakan realisasi PNBPN setelah dikurangi realisasi belanja yang telah disahkan dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal Kas pada BLU 1 Januari 2022	499.527.578.061,00
2	Penerimaan Kas PNBPN per 31 Desember 2022	1.963.164.846.916,00
3	Pengeluaran Kas PNBPN per 31 Desember 2022	1.588.622.837.698,00
4	Kenaikan/(penurunan) Kas per 31 Desember 2022	374.542.009.218,00
5	Koreksi Saldo Awal Kas BLU (Memo Penyesuaian)	0,00
6	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU 31 Desember 2022 (1+4+5)	874.069.587.279,00
7	Kas dan Bank belum disahkan	
8	Saldo Akhir Kas dan Bank BLU 31 Desember 2022 (6-7)	874.069.587.279,00

D.1.1.2.a Kas dan Bank BLU

Kas dan bank pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp679.069.587.279,00 dan Rp304.527.578.061,00. Kas dan bank pada Badan Layanan Umum merupakan realisasi PNBPN setelah dikurangi realisasi belanja yang telah disahkan sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Kantor Pusat	678.883.816.008,00	304.280.319.853,00
Kantor Perwakilan Jakarta	1.377.186,00	1.483.960,00
Rumah Sakit BP Batam	49.672.814,00	92.793.671,00
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	15.219.021,00	12.302.519,00
BUBU	6.087.771,00	29.022.268,00
BU Fasling	13.203.967,00	111.655.790,00
BU SPAM	100.210.512,00	0,00
Jumlah	679.069.587.279,00	304.527.578.061,00
Jumlah Kas dan Bank BLU setelah Rekonsiliasi	679.069.587.279,00	304.527.578.061,00

Terdapat perjanjian Program Pengembangan Operasional (PPO) dengan jangka waktu 12 bulan yang terhitung terhitung sejak tanggal 28 Desember 2021 antara Bank Tabungan Negara dan Badan Pengusahaan Batam Nomor 2076/BTM.II/FSU/XII/2022 dan Nomor 996/SPJ/A/12/2022 dengan saldo giro rata-rata yang mengendap setiap bulan sebesar Rp118.902.058.824,00 yang berupa penambahan peralatan dan mesin yang menambah nilai aset peralatan dan mesin. Perolehan manfaat Program Pengembangan Operasional (PPO) sebagaimana dimaksud dikonversikan dalam bentuk 1 (satu) kendaraan roda empat kebutuhan operasional kantor dengan detail berupa Mobil BMN X7 A/T Tahun 2022 warna Black Sapphire/ Black Extended Merino.

Rincian kas dan bank BLU masing-masing unit pelaporan terdiri atas:

D.1.1.2.1.a.Kantor Pusat

Giro rupiah pada Kantor Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp678.883.816.008,00 merupakan saldo setelah rekonsiliasi atas rekening penerimaan dan pengeluaran.

D.1.1.2.1.b.Kantor Perwakilan Jakarta

Giro rupiah Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.377.186,00 merupakan saldo rekening atas

transaksi pajak PB1 atas penerimaan dari kegiatan operasional Kuningan *Guest House* Jakarta.

D.1.1.2.1.c.Rumah Sakit BP Batam

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1	Kas Tunai	39.882.015,00
2	Giro Rupiah	9.790.799,00
	Jumlah	49.672.814,00

- **Kas tunai** Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP) per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.882.015,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kasir Apotik	2.765.191,00
2	Kasir Rawat Jalan	29.192.555,00
3	Kasir Rawat Inap	3.127.519,00
4	Kasir Klinik Baloi	867.500,00
5	Kasir Klinik Bandara	
7	Kasir IGD	3.929.250,00
	Jumlah	39.882.015,00

- **Giro rupiah** Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.790.799,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Rumah Sakit BP Batam atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.d.Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Giro rupiah Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.219.021,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.e.BUBU

Giro rupiah BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.087.771,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Badan Usaha Bandar Udara atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.f. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Giro rupiah Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.203.967,00 merupakan sisa saldo yang berada pada rekening Kantor Pengelolaan Air dan Limbah atas transaksi pendapatan dan belanja yang telah disahkan.

D.1.1.2.1.g. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Giro rupiah pada Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.210.512,00 merupakan saldo giro rupiah pada Badan Usaha SPAM Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022, berdasarkan hasil rekonsiliasi.

D.1.1.2.b Setara Kas Lainnya - BLU

Saldo setara kas lainnya-BLU per 31 Desember 2022 sebesar Rp195.000.000.000,00. Setara kas lainnya-BLU per 31 Desember 2022 sebesar Rp195.000.000.000,00 adalah investasi dalam bentuk deposito jangka waktu 1 (satu) bulan yang secara otomatis diperpanjang setiap bulannya kecuali akan dicairkan secara langsung.

No	No Rekening Deposito	Nomor Surat Pembukaan	Jumlah (Rp)
1	Bank Riau Kepri 1063000008	S-334/WPB.05/KP.0204/2018	25.000.000.000,00
2	Bank Riau Kepri 1063000010	S-148/WPB.05/KP.0204/2019	20.000.000.000,00
3	Bank Riau Kepri 1063000013	S-205/WPB.05/KP.0204/2020	20.000.000.000,00
4	Bank Riau Kepri 1063000015	S-133/WPB.05/KP.02/2021	20.000.000.000,00
5	Bank Tabungan Negara 02701400039015	S-206/WPB.05/KP.0204/2020	25.000.000.000,00
6	Bank BTN Syariah S116004	S-203/WPB.05/KP.0204/2020	25.000.000.000,00
7	Bank BTN Syariah S116030	S-132/WPB.05/KP.02/2021	20.000.000.000,00
8	Bank Rakyat Indonesia 033101004583401	S-285/WPB.05/KP.02/2021	20.000.000.000,00
9	Bank Rakyat Indonesia 033101004583407	S-285/WPB.05/KP.02/2021	20.000.000.000,00
Jumlah			195.000.000.000,00

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp205.900.000

D.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Belanja dibayar dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp205.900.000,00 dan Rp0,00. Koreksi UJK BPK RI sebesar Rp205.900.000,00 yang merupakan sisa Voucher BBM yang sebelumnya dibiayakan penuh, dengan No Kontrak SPK/64/PPK-PNBP-BU-BANDARA/12/2022 Tanggal 1 Desember 2022.

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima
Rp13,661,594,091

D.1.3. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp13.661.594.091,00 dan Rp18.701.678.188,00 mutasi pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut :

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	18.701.678.188,00	3.769.481.924,00	8.809.566.021,00	13.661.594.091,00
Jumlah	18.701.678.188,00	3.769.481.924,00	8.809.566.021,00	13.661.594.091,00

Mutasi Penambahan dan pengurangan merupakan jurnal memo, penyesuaian pendapatan yang masih harus diterima terhadap pelayanan jasa penumpang dalam negeri (JP2U), jurnal balik pembayaran nota mata uang asing, jurnal balik pembayaran piutang denda mata uang asing dari data sumber FBMS BP Batam (Adapun Rincian Mutasi dapat dilihat pada lampiran 2)

Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada masing-masing Unit terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Badan Usaha Bandar Udara	8.739.611.174,00	12.993.712.474,00
Badan Usaha Pelabuhan	4.921.982.917,00	5.707.965.714,00
Jumlah	13.661.594.091,00	18.701.678.188,00

- Pendapatan yang masih harus diterima **Badan Usaha Bandar Udara** per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.739.611.174,00 merupakan pendapatan pelayanan jasa pada Badan Usaha

Bandar Udara yang belum disetorkan oleh pihak ketiga yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam Negeri:	25.620.000,00
	a. Susi Air	540.000,00
	b. Express Air	25.080.000,00
2	Pendapatan atas Piutang Denda pada Badan usaha Bandar Udara yang belum diterbitkan fakturnya per 31 Desember 2022	8.713.991.174,00
Jumlah (1+2)		8.739.611.174,00

(Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima BUBU Hang Nadim dapat dilihat pada Lampiran 2.a).

Terdapat UJK BPK RI Tahun 2022 sebesar Rp107.760.000,00 terdiri dari sebesar Rp780.000,00 merupakan koreksi pendapatan yang masih harus diterima terhadap pelayanan jasa penumpang dalam negeri (JP2U) Carter penerbang angkasa tanggal 5 Maret 2022 dan sebesar Rp106.980.000,00 merupakan koreksi pendapatan yang masih harus diterima terhadap pelayanan jasa penumpang dalam negeri (JP2U) Garuda Air tanggal 20 – 30 Juni 2022.

- Pendapatan yang masih harus diterima **Badan Usaha Pelabuhan** per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.921.982.917,00 merupakan piutang denda dari jasa layanan kepelabuhan.

(Rincian pendapatan yang masih harus diterima Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam dapat dilihat pada Lampiran 2.b).

Piutang Bukan Pajak
Rp1.613.847.101

D.1.4. Piutang Bukan Pajak

Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.613.847.101,00 dan Rp1.613.847.101,00 merupakan piutang sisa pekerjaan akhir tahun yang belum selesai dengan jaminan garansi bank yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	1.613.847.101,00	1.613.847.101,00
Jumlah	1.613.847.101,00	1.613.847.101,00

- Saldo piutang bukan pajak **Badan Usaha Pelabuhan Batam** per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.613.847.101,00 merupakan pencatatan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengerukan kolam Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, nomor kontrak 5124.006.020.A.09/PPK-APBN/11/2015 pada tahun 2016.

Piutang dari
Kegiatan
Operasional BLU
Rp557.781.931.042

D.1.5. Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp557.781.931.042,00 dan Rp700.889.732.738,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Kantor Pusat	349.018.351.642,00	443.643.254.832,00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	2.344.420.546,00	6.760.799.378,00
Badan Usaha Bandar Udara	14.638.586.238,00	19.414.853.916,00
Badan Usaha Pelabuhan	151.998.487.137,00	175.456.599.783,00
Badan Usaha Rumah Sakit	39.544.614.556,00	55.614.224.829,00
Badan Usaha SPAM	237.470.923,00	0,00
Jumlah Piutang Usaha (I)	557.781.931.042,00	700.889.732.738,00
Kantor Pusat	(1.101.978.240,00)	(1.121.312.240,00)
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	(1.818.143.283,00)	(1.569.448.652,00)
Badan Usaha Bandar Udara	(14.083.273.824,00)	(14.707.727.921,00)
Badan Usaha Pelabuhan	(141.031.480.520,00)	(148.829.434.801,00)
Badan Usaha Rumah Sakit	(9.559.570.813,00)	(9.280.565.156,00)
Badan Usaha SPAM	0,00	0,00
Jumlah Akum. Penyisihan (II)	(167.594.446.680,00)	(175.508.488.770,00)
Nilai Buku Piutang Usaha :		
Kantor Pusat	347.916.373.402,00	442.521.942.592,00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	526.277.263,00	5.191.350.726,00
Badan Usaha Bandar Udara	555.312.414,00	4.707.125.995,00
Badan Usaha Pelabuhan	10.967.006.617,00	26.627.164.982,00
Badan Usaha Rumah Sakit	29.985.043.743,00	46.333.659.673,00
Badan Usaha SPAM	237.470.923,00	0,00
Nilai Buku Piutang Usaha (III)=(I+II)	390.187.484.362,00	525.381.243.968,00

Saldo dan Mutasi Piutang Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum pada masing-masing unit adalah sebagai berikut:

D.1.4.1. Kantor Pusat

Piutang usaha Kantor Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp349.018.351.642,00 terdiri dari:

No	Unit Kantor Pusat	Jumlah
1	Direktorat Infrastruktur Kawasan	1.101.978.240,00
2	Direktorat Pengelolaan Lahan	347.879.028.402,00
3	Pusat Data dan Sistem Informasi	37.345.000,00
Total		349.018.351.642,00

Mutasi Piutang Usaha pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Direktorat Infrastruktur Kawasan	1.121.312.240,00	0,00	19.334.000,00	1.101.978.240,00
Direktorat Pengelolaan Lahan	442.521.942.592,00	1.065.967.754.548,00	1.160.610.668.738,00	347.879.028.402,00
Pusat Data dan Sistem Informasi	0,00	10.448.234.000,00	10.410.889.000,00	37.345.000,00
Jumlah	443.643.254.832,00	1.076.415.988.548,00	1.171.040.891.738,00	349.018.351.642,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(1.121.312.240,00)	19.334.000,00	0,00	(1.101.978.240,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	442.521.942.592,00			347.916.373.402,00

Mutasi Piutang pada Kantor Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Piutang usaha **Direktorat Infrastruktur Kawasan:**

- Pengurangan piutang usaha Direktorat Infrastruktur Kawasan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp19.334.000,00 merupakan pelunasan faktur yang terdiri dari pelunasan sewa lahan reklame.

Mutasi Piutang **Direktorat Pengelolaan Lahan:**

- Penambahan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp Rp1.065.967.754.548,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Uang Wajib Tahunan (UWT)	1.041.967.068.230,00
2	Biaya Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	606.428.644,00
3	Biaya Administrasi Peralihan (BAP)	7.147.654.615,00
4	Revisi Gambar Penetapan Lokasi	26.400.000,00
5	Rekomendasi Hak Atas Tanah	564.700.000,00
6	Penggantian Dokumen	12.800.000,00
7	Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	1.043.400.000,00
8	UWT KSB	14.579.667.362,00
9	Denda UWTO	13.477.765,00
10	Koreksi Faktur Terbit	6.157.932,00
Total		1.065.967.754.548,00

- Pengurangan Piutang Usaha Direktorat Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.160.610.668.738,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Uang Wajib Tahunan (UWT)	935.620.277.952,00
2	Biaya Pengukuran dan Penetapan Lokasi (Pengukuran)	396.509.679,00
3	Biaya Administrasi Peralihan (BAP)	6.813.657.785,00
4	Revisi Gambar Penetapan Lokasi	30.700.000,00
5	Rekomendasi Hak Atas Tanah	408.800.000,00
6	Penggantian Dokumen	58.900.000,00
7	Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	990.300.000,00
8	UWT (KSB)	7.471.453.053,00
9	Denda UWTO	1.080.350,00
10	Faktur batal otomatis jatuh tempo	208.812.831.987,00
11	Koreksi Faktur Terbit	6.157.932,00
Total		1.160.610.668.738,00

Mutasi Piutang usaha **Pusat Data dan Sistem Informasi:**

- Penambahan piutang usaha Pusat Data dan Sistem Informasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.448.234.000,00 merupakan Pendapatan Data IT Centre.
- Pengurangan piutang usaha Pusat Data dan Sistem Informasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.410.889.000,00 merupakan pelunasan atas faktur Pendapatan Data IT Centre.

Penjelasan Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang Kantor Pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Akumulasi Penyisihan Piutang Kantor Pusat untuk Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp1.101.978.240,00) dan (Rp1.121.312.240,00) sehingga Penurunan Akumulasi penyisihan piutang sampai dengan 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp19.334.000,00 yang merupakan beban penyisihan piutang Direktorat Infrastruktur Kawasan sampai dengan 31 Desember 2022.

Piutang Usaha Kantor Pusat berdasarkan Unit Usahanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.1.4.1.a. Direktorat Infrastruktur Kawasan

Piutang usaha Direktorat Infrastruktur Kawasan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.101.978.240,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Sewa Lahan Reklame	960.471.750,00
2	Penghijauan/Showroom Bunga	35.042.330,00
3	Pemakaian Lahan ROW	106.464.160,00
Total		1.101.978.240,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 3)

D.1.4.1.b. Direktorat Pengelolaan Lahan

Piutang usaha Direktorat Pengelolaan Lahan per 31 Desember 2022 sebesar Rp347.879.028.402,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Denda UWTO	2.066.098.163,00
2	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	4.039.987.642,00
3	Pendapatan Penggantian Dokumen	5.800.000,00
4	Pendapatan UWTO	334.789.618.125,00
5	Pendapatan atas Sanksi/Klaim	4.265.400,00
6	Pendapatan Rekomendasi Hak atas Tanah	168.800.000,00
7	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	2.000.000,00
8	Pendapatan dari Bida Ayu	5.910.833.000,00
9	Pendapatan Administrasi Peralihan	165.026.072,00
10	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	726.600.000,00
Total		347.879.028.402,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 4)

D.1.4.1.c. Pusat Data dan Sistem Informasi

Piutang usaha Pusat Data dan Sistem Informasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp37.345.000,00 merupakan piutang atas Pendapatan Data IT Centre. (Rincian dapat dilihat pada Lampiran 5)

D.1.4.2. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Piutang Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.344.420.546,00 yang terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Sewa Kantin Lantai 4 Anex 2	102.766.630,00
2	Pendapatan Sewa Lokasi Perikanan	59.730.000,00
3	Pendapatan dari Rusun Sekupang	18.658.342,00
4	Sewa Forklift	1.792.000,00
5	Pendapatan Sewa Listrik	773.280,00
6	Pendapatan Jasa Pemetongan Ternak	18.000.000,00
7	Pendapatan dari Rusun Batu Ampar	1.924.532,00
8	Sewa Ruang Kantor	19.360.000,00
9	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruang/Gudang	7.979.000,00
10	Pendapatan Sewa Lainnya	210.312.153,00
11	Pendapatan Asrama Haji	171.932.500,00
12	Pendapatan Sewa Kandang Ternak	105.000.000,00
13	Pass Masuk Tahunan KPLI B3	1.700.000,00
14	Pendapatan Sewa Lahan untuk Tower	47.463.000,00
15	Pendapatan Sewa Lahan KPLI B3	23.946.000,00
16	Pendapatan dari Rusun Muka Kuning	4.319.571,00
17	Pendapatan Sewa Tapak Kandang Ternak	367.034.247,00
18	Pendapatan dari Rusun Kabil	228.412,00
19	Pass Masuk Bulanan KPLI B3	3.160.000,00
20	Jasa Pengelolaan Kawasan KPLI B3	32.400.000,00
21	Jembatan Timbang	17.200.000,00
22	Pendapatan Sewa Gedung/Bangunan/Ruang/Gudang Lainnya	16.666.667,00
23	Pendapatan Guest House	71.260.000,00
24	Pendapatan Sporthall	12.000.000,00
25	Pengolahan Air Limbah	21.940.000,00
26	Pendapatan Sewa Lokasi Pertanian	1.002.262.212,00
27	Pendapatan Sewa Lokasi Peternakan	4.612.000,00
Total		2.344.420.546,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 6)

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Piutang Usaha Perusahaan	4.317.671.663,00	12.625.540.954,00	16.508.625.548,00	434.587.069,00
Piutang Usaha Perorangan	2.443.127.715,00	3.379.127.791,00	3.912.422.029,00	1.909.833.477,00
Jumlah	6.760.799.378,00	16.004.668.745,00	20.421.047.577,00	2.344.420.546,00
Akumulasi Penyisihan	(1.569.448.652,00)	53.458.207,00	302.152.838,00	(1.818.143.283,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	5.191.350.726,00			526.277.263,00

- Penambahan Piutang Usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp16.004.668.745,00 berasal dari Penambahan piutang usaha perusahaan sebesar Rp12.625.540.954,00 adalah berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 31 Desember 2022 dan Penambahan piutang usaha pada perorangan sebesar Rp3.379.127.791,00 berasal dari penerbitan faktur sampai dengan 31 Desember 2022.
- Pengurangan Piutang Usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp20.421.047.577,00 berasal dari Pengurangan piutang usaha perusahaan sebesar Rp16.508.625.548,00 berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2022 dan Pengurangan piutang usaha perorangan sebesar Rp3.912.422.029,00 berasal dari pelunasan faktur sampai dengan 31 Desember 2022.
- Akumulasi penyisihan piutang sebesar Rp1.818.143.283,00 merupakan penyisihan piutang atas piutang usaha perusahaan dan piutang usaha perorangan yang berasal dari piutang penerbitan faktur.

D.1.4.3. Badan Usaha Bandar Udara

Piutang usaha Badan Usaha Bandar Udara per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.638.586.238,00 yang terdiri dari piutang usaha perusahaan sebesar Rp14.344.617.388,00, piutang usaha perorangan sebesar Rp250.892.757,00 dan piutang pegawai

beban BP Batam sebesar Rp43.076.093,00. Piutang dimaksud terbagi atas 2 (dua) mata uang yaitu Indonesia Rupiah dan Dollar Amerika, masing-masing sebesar Rp14.314.095.665,00 dan USD20.627,46 atau Ekuivalen Rp324.490.573,00. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 7)

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Bandar Udara sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Badan Usaha Bandar Udara	19.414.853.916,00	63.528.591.921,00	68.304.859.599,00	14.638.586.238,00
Jumlah	19.414.853.916,00	63.528.591.921,00	68.304.859.599,00	14.638.586.238,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(14.707.727.921,00)	891.175.578,00	266.721.481,00	(14.083.273.824,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	4.707.125.995,00			555.312.414,00

- Penambahan Piutang Badan Usaha Bandar Udara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp63.528.591.921,00 berasal dari Penerbitan Faktur sebesar Rp63.452.165.985,00, Selisih Kurs Piutang sebesar Rp32.919.427,00 dan koreksi perubahan COA sebesar Rp43.506.509,00.
- Pengurangan Piutang Badan Usaha Bandar Udara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp68.304.859.599,00 berasal dari pembayaran faktur sebesar Rp52.062.002.219,00, Selisih Kurs Piutang sebesar Rp2.513.054,00, Pembatalan Faktur sebesar Rp16.102.309.817,00, Koreksi perubahan COA sebesar Rp43.506.509,00 dan TAK Kantor Pusat atas TIK sebesar Rp94.528.000,00.
- Mutasi Akumulasi Penyisihan Piutang sebesar Rp624.454.097,00 dibandingkan dengan Biaya Penyisihan Piutang (Rp56.552.707,00), terdapat selisih sebesar Rp681.006.804,00 yang terdiri dari Rp24.627.046,00 akibat

pembentukan cadangan piutang tidak lancar dan Rp656.379.758,00 akibat Surplus LO tahun lalu yang sudah dibiayakan.

D.1.4.4. Badan Usaha Pelabuhan

Piutang usaha Badan Usaha Pelabuhan Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.998.487.137,00 terdiri dari piutang usaha perusahaan sebesar Rp150.865.483.332,00 dan piutang usaha perorangan sebesar Rp1.133.003.805,00 sesuai dengan laporan keuangan, sedangkan sesuai dengan rekapitulasi daftar rincian piutang usaha sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai Piutang
1	Daftar Piutang FBMS	150.265.222.813,00
2	Daftar Piutang KSO non FBMS	1.733.264.324,00
	Total Piutang Usaha	151.998.487.137,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 8).

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Pelabuhan Batam sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Piutang Usaha	175.456.599.783,00	307.556.882.412,00	331.014.995.058,00	151.998.487.137,00
Jumlah	175.456.599.783,00	307.556.882.412,00	331.014.995.058,00	151.998.487.137,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(148.829.434.801,00)	55.183.672.742,00	47.385.718.461,00	(141.031.480.520,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	26.627.164.982,00			10.967.006.617,00

- Penambahan Piutang Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Batam sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp307.556.882.412,00 berasal dari penerbitan faktur sebesar Rp301.150.562.610,00, Pencatatan piutang sebesar Rp2.367.578.450,00, Koreksi pelunasan sebesar Rp9.346.000,00 dan Pencatatan selisih kurs sebesar Rp4.029.395.352,00.

- Pengurangan Piutang Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp331.014.995.058,00 berasal dari pelunasan faktur sebesar Rp322.843.576.182,00, Pelunasan piutang sebesar Rp2.368.516.954,00, koreksi faktur sebesar Rp756.995.732,00, pelunasan menggunakan dana penerimaan sementara sebesar Rp5.015.528.286,00 dan pencatatan selisih kurs sebesar Rp30.377.904,00.

Dari saldo Piutang Usaha Badan Usaha Pelabuhan tersebut, termasuk piutang KSO Non FBMS sebesar Rp1.733.264.324,00 terdiri dari Piutang IDR sebesar Rp573.267.758,00 dan USD 73.739,53 (Ekuivalen USD = Rp1.159.996.566,00).

D.1.4.5. Badan Usaha Rumah Sakit

Piutang Usaha Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.544.614.556,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Piutang Usaha Perusahaan (Pelanggan)	33.879.623.305,00
2	Piutang Usaha Perorangan (Kredit Umum)	5.664.991.251,00
Total Piutang		39.544.614.556,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 9).

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Rumah Sakit Batam sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
RSBP	55.614.224.829,00	189.734.232.092,00	205.803.842.365,00	39.544.614.556,00
Jumlah	55.614.224.829,00	189.734.232.092,00	205.803.842.365,00	39.544.614.556,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(9.280.565.156,00)	7.450.251.602,00	7.729.257.259,00	(9.559.570.813,00)
Nilai Buku Piutang Usaha	46.333.659.673,00			29.985.043.743,00

- Penambahan Piutang Usaha RSBP Batam sebesar Rp189.734.232.092,00 terdiri dari Penerbitan Faktur sebesar

Rp168.795.003.018,00, denda keterlambatan pembayaran piutang sebesar Rp50.655.628,00, Reklasifikasi dari piutang perorangan ke perusahaan sebesar Rp20.685.167.350,00, dan Koreksi Tambah Faktur sebesar Rp188.022.332,00.

Terdapat UJK BPK RI Tahun 2022 terdiri dari koreksi kurang catat piutang atas pendapatan konsesi PT Sebastian Citra Indonesia periode Oktober sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp9.666.775,00, koreksi kurang catat piutang atas pendapatan sewa air dan listrik periode Februari dan kartin Maret 2022 sebesar Rp831.861,00, mencatat pendapatan atas piutang kurang tagih kasir pada pasien RSBP sebesar Rp4.695.808,00 dan mencatat pendapatan atas piutang yang seharusnya ditagihkan ke pihak ketiga sebesar Rp189.320,00.

- Pengurangan Piutang Usaha Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp205.803.842.365,00 terdiri dari Pelunasan Pembayaran Piutang sebesar Rp128.604.937.488,00, Reklasifikasi Denda Keterlambatan Pembayaran Piutang sebesar Rp38.003.715,00, Reklasifikasi dari piutang perorangan ke perusahaan sebesar Rp20.685.167.350,00, Koreksi kurang faktur sebesar Rp59.490.408,00 dan Koreksi atas pelunasan piutang sebesar Rp56.416.243.404,00.

D.1.4.6. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Piutang Usaha Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum per 31 Desember 2022 sebesar Rp237.470.923,00 terdiri dari:

No	Jenis Piutang	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Air Baku	237.470.923,00
Total Piutang		237.470.923,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 10).

Mutasi Piutang Usaha pada Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
BU SPAM	4.328.609.358,00	54.611.283.155,00	58.702.421.590,00	237.470.923,00
Jumlah	4.328.609.358,00	54.611.283.155,00	58.702.421.590,00	237.470.923,00
Akumulasi Penyisihan Piutang	0,00			0,00
Nilai Buku Piutang Usaha	4.328.609.358,00			237.470.923,00

- Penambahan Piutang Usaha pada Badan Usaha SPAM sebesar Rp54.611.283.155,00 adalah berasal dari penerbitan faktur selama tahun 2022 atas tagihan pemakaian air baku dan sewa lahan untuk tower.
- Pengurangan Piutang Usaha pada Badan Usaha SPAM sebesar Rp58.702.421.590,00 berasal dari pelunasan faktur selama tahun 2022.

Penyisihan Piutang
Dari Kegiatan
Operasional
Rp167.594.446.680

D.1.6. Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional

Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp167.594.446.680,00 dan Rp175.508.488.770,00 dan yang terdiri dari:

Unit	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
Kantor Pusat	1.101.978.240,00	1.121.312.240,00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	1.818.143.283,00	1.569.448.652,00
Badan Usaha Bandar Udara	14.083.273.824,00	14.707.727.921,00
Badan Usaha Pelabuhan	141.031.480.520,00	148.829.434.801,00
Badan Usaha Rumah Sakit	9.559.570.813,00	9.280.565.156,00
Jumlah	167.594.446.680,00	175.508.488.770,00

Mutasi Penyisihan Piutang Dari Kegiatan Operasional Sebagai Berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Pusat - Akumulasi Penyisihan Piutang	(1.121.312.240,00)	19.334.000,00	0,00	(1.101.978.240,00)
Bu Fasling - Akumulasi Penyisihan Piutang	(1.569.448.652,00)	53.458.207,00	302.152.838,00	(1.818.143.283,00)
Bu Bandar Udara - Akumulasi Penyisihan Piutang	(14.707.727.921,00)	891.175.578,00	266.721.481,00	(14.083.273.824,00)
Bu Pelabuhan Laut - Akumulasi Penyisihan Piutang	(148.829.434.801,00)	55.183.672.742,00	47.385.718.461,00	(141.031.480.520,00)
Bu RSBP - Akumulasi Penyisihan Piutang	(9.280.565.156,00)	7.450.251.602,00	7.729.257.259,00	(9.559.570.813,00)
Jumlah	(175.508.488.770,00)	63.597.892.129,00	55.683.850.039,00	(167.594.446.680,00)

Penyisihan piutang dari kegiatan operasional per 31 Desember 2022 sebesar Rp167.594.446.680,00 dapat dirinci sebagai berikut:

Unit	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Umur Piutang (Bulan)				
		0%	25%	50%	75%	100%
Kantor Pusat	1.101.978.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.978.240,00
Badan Usaha Fasling	1.818.143.283,00	0,00	89.050.823,00	20.197.500,00	249.574.875,00	1.459.320.085,00
Badan Usaha Bandar Udara	14.083.273.824,00	0,00	95.038.263,00	19.532.534,00	95.179.684,00	13.873.523.343,00
Badan Usaha Pelabuhan	141.031.480.520,00	0,00	106.530.847,00	6.428.475.595,00	3.638.407.651,00	130.858.066.427,00
Badan Usaha Rumah Sakit	9.559.570.813,00	0,00	430.014.416,00	1.372.110.883,00	1.252.391.274,00	6.505.054.240,00
Jumlah	167.594.446.680,00	0,00	720.634.349,00	7.840.316.512,00	5.235.553.484,00	153.797.942.335,00

Persediaan
Rp14.223.002.748

D.1.7. Persediaan

Persediaan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp14.223.002.748,00 dan Rp16.847.704.623,00 terdiri dari:

Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)	31 Desember 2021 (Rp) (Audited)
Barang Konsumsi	2.306.947.960,00	2.780.950.795,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	7.972.000,00	45.483.000,00
Suku Cadang	495.186.100,00	982.501.608,00
Bahan Baku	469.493.450,00	212.955.550,00
Persediaan Lainnya	10.943.403.238,00	12.825.813.670,00
Jumlah	14.223.002.748,00	16.847.704.623,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 11).

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	2.780.950.795,00	12.165.686.463,00	12.639.689.298,00	2.306.947.960,00
Bahan untuk Pemeliharaan	45.483.000,00	336.207.500,00	373.718.500,00	7.972.000,00
Suku Cadang	982.501.608,00	581.942.100,00	1.069.257.608,00	495.186.100,00
Pita Cukai	0,00	3.373.875,00	3.373.875,00	0,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0,00	184.186.000,00	184.186.000,00	0,00
Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	0,00	49.961.000,00	49.961.000,00	0,00
Bahan Baku	212.955.550,00	924.295.500,00	667.757.600,00	469.493.450,00
Persediaan Lainnya	12.825.813.670,00	96.101.364.669,00	97.983.775.101,00	10.943.403.238,00
Jumlah	16.847.704.623,00	110.347.017.107,00	112.971.718.982,00	14.223.002.748,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.165.686.463,00 yang terdiri dari Pembelian Sebesar Rp11.982.547.897,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2022, Internal Transfer Masuk Sebesar Rp99.137.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk di Unit Pusat Data dan Sistem Informasi dari Badan Usaha Bandar Udara dengan Berita Acara No 05/A4.4/08/2022 dan di Unit Biro Umum ke Unit Direktorat Evaluasi dan Pengendalian dengan Berita Acara No 1/BA/A4.3/12/2022, Reklasifikasi Masuk sebesar Rp6.576.566,00 merupakan perbaikan Sakti atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di Badan Usaha RSBP, Kantor Perwakilan, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, dan Kantor Pusat Tahun 2022, Reklasifikasi dari Aset sebesar Rp72.500,00 merupakan Reklasifikasi Aset dari modul aset tetap Biro Umum ke modul Persediaan Biro

Umum dengan Berita Acara No 1/BA/A1.2/12/2022 dan Perolehan Lainnya sebesar Rp77.352.500,00 merupakan Bukti Kas yang belum tercatat dalam BAST Persediaan SAKTI 2022 dan direkam menggunakan Perolehan Lainnya yang terdapat di Badan Usaha Bandar Udara dengan nomro Berita Acara 1/A4.41/1/2023.

- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.639.689.298,00 yang terdiri dari Pemakaian sebesar Rp11.282.587.967,00 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi pada tahun Anggaran 2022, Internal Transfer Keluar sebesar Rp99.137.000,00 merupakan Transfer Internal Keluar dari Badan Usaha Bandar Udara ke Unit Pusat Data dan Sistem Informasi dengan Berita Acara Nomor 05/A4.4/08/2022 dan transfer dari Unit Biro Umum ke Unit Direktorat Evaluasi dan Pengendalian dengan Berita Acara no 1/BA/A4.3/12/2022, Barang Usang sebesar Rp11.170.500,00 merupakan barang rusak di Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dengan BA No 8/A4.7/12/2022, Reklasifikasi Keluar sebesar Rp6.276.566,00 merupakan perbaikan atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di unit Badan Usaha Rumah Sakit, Kantor Perwakilan, Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum, dan Kantor Pusat 2022, Hasil Opname Fisik sebesar Rp1.240.517.265,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa Persediaan pada akhir periode di gudang.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp336.207.500,00 terdiri dari

Pembelian sebesar Rp335.579.500,00 merupakan perolehan persediaan Bahan untuk Pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022, Internal Transfer Masuk sebesar Rp628.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk di Unit Pusat Data dan Sistem Informasi yang berasal dari Badan Usaha Bandar Udara dengan Nomor BA 05/A4.4/08/2022.

- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp373.718.500,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp297.066.000,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan untuk Pemeliharaan TA 2022, Internal Transfer Keluar sebesar Rp628.000,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari Badan Usaha Bandar Udara ke Unit Pusat Data dan Sistem Informasi dengan Nomor BA 05/A4.4/08/2022 dan hasil opname fisik sebesar Rp76.024.500,00 merupakan hasil opname fisik persediaan pada akhir periode di Gudang.

c. Suku Cadang

- Penambahan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp581.942.100,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp391.492.100,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022 dan Perolehan Lainnya sebesar Rp190.450.000,00 merupakan perolehan lainnya dikarenakan BAST Persediaan yang tidak direkam komitmen yang terdapat di Badan Usaha Rumah Sakit dengan nomor Berita Acara 01/PERS/01/2023.
- Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.069.257.608,00 terdiri dari Pemakaian

sebesar Rp1.069.103.608,00 merupakan pemakaian persediaan suku cadang pada TA 2022 dan Hasil Opname Fisik sebesar Rp154.000,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa Persediaan pada akhir periode di gudang.

d. Pita Cukai

- Penambahan Pita Cukai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.373.875,00 merupakan perolehan persediaan Pita Cukai yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2022.
- Pengurangan Pita Cukai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.373.875,00 terdiri dari pemakaian sebesar Rp 3.073.875,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022 dan Reklasifikasi Keluar sebesar Rp300.000,00 merupakan perbaikan pencatatan kode barang SAKTI yang ada di Unit Direktorat Evaluasi dan Pengendalian.

e. Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

- Penambahan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp184.86.000,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2022.
- Pengurangan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp184.186.000,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022.

f. Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial

- Penambahan Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial sebesar Rp49.961.000,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.
- Pengurangan Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial sebesar Rp49.961.000,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022.

g. Bahan Baku

- Penambahan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp924.295.500,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.
- Pengurangan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp667.757.600,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp482.219.050,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022 dan Hasil Opname Fisik sebesar Rp185.538.550,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa persediaan pada akhir periode di gudang.

h. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp96.101.364.669,00 terdiri dari pembelian sebesar Rp1.040.701.019,00 merupakan perolehan persediaan lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022, Reklasifikasi Masuk – Obat *Expired* sebesar Rp710.156.265,00 merupakan inputan nilai obat *Expired* setiap bulan selama TA 2022 dan pembelian – Obat Padat sebesar Rp45.444.196.364,00 merupakan Pembelian Persediaan OBAT Padat di RSBP Batam, Reklasifikasi Masuk – Obat Padat sebesar

Rp48.906.311.021,00 merupakan Reklasifikasi Masuk Obat Padat pada Badan Usaha Rumah Sakit.

- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp97.983.775.101,00 terdiri dari pemakaian sebesar Rp48.281.225.751,00 terdiri dari hasil inputan keluar saldo persediaan Obat setiap akhir periode menyesuaikan dengan aplikasi My Hospital di UAPKPB RSBP Batam sebesar Rp46.962.303.950,00 dan pemakaian persediaan lainnya (Non Obat) sebesar Rp1.318.921.801,00, Barang Rusak sebesar Rp71.635.064,00 merupakan Barang Rusak berupa Obat-obatan yang telah kadaluarsa (*Expired*) pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit selama TA 2022 , Reklasifikasi Keluar-Obat *Expired* sebesar Rp329.074.919,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di unit Rumah Sakit untuk menyesuaikan saldo Obat *Expired* di akhir periode sesuai aplikasi My Hospital UAPKPB RSBP Batam, Reklasifikasi Keluar – Obat Padat sebesar Rp49.287.392.367,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di Unit Rumah Sakit untuk menyesuaikan saldo obat padat di akhir periode sesuai aplikasi My Hospital UPAKPB RSBP Batam, Hasil Opname Fisik sebesar Rp14.447.000,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa Persediaan pada akhir periode di Gudang.

Rincian persediaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.223.002.748,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	1.097.455.550,00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	205.340.900,00
3	Badan Usaha Bandar Udara	1.084.769.500,00
4	Badan Usaha Pelabuhan	240.673.550,00
5	Badan Usaha Rumah Sakit	11.573.434.338,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	15.859.310,00
7	Badan Usaha SPAM	5.469.600,00
Jumlah		14.223.002.748,00

D.1.6.1. Kantor Pusat

Persediaan Kantor Pusat per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.097.455.550,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	1.097.141.550,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	314.000,00
Jumlah		1.097.455.550,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 pada Kantor Pusat adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	1.278.466.530,00	7.335.898.282,00	7.517.223.262,00	1.097.141.550,00
Bahan untuk pemeliharaan	525.000,00	8.757.000,00	8.968.000,00	314.000,00
Pita Cukai	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0,00	184.186.000,00	184.186.000,00	0,00
Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial	0,00	49.961.000,00	49.961.000,00	0,00
Bahan Baku	0,00	44.397.000,00	44.397.000,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	349.631.000,00	349.631.000,00	0,00
Jumlah	1.278.991.530,00	7.344.655.282,00	7.526.191.262,00	1.097.455.550,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.335.898.282,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp7.235.566.182,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBPTA Tahun 2022, Internal Transfer Masuk sebesar Rp99.137.000,00 terdiri dari Internal Transfer Masuk sebesar Rp99.064.500,00 merupakan Internal Transfer Masuk di Unit Pusat Data dan Sistem Informasi dari Badan Usaha Bandar Udara dengan Berita Acara No

05/A4.4/08/2022 dan Internal Transfer Masuk sebesar Rp72.500,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari Unit Biro Umum ke Unit Direktorat Evaluasi dan Pengendalian dengan Berita Acara No 1/BA/A4.3/12/2022, Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.122.600,00 merupakan perbaikan SAKTI atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di Kantor Pusat Tahun 2022, Reklasifikasi dari Aset sebesar Rp72.500,00 merupakan Reklasifikasi Aset dari Modul Aset Tetap Biro Umum ke Modul Persediaan Biro Umum dengan Berita Acara No 1/BA/A1.2/12/2022.

- Pengurangan Barang Konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp7.517.223.262,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp6.749.247.862,00 merupakan pemakaian persediaan pada tahun Anggaran 2022, Internal Transfer Keluar sebesar Rp72.500,00 merupakan transfer dari Unit Biro Umum ke Unit Direktorat Evaluasi dan Pengendalian dengan Berita Acara No 1/BA/A4.3/12/2022, Reklasifikasi Keluar sebesar Rp822.600,00 merupakan perbaikan atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di Kantor Pusat Tahun 2022, Hasil Opname Fisik Sebesar Rp767.080.300,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa Persediaan pada akhir periode di gudang.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.757.000,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp8.129.000,00 merupakan perolehan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2022, Internal Transfer Masuk sebesar Rp628.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk di

Unit Pusat Data dan Sistem Informasi yang berasal dari Badan Usaha Bandar Udara dengan Nomor BA 05/A4.4/08/2022.

- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.968.000,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp8.263,000,00 merupakan pemakaian persediaan bahan untuk pemeliharaan TA 2022, Hasil Opname Fisik Sebesar Rp705.000,00 merupakan Hasil Opname Fisik persediaan pada akhir periode di gudang.

c. Pita Cukai

- Penambahan Pita Cukai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.180.000,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2022.
- Pengurangan Pita Cukai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.180.000,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp2.880.000,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022 dan Reklasifikasi Keluar sebesar Rp300.000,00 merupakan perbaikan pencatatan kode barang SAKTI yang ada di Unit Direktorat Evaluasi dan Pengendalian.

d. Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat

- Penambahan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp184.186.000,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2022.
- Pengurangan Peralatan dan Mesin untuk Dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat sampai dengan 31

Desember 2022 sebesar Rp184.186.000,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022.

e. Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial

- Penambahan Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp49.961.000,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.
- Pengurangan Persediaan Dalam Rangka Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp49.961.000,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022.

f. Bahan Baku

- Penambahan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp44.397.000,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.
- Pengurangan Bahan Baku sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp44.397.000,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022.

g. Persediaan Lainnya

- Penambahan Persediaan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp349.631.000,00 merupakan perolehan Persediaan Lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.
- Pengurangan Persediaan Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp349.631.000,00 merupakan pemakaian Persediaan Lainnya (Non Obat).

D.1.6.2. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Persediaan Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2022 sebesar Rp205.340.900,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	149.816.000,00
2	Barang untuk Pemeliharaan	5.474.000,00
3	Bahan Baku	30.391.400,00
4	Persediaan Lainnya	19.659.500,00
Jumlah		205.340.900,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	159.650.700,00	933.046.500,00	942.881.200,00	149.816.000,00
Bahan untuk pemeliharaan	40.285.000,00	223.884.000,00	258.695.000,00	5.474.000,00
Bahan Baku	54.317.600,00	251.554.500,00	275.480.700,00	30.391.400,00
Persediaan Lainnya	14.917.000,00	97.881.000,00	93.138.500,00	19.659.500,00
Jumlah	269.170.300,00	1.506.366.000,00	1.570.195.400,00	205.340.900,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp933.046.500,00 sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2022.
- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp942.881.200,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp834.791.900,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022, Barang Usang sebesar Rp11.170.500,00 merupakan barang rusak di Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan dengan BA No 8/A4.7/12/2022, Hasil Opname Fisik sebesar Rp96.918.800,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa Persediaan pada akhir periode di Gudang.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp223.884.000,00 sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan perolehan persediaan bahan untuk pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp258.695.000,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp219.548.000,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan untuk Pemeliharaan pada TA 2022, Hasil Opname Fisik sebesar Rp39.147.000,00 merupakan Hasil Opname Fisik persediaan pada akhir periode di Gudang.

c. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sebesar Rp251.554.500,00 sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan perolehan persediaan bahan baku yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.
- Pengurangan bahan baku sebesar Rp275.480.700,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp249.817.600,00 merupakan pemakaian persediaan sampai dengan 31 Desember 2022, Hasil Opname Fisik sebesar Rp25.663.100,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa persediaan pada akhir periode di gudang.

d. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sebesar Rp97.881.000,00 sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan perolehan persediaan lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.

- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp93.138.500,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp78.691.500,00 merupakan pemakaian Persediaan Lainnya (Non Obat), Hasil Opname Fisik sebesar Rp14.447.000,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa persediaan pada akhir periode di gudang.

D.1.6.3. Badan Usaha Bandar Udara

Persediaan BUBU Hang Nadim per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.084.769.500,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	643.483.450,00
2	Bahan untuk Pemeliharaan	2.184.000,00
3	Bahan Baku	439.102.050,00
Jumlah		1.084.769.500,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 pada BUBU adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	963.158.200,00	1.019.781.200,00	1.339.455.950,00	643.483.450,00
Bahan untuk pemeliharaan	4.673.000,00	102.762.500,00	105.251.500,00	2.184.000,00
Bahan Baku	158.637.950,00	628.344.000,00	347.879.900,00	439.102.050,00
Jumlah	1.126.469.150,00	1.750.887.700,00	1.792.587.350,00	1.084.769.500,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sebesar Rp1.019.781.200,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp942.428.700,00 merupakan Pembelian persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBPA TA 2022 dan Perolehan Lainnya sebesar Rp77.352.500,00 merupakan bukti kas yang belum tercatat dalam BAST Persediaan SAKTI 2022 dan direkam

menggunakan Perolehan Lainnya yang terdapat di Badan Usaha Bandar Udara dengan nomor Berita Acara 1/A4.41/1/2023.

- Pengurangan barang konsumsi sebesar Rp1.339.455.950,00 terdiri dari pemakaian sebesar Rp882.479.150,00 merupakan pemakaian persediaan pada TA 2022, Internal Transfer Keluar sebesar Rp99.064.500,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari Badan Usaha Bandar Udara ke Unit Pusat Data dan Sistem Informasi dengan Berita Acara No 05/A4.4/08/2022, Hasil Opname Fisik sebesar Rp357.912.300,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa Persediaan pada akhir periode di gudang.

b. Bahan Untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp102.762.500,00 merupakan perolehan persediaan Bahan untuk Pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2022.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp105.251.500,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp68.451.000,00 merupakan pemakaian persediaan Bahan untuk Pemeliharaan TA 2022, Internal Transfer Keluar sebesar Rp628.000,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari Badan Usaha Bandar Udara ke Unit Pusat Data dan Sistem Informasi dengan nomor BA 05/A4.4/08/2022, Hasil Opname Fisik sebesar Rp36.172.500,00 merupakan hasil Opname Fisik persediaan pada akhir periode di gudang.

c. Bahan Baku

- Penambahan bahan baku sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp628.344.000,00 merupakan pembelian persediaan Bahan Baku yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.
- Pengurangan bahan baku sebesar Rp347.879.900,00 terdiri dari pemakaian sebesar Rp188.004.450,00 merupakan pemakaian Persediaan TA 2022, Hasil Opname Fisik sebesar Rp159.875.450,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa Persediaan pada akhir periode di gudang.

D.1.6.4. Badan Usaha Pelabuhan

Persediaan Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp240.673.550,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	240.673.550,00
Jumlah		240.673.550,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 pada Badan Usaha Pelabuhan adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	250.385.100,00	940.357.100,00	950.068.650,00	240.673.550,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	804.000,00	804.000,00	0,00
Jumlah	250.385.100,00	941.161.100,00	950.872.650,00	240.673.550,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp940.357.100,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBP 2022.
- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp950.068.650,00 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi TA 2022.

b. Bahan untuk Pemeliharaan

- Penambahan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp804.000,00 merupakan perolehan persediaan Bahan untuk Pemeliharaan yang berasal dari sumber dana PNBP 2022.
- Pengurangan bahan untuk pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp804.000,00 merupakan pemakaian persediaan bahan untuk pemeliharaan TA 2022.

D.1.6.5. Badan Usaha Rumah Sakit

Persediaan Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.573.434.338,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Audited)
1	Barang Konsumsi	155.008.500,00
2	Suku Cadang	494.682.100,00
4	Persediaan Lainnya	10.923.743.738,00
Jumlah		11.573.434.338,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 pada Badan Usaha Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	114.304.000,00	1.752.043.881,00	1.711.339.381,00	155.008.500,00
Suku Cadang	982.347.608,00	580.682.100,00	1.068.347.608,00	494.682.100,00
Pita Cukai	0,00	193.875,00	193.875,00	0,00
Persediaan Lainnya	12.810.896.670,00	95.653.852.669,00	97.541.005.601,00	10.923.743.738,00
Jumlah	13.907.548.278,00	97.986.772.525,00	100.320.886.465,00	11.573.434.338,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.752.043.881,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp1.750.594.915,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022 dan Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.448.966,00 merupakan perbaikan Sakti atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di Badan Usaha RSBP Tahun 2022.
- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.711.339.381,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp1.709.890.415,00 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi TA 2022, Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.448.966,00 merupakan perbaikan atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di Badan Usaha RSBP Tahun 2022.

b. Suku Cadang

- Penambahan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp580.682.100,00 terdiri dari pembelian sebesar Rp390.232.100,00 merupakan perolehan persediaan suku cadang yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022, Perolehan Lainnya sebesar

Rp190.450.000,00 merupakan Perolehan Lainnya dikarenakan BAST Persediaan yang tidak direkam komitmen yang terdapat di Badan Usaha Rumah Sakit dengan nomor Berita Acara 01/PERS/01/2023.

- Pengurangan suku cadang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.068.347.608,00 merupakan pemakaian persediaan Suku Cadang TA 2022.

c. Pita Cukai

- Penambahan Pita Cukai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp193.875,00 merupakan perolehan persediaan yang berasal dari sumber dana PNBP TA 2022.
- Pengurangan Pita Cukai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp193.875,00 merupakan pemakaian persediaan Pita Cukai TA 2022.

d. Persediaan Lainnya

- Penambahan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp95.653.852.669,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp593.189.019,00 merupakan perolehan Persediaan Lainnya (Non Obat) yang berasal dari sumber dana PNBP, Reklasifikasi Masuk – Obat *Expired* sebesar Rp710.156.265,00 merupakan inputan Nilai Obat *Expired* setiap bulan selama TA 2022, Pembelian – Obat Padat sebesar Rp45.444.196.364,00 merupakan Pembelian persediaan Obat Padat di RSBP Batam, Reklasifikasi Masuk – Obat Padat sebesar Rp48.906.311.021,00 merupakan Reklasifikasi Masuk Obat Padat pada Badan Usaha Rumah Sakit.
- Pengurangan persediaan lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp97.541.005.601,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp47.852.903.251,00 yaitu sebesar Rp46.962.303.950,00 berasal dari inputan keluar Saldo

Persediaan OBAT setiap akhir periode menyesuaikan dengan aplikasi My Hospital di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit, sebesar Rp890.599.301,00 merupakan pemakaian Persediaan Lainnya (Non Obat), Barang Rusak sebesar Rp71.635.064,00 merupakan Barang Rusak berupa Obat-Obatan yang telah kadaluarsa (*Expired*) pada UAPKPB Rumah Sakit BP Batam selama TA 2022, Reklasifikasi Keluar – Obat *Expired* sebesar Rp329.074.919,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di Unit Rumah Sakit untuk menyesuaikan saldo Obat *Expired* di akhir periode sesuai aplikasi My Hospital UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit, Reklasifikasi Keluar – Obat Padat sebesar Rp49.287.392.367,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di Unit Rumah Sakit untuk menyesuaikan saldo Obat Padat di akhir periode sesuai aplikasi My Hospital UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit.

D.1.6.6. Kantor Perwakilan Jakarta

Persediaan Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.859.310,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	15.355.310,00
2	Suku Cadang	504.000,00
Jumlah		15.859.310,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 pada Kantor Perwakilan Jakarta adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	14.986.265,00	85.017.500,00	84.648.455,00	15.355.310,00
Suku Cadang	154.000,00	1.260.000,00	910.000,00	504.000,00
Jumlah	15.140.265,00	86.277.500,00	85.558.455,00	15.859.310,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp85.017.500,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp81.807.500,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBPA TA 2022, Reklasifikasi Masuk sebesar Rp3.210.000,00 merupakan perbaikan Sakti atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di Kantor Perwakilan Tahun 2022.
- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp84.648.455,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp62.832.590,00 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi TA 2022, Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.210.000,00 merupakan perbaikan atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di Kantor Perwakilan Tahun 2022, Hasil Opname Fisik sebesar Rp18.605.865,00 merupakan pemakaian persediaan berdasarkan Opname Fisik sisa persediaan pada akhir periode di gudang.

b. Suku Cadang

- Penambahan Suku Cadang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.260.000,00 merupakan perolehan persediaan Suku Cadang yang berasal dari sumber dana PNBPA TA 2022.
- Pengurangan Suku Cadang sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp910.00,00 terdiri dari Pemakaian sebesar Rp756.000,00 merupakan pemakaian persediaan TA 2022 dan Hasil Opname Fisik sebesar Rp154.000,00 merupakan pemakaian persediaan Suku Cadang berdasarkan Opname Fisik sisa Persediaan pada akhir periode di gudang.

D.1.6.7. Badan Usaha SPAM

Persediaan Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.469.600,00 terdiri dari:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2022 (Rp) (Audited)
1	Barang Konsumsi	5.469.600,00
Jumlah		5.469.600,00

Mutasi penambahan dan pengurangan persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 pada Kantor Perwakilan Jakarta adalah sebagai berikut:

Jenis Persediaan	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2021 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Barang Konsumsi	0,00	99.542.000,00	94.072.400,00	5.469.600,00
Jumlah	0,00	99.542.000,00	94.072.400,00	5.469.600,00

a. Barang Konsumsi

- Penambahan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp99.542.000,00 terdiri dari Pembelian sebesar Rp98.747.000,00 merupakan perolehan persediaan Barang Konsumsi yang berasal dari sumber dana PNBK TA 2022, Reklasifikasi Masuk sebesar Rp795.000,00 merupakan perbaikan SAKTI atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Tahun 2022.
- Pengurangan barang konsumsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp94.072.400,00 terdiri dari pemakaian sebesar Rp93.277.400,00 merupakan pemakaian persediaan Barang Konsumsi TA 2022, reklasifikasi keluar sebesar Rp795.000,00 merupakan perbaikan atas kesalahan pencatatan kode barang yang terdapat di Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Tahun 2022.

Aset Tetap
Rp52.745.924.990.570

D.2. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp52.745.924.990.570,00 dan Rp52.928.779.723.338,00 terdiri dari:

Uraian Aset Tetap	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Tanah	39.995.077.574.175,00	41.907.260.224.875,00
Peralatan dan Mesin	1.515.345.456.774,00	1.874.091.635.480,00
Gedung dan bangunan	3.609.752.504.035,00	3.509.429.070.007,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	10.911.853.838.741,00	11.506.196.976.816,00
Aset tetap lainnya	10.860.155.632,00	9.637.618.122,00
Konstruksi dalam pengerjaan	779.654.087.090,00	767.370.239.040,00
Aset Konsesi Jasa	3.314.318.784.424,00	0,00
Properti Investasi	122.068.810.000,00	0,00
Jumlah Aset Tetap (I)	60.258.931.210.871,00	59.573.985.764.340,00
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	(1.031.800.506.563,00)	(1.204.858.087.325,00)
Gedung dan bangunan	(844.782.257.603,00)	(777.290.335.679,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(4.621.443.653.878,00)	(4.662.469.225.998,00)
Aset tetap lainnya	(618.647.000,00)	(588.392.000,00)
Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00
Aset Konsesi Jasa	(1.013.775.631.527,00)	0,00
Properti Investasi	(585.523.730,00)	0,00
Jumlah Akumulasi Penyusutan (II)	(7.513.006.220.301,00)	(6.645.206.041.002,00)
Tanah	39.995.077.574.175,00	41.907.260.224.875,00
Peralatan dan Mesin	483.544.950.211,00	669.233.548.155,00
Gedung dan bangunan	2.764.970.246.432,00	2.732.138.734.328,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.290.410.184.863,00	6.843.727.750.818,00
Aset tetap lainnya	10.241.508.632,00	9.049.226.122,00
Konstruksi dalam pengerjaan	779.654.087.090,00	767.370.239.040,00
Aset Konsesi Jasa	2.300.543.152.897,00	0,00
Properti Investasi	121.483.286.270,00	0,00
Nilai Buku Aset tetap (I-II)	52.745.924.990.570,00	52.928.779.723.338,00

Mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tanah
Rp39.995.077.574.175

D.2.1. Tanah

Saldo tanah Badan Pengusahaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp39.995.077.574.175,00 dan Rp41.907.260.224.875,00 (Rincian Tanah dapat dilihat pada lampiran 12).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah sebesar Rp41.907.260.224.875,00 dengan mutasi tambah sebesar Rp18.145.910.034.575,00 dan mutasi kurang Rp20.058.092.685.275,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		41.907.260.224.875,00
Mutasi Tambah		
-	Transfer Masuk	12.788.570.174.000,00
-	Perolehan Lainnya	101.615.200.000,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	1.832.906.575,00
-	Perolehan Lainnya - UJK BPK RI	2.192.249.518.000,00
-	Perubahan Aset Kemitraan ke BMN - UJK BPK RI	2.293.864.718.000,00
-	Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN - UJK BPK RI	767.777.518.000,00
Total Mutasi Tambah		18.145.910.034.575,00
Mutasi Kurang		
-	Transfer Keluar	4.975.689.700,00
-	Internal Transfer Keluar	12.788.570.174.000,00
-	Reklasifikasi Keluar	1.832.906.575,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	2.293.864.718.000,00
-	Hibah (Keluar)	4.450.000.000,00
-	Koreksi pencatatan nilai/kuantitas - UJK BPK RI	2.192.249.518.000,00
-	Perubahan BMN ke aset konsesi jasa -UJK BPK RI	2.652.163.468.000,00
-	Perubahan BMN ke PI - UJK BPK RI	119.986.211.000,00
Total Mutasi Kurang		20.058.092.685.275,00
Total Saldo Akhir		39.995.077.574.175,00

Mutasi Tambah:

- Internal Transfer Masuk sebesar Rp12.788.570.174.000,00 terdiri dari:
- Sebesar Rp24.409.688.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB BUBU Hang Nadim ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA-04/AP-00/7/2022 dan BA-05/AP-00/8/2022.
- Sebesar Rp12.764.160.486.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan

Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022.

- Perolehan Lainnya sebesar Rp101.615.200.000,00 merupakan pencatatan Perolehan Lainnya pada UAPKPB Badan Usaha BUBU Hang Nadim atas penerbitan PL No. 221062032.
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp1.832.906.575,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan Sesuai dengan nomor bukti HPL/Kem-ATR/BPN VIII
- Perolehan Lainnya – UJK BPK Sebesar Rp2.192.249.518.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA 2022 Atas Koreksi Pencatatan Atas Tanah disebabkan Koreksi Pemecahan NUP dari 1 menjadi 2 NUP atas tanah yang diserahkan ke PT Bandara Internasional Batam dan Tanah yang masih tercatat sebagai Aset Tetap UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
- Perubahan Aset Kemitraan ke BMN – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp2.293.864.718.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi dari Aset Kemitraan Menjadi Aset Tanah pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
- Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp767.777.518.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi dari Aset

Konsesi Jasa Menjadi Aset Tanah pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara

Mutasi Kurang:

- Transfer keluar sebesar Rp4.975.689.700,00 Merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke Kementerian Pertahanan Sesuai dengan Berita Acara BA 185/A1/12/2022
- Internal Transfer Keluar sebesar Rp12.788.570.174.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp24.409.688.000,00 Merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB BUBU Hang Nadim ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA-04/AP-00/7/2022 dan BA-05/AP-00/8/2022.
 - Sebesar Rp12.764.160.486.000,00 Merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022.
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp1.832.906.575,00 Merupakan Reklasifikasi Keluar pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara BA 35/BA/A3.1/12/2022, BA29A/BA/A3.1/12/2022 dan BA33/BA/A3.1/12/2022
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp2.293.864.718.000,00 Merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022

- Hibah Keluar sebesar Rp4.450.000.000,00 Merupakan Hibah Keluar ke Pemko Batam pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan SK Kepala BP Batam No. 123 tahun 2022
- Koreksi Pencatatan – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp2.192.249.518.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi Pencatatan Atas Tanah disebabkan Koreksi Pemecahan NUP dari 1 menjadi 2 NUP atas tanah yang diserahkan ke PT. Bandara Internasional Batam dan Tanah yang masih tercatat sebagai Aset Tetap UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
- Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp2.652.163.468.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp2.293.864.718.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset Tanah menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (dengan PT. Bandara Internasional Batam) pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
 - Sebesar Rp358.298.750.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA 2022 Atas Reklasifikasi Aset Tanah (berupa Tanah Bangunan Terminal Laut pada Pelabuhan PT. SYNERGY THARADA, PT. INDO DHARMA CORPORA dan PT. SARANA CITRANUSA KABIL) menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan
- Perubahan BMN ke Properti Investasi – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp119.986.211.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi kurang atas

Tanah berupa tanah bangunan Kuningan Guest House yang tercatat sebagai Aset Properti Investasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta

Peralatan dan mesin
Rp1.515.345.456.774

D.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.515.345.456.774,00 dan Rp1.874.091.635.480,00. (Rincian Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada lampiran 13).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp1.874.091.635.480,00 dengan mutasi tambah sebesar Rp920.373.131.038,00 dan mutasi kurang sebesar Rp1.279.119.309.744,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		1.874.091.635.480,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	30.000.999.789,00
-	Perolehan Lainnya	19.921.016.804,00
-	Internal Transfer Masuk	476.383.766.988,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	196.696.000,00
-	Reklasifikasi Masuk	3.505.625.000,00
-	Koreksi Susulan	119.911.976,00
-	Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan	1.167.000,00
-	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	24.092.857,00
-	Perolehan Lainnya - UJK BPK RI	2.021.335.000,00
-	Koreksi pencatatan nilai/kuantitas - UJK BPK RI	971.550.030,00
-	Reklasifikasi aset konsesi jasa ke BMN - UJK BPK RI	387.226.969.594,00
Total Mutasi Tambah		920.373.131.038,00
Mutasi Kurang		
-	Koreksi Pencatatan	8.707.983.465,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	387.228.136.594,00
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	12.860.557.232,00
-	Internal Transfer Keluar	476.383.766.988,00
-	Koreksi Susulan	10.810.000,00
-	Reklasifikasi Keluar	3.555.625.000,00
-	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	148.500.000,00
-	Hibah Keluar	974.625.871,00
-	Koreksi pencatatan nilai berkurang - UJK BPK RI	1.000.000,00
-	Koreksi pencatatan - UJK BPK RI	2.021.335.000,00
-	Perubahan BMN ke aset konsesi jasa - UJK BPK RI	387.226.969.594,00
Total Mutasi Kurang		1.279.119.309.744,00
Total Saldo Akhir		1.515.345.456.774,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp30.000.999.789,00 merupakan perolehan aset yang berasal dari pendanaan PNBK TA 2022.
- Perolehan Lainnya sebesar Rp19.921.016.804,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp2.928.125.000,00 Merupakan pencatatan Perolehan Lainnya atas Mutasi tambah pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan nomor Bukti Kas 2022/01/002348
 - Sebesar Rp6.128.022.308,00 Merupakan Perolehan Lainnya yang diperoleh dari pendetilan BAST tercatat dengan kuantitas 1 (satu) di UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022
 - Sebesar Rp679.972.078,00 Merupakan Perolehan Lainnya yang diperoleh dari pendetilan BAST tercatat dengan kuantitas 1 (satu) di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit berasal dari Bukti Kas RSOB/2022/12/1000 dan sesuai dengan Berita Acara BA 35/A4.6/12/2022
 - Sebesar Rp3.063.676.031,00 Merupakan pencatatan Perolehan Lainnya yang berasal dari Inspeksi Pencatatan Belanja SPAM pada UAPKPB Badan Usaha Pengelolaan Air minum sesuai dengan Berita Acara BA 18/A4.8/10/2022 dan BA 27/A4.8/AL.01/12/2022
 - Sebesar Rp2.021.335.000,00 Merupakan pencatatan Perolehan Lainnya yang berasal dari PPO dengan BANK BTN pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara 2076/BTM.II/FSU/XII/2022 (PPO)
 - Sebesar Rp5.099.886.387,00 Merupakan Perolehan Lainnya yang diperoleh dari pendetilan BAST tercatat dengan kuantitas 1 (satu) di UAPKPB Direktorat

Pengamanan Aset berasal dari Bukti Kas RSOB/2022/12/1000 dan sesuai dengan Berita Acara BA 02/A3.4/AP.01.01/12/2022

- Internal Transfer Masuk sebesar Rp476.383.766.988,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp39.835.143.744,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022
 - Sebesar Rp14.108.045.220,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB BUBU Hang Nadim ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA-04/AP-00/7/2022 dan BA-05/AP-00/8/2022.
 - Sebesar Rp29.676.000,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022.
 - Sebesar Rp382.996.088.546,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022.
 - Sebesar Rp32.255.400,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 57/A4.5/12/2022
 - Sebesar Rp4.151.808.611,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB BUBU Hang Nadim ke UAPKPB

Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022

- Sebesar Rp10.131.330.919,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB BUBU Hang Nadim Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022
- Sebesar Rp9.851.162.622,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Biro Umum UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/6/2022
- Sebesar Rp15.143.887.926,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Biro Umum UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A1.1/7/2022
- Sebesar Rp104.368.000,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 7/A4.7/11/2022
- Penyelesaian Pembangunan dengan KDP sebesar Rp196.696.000,00 merupakan penyelesaian pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan sesuai dengan Berita Acara BA 09/A3.2/12/2022.
- Reklasifikasi masuk sebesar Rp3.505.625.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp568.125.000,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA 03/A1.1/07/2022.

- Sebesar Rp2.937.500.000,00 merupakan reklasifikasi masuk di UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 05/A1.1/12/2022
- Koreksi susulan sebesar Rp119.911.976,00 merupakan Koreksi Susulan disebabkan Kesalahan pencatatan pada UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan Berita Acara BA 18/A4.8/10/2022
- Perolehan Aset Tetap dari Reklasifikasi Aset Kemitraan sebesar Rp1.167.000,00 Merupakan Reklasifikasi Aset Kemitraan Ke BMN pada UAPKPB BUBU Hang Nadim sesuai dengan Berita Acara BA. No /A4.1/AP.00/11/2022
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan sebesar Rp24.092.857,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp5.072.857,00 Merupakan Penggunaan Kembali BMN yang sudah Dihentikan pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA 6/A4.7/10/2022
 - Sebesar Rp19.020.000,00 Merupakan Penggunaan Kembali BMN yang sudah Dihentikan pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA 45/A4.5/12/2022
- Perolehan Lainnya – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp2.021.335.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi Tambah Peralatan dan Mesin disebabkan tidak terbentuk penyusutan reguler pada UAPKPB Biro Umum berupa Station Wagon
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp971.550.030,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp30,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA 2022 Atas Koreksi tambah peralatan dan mesin atas tindak lanjut data Anomali yang disebabkan kesalahan Input Normalisasi pada saat koreksi data anomali TA.2021 pada UAPKPB Biro Umum
- Sebesar Rp970.550.000,00 Koreksi tambah Peralatan dan Mesin pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Penyusunan Kajian Teknis dan Desain Rinci Reception Facility (RF) Terminal Batu Ampar Curah Cair Kabil dan DED Desain Revitalisasi Dan Penataan Rak Pipa Terpadu Pelabuhan Curah Cair Kabil-Batam yang dikapitalisasi ke pekerjaan fisik
- Sebesar Rp1.000.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI TA 2022 Atas Koreksi tambah peralatan dan mesin atas tindak lanjut data Anomali yang disebabkan kesalahan Input Normalisasi pada saat koreksi data anomali TA.2021 pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta

Mutasi Kurang:

- Koreksi Pencatatan sebesar Rp8.707.983.465,00
 - Sebesar Rp2.928.125.000,00 merupakan Koreksi Pencatatan di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA 04/A1.1/07/2022
 - Sebesar Rp679.972.078,00 Merupakan Koreksi Pencatatan disebabkan pendetilan BAST tercatat dengan kuantitas 1 (satu) di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit Sesuai dengan Berita Acara BA 35/A4.6/12/2022
 - Sebesar Rp5.099.886.387,00 Merupakan Koreksi Pencatatan disebabkan pendetilan BAST tercatat dengan

kuantitas 1 (satu) di UAPKPB Direktorat Pengamanan Aset
Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A3.4/AP.01.01/12/2022

- Penghentian Aset dari penggunaan sebesar Rp12.860.557.232,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp3.547.326.336,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan Sesuai dengan Berita Acara BA/11/A4.5/5/2022
 - Sebesar Rp1.686.052.744,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA 03/A1.1/11/2022
 - Sebesar Rp6.076.511.999,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit Sesuai dengan Berita Acara BA 13/A4.6/6/2022
 - Sebesar Rp579.392.849,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Sesuai dengan Berita Acara BA 6/A4.7/10/2022
 - Sebesar Rp3.738.500,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 176/A4.8/10/2022
 - Sebesar Rp967.534.804,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan Sesuai dengan Berita Acara BA 46/A4.5/11/2022
- Internal Transfer Keluar sebesar Rp476.383.766.988,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp39.835.143.744,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Pusat Data

- dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022
- Sebesar Rp29.676.000,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022
 - Sebesar Rp14.108.045.220,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB BUBU Hang Nadim ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi sesuai dengan Berita Acara BA-04/AP-00/7/2022 dan BA-05/AP-00/8/2022
 - Sebesar Rp382.996.088.546,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
 - Sebesar Rp32.255.400,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 57/A4.5/12/2022
 - Sebesar Rp9.851.162.622,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Biro Umum UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/6/2022
 - Sebesar Rp15.143.887.926,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Biro Umum UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A1.1/7/2022
 - Sebesar Rp10.131.330.919,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke

UAPKPB BUBU Hang Nadim Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022

- Sebesar Rp4.151.808.611,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB BUBU Hang Nadim ke UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022
- Sebesar Rp104.368.000,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 7/A4.7/11/2022
- Koreksi Susulan sebesar Rp10.810.000,00 merupakan Koreksi Susulan disebabkan Kesalahan pencatatan pada UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan Berita Acara BA 18/A4.8/10/2022
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.555.625.000,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp568.125.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA 03/A1.1/07/2022
 - Sebesar Rp2.987.500.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA05/A1.1/12/2022
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp387.228.136.594,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp148.500.000,00 merupakan Koreksi Pencatatan nilai Berkurang disebabkan

Kesalahan pencatatan pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022

- Hibah Keluar sebesar Rp974.625.871,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp557.154.000,00 merupakan Hibah Keluar ke Pemko Batam pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan SK Kepala BP Batam No. 125 tahun 2022
 - Sebesar Rp417.471.871,00 merupakan hibah keluar ke Pemko Batam pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan SK Kepala BP Batam No. 123 tahun 2022
- Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp1.000.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi Kurang peralatan dan mesin atas tindak lanjut data Anomali yang disebabkan kesalahan Input Normalisasi pada saat koreksi data anomali TA.2021 pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta
- Koreksi Pencatatan – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp2.021.335.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi Kurang Peralatan dan Mesin disebabkan tidak terbentuk penyusutan reguler pada UAPKPB Biro Umum berupa Station Wagon
- Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp387.226.969.594,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset Peralatan dan Mesin menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (dengan PT. Bandara Internasional Batam) pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara

*Gedung dan
Bangunan
Rp3.609.752.504.035*

D.2.3. Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp3.609.752.504.035,00

dan Rp3.509.429.070.007,00. (Rincian gedung dan bangunan dapat dilihat pada lampiran 14).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp3.509.429.070.007,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp833.394.641.705,00 dan mutasi kurang sebesar Rp733.071.207.677,00.

Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		3.509.429.070.007,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	863.018.000,00
-	Internal Transfer Masuk	206.910.791.275,00
-	Perolehan Lainnya	111.479.412.762,00
-	Penyelesaian pembangunan dengan KDP	278.825.809.581,00
-	Pengembangan melalui KDP	9.681.960.970,00
-	Reklasifikasi aset kemitraan ke BMN	9.560.740.600,00
-	Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	6.384.607.340,00
-	Koreksi Pencatatan nilai/kuantitas - UJK BPK RI	3.639.936.500,00
-	Reklasifikasi aset kemitraan ke BMN - UJK BPK RI	200.080.764.677,00
-	Perubahan aset konsesi jasa ke BMN - UJK BPK RI	5.967.600.000,00
Total Mutasi Tambah		833.394.641.705,00
Mutasi Kurang		
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	2.524.312.476,00
-	Transfer Keluar	948.742.957,00
-	Internal Transfer Keluar	206.910.791.275,00
-	Koreksi Pencatatan	118.136.424.957,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	180.851.626.335,00
-	Hibah (Keluar)	12.779.502.000,00
-	Transaksi normalisasi BMN - UJK BPK RI	235.839.000,00
-	Perubahan BMN ke aset konsesi jasa - UJK BPK RI	208.601.369.677,00
-	Perubahan BMN ke PI - UJK BPK RI	2.082.599.000,00
Total Mutasi Kurang		733.071.207.677,00
Saldo Akhir		3.609.752.504.035,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp863.018.000,00 merupakan pembelian Aset yang berasal dari sumber dana PNPB.
- Internal Transfer masuk sebesar Rp206.910.791.275,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp13.411.927.272,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB BUBU Hang Nadim ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA-04/AP-00/7/2022 dan BA-05/AP-00/8/2022
- Sebesar Rp68.095.037.676,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
- Sebesar Rp4.792.813.162,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara ke UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 05/A3.2/12/2022
- Sebesar Rp113.164.861.924,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022
- Sebesar Rp3.637.861.538,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit Sesuai dengan Berita Acara BA 05/A3.2/12/2022
- Sebesar Rp3.537.487.703,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Direktorat Pengamanan Aset Sesuai dengan Berita Acara BA 09/A3.2/12/2022
- Sebesar Rp270.802.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan ke UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA /56/A4.5/11/2022

- Perolehan Lainnya sebesar Rp111.479.412.762,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp108.372.048.762,00 merupakan Perolehan Lainnya yang diperoleh dari pendetilan BAST tercatat dengan kuantitas 1 (satu) di UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022
 - Sebesar Rp1.123.932.000,00 merupakan Perolehan Lainnya pada UAPKPB BUBU Hang Nadim berdasarkan surat hasil Penilaian KPKNL Batam No. S-1288/KNL.0304/2022
 - Sebesar Rp1.983.432.000,00 merupakan Perolehan Lainnya di UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 269/KA/11/2020
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp278.825.809.581,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 09/A3.2/12/2022
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp9.681.960.970,00 merupakan Pengembangan Melalui KDP Pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 09/A3.2/12/2022
- Reklasifikasi Aset Kemitraan ke BMN sebesar Rp9.560.740.600,00 merupakan Reklasifikasi Aset Kemitraan Ke BMN pada UAPKPB BUBU Hang Nadim sesuai dengan Berita Acara BA. No /A4.1/AP.00/11/2022
- Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan sebesar Rp6.384.607.340,00 merupakan Penggunaan Kembali BMN

yang sudah Dihentikan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim sesuai dengan Berita Acara BA-09/A4.41/AP.00/10/2022

- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas - UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp3.639.936.500,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp2.439.936.500,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi tambah gedung dan bangunan pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Perencanaan Desain Taman Rusa Sekupang dan DED Pembangunan Taman Rusa Sekupang
 - Sebesar Rp1.200.000.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi tambah gedung dan bangunan pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara Berupa DED Fuel Distribution System di Bandara Hang Nadim yang dikapitalisasi ke pekerjaan fisik
- Reklasifikasi Aset Kemitraan ke Aset BMN - UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp200.080.764.677,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp171.290.885.735,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi dari Aset Kemitraan Menjadi Aset gedung dan bangunan pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
 - Sebesar Rp28.789.878.942,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga menjadi Gedung dan Bangunan pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan
- Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN - UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp5.967.600.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah menjadi Gedung dan Bangunan pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara

Mutasi Kurang:

- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp2.524.312.476,00 terdiri:
 - Sebesar Rp6.035.000,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan Sesuai dengan Berita Acara BA 44/A4.5/11/2022
 - Sebesar Rp2.518.277.476,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara No. 25/A4.8/12/2022
- Transfer Keluar sebesar Rp948.742.957,00 merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke Kementerian Pertahanan Sesuai dengan Berita Acara BA 185/A1/12/2022
- Internal Transfer Keluar sebesar Rp206.910.791.275,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp13.411.927.272,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB BUBU Hang Nadim ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA-04/AP-00/7/2022 dan BA-05/AP-00/8/2022
 - Sebesar Rp68.095.037.676,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
 - Sebesar Rp113.164.861.924,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022

- Sebesar Rp3.637.861.538,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit Sesuai dengan Berita Acara BA 05/A3.2/12/2022
- Sebesar Rp3.537.487.703,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Direktorat Pengamanan Aset Sesuai dengan Berita Acara BA 09/A3.2/12/2022
- Sebesar Rp270.802.000,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan ke UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA /56/A4.5/11/2022
- Sebesar Rp4.792.813.162,00 merupakan Internal Transfer Keluar, dari UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara ke UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 05/A3.2/12/2022
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp118.136.424.957,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp116.152.992.957,00 merupakan Koreksi Pencatatan disebabkan pendetilan BAST tercatat dengan kuantitas 1 (satu) di UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara
 - Sebesar Rp1.983.432.000,00 merupakan Koreksi Pencatatan pada Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan Berita Acara BA 24/A4.8/11/2022
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Kemitraan sebesar Rp180.851.626.335,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022

- Hibah Keluar sebesar Rp12.779.502.000,00 merupakan Hibah Keluar ke Pemko Batam pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan SK Kepala BP Batam No. 123 tahun 2022
- Transaksi Normalisasi BMN - UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp235.839.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi Kurang Gedung dan bangunan atas tindak lanjut data Anomali yang disebabkan kesalahan Input Normalisasi pada saat koreksi data anomali TA 2021 pada UAPKPB Biro Umum
- Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa - UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp208.601.369.677,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp177.258.485.735,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (dengan PT. Bandara Internasional Batam) pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
 - Sebesar Rp31.342.883.942,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen, Gedung Pos Jaga Permanen dan Bangunan Lantai Jemur Permanen pada Pelabuhan PT. SYNERGY THARADA menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan
- Perubahan BMN ke Properti Investasi - UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp2.082.599,000 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi kurang atas Gedung dan bangunan berupa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen dan Bangunan

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen yang tercatat sebagai Aset Properti Investasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp10.911.853.838.741

D.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp10.911.853.838.741,00 dan Rp11.506.196.976.816,00. (Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada lampiran 15).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp11.506.196.976.816,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp6.658,580.838.760,00 dan mutasi kurang sebesar Rp7.252.923.976.835,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		11.506.196.976.816,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	3.095.542.000,00
-	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	204.972.536.718,00
-	Pengembangan melalui KDP	23.757.633.527,00
-	Internal Transfer Masuk	5.583.839.972.353,00
-	Perolehan Lainnya	10.114.618.120,00
-	Koreksi Susulan	189.065.078,00
-	Koreksi pencatatan nilai/kuantitas - UJK BPK RI	450.748.151,00
-	Reklasifikasi aset kemitraan ke BMN - UJK BPK RI	832.160.722.813,00
Total Mutasi Tambah		6.658.580.838.760,00
Mutasi Kurang		
-	Penghentian Aset dari Penggunaan	9.415.000,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	827.528.749.669,00
-	Koreksi Pencatatan	2.616.400.000,00
-	Internal Transfer Keluar	5.583.839.972.353,00
-	Reklasifikasi Keluar	293.288.000,00
-	Perubahan BMN ke aset konsesi jasa - UJK BPK RI	838.636.151.813,00
Total Mutasi Kurang		7.252.923.976.835,00
Saldo Akhir		10.911.853.838.741,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp3.095.542.000,00 merupakan pembelian Aset yang berasal dari sumber dana PNB
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp204.972.536.718,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp664.648.799,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Sesuai dengan Nomor Bukti Perolehan BK FASLING/2021/08/1019
 - Sebesar Rp156.306.269.361,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 09/A3.2/12/2022
 - Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp48.001.618.558,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 09/A3.2/12/2022
- Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp23.757.633.527,00 terdiri dari:
 - Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp21.432.118.347,00 merupakan Pengembangan Melalui KDP Pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 09/A3.2/12/2022
 - Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp2.325.515.180,00 merupakan Pengembangan Melalui KDP Pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 09/A3.2/12/2022

- Internal Transfer Masuk sebesar Rp5.583.839.972.353,00 terdiri dari:
 - Internal Transfer Masuk sebesar Rp25.636.287.164,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
 - Sebesar Rp3.309.398.286.217,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
 - Sebesar Rp1.782.790.687,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022
 - Sebesar Rp4.372.601.933,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit Sesuai dengan Berita Acara BA 05/A3.2/12/2022
 - Sebesar Rp275.019.250,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022
 - Sebesar Rp2.242.374.987.102,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022

- Perolehan Lainnya sebesar Rp10.114.618.120,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp1.782.790.687,00 merupakan Perolehan Lainnya yang diperoleh dari pendetilan BAST tercatat dengan kuantitas 1 (satu) di UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022
 - Sebesar Rp694.725.492,00 merupakan pencatatan Perolehan Lainnya yang berasal dari Inspeksi Pencatatan Belanja SPAM pada UAPKPB Badan Usaha Pengelolaan Air minum sesuai dengan Berita Acara BA 18/A4.8/10/2022
 - Perolehan Lainnya sebesar Rp7.637.101.941,00 merupakan pencatatan Perolehan Lainnya yang berasal dari Inspeksi Pencatatan Belanja SPAM pada UAPKPB Badan Usaha Pengelolaan Air minum sesuai dengan Berita Acara BA 18/A4.8/10/2022
- Koreksi Susulan sebesar Rp189.065.078,00 terdiri dari:
 - Koreksi Susulan sebesar Rp96.773.204,00 merupakan Koreksi Susulan disebabkan Kesalahan pencatatan pada UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan Berita Acara BA 18/A4.8/10/2022
 - Koreksi Susulan sebesar Rp92.291.874,00 merupakan Koreksi Susulan disebabkan Kesalahan pencatatan pada UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan Berita Acara BA 18/A4.8/10/2022
- Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp450.748.151,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Koreksi tambah Jalan dan Jembatan pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa DED Pembangunan Taman Kolam Sekupang dan Desain Rinci Jalan Kolektor Dari

Bundaran Madani Menuju Bengkong Sadai yang dikapitalisasi ke pekerjaan fisik

- Reklasifikasi Aset Kemitraan ke BMN – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp832.160.722.813,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp681.204.277.044,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi dari Aset Kemitraan Menjadi Aset Jalan dan Jembatan pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
 - Sebesar Rp4.631.973.144,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga menjadi Jalan dan Jembatan pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan
 - Sebesar Rp45.829.838.551,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi dari Aset Kemitraan Menjadi Aset Irigasi pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
 - Sebesar Rp100.494.634.074,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi dari Aset Kemitraan Menjadi Aset Jaringan pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara

Mutasi Kurang:

- Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp9.415.000,00 merupakan Penghentian Aset Dari Penggunaan di UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan Sesuai dengan Berita Acara BA/11/A4.5/5/2022
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp827.528.749.669,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp681.204.277.044,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap

- ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp45.829.838.551,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp100.494.634.074,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022
- Koreksi Pencatatan sebesar Rp2.616.400.000,00 merupakan Koreksi Pencatatan disebabkan pendetilan BAST tercatat dengan kuantitas 1 (satu) di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA/06/A1.1/12/2022
- Internal Transfer Keluar sebesar Rp5.583.839.972.353,00 terdiri dari:
 - Internal Transfer Keluar sebesar Rp25.636.287.164,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
 - Sebesar Rp275.019.250,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022

- Sebesar Rp2.242.374.987.102,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
- Sebesar Rp3.309.398.286.217,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
- Sebesar Rp1.782.790.687,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara Sesuai dengan Berita Acara BA 08/A3.2/12/2022
- Sebesar Rp4.372.601.933,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan ke UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit Sesuai dengan Berita Acara BA 05/A3.2/12/2022
- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp293.288.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA05/A1.1/12/2022
- Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp838.636.151.813,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp681.204.277.044,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset Jalan dan Jembatan menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (dengan PT. Bandara Internasional Batam) pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara

- Sebesar Rp11.062.340.144,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Jalan dan Jembatan pada Pelabuhan PT. SYNERGY THARADA menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan
- Sebesar Rp45.829.838.551,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset Irigasi menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (dengan PT. Bandara Internasional Batam) pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
- Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa – UJK BPK sebesar Rp45.062.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset Irigasi menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (dengan PT. Synergy Tharada) pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan
- Sebesar Rp100.494.634.074,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset Jaringan menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (dengan PT. Bandara Internasional Batam) pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara

Aset Tetap Lainnya
Rp10.860.155.632

D.2.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp10.860.155.632,00 dan Rp9.637.618.122,00. [\(Rincian Aset tetap Lainnya dapat dilihat pada lampiran 16\).](#)

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp9.637.618.122,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp5.480.036.527,00 dan mutasi kurang sebesar Rp4.257.499.017,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		9.637.618.122,00
-	Pembelian	288.717.000,00
-	Internal Transfer Masuk	800.000,00
-	Reklasifikasi Masuk	5.190.519.527,00
Total Mutasi Tambah		5.480.036.527,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	15.000.000,00
-	Internal Transfer Keluar	800.000,00
-	Reklasifikasi Keluar	4.241.699.017,00
Total Mutasi Kurang		4.257.499.017,00
Saldo Akhir		10.860.155.632,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp288.717.000,00 merupakan pembelian Aset yang berasal dari sumber dana PNB
- Internal Transfer Masuk sebesar Rp800.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp5.190.519.527,00 merupakan Reklasifikasi Masuk pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan berupa Tanaman sesuai dengan Berita Acara BA 01/A3.2/9/2022

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp15.000.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022
- Internal Transfer Keluar sebesar Rp800.000,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022

- Reklasifikasi Keluar sebesar Rp4.241.699.017,00 terdiri dari:
 - Reklasifikasi Keluar sebesar Rp288.717.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar disebabkan kesalahan Kodefikasi di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan nomor Bukti Kas 2022/10/001502, 2022/10/002417 dan 2022/10/004023
 - Reklasifikasi keluar sebesar Rp3.952.982.017,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Sesuai dengan Berita Acara BA01/A3.2/9/2022

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Rp779.654.087.090

D.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp779.654.087.090,00 dan Rp767.370.239.040,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Jumlah (Rp)
1	Tanah Dalam Pengerjaan	10.618.536.428,00
2	Peralatan dan Mesin dalam Pengerjaan	71.481.534.000,00
3	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	26.939.237.293,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam Pengerjaan	8.557.720.560,00
5	Irigasi dalam Pengerjaan	662.057.058.809,00
	Jumlah	779.654.087.090,00

(Rincian dapat dilihat pada Lampiran 17).

Tanah dalam pengerjaan sebesar Rp10.618.536.428,00 merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Dalam hal sertifikat HPL telah diterbitkan, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai aset lainnya.

Peralatan dan Mesin dalam pengerjaan sebesar Rp71.481.534.000,00, Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan sebesar Rp26.939.237.293,00, Jalan, Irigasi dan Jaringan dalam pengerjaan sebesar Rp8.557.720.560,00 dan Irigasi dalam pengerjaan sebesar Rp662.057.058.809,00 merupakan pekerjaan pengadaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2022.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp767.370.239.040,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp531.645.378.421,00 dan mutasi kurang sebesar Rp519.361.530.371,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		767.370.239.040,00
Mutasi Tambah		
-	Penambahan KDP	531.645.378.421,00
Total Mutasi Tambah		531.645.378.421,00
Mutasi Kurang		
-	KDP yang menjadi aset definitif	519.361.530.371,00
Total Mutasi Kurang		519.361.530.371,00
Saldo Akhir		779.654.087.090,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp531.645.378.421,00 merupakan pembelian aset yang berasal dari sumber dana PNPB sebesar Rp482.403.497.727,00, sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp42.198.141.340,00 dan sumber dana PHLN sebesar Rp7.043.739.354,00 merupakan belanja modal irigasi.

Mutasi Kurang:

- Pengurangan sebesar Rp519.361.530.371,00 merupakan KDP yang menjadi aset definitif.

Akumulasi
Penyusutan
Rp6.498.645.065.044

D.2.7. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp6.498.645.065.044,00 dan Rp6.645.206.041.002,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Jumlah (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	1.031.800.506.563,00
2	Gedung dan Bangunan	844.782.257.603,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.621.443.653.878,00
4	Aset Tetap Lainnya	618.647.000,00
Jumlah		6.498.645.065.044,00

D.2.8. Aset Konsesi Jasa

Saldo aset konsesi jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 3.314.318.784.424,00 dan Rp0,00. (Rincian Aset Konsesi Jasa dapat dilihat pada lampiran 18).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.088.066.594.424,00 dan mutase kurang sebesar Rp773.747.810.000,00. Penjelasan mutase tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		0,00
-	Perubahan BMN ke aset konsesi jasa - UJK BPK RI	4.088.066.594.424,00
Total Mutasi Tambah		4.088.066.594.424,00
Mutasi Kurang		
-	Perubahan aset konsesi jasa ke BMN - UJK BPK RI	773.747.810.000,00
Total Mutasi Kurang		773.747.810.000,00
Saldo Akhir		3.314.318.784.424,00

Saldo aset konsesi jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 3.314.318.784.424,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp4.088.066.594.424,00 dan mutase kurang sebesar Rp773.747.810.000,00. Penjelasan mutase tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		0,00
-	Perubahan BMN ke aset konsesi jasa - UJK BPK RI	4.088.066.594.424,00
Total Mutasi Tambah		4.088.066.594.424,00
Mutasi Kurang		
-	Perubahan aset konsesi jasa ke BMN - UJK BPK RI	773.747.810.000,00
Total Mutasi Kurang		773.747.810.000,00
Saldo Akhir		3.314.318.784.424,00

Mutasi Tambah:

- Perubahan BMN ke Aset Konsesi Jasa – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp4.088.066.594.424,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp3.687.317.558.338,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah (dengan PT. Bandara Internasional Batam) pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
- Sebesar Rp400.749.036.086,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset (pada Pelabuhan PT. SYNERGY THARADA, PT. INDO DHARMA CORPORA dan PT. SARANA CITRANUSA KABIL) menjadi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan

Mutasi Kurang:

- Perubahan Aset Konsesi Jasa ke BMN – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp773.747.810.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi Aset konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah menjadi Aset Tetap (dengan PT. Bandara Internasional Batam) pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara.

Saldo Aset Konsesi Jasa hanya menyajikan nilai aset konsesi yang berasal dari partisipasi BP Batam. BP Batam belum dapat menyajikan nilai aset konsesi jasa yang berasal dari partisipasi pihak mitra penerima konsesi belum menerapkan ISAK 16 pada Laporan Keuangan Tahun 2022 (audited)

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Konsesi Jasa
Rp1.013.775.631.527*

D.2.9. Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa

Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.013.775.631.527,00 dan Rp0,00.

Properti Investasi
Rp122.068.810.000

D.2.10. Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 122.068.810.000,00 dan Rp0,00. (Rincian Aset Properti Investasi dapat dilihat pada lampiran 19).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp122.068.810.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00. Penjelasan mutasi tambah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		0,00
-	Perubahan BMN ke Properti Investasi - UJK BPK RI	122.068.810.000,00
Total Mutasi Tambah		122.068.810.000,00
Mutasi Kurang		
-	Perubahan Aset Properti Investasi ke BMN	0,00
Total Mutasi Kurang		0,00
Saldo Akhir		122.068.810.000,00

Mutasi Tambah:

- Perubahan BMN ke Properti Investasi – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp122.068.810.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi kurang atas Gedung dan bangunan berupa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lainnya, Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen dan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen yang tercatat sebagai Aset Properti Investasi pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta

Akumulasi
Penyusutan
Properti Investasi
Rp585.523.730

D.2.11. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp585.523.730,00 dan Rp0,00.

Aset Lainnya
Rp677.072.294.910

D.3 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp677.072.294.910,00 dan Rp665.101.882.722,00 dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	39.015.979.867,00	72.437.831.953,00
	Akumulasi Penyusutan	(16.506.738.505,00)	(25.620.102.602,00)
	Nilai Buku (1)	22.509.241.362,00	46.817.729.351,00
2	Aset Tak Berwujud	672.996.735.102,00	600.459.430.707,00
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(51.555.468.394,00)	(48.556.141.673,00)
	Nilai Buku (2)	621.441.266.708,00	551.903.289.034,00
3	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan (3)	0,00	27.094.239.651,00
4	Aset Lain-lain		
	a. Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	205.137.128.235,00	205.572.092.290,00
	b. Piutang Tidak Lancar	13.731.359.728,00	13.022.247.208,00
	c. Panjar Tidak Lancar	2.950.153.242,00	2.961.573.242,00
	d. Piutang Pegawai Tidak Lancar	153.327.225,00	153.327.225,00
	e. Piutang TGR	1.506.032.334,00	1.506.032.334,00
	Jumlah	223.478.000.764,00	223.215.272.298,00
	Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Aset Lain-lain		
	a. Akum. Penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	(173.521.373.729,00)	(167.791.499.939,00)
	b. Cadangan Piutang Tidak Lancar	(13.731.359.728,00)	(13.022.247.206,00)
	c. Cadangan Panjar Tidak Lancar	(2.950.153.242,00)	(2.961.573.242,00)
	d. Cadangan Piutang Pegawai Tidak Lancar	(153.327.225,00)	(153.327.225,00)
	Jumlah	(190.356.213.924,00)	(183.928.647.612,00)
	Nilai Buku (4)	33.121.786.840,00	39.286.624.686,00
	Total Nilai Buku (1+2+3+4)	677.072.294.910,00	665.101.882.722,00

Penjelasan aset lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Kemitraan Dengan
Pihak ketiga Rp
Rp39.015.979.867

D.3.1. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp39.015.979.867,00 dan Rp72.437.831.953,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp72.437.831.953,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp3.690.909.173.938,00 dan mutasi kurang sebesar

Rp3.724.331.026.024,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	72.437.831.953,00
Mutasi Tambah	
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	3.690.909.173.938,00
Total Mutasi Tambah	3.690.909.173.938,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Aset Kemitraan ke BMN	9.561.907.600,00
- Reklasifikasi Aset Kemitraan ke BMN - UJK BPK RI	3.714.769.118.424,00
Total Mutasi Kurang	3.724.331.026.024,00
Saldo Akhir	39.015.979.867,00

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp3.690.909.173.938,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi Aset Kemitraan ke BMN sebesar Rp9.561.907.600,00 merupakan Reklasifikasi Aset Kemitraan Ke BMN pada UAPKPB BUBU Hang Nadim sesuai dengan Berita Acara BA. No /A4.1/AP.00/11/2022
- Reklasifikasi Aset Kemitraan ke BMN – UJK BPK sebesar Rp3.714.769.118.424,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp3.681.347.266.338,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi dari Aset Kemitraan Menjadi Aset Tetap pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara
 - Sebesar Rp33.421.852.086,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Reklasifikasi dari Aset Kemitraan Menjadi Aset Tetap pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.015.979.867,00 terdiri dari:

No	Uraian Kelompok Barang	Sat	Jumlah (Rp)	
			Kuantitas	Nilai
1	TANAH PERSIL	Unit/Buah	20.000	4.296.727.000
2	ALAT BESAR DARAT	Unit/Buah	2	6.700.000.000
3	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Unit/Buah	1	28.019.252.867
Total			20.003	39.015.979.867
Amortisasi Penyusutan				(16.506.738.505)
Nilai Buku			20.003	22.509.241.362

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.015.979.867,00, berdasarkan unit terdiri dari:

No	Unit Kantor Pusat	Jumlah (Rp)
1	Badan Usaha Pelabuhan Laut Batam	6.700.000.000,00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	32.315.979.867,00
Total		39.015.979.867,00

D.3.1.1. Badan Usaha Pelabuhan Laut Batam

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.700.000,00 terdiri dari:

No	Uraian Akun	Jumlah	Nama Pihak Ketiga
1	Alat Besar Darat	6.700.000.000,00	PT. TUAH SELIMANGKARANG
Jumlah		6.700.000.000,00	

D.3.1.2. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.315.979.867,00, terdiri dari:

No	Uraian Akun	Jumlah	Nama Pihak Ketiga
1	Tanah Persil	4.296.727.000,00	BPP
2	Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.019.252.867,00	BPP
Jumlah		32.315.979.867,00	

Aset KSO Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.315.979.867,00 merupakan aset Gedung Pusat Promosi Se-Sumatera Batam yang di kelola bersama-sama dengan Pemerintahan Provinsi Riau, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama sesuai

dengan Peraturan Bersama No. 2, Nomor 1 dan Nomor 37 Tahun 2017.

Aset Tak Berwujud
Rp672.996.735.102

D.3.2. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp672.996.735.102,00 dan Rp600.459.430.707,00 yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Software	48.056.834.247,00	47.629.170.247,00
Lisensi	9.294.098.420,00	10.506.041.760,00
Hasil Kajian/Penelitian	49.775.108.277,00	24.449.711.277,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	565.870.694.158,00	517.874.507.423,00
Jumlah Aset Tak Berwujud	672.996.735.102,00	600.459.430.707,00
Software	(45.641.851.734,00)	(43.182.449.021,00)
Lisensi	(5.913.616.660,00)	(5.373.692.652,00)
Hasil Kajian/Penelitian	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Akumulasi Amortisasi	(51.555.468.394,00)	(48.556.141.673,00)
Software	2.414.982.513,00	4.446.721.226,00
Lisensi	3.380.481.760,00	5.132.349.108,00
Hasil Kajian/Penelitian	49.775.108.277,00	24.449.711.277,00
Aset Tak Berwujud Lainnya	565.870.694.158,00	517.874.507.423,00
Nilai Buku Aset Tak Berwujud	621.441.266.708,00	551.903.289.034,00

(Rincian *software*, lisensi dan hasil kajian dapat dilihat pada lampiran 20).

D.3.2.1. Software

Saldo *software* per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp48.056.834.247,00 dan Rp47.629.170.247,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp47.629.170.247,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp8.680.987.444,00 dan mutasi kurang sebesar Rp8.253.323.444,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	47.629.170.247,00
Mutasi Tambah	
- Pembelian	446.664.000,00
- Internal Transfer Masuk	8.184.323.444,00
- Reklasifikasi Masuk	50.000.000,00
Total Mutasi Tambah	8.680.987.444,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	69.000.000,00
- Internal Transfer Keluar	8.184.323.444,00
Total Mutasi Kurang	8.253.323.444,00
Saldo Akhir	48.056.834.247,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian Sebesar Rp446.664.000,00 merupakan pembelian aset yang berasal dari sumber dana PNB
- Internal Transfer Masuk sebesar Rp8.184.323.444,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp7.923.173.444,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022
 - Sebesar Rp197.500.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB BUBU Hang Nadim ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA-04/AP-00/7/2022 dan BA-05/AP-00/8/2022
 - Sebesar Rp49.050.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
 - Sebesar Rp14.600.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/6/2022

- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp50.000.000,00 merupakan Reklasifikasi Keluar di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA05/A1.1/12/2022

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp69.000.000,00 merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022
- Internal Transfer Keluar sebesar Rp8.184.323.444,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022

D.3.2.2. Lisensi

Saldo lisensi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp9.294.098.420,00 dan Rp10.506.041.760,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp10.506.041.760,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp849.372.120,00 dan mutasi kurang sebesar Rp2.061.315.460,00. Penjelasan mutase tambah dan kurang tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		10.506.041.760,00
Mutasi Tambah		
-	Pembelian	140.000.000,00
-	Internal Transfer Masuk	709.372.120,00
Total Mutasi Tambah		849.372.120,00
Mutasi Kurang		
-	Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan	1.351.943.340,00
-	Internal Transfer Keluar	709.372.120,00
Total Mutasi Kurang		2.061.315.460,00
Saldo Akhir		9.294.098.420,00

Mutasi Tambah:

- Pembelian sebesar Rp140.000.000,00 merupakan pembelian Aset yang berasal dari sumber dana PNB
- Internal Transfer Masuk sebesar Rp709.372.120,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022

Mutasi Kurang:

- Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan sebesar Rp1.351.943.340,00 Merupakan Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Kemitraan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim ke PT. BIB sesuai dengan nomor Perjanjian No. 07/A4.4/AP.00/6/2022
- Internal Transfer Keluar sebesar Rp709.372.120,00 Merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Pusat Data dan Sistem Informasi Sesuai dengan Berita Acara BA 01/A1.1/07/2022

D.3.2.3. Hasil Kajian/Penelitian

Saldo hasil kajian/penelitian per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp49.775.108.277,00 dan Rp24.449.711.277,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp24.449.711.277,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp40.954.866.302,00 dan mutasi kurang sebesar Rp15.629.469.302,00 Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi		Jumlah (Rp)
Saldo Awal		24.449.711.277,00
Mutasi Tambah		
-	Perolehan Lainnya	2.616.400.000,00
-	Internal Transfer Masuk	292.000.000,00
-	Penyelesaian pembangunan dengan KDP	93.987.000,00
-	Reklasifikasi Masuk	582.005.000,00
-	Penyelesaian pembangunan dengan KDP - UJK BPK RI	27.094.239.651,00
-	Internal Transfer Masuk - UJK BPK RI	10.276.234.651,00
Total Mutasi Tambah		40.954.866.302,00
Mutasi Kurang		
-	Internal Transfer Keluar	292.000.000,00
-	Koreksi pencatatan - UJK BPK RI	5.061.234.651,00
-	Internal transfer keluar - UJK BPK RI	10.276.234.651,00
Total Mutasi Kurang		15.629.469.302,00
Saldo Akhir		49.775.108.277,00

Mutasi Tambah:

- Perolehan Lainnya sebesar Rp2.616.400.000,00 merupakan Perolehan Lainnya yang diperoleh dari pendetilan BAST tercatat dengan kuantitas 1 (satu) Berupa Aset Tetap Jalan dan Jembatan di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA 06/A1.1/12/2022
- Internal Transfer Masuk sebesar Rp292.000.000,00 merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp93.987.000,00 merupakan Penyelesaian Pembangunan dengan KDP pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Nomor Bukti BK 2022/08/004173
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp582.005.000,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp293.288.000,00 merupakan Reklasifikasi Masuk di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan Berita Acara BA05/A1.1/12/2022
- Sebesar Rp288.717.000,00 merupakan Reklasifikasi Masuk disebabkan kesalahan Kodefikasi di UAPKPB Biro Umum Sesuai dengan nomor Bukti Kas 2022/10/001502, 2022/10/002417 dan 2022/10/004023
- Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp27.094.239.651,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp26.866.811.151,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi tambah hasil kajian/penelitian pada UAPKPB Biro Umum disebabkan pekerjaan kegiatan kejadian telah selesai
 - Sebesar Rp227.428.500,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi tambah hasil kajian/penelitian pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan disebabkan pekerjaan kegiatan kejadian telah selesai
- Internal Transfer Masuk – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp10.276.234.651,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp2.607.500.000,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara ke UAPKPB Biro Umum Berupa Hasil Kajian/Penelitian dan DED yang sudah selesai Pekerjaan Fisik
 - Sebesar Rp3.861.234.651,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Hasil Kajian/Penelitian dan DED yang sudah selesai Pekerjaan Fisik
 - Sebesar Rp3.807.500.000,00 Merupakan Internal Transfer Masuk dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Badan Usaha

Bandar Udara Berupa Hasil Kajian/Penelitian dan DED yang sudah selesai Pekerjaan Fisik

Mutasi Kurang:

- Internal Transfer Keluar sebesar Rp292.000.000,00 merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum Sesuai dengan Berita Acara BA 02/A4.7/7/2022 dan BA 04/A4.7/8/2022
- Koreksi Pencatatan – UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp5.061.234.651,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp3.861.234.651,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi kurang hasil kajian/penelitian pada UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan Berupa Perencanaan Desain Taman Rusa Sekupang dan DED Pembangunan Taman Rusa Sekupang yang dikapitalisasi ke pekerjaan fisik
 - Sebesar Rp1.200.000.000,00 Merupakan Usulan Jurnal Koreksi BPK RI Atas Koreksi kurang hasil kajian/penelitian pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara Berupa DED Fuel Distribution System di Bandara Hang Nadim yang dikapitalisasi ke pekerjaan fisik
- Internal Transfer Masuk – UJK BPK sebesar Rp10.276.234.651,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp7.668.734.651,00 Merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Biro Umum ke UAPKPB Direktorat Infrastruktur Kawasan dan UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara Berupa Hasil Kajian/Penelitian dan DED yang sudah selesai Pekerjaan Fisik

- Sebesar Rp2.607.500.000,00 Merupakan Internal Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara ke UAPKPB Biro Umum Berupa Hasil Kajian/Penelitian dan DED yang sudah selesai Pekerjaan Fisik

D.3.2.4. Aset Tidak Berwujud Lainnya

Saldo aset tidak berwujud lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp565.870.694.158,00 dan Rp517.874.507.423,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp517.874.507.423,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp47.996.186.735,00 dan mutasi kurang sebesar Rp0,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	517.874.507.423,00
Mutasi Tambah	
- Saldo Awal	46.163.280.160,00
- Reklasifikasi Masuk	1.832.906.575,00
Total Mutasi Tambah	47.996.186.735,00
Mutasi Kurang	
- Reklasifikasi Keluar	0,00
Total Mutasi Kurang	0,00
Saldo Akhir	565.870.694.158,00

Mutasi Tambah:

- Saldo Awal sebesar Rp46.163.280.160,00 merupakan pencatatan Saldo Awal Berupa Hak Pengelolaan Lahan yang di peroleh tahun 2014 ke bawah pada Direktorat Pengelolaan Pertanahan sesuai dengan Berita Acara BA 34/BA/A3.1/12/2022
- Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.832.906.575,00 merupakan Reklasifikasi Masuk Hak Pengelolaan Lahan dari Aset Tetap Tanah pada UAPKPB Direktorat Pengelolaan Pertanahan

sesuai dengan Berita Acara 35/BA/A3.1/12/2022, BA29A/BA/A3.1/12/2022 dan BA33/BA/A3.1/12/2022

D.3.2.4.1 Hak Pengelolaan Lahan

Saldo hak pengelolaan lahan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp565.870.694.158,00 dan Rp517.874.507.423,00 merupakan hak pengelolaan lahan yang diberikan Pemerintah kepada Badan Pengusahaan Batam, yang telah diterbitkan sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional. Nilai hak pengelolaan yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Batam dalam rangka mengurus penerbitan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Biaya yang dikeluarkan dalam hal sertifikat HPL belum terbit/selesai, biaya-biaya tersebut akan dicatat sebagai tanah dalam pengerjaan-lihat catatan C.2.6.

Luas lahan Pulau Batam menurut Peraturan Presiden Batam Bintan Karimun (BBK) Nomor 87 Tahun 2011 adalah 457.788.953,44 m².

Rincian penentuan pola ruang disajikan pada tabel berikut:

No.	Peruntukan Pola Ruang Perpres BBK 87/2011	Total Luas Batam (M2)
		Perpres BBK 87/2011
1	Kawasan Permukiman (B1)	136.405.872,00
2	Kawasan Peruntukan Bandar Udara (B6.1)	17.490.475,67
3	Kawasan Peruntukan Pelabuhan (B6.2)	9.859.986,13
4	Kawasan Peruntukan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Riset dan Teknologi (B6.3)	16.735.415,65
5	Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan Negara (B6.4)	68.814,31
6	Kawasan Perdagangan dan Jasa (B6.5)	27.596.029,41
7	Kawasan Industri (B4)	75.226.874,30
8	Kawasan Pariwisata (B5)	29.444.022,41
9	Budidaya Lain (B6)	5.722,82
10	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (L1)	75.537.528,65
11	Kawasan Perlindungan Setempat (L2)	32.138.752,68
12	Danau	26.270.713,55
13	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya (L3)	10.615.587,33
14	Sungai	393.158,53
TOTAL LUAS KESELURUHAN		457.788.953,44

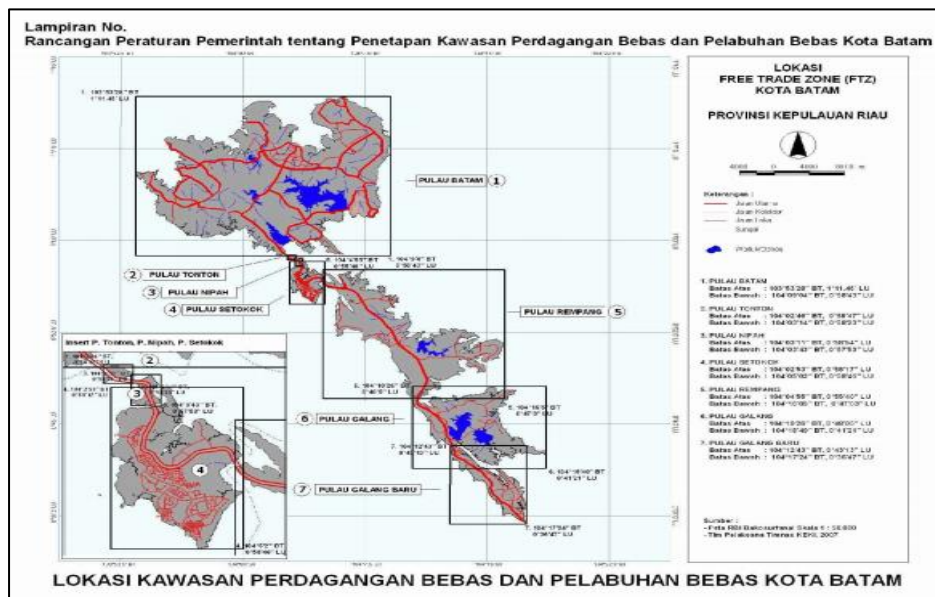
Prosedur pengelolaan lahan mulai dari persiapan, pembayaran, penerbitan HPL, PL, sampai dengan prosedur pengawasan dan penindakannya.

- Proses identifikasi dan verifikasi, pengukuran dan pembebasan lahan oleh warga
 - Permohonan pendaftaran pensertipikatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 - Pembayaran biaya pengukuran dan biaya panitia A kepada BPN
 - Penerbitan SK Menteri ATR/ Kepala BPN
 - Penerbitan Sertipikat HPL oleh Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN)
 - Proses pengalokasian tanah kepada pihak ketiga (sesuai Perka 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengelolaan pertanahan).
 - Penerbitan faktur UWT, Surat Keputusan Penggunaan Tanah (SKPT) dan Surat Perjanjian Penggunaan Tanah (SPPT) beserta lampiran Gambar Penetapan Lokasi (Gambar PL)
 - Rekomendasi penerbitan SHGB ke BPN
- BP Batam melakukan evaluasi terhadap penerima alokasi sesuai dengan jadwal pembangunan yang terlampir di dalam Surat Perjanjian Penggunaan Lahan (SPPL).

Luas wilayah kerja sesuai Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2007 (Pulau Batam, Pulau Janda Berias, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru), yang dihitung berdasarkan pola ruang Perpres Nomor 87 Tahun 2011 seluas \pm 73.239,04 Ha.

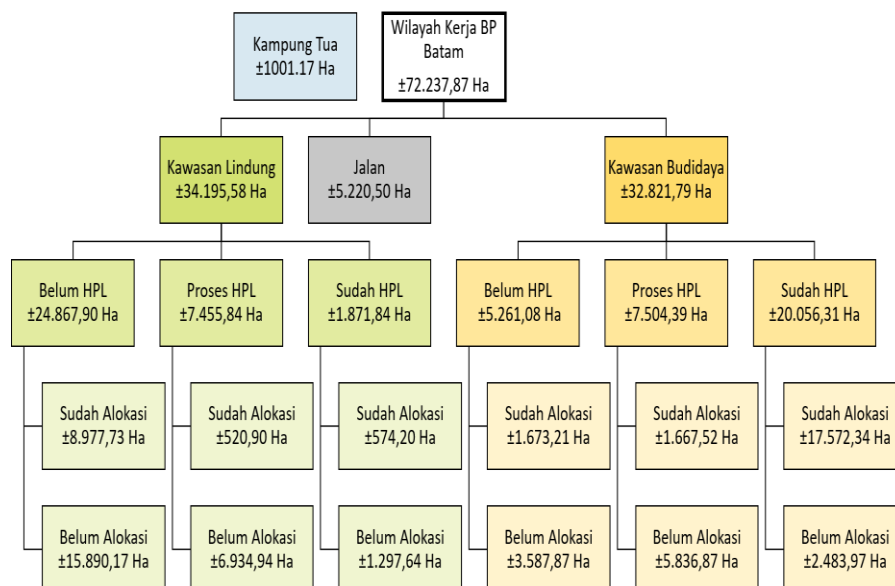
- Luas Pulau Batam : \pm 46.192,26 Ha
- Luas Pulau Janda Berias : \pm 241,09 Ha
- Luas Pulau Tonton : \pm 33,10 Ha

- Luas Pulau Nipah : ± 66,00 Ha
- Luas Pulau Setokok : ± 1.449,29 Ha
- Luas Pulau Rempang : ± 14.039,42 Ha
- Luas Pulau Galang : ± 8.187,75 Ha
- Luas Pulau Galang Baru : ± 3.030,13 Ha



Gambar 1. Wilayah Kerja BP Batam

Neraca Lahan dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung.



*perhitungan berdasarkan data spasial bulan Januari 2023

Gambar 2. Neraca Lahan

Sertipikat HPL yang telah terbit sebanyak 527 sertipikat seluas \pm 27.599 Ha berdasarkan luas yang tercantum di dalam dokumen sertipikat HPL. Namun, untuk luas yang digunakan dalam pengelolaan data spasial HPL menggunakan luasan grafis dengan total luas \pm 27.482 Ha. Data grafis spasial merupakan hasil pengukuran lapangan berupa sekumpulan koordinat yang sudah diproyeksikan dengan skala yang tidak seragam dan tingkat akurasi berbeda, sehingga menghasilkan luas yang berbeda dengan hasil pengukuran yang tercantum dalam sertipikat. Neraca lahan yang disajikan pada Gambar 2 di atas merupakan perhitungan HPL berdasarkan luas grafis yang dibandingkan dengan Wilayah Kerja BP Batam.

Luas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam yang tercatat pada Direktorat Lahan mencapai seluas \pm 27.599 Ha, selanjutnya yang sudah disajikan di Laporan Keuangan *Audited* adalah seluas 23.630 Ha, sebanyak 451 lembar Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan nilai Rp565.870.694.158,00 sesuai data SAKTI per 31 Desember 2022.

(Daftar sertifikat hak pengelolaan lahan Badan Pengusahaan Batam yang telah diterbit dapat dilihat pada Lampiran 21).

*Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan
Rp0*

D.3.3 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp27.094.239.651,00.

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp27.094.239.651,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp0,00 dan mutasi kurang sebesar Rp27.094.239.651,00. Penjelasan mutasi tambah dan kurang dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	27.094.239.651,00
Mutasi Tambah	
- Penambahan KDP	0,00
Total Mutasi Tambah	0,00
Mutasi Kurang	
- Aset dalam pengerjaan yang menjadi aset definitif	27.094.239.651,00
Total Mutasi Kurang	27.094.239.651,00
Saldo Akhir	0,00

Mutasi Kurang:

- Pengurangan Aset Dalam Pengerjaan merupakan Aset Dalam Pengerjaan yang menjadi aset definitif sebesar Rp27.094.239.651,00

Aset Lain-lain
Rp223.478.000.764

D.3.4 Aset Lain-lain

Aset lain-lain per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp223.478.000.764,00 dan Rp223.215.272.298,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	205.137.128.235,00	205.572.092.290,00
2	Piutang Tidak Lancar	13.731.359.728,00	13.022.247.208,00
3	Panjar Tidak Lancar	2.950.153.242,00	2.961.573.242,00
4	Piutang pegawai tidak lancar	153.327.225,00	153.327.225,00
5	Piutang TGR	1.506.032.334,00	1.506.032.334,00
	Total	223.478.000.764,00	223.215.272.298,00

Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	205.572.092.290,00	15.394.284.708,00	15.829.248.763,00	205.137.128.235,00
Piutang Tidak Lancar	13.022.247.208,00	719.756.085,20	10.643.565,03	13.731.359.728,17
Panjar Tidak Lancar	2.961.573.242,00	0,00	11.420.000,00	2.950.153.242,00
Piutang Pegawai Tidak Lancar	153.327.225,00	0,00	0,00	153.327.225,00
Piutang TGR	1.506.032.334,00	0,00	0,00	1.506.032.334,00
Jumlah	223.215.272.299,00	16.114.040.793,20	15.851.312.328,03	223.478.000.764,17

Penjelasan aset lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan
Rp205.137.128.235*

D.3.4.1. Aset Tetap Yang Tidak Dapat Digunakan

Aset tetap yang tidak dapat digunakan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp205.137.128.235,00 dan Rp205.572.092.290,00 merupakan aset tetap yang sudah rusak atau tidak dapat dimanfaatkan kembali. (Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dapat dilihat pada lampiran 22).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp205.572.092.290,00 terdapat mutasi tambah sebesar Rp15.394.284.708,00 dan mutasi kurang sebesar Rp15.829.248.763,00. Penjelasan mutasi aset tetap tidak dapat digunakan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Transaksi	Jumlah (Rp)
Saldo Awal	205.572.092.290,00
Mutasi Tambah	
- Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	15.394.284.708,00
Total Mutasi Tambah	15.394.284.708,00
Mutasi Kurang	
- Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	6.408.700.197,00
- Pencatatan barang yang mau dihapuskan	9.110.628.566,00
- Penghapusan (BMN yang dihentikan)	309.920.000,00
Total Mutasi Kurang	15.829.248.763,00
Saldo Akhir	205.137.128.235,00

Mutasi Tambah:

- Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp15.394.284.708,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp3.556.741.336,00 merupakan reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA/11/A4.5/5/2022

- Sebesar Rp1.686.052.744,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 03/A1.1/11/2022
- Sebesar Rp6.076.511.999,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan Berita Acara BA 13/A4.6/6/2022
- Sebesar Rp579.392.849,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA 7/A4.7/11/2022
- Sebesar Rp973.569.804,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA 46/A4.5/12/2022
- Sebesar Rp2.522.015.976,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan Berita Acara BA No. 25/A4.8/12/2022 dan 176/A4.8/10/2022

Mutasi Kurang:

- Penggunaan Kembali BMN yang Sudah Dihentikan sebesar Rp6.408.700.197,00 terdiri dari:
 - Sebesar Rp6.384.607.340,00 merupakan Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan Penggunaan pada UAPKPB BUBU Hang Nadim sesuai dengan Berita Acara BA-09/A4.41/AP.00/10/2022
 - Sebesar Rp5.072.857,00 merupakan Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan Penggunaan pada UAPKPB

- BUBU Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA 6/A4.7/10/2022
- Sebesar Rp19.020.000,00 merupakan Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan Penggunaan pada UAPKPB BUBU Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan Berita Acara BA 45/A4.5/12/2022
 - Pencatatan barang yang mau dihapuskan sebesar Rp9.110.628.566,00, terdiri dari:
 - Sebesar Rp910.035.000,00 merupakan pencatatan barang yang mau dihapuskan pada UAPKPB Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadim sesuai dengan SK Kepala BP Batam no.139 Tahun 2022
 - Sebesar Rp1.281.556.157,00 merupakan pencatatan barang yang mau dihapuskan pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sesuai dengan SK Kepala BP Batam No. 90 Tahun 2022 dan SK No. 139 Tahun 2022
 - Sebesar Rp343.768.125,00 merupakan pencatatan barang yang mau dihapuskan pada UAPKPB Badan Usaha Pelabuhan sesuai dengan SK Kepala BP Batam no. 88 Tahun 2022
 - Sebesar Rp1.437.368.000,00 merupakan Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan pada UAPKPB Biro Umum sesuai dengan Berita Acara BA 03/A1.1/11/2022
 - Sebesar Rp1.664.603.316,00 merupakan Pencatatan Barang yang mau dihapuskan pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan surat keputusan Kepala BP Batam No. 89 Tahun 2022
 - Sebesar Rp574.319.992,00 merupakan Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan pada UAPKPB Badan Usaha Fasilitas

- dan Lingkungan sesuai dengan Berita Acara BA 7/A4.7/11/2022
- Sebesar Rp2.522.015.976,00 merupakan Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan pada UAPKPB Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sesuai dengan Berita Acara BA No. 25/A4.8/12/2022 dan 176/A4.8/10/2022
 - Sebesar Rp376.962.000,00 merupakan Pencatatan Barang yang Mau Dihapuskan pada UAPKPB Kantor Perwakilan Jakarta sesuai dengan Berita Acara SK Kepala BP Batam No. 22 Tahun 2022
 - Penghapusan (BMN yang Dihentikan) sebesar Rp309.920.000,00 merupakan Penghapusan (BMN yang dihentikan) pada UAPKPB Badan Usaha Rumah Sakit sesuai dengan surat keputusan Kepala BP Batam No. 89 Tahun 2022

Piutang Tidak Lancar
Rp13.731.359.728

D.3.4.2. Piutang Tidak Lancar

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.731.359.728,00 merupakan piutang dengan umur lebih dari dua tahun yang diperkirakan tidak dapat ditagih atau macet. Piutang tidak lancar tersebut adalah piutang yang telah diusulkan kepada KPKNL untuk ditindaklanjuti penagihannya maupun penghapusannya. Adapun piutang tidak lancar terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	6.822.534.430,00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	512.376.810,00
3	BUBU Hang Nadim	1.213.568.396,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	3.480.383.476,00
5	Badan Usaha Rumah Sakit	1.702.496.616,00
Total		13.731.359.728,00

Rincian piutang tidak lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.731.359.728,00 terdiri dari:

D.3.4.2.a. Kantor Pusat

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Biro Keuangan	5.903.473.840,00
2	Direktorat Infrastruktur Kawasan	919.060.590,00
	Total	6.822.534.430,00

(Kronologis piutang royalti pasir dan daftar piutang tidak lancar dapat dilihat pada Lampiran 23).

D.3.4.2.b. Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp512.376.810,00 Piutang yang telah berumur di atas 2 tahun yang telah diserahkan pengurusannya ke KPKNL Batam No. B/2507/A4/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014, No. B-563/A1/KU.03/4/2019 tanggal 19 April 2019, No. B-564/A1/KU.03/4/2019 tanggal 29 April 2019, No. B-565/A1/KU.03/4/2019 tanggal 29 April 2019, No. B-566/A1/KU.03/4/2019 tanggal 29 April 2019.

D.3.4.2.c. BUBU Hang Nadim

No	Nama Debitur	Jumlah (Rp)
1	Prodexim BUMD	264.986.807,28
2	PT. Mandala Airline	138.824.300,00
3	PT. Gading Aerindo Satia	57.527.800,00
4	Batavia Air	429.134.200,00
5	Thomas Cook Airlines Ltd	83.556.000,00
6	PT. Kartika Air	178.453.259,40
7	Paparons Pizza	11.078.900,00
8	Good Way Hotel	50.007.129,32
	Total	1.213.568.396,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 24).

D.3.4.2.d. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.480.383.476,00 merupakan Piutang yang telah berumur di

atas 2 tahun yang telah diserahkan pengurusannya ke KPKNL.
(Rincian dapat dilihat pada lampiran 25).

D.3.4.2.e. Rumah Sakit BP Batam

Piutang tidak lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.702.496.616,00 terdiri dari Piutang Tidak Tertagih Perorangan SP3N 114-264/PUPNC.31.00/2017 sebesar Rp288.294.737,00, SP3N 83-382/PUPNC.31.00/2018 sebesar Rp581.131.521,00, SP3N 04-314/PUPNC.31.00/2019 sebesar Rp582.315.518,00 dan SP3N 1-187/PUPNC.31.00/2020 sebesar Rp250.754.840,00 (Rincian dapat dilihat pada lampiran 26).

*Panjar Tidak Lancar
Rp2.950.153.242*

D.3.4.3. Panjar Tidak Lancar

Panjar tidak lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.950.153.242,00 merupakan panjar yang belum dipertanggungjawabkan sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 2011. Upaya penagihan telah dilakukan kepada para pengambil panjar yang belum dipertanggungjawabkan akan panjar tersebut di atas, tetapi kondisi penerima panjar saat ini banyak yang telah pensiun, pindah instansi, alamat tidak jelas sampai dengan telah meninggal dunia. Upaya terus dilakukan guna menyelesaikan panjar tersebut dengan telah dibuatnya Tim Penyelesaian Panjar Tidak Lancar tersebut dengan kemajuan sampai dengan sekarang. Mengingat panjar tersebut terjadi pada tahun 2011 dan sebelumnya serta menjadi beban tahun yang bersangkutan, agar tidak membebani tahun anggaran berikutnya maka terhadap saldo panjar tersebut dibentuk penyisihannya. Atas nilai sisa panjar sebesar Rp2.961.573.242,00 yang telah didukung dengan surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan dan Inspektorat (Satuan Pemeriksa Internal sekarang) serta mengetahui Anggota 1/Deputi Administrasi dan Umum.

Rincian panjar tidak lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.950.153.242,00 berdasarkan tahun pengambilan panjar terdiri dari:

Tahun	Saldo Awal 01 Januari 2022 (Audited)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2022 (Audited)
1993	5.370.000,00	-	-	5.370.000,00
1994	2.050.000,00	-	-	2.050.000,00
1995	98.481.500,00	-	-	98.481.500,00
1996	5.575.000,00	-	-	5.575.000,00
1997	12.228.175,00	-	-	12.228.175,00
1998	30.595.000,00	-	-	30.595.000,00
1999	34.600.000,00	-	-	34.600.000,00
2000	28.048.000,00	-	-	28.048.000,00
2001	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00
2002	348.984.000,00	-	-	348.984.000,00
2003	450.905.830,00	-	-	450.905.830,00
2004	543.674.500,00	-	-	543.674.500,00
2005	134.984.148,00	-	-	134.984.148,00
2006	259.176.289,00	-	-	259.176.289,00
2007	224.500.000,00	-	-	224.500.000,00
2008	230.597.350,00	-	-	230.597.350,00
2009	346.834.950,00	-	11.420.000,00	335.414.950,00
2010	57.263.500,00	-	-	57.263.500,00
2011	140.705.000,00	-	-	140.705.000,00
	2.961.573.242,00	-	11.420.000,00	2.950.153.242,00

(Rincian dilihat pada Lampiran 27).

Piutang Pegawai
Tidak Lancar
Rp153.327.225

D.3.4.4. Piutang Pegawai Tidak Lancar

Piutang pegawai tidak lancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp153.327.225,00 merupakan kelebihan biaya pengobatan pegawai yang ditanggung oleh Badan Pengusahaan Batam namun belum dibayar ke Badan Pengusahaan Batam/Biro Sumber Daya Manusia. Piutang pegawai tidak lancar per 31 Desember 2022 terdiri dari piutang pegawai tidak lancar Kantor

Pusat sebesar Rp153.327.225,00. (Rincian dilihat pada Lampiran 28).

Piutang TGR
Rp1.506.032.334

D.3.4.5. Piutang TGR

Piutang TGR per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.506.032.334,00 merupakan reklasifikasi dari piutang lain-lain. Piutang dimaksud telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (KPKNL) Batam sesuai surat Nomor SP3N-02/PUPNC.04/2015 tanggal 11 Maret 2015.

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
(Cadangan Aset Lain-
lain)
Rp258.418.420.823

D.3.5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain)

Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp258.418.420.823,00 dan Rp258.104.891.887,00 terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Akumulasi penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	16.506.738.505,00	25.620.102.602,00
Akumulasi penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	173.173.865.629,00	167.443.991.839,00
Cadangan Piutang Tidak Lancar	13.731.359.728,00	13.022.247.206,00
Cadangan Panjar Tidak Lancar	2.950.153.242,00	2.961.573.242,00
Cadangan Piutang Pegawai	153.327.225,00	153.327.225,00
Akumulasi Amortisasi Software	45.641.851.734,00	43.182.449.021,00
Akumulasi Amortisasi Lisensi	5.913.616.660,00	5.373.692.652,00
Akumulasi penyusutan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi	347.508.100,00	347.508.100,00
Total	258.418.420.823,00	258.104.891.887,00

Mutasi Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya (Cadangan Aset Lain-lain) sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal 1 Januari 2022 (Audited) (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir s.d 31 Desember 2022 (Audited) (Rp)
		Debit (Rp)	Kredit (Rp)	
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	25,620,102,602.00	101,143,556,618.00	1,002,322,202,088.00	16,506,738,505.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tidak Dapat Digunakan	167,443,991,839.00	0.00	5,729,873,790.00	173,173,865,629.00
Cadangan Piutang Tidak Lancar	13,022,247,206.00	18,678,404.00	727,790,926.00	13,731,359,728.00
Cadangan Panjar Tidak Lancar	2,961,573,242.00	11,420,000.00	0.00	2,950,153,242.00
Cadangan Piutang Pegawai	153,327,225.00	0.00	0.00	153,327,225.00
Akumulasi Amortisasi Software	43,182,449,021.00	0.00	2,459,402,713.00	45,641,851,734.00
Akumulasi Amortisasi Lisensi	5,373,692,652.00	0.00	539,924,008.00	5,913,616,660.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi	347,508,100.00	0.00	0.00	347,508,100.00
Jumlah	258,104,891,887.00	1,011,465,664,589.00	1,011,779,193,525.00	258,418,420,823.00

Kewajiban
Rp4.031.983.922.321

D.4. Kewajiban

Saldo kewajiban per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp4.031.983.922.321,00 dan Rp3.294.800.223.949,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	221,581,816,233.00	149,563,753,288.00
2	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima Dimuka	3,810,384,986,340.00	3,145,231,138,151.00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	17,119,748.00	5,332,510.00
	Jumlah	4,031,983,922,321.00	3,294,800,223,949.00

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp221.581.816.233

D.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp221.581.816.233,00 terdiri dari:

Keterangan	Saldo Awal Per 1 Januari 2022 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Audited)
		Tambah	Kurang	
Belanja Barang yang masih harus dibayar	6.510.552.927,00	45.691.686.579,00	27.408.860.020,00	24.793.379.486,00
Utang Usaha	253.000.000,00	117.019.667.007,00	112.446.805.656,00	4.825.861.351,00
Titipan Pihak Ketiga	127.670.644.800,00	263.546.531.367,00	199.254.600.769,00	191.962.575.396,00
Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU	15.129.555.561,00	628.870.917,00	15.758.426.478,00	0,00
Jumlah	149.563.753.288,00	426.886.755.870,00	354.868.692.923,00	221.581.816.233,00

(Rincian dilihat pada Lampiran 29).

*Belanja Barang
Yang Masih Harus
Dibayar
Rp24.793.379.486*

D.4.1.1. Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar

Belanja barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.793.379.486,00 merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Biaya yang masih harus dibayar yaitu biaya-biaya yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar termasuk bagian biaya/bunga yang telah diakui sampai tanggal laporan posisi keuangan tetapi biaya secara keseluruhan belum jatuh tempo. Biaya barang yang masih harus dibayar per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.793.379.486,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji, Upah dan Tunjangan yang masih harus dibayar	14.266.488.422,00
2	Biaya Listrik	3.643.912.541,00
3	Biaya Telepon	110.405.200,00
4	Biaya Air	446.896.050,00
5	Jasa Medik dan Pelayanan Kesehatan yang Masih Harus Dibayar	6.303.614.444,00
6	Biaya Langganan Daya dan Jasa Lainnya	10.222.000,00
7	Biaya Perjalanan Dalam Negeri	11.035.829,00
8	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	805.000,00
	Jumlah	24.793.379.486,00

D.4.1.2 Utang Usaha

Utang usaha Badan Pengusahaan Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.825.861.351,00 merupakan utang usaha atas kegiatan operasional Badan Pengusahaan Batam yang terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	1.763.711.250,00
2	Badan Usaha Rumah Sakit	3.062.150.101,00
	Jumlah	4.825.861.351,00

Utang usaha per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.825.861.351,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.4.1.2.a. Kantor Pusat

Utang usaha Kantor Pusat per 31 Desember 2022 Sebesar Rp1.763.711.250,00 merupakan utang usaha Pusat Data dan Sistem Informasi berupa pemeliharaan server dan storage aplikasi BP Batam sesuai hasil reviu SPI ND No 23/SPI/PI.00.05/01/2022 dan Utang Usaha Biro Umum berupa belanja konsumsi sesuai hasil reviu SPI ND No 22/SPI/PI.00.05/02/2022

D.4.1.2.b. Badan Usaha Rumah Sakit

Utang usaha Badan Usah Rumah Sakit per 31 Desember 2022 Sebesar Rp3.062.150.101,00 merupakan utang atas pengadaan obat dan barang habis pakai alat kesehatan sesuai Berita Acara Rekonsiliasi antara SPI dengan Badan Usaha Rumah Sakit No. BA-4/A4.6/PI.00.05/01/2023 dan BA-1/SPI/PI.00.05/01/2023 tanggal 25 Januari 2023, serta UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp45,000,000.00 Utang Pemeliharaan atas Tagihan PT Rumah Sakit PELNI (Maintenance PHIS 2nd Generation bulan November dan Desember 2022 sesuai Nota Dinas Kepala SPI nomor 95/SPI/PI.00.05/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 hal Laporan Hasil Reviu Utang TA 2022.

Titipan Pihak
Ketiga
Rp191.962.575.396

D.4.1.3. Titipan Pihak Ketiga

Titipan pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam Per 31 Desember 2022 sebesar Rp191.962.575.396,00 merupakan uang jaminan pelanggan pada Badan Pengusahaan Batam atas penggunaan jasa yang diberikan dan perkiraan yang menampung transaksi penerimaan yang belum dicatat sebagai pendapatan karena bukti penyeteroran belum diperoleh. Rincian titipan pihak ketiga Badan Pengusahaan Batam terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	130.993.876.241,00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	772.431.935,00
3	Badan Usaha Bandar Udara	2.171.511.022,00
4	Badan Usaha Pelabuhan	5.065.935.479,00
5	Badan Usaha Rumah Sakit	881.832.916,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	75.102.714,00
7	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	52.001.885.089,00
	Jumlah	191.962.575.396,00

Rincian titipan pihak ketiga per 31 Desember 2022 menurut jenis titipannya pada masing-masing unit di BP Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:

D.4.1.3.a. Kantor Pusat

Titipan pihak ketiga pada Kantor Pusat Per 31 Desember 2022 sebesar Rp130.993.876.241,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Sementara	508.444.293,00
2	Titipan Penerimaan Pihak Ketiga Lainnya	7.762.623.787,00
3	Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP)	102.831.126.708,00
4	Titipan Uang Muka UWTO	18.746.393.250,00
5	Titipan Jaminan Lainnya	1.145.288.203,00
	Jumlah (1 s.d 6)	130.993.876.241,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 30).

Titipan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp130.993.876.241,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penerimaan sementara pada neraca sebesar Rp508.444.293,00 merupakan penerimaan sementara Tahun 2018 sampai 2022.
- Titipan penerimaan pihak ketiga lainnya sebesar Rp7.762.623.787,00 terdiri dari:
 - Penerimaan atas faktur yang tidak dapat diidentifikasi sebesar Rp434.018.000,00 (sesuai nota dinas Direktur Lahan Nomor 209/A1.1/LHN/12/2015 tanggal 18 Desember 2015)
 - Penerimaan atas pembayaran UWTO PT Pertamina pada tanggal 27 Oktober 2014 sebesar Rp7.083.589.587,00 atas faktur yang diterbitkan atas UWTO tersebut adalah sebesar Rp10.475.128.090,00 (nomor faktur C.0045041304 tanggal 9 April 2014). Atas alokasi lahan yang diberikan kepada PT Pertamina mengalami perubahan yang belum memperoleh kesepakatan. Kemudian pada tanggal 22 Januari 2015, Deputi Bidang Pengusahaan Sarana dan Usaha menerbitkan surat Nomor B/86/KA.A3/1/2015 yang menyatakan pembatalan sebagian alokasi lahan PT Pertamina dan agar UWTO yang telah dibayarkan (Rp7.083.589.587,00) agar ditagih kembali ke Badan pengusahaan Batam, namun sampai dengan 31 Desember 2018 belum direalisasikan.
 - Penerimaan atas pembayaran UWTO sebesar Rp245.016.200,00 pada tanggal 23 Desember 2014 yang tidak dapat diidentifikasi baik faktur maupun penyetor (sampai dengan berakhirnya periode Laporan Keuangan Direktorat Lahan belum memberikan klarifikasi yang memadai).

- Jaminan Pelaksanaan Pembangunan (JPP) Per 31 Desember 2022 di neraca sebesar Rp102.831.126.708,00 merupakan Jaminan yang harus diberikan oleh pihak konsumen atau investor sebagai pelaksanaan pembangunan diatas lahan yang telah di alokasikan.
- Titipan Uang Muka UWTO per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.746.393.250,00 adalah perkiraan yang menampung uang Muka UWTO yang belum diakui sebagai pendapatan UWTO.
- Titipan Jaminan Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.145.288.203,00 merupakan Jaminan Kesanggupan.

D.4.1.3.b. Badan Usaha fasilitas dan Lingkungan

Titipan pihak ketiga pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp772.431.935,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Deposit pada Kantor Air dan Limbah	129.453.740,00
2	Titipan Dana Rusun Batu Ampar	91.215.000,00
3	Titipan Dana Rusun Sekupang	84.406.250,00
4	Titipan Dana Rusun Muka Kuning	206.710.175,00
5	Titipan Dana Rusun Kabil	196.170.000,00
6	Titipan Dana Rusun Tanjung Uncang	14.625.000,00
7	Titipan Dana Pihak Ketiga lainnya	10.000.000,00
8	Penerimaan Sementara	39.851.770,00
	Jumlah	772.431.935,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 31).

- Titipan Pihak Ketiga Kantor Pengelolaan Air dan Limbah per 31 Desember 2022 sebesar Rp129.453.740,00 merupakan deposit atas uang jaminan pelanggan KPLI B3, yang apabila perjanjian berakhir dan pelanggan mengundurkan diri, maka pelanggan dapat meminta kembali uang jaminan tersebut.

- Titipan dana Rusun Batu Ampar per 31 Desember 2022 sebesar Rp91.215.000,00 merupakan titipan atas penyewa Rusun Batu Ampar yang akan dikembalikan pada saat penyewa check out.
- Titipan dana Rusun Sekupang per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.406.250,00 merupakan titipan atas penyewa Rusun Sekupang yang akan dikembalikan pada saat penyewa check out.
- Titipan dana Rusun Muka Kuning per 31 Desember 2022 sebesar Rp206.710.175,00 merupakan titipan atas penyewa Rusun Muka Kuning yang akan dikembalikan pada saat penyewa check out.
- Titipan dana Rusun Kabil per 31 Desember 2022 sebesar Rp196.170.000,00 merupakan titipan atas penyewa Rusun Kabil yang akan dikembalikan pada saat penyewa check out.
- Titipan dana Rusun Tanjung Uncang per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.625.000,00 merupakan titipan atas penyewa Rusun Tanjung Uncang yang akan dikembalikan pada saat penyewa check out.
- Titipan pihak ketiga lainnya sebesar Rp10.000.000,00 merupakan titipan listrik Taman Kolam Sekupang.
- Penerimaan sementara per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.851.770,00 pada akun titipan Pihak Ketiga adalah penerimaan sementara dari pendapatan sekuter listrik dan sepeda air Taman Rusa Sekupang, penerimaan sementara jasa giro pada bank Dana Kelolaan yang akan dipindahkan pada bulan berikutnya dan penerimaan sementara dari kesalahan setor PT Signal Kabel Media.
Penerimaan Sementara per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.851.770,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Penerimaan sementara pada rekening Dana Kelolaan Bank BNI No. Rek 288588997 sebesar Rp651.770,00
- b. Penerimaan sementara pada rekening Bank BNI No Rek. 2458899885 sebesar Rp5.400.000,00
- c. Penerimaan sementara pada rekening Bank Mandiri No Rek. 1090017474644 sebesar Rp33.800.000,00

D.4.1.3.c. Badan Usaha Bandar Udara

Titipan pihak ketiga pada BUBU Per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.171.511.022,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Sementara	879.929.877,00
2	Titipan Pembayaran Pihak Ketiga Lainnya	1.291.581.145,00
	Jumlah	2.171.511.022,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 32).

- Penerimaan Sementara sebesar Rp879.929.877,00 dari penerimaan yang tidak diketahui debiturnya sebesar Rp577.239.432,00, penerimaan yang telah diketahui debiturnya tetapi tidak diketahui peruntukan pembayarannya sebesar Rp252.386.210,00, kelebihan pembayaran dengan nominal diatas Rp1.000,00 sebesar Rp50.304.235,00.
- Titipan Pembayaran Pihak ketiga Lainnya sebesar Rp1.291.581.145,00 adalah Titipan Jaminan Jasa Layanan Kemandarudaraan sesuai kontrak.

D.4.1.3.d. Badan Usaha Pelabuhan

Titipan pihak ketiga Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.065.935.479,00. Titipan Pihak Ketiga Badan Pengelola Pelabuhan Batam per 31 Desember

2022 merupakan sisa penerimaan di Bank yang belum diketahui peruntukannya. Mutasi sebesar Rp208.285.557,00 adalah penambahan penerimaan sementara pada bank untuk pelunasan piutang usaha sesuai dengan pencatatannya. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 33).

D.4.1.3.e. Badan Usaha Rumah Sakit

Titipan pihak ketiga pada Rumah Sakit BP Batam per 31 Desember 2022 sebesar Rp881.832.916,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Deposit/simpanan Pelanggan RSBP	398.353.630,00
2	Titipan Dana Pihak Ketiga Lainnya	449.573.961,00
3	Penerimaan Sementara	33.905.325,00
	Jumlah	881.832.916,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 34).

Titipan pihak ketiga per 31 Desember 2022 sebesar Rp881.832.916,00 dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Deposit sebesar Rp398.353.630,00 merupakan jaminan pasien umum dalam perawatan yang belum diselesaikan pada saat pasien pulang.
- Titipan Dana Pihak Ketiga lainnya sebesar Rp449.573.961,00 merupakan jaminan perusahaan.
- Penerimaan Sementara sebesar Rp33.905.325,00.

D.4.1.3.f. Kantor Perwakilan Jakarta

Titipan pihak ketiga pada Kantor Perwakilan Jakarta per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.102.714,00 terdiri dari sisa dana *service charge* sebesar 10% yang digunakan untuk jasa layanan pegawai Kuningan Guest House yang belum dibayar sebesar Rp35.102.714,00 dan Titipan jaminan mitra kerjasama PT GWA sebesar Rp40.000.000,00. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 35).

D.4.1.3.g. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Titipan pihak ketiga pada Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.001.885.089,00 merupakan jaminan pelanggan air bersih dan akan dikembalikan kepada pelanggan apabila tidak menjadi pelanggan dengan air minum Badan Usaha SPAM, serta dapat diperhitungkan apabila pelanggan menunggak tagihan pemakaian air bersih.

*Dana Pihak Ketiga
Lainnya BLU Rp0*

D.4.1.4 Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU

Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp15.129.555.561,00 Mutasi penambahan dan pengurangan Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saldo Awal Per 1 Januari 2022 (Audited)	Tambah	Kurang	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Audited)
Dana Pihak Ketiga Lainnya BLU	15.129.555.561,00	628.870.917,00	15.758.426.478,00	0,00
Jumlah	15.129.555.561,00	628.870.917,00	15.758.426.478,00	0,00

- Penambahan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp628.870.917,00 merupakan catatan jurnal cek beredar.
- Pengurangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.758.426.478,00 merupakan jurnal balik cek beredar yang sudah tercatat.

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp3.810.384.986.340*

D.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.810.384.986.340,00 dan Rp3.145.231.138.151,00 yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari hak atas pengalokasian lahan selama 30 (tiga puluh) tahun pada unit Direktorat Pengelolaan Lahan, Pendapatan sewa di Badan Usaha Rumah Sakit, Badan Usaha Pelabuhan, Badan Usaha

Fasilitas dan Lingkungan dan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum. (Rincian dapat dilihat pada lampiran 36).

Mutasi penambahan dan pengurangan pendapatan diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Unit	Saldo Awal Per 1 Januari 2022 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Audited)
		Tambah	Kurang	
Kantor Pusat	3.133.925.439.626,00	942.301.105.631,00	274.735.077.110,00	3.801.491.468.147,00
Badan Usaha Rumah Sakit	105.878.546,00	257.885.166,00	59.596.381,00	304.167.331,00
Badan Usaha Pelabuhan	9.875.323.132,00	4.658.004.817,00	7.625.689.874,00	6.907.638.075,00
Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	1.324.496.847,00	1.235.997.965,00	1.324.496.845,00	1.235.997.967,00
Badan Usaha SPAM	0,00	500.149.700,00	54.434.880,00	445.714.820,00
Jumlah	3.145.231.138.151,00	948.953.143.279,00	283.799.295.090,00	3.810.384.986.340,00

- Penambahan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp948.953.143.279,00 terdiri dari Pendapatan Yang Ditangguhkan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp942.301.105.631,00 pada Direktorat pengelolaan Lahan terdiri dari Pendapatan UWTO Yang ditangguhkan selama per 31 Desember 2022 dan pendapatan diterima dimuka Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp257.885.166,00 merupakan pendapatan diterima dimuka ATM dan Indomaret, Badan Usaha Pelabuhan sebesar Rp4.658.004.817,00 merupakan pendapatan sewa periode tahun 2023 yang telah dibukukan pada tahun 2022 sehingga harus dilakukan penyesuaian kembali pada tahun 2022, Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp1.235.615.519,00 merupakan pendapatan sewa lahan kosong di Kawasan Olah Raga Temenggung Abdul Jamal, pendapatan sewa ruang ATM PT. Bank BNI Rusun Muka Kuning, pendapatan sewa Lahan Tower Lokasi Tanjung Riau, pendapatan sewa Lahan Tower Lokasi Legenda Malaka, pendapatan sewa Lahan

Tower Lokasi Sei. Binti, pendapatan sewa Lahan Tower Lokasi Benih Raya Tanjung Riau, pendapatan sewa Lahan Tower Lokasi Sei. Temiang, pendapatan sewa lahan Simpang Patam dan pendapatan sewa Ruang Bank Mandiri dan Badan Usaha SPAM sebesar Rp500.149.700,00 merupakan pendapatan yang diterima atas sewa lahan untuk tower, UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp382.446,00 merupakan pendapatan diterima dimuka Unit Usaha Fasilitas dan Lingkungan Periode Desember 2022 (sewa lahan tower dan sewa lahan simpang patam)

- Pengurangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp283.799.295.090,00 terdiri dari Pendapatan Yang Ditangguhkan pada 31 Desember 2022 sebesar Rp274.735.077.110,00 pada Direktorat Pengelolaan Lahan, Badan Usaha Rumah Sakit sebesar Rp57.763.048,00 merupakan penyesuaian pendapatan diterima dimuka, Pengurangan Pada Badan Usaha Pelabuhan sebesar Rp7.625.689.874,00 merupakan pendapatan sewa periode tahun 2023 yang telah dibukukan pada tahun 2022 sehingga harus dilakukan penyesuaian kembali pada tahun 2022, Pengurangan pada Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sebesar Rp1.324.496.845,00 merupakan pendapatan sewa diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2022 dan Pengurangan Badan Usaha SPAM sebesar Rp54.434.880,00 merupakan pendapatan sewa diterima dimuka sampai dengan 31 Desember 2022, UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp1.833.333,00 merupakan koreksi Kurang Catat pendapatan 1 bulan atas sewa diterima dimuka ATM PT BNI dengan perjanjian 2 Tahun (15 Agustus 2022 sd 14 Agustus 2024) Nomor Faktur B-1416/A4.6/RS.05.04/9/2022

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp17.119.748

D.4.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp17.119.748,00 dan Rp5.332.510,00 yang terdiri dari:

Keterangan	Saldo Awal Per 1 Januari 2022 (Audited)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022 (Audited)
		Tambah	Kurang	
Utang Pajak	5.332.510,00	47.002.722.363,00	46.990.935.125,00	17.119.748,00
Jumlah	5.332.510,00	47.002.722.363,00	46.990.935.125,00	17.119.748,00

(Rincian dapat dilihat pada lampiran 37).

Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.119.748,00 merupakan utang pajak daerah (PB1) atas penerimaan dari kegiatan operasional Kuningan *Guest House* Jakarta yang belum disetorkan sebesar Rp17.119.748,00.

Kuningan *Guest House* terdaftar sebagai subjek pajak PB1 sejak bulan Mei 2015 sesuai Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD) 106.15.04.07.0002 TMT tanggal 1 Mei 2015 dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah 15.2.01.05.0001 tanggal 29 Mei 2015.

Ekuitas
Rp50.874.883.595.847

D.5 Ekuitas

Jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.874.883.595.847,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas Awal Badan Pengusahaan Batam per 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp51.502.116.780.170,00 sedangkan defisit-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp696.809.411.123,00. Disisi lain, terdapat koreksi yang menambah ekuitas sebesar Rp75.143.747.611,00 yang terdiri Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp72.500,00, ditambah Koreksi Nilai Aset

Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp34.397.337.641,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp40.746.337.470,00, Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp5.567.520.811,00). Dengan demikian terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp627.233.184.323,00 sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp50.874.883.595.847,00.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak Lainnya
Rp1.186.138.586.553*

E.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan negara bukan pajak lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.186.138.586.553,00 dan Rp1.347.743.362.271,00.

Pendapatan negara bukan pajak lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari:

E.1.1 Pendapatan Alokasi APBN

Pendapatan Alokasi APBN untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp49.241.880.694,00 dan Rp333.626.344.540,00 jumlah tersebut Belanja Modal yang berasal dari PHLN sebesar Rp49.241.880.694,00.

E.1.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp1.136.896.705.859,00 dan Rp1.013.408.969.431,00 Jumlah tersebut merupakan pendapatan operasional yang diperoleh dari penerimaan atas jasa pada unit-unit usaha Badan Pengusahaan Batam. Rincian pendapatan jasa layanan dari masyarakat lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2021 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
A. Pendapatan Usaha Dari Jasa Layanan			
1	Pendapatan Kantor Pusat	165.212.307.231,00	67.664.554.004,00
2	Pendapatan Fasilitas dan Lingkungan	21.105.270.827,00	107.774.830.485,00
3	Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim	91.802.669.546,00	122.107.203.001,00
4	Pendapatan Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	251.516.764.122,00	270.448.326.309,00
5	Pendapatan Usaha Kantor Perwakilan Jakarta	679.356.322,00	238.989.537,00
6	Pendapatan Usaha Rumah Sakit BP Batam	150.597.323.212,00	187.518.694.299,00
7	Pendapatan Usaha SPAM	54.296.020.992,00	0,00
Jumlah A = (1+2+3+4+5+6+7)		735.209.712.252,00	755.752.597.635,00
B. Pendapatan Usaha Lainnya			
1	Pendapatan Kantor Pusat	35.369.802.717,00	26.305.394.985,00
2	Pendapatan Fasilitas dan Lingkungan	1.104.654.355,00	166.480.355.161,00
3	Pendapatan Usaha BUBU Hang Nadim	54.508.627.524,00	2.551.935.219,00
4	Pendapatan Usaha Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	49.866.269.957,00	61.235.942.025,00
5	Pendapatan Usaha Kantor Perwakilan Jakarta	8.817.736,00	5.347.843,00
6	Pendapatan Usaha Rumah Sakit BP Batam	2.612.488.084,00	1.077.120.465,00
7	Pendapatan Usaha SPAM	258.216.153.190,00	0,00
Jumlah (B)		401.686.813.563,00	257.656.095.698,00
C. Retur Pendapatan & Keuntungan Lainnya			
1	BUBU Hang Nadim	180.044,00	276.098,00
Jumlah (C)		180.044,00	276.098,00
Jumlah (A+B+C)		1.136.896.705.859,00	1.013.408.969.431,00

Pendapatan Usaha
dari Jasa Layanan
Rp735.209.712.252

E.1.2.1 Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan

Pendapatan Usaha dari jasa layanan per 31 Desember 2022 sebesar Rp735.209.712.252,00 berdasarkan unit terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	165.212.307.231,00
2	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	21.105.270.827,00
3	BUBU Hang Nadim	91.802.669.546,00
4	Badan Usaha Pelabuhan	251.516.764.122,00
5	Kantor Perwakilan Jakarta	679.356.322,00
6	Badan Usaha Rumah Sakit	150.597.323.212,00
7	Badan Usaha SPAM	54.296.020.992,00
JUMLAH		735.209.712.252,00

E.1.2.1.1 Kantor Pusat

Pendapatan usaha Kantor Pusat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp165.212.307.231,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Direktorat Pengelolaan Lahan:	
	Pendapatan UWTO	132.717.610.519,00
	Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	9.474.342.988,00
	Pendapatan Administrasi Peralihan	6.856.686.876,00
	Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	25.900.000,00
	Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	428.200.000,00
	Pendapatan Penggantian Dokumen	12.800.000,00
	Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	971.700.000,00
	Jumlah 1	150.487.240.383,00
2.	Direktorat Infrastruktur Kawasan	
	Perijinan Pematangan Lahan	721.500.000,00
	Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	1.264.550.500,00
	Pendapatan dari sewa lahan reklame	965.365.348,00
	Jumlah 2	2.951.415.848,00
3.	Direktorat Lalu Lintas Barang	
	Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	162.450.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar	2.300.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	987.225.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	110.100.000,00
	Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	117.100.000,00
	Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	29.800.000,00
	Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian RoHS pada Logam, Polimer	4.070.000,00
	Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang Lainnya	6.900.000,00
	Jumlah 3	1.419.945.000,00
4.	Pusat Data dan Sistem Informasi	
	Pendapatan Data Center IT Center (detail)	10.353.706.000,00
	Jumlah 4	10.353.706.000,00
	Total	165.212.307.231,00

Pendapatan usaha dari jasa layanan terdiri dari pendapatan faktur dan pendapatan non faktur. Pendapatan faktur adalah pendapatan yang penerimaannya menggunakan faktur dan penyetorannya langsung dilakukan oleh pihak ketiga ke rekening Badan Pengusahaan Batam, sedangkan pendapatan non faktur adalah pendapatan yang penerimaannya disetorkan langsung oleh pihak ketiga ke rekening Badan Pengusahaan Batam tanpa menjadi Piutang terlebih dahulu. Pendapatan usaha berdasarkan

metode penerimaan (faktur dan non faktur) adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
Pendapatan dari Faktur		
Pendapatan UWTO	132.717.610.519,00	52.715.010.362,00
Pendapatan Pengukuran dan Penetapan Lokasi	9.474.342.988,00	2.984.031.017,00
Pendapatan Administrasi Peralihan	6.856.686.876,00	7.257.252.365,00
Pendapatan Revisi Gambar Penetapan Lokasi	25.900.000,00	26.400.000,00
Pendapatan Rekomendasi Hak Atas Tanah	428.200.000,00	1.145.600.000,00
Pendapatan Pecah dan Gabung Penetapan Lokasi	971.700.000,00	743.800.000,00
Pendapatan Penggantian Dokumen	12.800.000,00	20.700.000,00
Pendapatan dari sewa lahan reklame	965.365.348,00	0,00
Pendapatan Data Center IT Center (detail)	10.353.706.000,00	0,00
Jumlah (I)	161.806.311.731,00	64.892.793.744,00
Pendapatan dari Non Faktur		
Perijinan Pematangan Lahan	721.500.000,00	710.000.000,00
Pendapatan Pemakaian Lahan ROW untuk Utilitas	1.264.550.500,00	834.930.260,00
Pendapatan Perijinan Lalu Lintas Barang Lainnya	6.900.000,00	6.600.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Penerbitan Izin Usaha (Baru dan Perpanjangan)	162.450.000,00	118.850.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Penetapan Importir Terdaftar	2.300.000,00	300.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Barang	987.225.000,00	823.950.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pemasukan Sementara Barang	110.100.000,00	91.800.000,00
Pendapatan Jasa Pelayanan Perijinan Pengeluaran Sementara Barang	117.100.000,00	92.800.000,00
Pendapatan Jasa Rekomendasi Pelabuhan Khusus	29.800.000,00	63.200.000,00
Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian RoHS pada Logam, Polimer	4.070.000,00	24.930.000,00
Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening RoHS dengan Jasa Layanan	0,00	3.300.000,00
Pendapatan Jasa Layanan Laboratorium Pengujian Screening Unsur (Dari Carbon sampai)	0,00	1.100.000,00
Jumlah (II)	3.405.995.500,00	2.771.760.260,00
Total (I+II)	165.212.307.231,00	67.664.554.004,00

E.1.2.1.2 Fasilitas dan Lingkungan

Pendapatan usaha Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp21.105.270.827,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pengolahan Air Limbah	494.560.000,00
2	Penyedotan air limbah	16.200.000,00
3	Pendapatan retribusi dari pass masuk KPLI B	307.120.000,00
4	Pendapatan sewa	2.553.562.718,00
5	Pendapatan sewa rusun bida sekupang	1.463.102.362,00
6	Pendapatan sewa rusun bida ampar	1.934.504.848,00
7	Pendapatan sewa rusun bida kuning	3.609.500.898,00
8	Pendapatan rusun bida kabil	2.449.168.593,00
9	Pendapatan rusun lainnya	3.276.946,00
10	Pendapatan asrama haji	1.841.411.000,00
11	Pendapatan sporthall	377.796.644,00
12	Pendapatan sewa lahan untuk tower	509.957.407,00
13	Pendapatan guest house	215.336.250,00
14	Pendapatan sewa lainnya	1.072.330.325,00
15	Pendapatan agribisnis	754.901.500,00
16	Pendapatan retribusi	2.994.170.701,00
17	Pendapatan taman	43.900.000,00
18	Pendapatan unit usaha hunian, gedung, agribisnis dan taman lainnya	464.470.635,00
Jumlah		21.105.270.827,00

E.1.2.1.3 Badan Usaha Bandar Udara

Pendapatan usaha BUBU sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp91.802.669.546,00 terdiri dari Pendapatan aeronautika sebesar Rp50.478.180.575,00 dan Pendapatan non aeronautika sebesar Rp41.324.488.971,00.

Pendapatan aeronautika sebesar Rp50.478.180.575,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendaratan Dalam Negeri	2.644.915.150,00
2	Penempatan Dalam Negeri	626.498.500,00
3	Pendaratan Luar Negeri	523.537.275,00
4	Penempatan Luar Negeri	89.441.200,00
5	Pelayanan Jasa Penumpang Dalam Negeri (JP2U)	44.182.172.500,00
6	Pelayanan Jasa Penumpang Luar Negeri/Haji (JP2U)	80.000.000,00
7	Garbarata Dalam Negeri	1.059.200.000,00
8	Counter Dalam Negeri	990.301.200,00
9	Garbarata Luar Negeri	244.803.900,00
10	Counter Luar Negeri	2782500,00
11	Flight Approval/Local	100.000,00
12	GSE/Royalti	34.428.350,00
Jumlah		50.478.180.575,00

Pendapatan Non Aeronautika sebesar Rp41.324.488.971,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Sewa Perkantoran	1.413.070.040,00
2	Pendapatan Sewa Usaha	5.759.058.615,00
3	Pendapatan Sewa Jasa Pergudangan	117.113.310,00
4	Pendapatan Sewa Fasilitas X-Ray	979.584.000,00
5	Pendapatan Sewa Bus Apron	2.400.000,00
6	Pendapatan Sewa Tanah	149.230.200,00
7	Pendapatan Konsesi Perkantoran	865.108.895,00
8	Pendapatan Konsesi Usaha	4.671.674.541,00
9	Pendapatan Konsesi Pergudangan	6.444.685.185,00
10	Layanan Konsesi Lainnya	57.047.150,00
11	Pendapatan Sewa Space Reklame/ Iklan	227.277.500,00
12	Layanan Jasa Kargo & Pos Pesawat Udara Barang Impor	814.834.554,00
13	Layanan Pergudangan Domestik	33.727.290,00
14	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik KWH	1.213.406.478,00
15	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Listrik Catu Daya	934.157.081,00
16	Layanan Penunjang Lainnya - Penggunaan Air	265.422.802,00
17	Pendapatan Porter	57.600.000,00
18	Pendapatan Taxi (Biaya Pangkalan)	320.400.000,00
19	Pendapatan Pas Bandara	251.425.000,00
20	Pendapatan FDS	15.000.000.000,00
21	Pendapatan Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara (Fuel Throughput)	1.747.266.330,00
	Jumlah	41.324.488.971,00

E.1.2.1.4 Badan Usaha Pelabuhan Laut Batam

Pendapatan usaha dari jasa layanan Kepelabuhanan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp251.516.764.122,00 terdiri dari Pendapatan Usaha Jasa Layanan Kapal sebesar Rp129.310.109.926,00, Jasa Layanan Barang sebesar Rp75.986.881.334,00 dan Jasa Layanan Lainnya sebesar Rp46.219.772.862,00.

1. Pendapatan usaha jasa layanan kapal sebesar Rp129.310.109.926,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Jasa Labuh	100.563.649.784,00
2	Pendapatan Jasa Tambat	25.704.658.142,00
3	Pendapatan Jasa Air Tawar	3.041.802.000,00
	Jumlah	129.310.109.926,00

2. Pendapatan Usaha Jasa Layanan Barang sebesar Rp75.986.881.334,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Jasa Penumpukan Barang	10.883.124.144,00
2	Pendapatan Jasa Throughput	14.152.238.173,00
3	Pendapatan Jasa Bongkar Muat	50.951.519.017,00
	Jumlah	75.986.881.334,00

3. Pendapatan Jasa Layanan Lainnya Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sebesar Rp46.219.772.862,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Retribusi	21.024.341.000,00
-	Pendapatan Retribusi Pass Kendaraan	5.947.521.000,00
-	Pendapatan Pass Untuk Orang	995.050.000,00
-	Pendapatan Seaport Tax	14.081.770.000,00
2	Pendapatan Sewa	24.940.769.862,00
-	Pendapatan Iklan	28.899.133,00
-	Pendapatan Sewa Ruang	1.963.461.639,00
-	Pendapatan Sewa Tangki	10.290.795.319,00
-	Pendapatan Sewa Tanah	8.584.664.706,00
-	Pendapatan Sewa Rak	91.518.417,00
-	Pendapatan Sewa Gudang	184.000.000,00
-	Layanan Penggunaan Perairan	3.797.430.648,00
3	Pendapatan Jasa Layanan Lainnya	254.662.000,00
-	Pendapatan Jasa Yacht	254.662.000,00
	Jumlah	46.219.772.862,00

E.1.2.1.5 Kantor Perwakilan Jakarta

Pendapatan usaha Kantor Perwakilan Jakarta sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp679.356.322,00 merupakan pendapatan dari sewa kamar sebesar Rp268.417.305,00 dan pendapatan sewa usaha kuning Guest House lainnya sebesar Rp410.939.017,00.

E.1.2.1.6 Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Pendapatan Badan Usaha Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp150.597.323.212,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Rawat Inap	110.698.188.721,00
2	Pendapatan Rawat Jalan	36.149.329.112,00
3	Pendapatan Instalasi Gawat Darurat	2.480.870.586,00
4	Pendapatan Operasional Unit Penunjang	1.026.444.871,00
5	Pendapatan Operasional Lain	242.489.922,00
Jumlah		150.597.323.212,00

E.1.2.1.7 Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Pendapatan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp54.296.020.992,00 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Air Baku	54.218.346.228,00
2	Pendapatan Sewa Lahan Tower	74.589.060,00
3	Pendapatan Lainnya	3.085.704,00
Jumlah		54.296.020.992,00

Pendapatan Usaha
Lainnya
Rp401.686.813.563

E.1.2.2 Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp401.686.813.563,00 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya	358.068.105.219,00
Pendapatan Sewa	2.133.678.757,00
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan	24.715.416.788,00
Lain-lain	16.769.612.799,00
Jumlah	401.686.813.563,00

E.1.2.2.1. Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lainnya

Pendapatan usaha lainnya hasil kerjasama dengan pihak lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp358.068.105.219,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	BUBU Hang Nadim	52.004.794.121,00
2	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	49.051.744.513,00
3	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	257.011.566.585,00
	Total	358.068.105.219,00

(Rincian Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 38).

Pendapatan usaha lainnya hasil kerjasama dengan pihak lainnya sebesar Rp358.068.105.219,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya pada **BUBU Hang Nadim** sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp52.004.794.121,00 terdiri dari penerimaan kontribusi tetap atas kerjasama pengelolaan bandara dengan PT Bandara International Batam sebesar Rp51.009.509.280,00 dan kerjasama pengelolaan parkir dengan PT Adhil Sukses Pratama dan PT Harmoni Trisekawan Asia Abadi sebesar Rp995.284.841,00.
2. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya pada **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp49.051.744.513,00 terdiri dari

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	KSO Chasis	8.057.849.850,00
2	KSO Pandu	9.421.694.298,00
3	KSO Parkir	119.642.375,00
4	KSO Pelayanan Air Bersih Kapal	45.133.200,00
5	KSO Royalti	645.076.199,00
6	KSO Sampah	40.537.000,00
7	KSO Seaport Tax/Pass Orang	7.973.151.250,00
8	KSO Sewa Ruangan / Bangunan	200.145.253,00
9	KSO Tambat	5.017.760.047,00
10	KSO Tunda	16.230.590.775,00
12	KSO Fee Bongkar Muat	806.263.480,00
13	Pendapatan Hasil Kerjasama/KSO Lainnya	471.442.036,00
	Jumlah	49.051.744.513,00

Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam terdiri dari:

- Pendapatan KSO Chasis sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp8.057.849.850,00 adalah hasil kerjasama antara PT. Port Sekupang Batam dengan Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014. Pendapatan KSO Chasis juga diperoleh dari kerjasama antara BP Batam dan PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada dengan Perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022.
- Pendapatan KSO Pandu sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp9.421.694.298,00 adalah KSO Pemanduan antara BP Batam dan beberapa mitra KSO yaitu:
 - a. KSO Pemanduan PT. Bias Delta Pratama dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 213/SPJ/A1/10/2012 & 012/DIR-BDP/X/2012. Kemudian dilakukan perubahan perjanjian dengan nomor 1262/SPJ/A3/9/2017 & 0068/BDP-DIR/X/2017. Selanjutnya dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 555/SPJ/A3/9/2018 & 0036/BDP-IDR/IX/2018,

- kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 809/SPJ/A4/11/2020 – 053/BDP-DIR/XI/2020.
- b. KSO Pemanduan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU yang diperpanjang melalui perjanjian nomor 763/SPJ/A4/10/2020 – UM.57/31/13/PI-20.TU.
 - c. KSO Pemanduan PT Segara Catur Perkasa dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 802/SPJ/A4/7/2022.
 - d. KSO Pemanduan PT Gema Samudera Sarana dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 968/A4/SPJ/9/2022 – 005/GSS-Dir/IX/2022.
 - e. KSO Pemanduan PT Snepac Indo Service dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 967/A4/SPJ/9/2022 – 009/SIS/IX-PMD/2022.
- Pendapatan KSO Parkir sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp119.642.375,00 adalah pendapatan hasil kerjasama dengan KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT. Synergy Tharada dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 118/SPJ/KA/12/2011-014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 dan di addendum dengan perjanjian nomor 976/SPJ/A4/ADD/10/2022 – 056/IDC-OB/ADD/BOT-SKP/X/2022.

- Pendapatan KSO Pelayanan Air Bersih Kapal sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp45.133.200,00 adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil melalui perjanjian nomor 005/PERJ-KA/IV/2004 – 002/PC/IV/2004.
- Pendapatan KSO Royalti sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp645.076.199,00 adalah pendapatan royalti progressive dari pengelolaan terminal penumpang Internasional Batam Center antara PT. Synergy Tharada dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 04/PERJ-KA/VII/2002 – 110/OB-ST/SPCB/VII/2002. Perubahan kedua terhadap perjanjian kerjasama operasi pengelolaan terminal ferry internasional Batam Center nomor 118/SPJ/KA/12/2011 – 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011.
- Pendapatan KSO Sampah sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp40.537.000,00 adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil melalui perjanjian nomor 005/PERJ-KA/IV/2004 – 002/PC/IV/2004.
- Pendapatan KSO Seaport Tax/Pass Orang sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp7.973.151.250,00 terdiri dari KSO Pengelolaan Terminal Penumpang yaitu:
 - a. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Harbour Bay antara PT. Citra Tri Tunas dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2012 – 156/SPJ/KA/7/2012, dan 015/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2013 – 453/SPJ/KA/7/2013.

- b. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT Synergy Tharada dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 04/PERJ-KA/VII/2002 – 110/OB-ST/SPCB/VII/2002. Perubahan kedua terhadap perjanjian kerjasama operasi pengelolaan terminal Ferry International Batam Centre nomor 118/SPJ/KA/12/2011 – 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011.
- c. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 diperpanjang melalui perjanjian nomor 976/SPJ/A4/ADD/10/2022 – 056/IDC-IDC-OB/ADD/BOT-SKP/X/2022.
- Pendapatan KSO Sewa Ruang dan Bangunan sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp200.145.253,00 terdiri dari KSO Pengelolaan Terminal Penumpang yaitu:
 - a. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT Synergy Tharada dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 04/PERJ-KA/VII/2002 – 110/OB-ST/VII/2002. Perubahan kedua terhadap perjanjian kerjasama operasi pengelolaan Terminal Ferry International Batam Centre nomor 118/SPJ/KA/12/2011 – 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011
 - b. KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Sekupang antara PT. Indodharma Corpora dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian Nomor 1/PERJ-KA/I/2010-010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 dan kemudian diperpanjang melalui

perjanjian kerjasama nomor
976/SPJ/A4/ADD/10/2022 – 056/IDC-IDC-
OB/ADD/BOT-SKP/X/2022.

- Pendapatan KSO Tambat sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp5.017.760.047,00 diantaranya adalah pendapatan KSO Tambat hasil kerjasama dengan beberapa mitra yaitu:
 - a. PT. Sarana Citra Nusa kabil dengan nomor perjanjian 005/PERJ-KA/IV/2004 & 002/SC/IV/2004
 - b. PT. Port Sekupang Batam dengan perjanjian nomor 190/SPJ/A3/8/2014 & 001/PKS-PSB/VIII/2014 & 001/PKS-DE/VIII/2014.
 - c. PT Sembilan Sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022.
- Pendapatan KSO Tunda sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp16.230.590.775,00 merupakan pendapatan kerjasama dari PT Gema Samudera Sarana, PT Segara Catur Perkasa, PT Pelabuhan Indonesia cabang Batam, PT Bias Delta Pratama, PT Maccahma Dhina Hartiendspin, PT Snepac Indo Service.
 - a. Pendapatan hasil kerjasama KSO Pengelolaan Kapal Tunda PT Gema Samudera Sarana dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 755/SPJ/A4/6/2021 & 009/GSS-Dir/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 dengan jangka waktu 5 tahun sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 02 Mei 2026 pada tanggal 15 September 2022 dilakukan perubahan isi perjanjian seperti tercantum pada

perjanjian nomor 968/A4/SPJ/9/2022 – 005/GSS-Dir/IX/2022 dengan mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:

- Pengelolaan kapal tunda TB. Gema 5
- Pengelolaan kapal tunda TB. Gema 2

b. KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT Segara Catur Perkasa dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 688/SPJ/A4/4/2021 & 009/PKS-BP/KSOP/IV/2021 tanggal 24 April 2021. Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian. Pada tanggal 04 Juli 2022 dilakukan perubahan isi perjanjian yang tertuang pada perjanjian nomor 802/SPJ/A4/7/2022 dengan mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:

- Pengelolaan Kapal Tunda TB. Sukses 1200
- Pengelolaan Kapal Tunda TB. Elisyah I
- Pengelolaan Kapal Tunda TB. Elisyah II
- Pengelolaan Kapal Tunda TB. Putra I.

c. KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Pelindo) dan Badan Pengelola Pelabuhan Batam BP Batam dengan perjanjian nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018. Jangka waktu perjanjian ini berlaku 2 tahun terhitung sejak di tandatangani. Pada tanggal 16 Oktober 2020 dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 763/SPJ/A4/10/2020 dan UM.57/31/13/PI-20.TU, dengan jangka waktu perjanjian 5 Tahun, dengan mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:

- Pengelolaan kapal Tunda TB. Sei Deli
- Pengelolaan kapal Tunda TB. KT Sei Deli 3

- Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Maritim 3000
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Maiden II
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Megamas Sky
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Hang Tuah V
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Trust
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Sumber Z Marine
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. SM XXI
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Tirta Samudra XXVII
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Anugerah Bersama 17
- d. KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT. Bias Delta Pratama dengan Badan Pengelola Pelabuhan Batam dengan perjanjian nomor 809/SPJ/A4/11/2020 & 053/BDP-DIR/XI/2020 dengan jangka waktu 5 tahun mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:
- Pengelolaan kapal Tunda TB, Heming way 2
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 4
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 8
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 1400
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming Way 2400
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Heming way 3200
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. ASL Crest
 - Pengelolaan kapak Tunda TB. ASK Calypso
- e. KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT Maccahma Dhina Hartiendspin dengan Badan Usaha Pelabuhan dengan perjanjian nomor 763/SPJ/A4/4/2022 – 037/SK/MDH-GNR/IV/2022 dengan jangka waktu 5 tahun mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:
- Pengelolaan kapal Tunda TB. Aljechin One

- Pengelolaan kapal Tunda TB. Aljechin Two.
- f. KSO Pengelolaan Kapal Tunda antara PT Snepac Indo Service dengan Badan Usaha Pelabuhan dengan perjanjian nomor 967/A4/SPJ/9/2022 – 009/SIS/IX-PMD/2022 dengan jangka waktu 5 tahun mencakup kapal operasi tunda sebagai berikut:
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Bintang Zeus 3509.
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Bintang Borneo 3209.
 - Pengelolaan kapal Tunda TB. Medelin-III.
 - Pengelolaan kapal Tunda Perkasa 05.
- Pendapatan KSO Iklan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.458.750,00 adalah pendapatan iklan untuk hasil kerjasama KSO dengan PT Synergy Tharada atas KSO Pengelolaan Terminal Penumpang Internasional Batam Centre antara PT Synergy Tharada dan Badan Usaha Pelabuhan BP Batam dengan perjanjian nomor 04/PERJ-KA/VII/2002 – 110/OB-ST/SPCB/VII/2002. Perubahan kedua terhadap perjanjian kerjasama operasi pengelolaan terminal Ferry Internasional Batam Centre nomor 118/SPJ/KA/12/2011 – 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011
- Pendapatan KSO Fee Bongkar Muat sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp806.263.480,00 adalah Pendapatan Jasa Bongkar Muat untuk hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil dengan nomor perjanjian 005/PERJ-KA/IV/2004 – 002/SC/IV/2004 dan Bintang Sembilan Sembilan Persada dengan perjanjian nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 kemudian diperpanjang melalui perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 & 001/BSSP/PKS/IV/2022.

- Pendapatan KSO Lainnya sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp471.442.036,00 adalah pendapatan hasil kerjasama KSO dengan PT. Sarana Citra Nusa Kabil seperti sewa gudang dan sewa lahan disekitar pelabuhan.
3. Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lainnya pada **Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum** sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp257.011.566.585,00 terdiri dari Pendapatan air unit air SPAM Hilir sebesar Rp208.596.096.993,00 dan Pendapatan non air unit SPAM Hilir sebesar Rp 48.415.469.592,00.

Pendapatan air unit air SPAM Hilir sebesar Rp208.596.096.993,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan Tunai	184.919.833.106,00
2	Aset dan CPT Jaringan	11.487.827.018,00
3	Belanja SPAM Non BMN dan CPT	12.188.436.869,00
	Jumlah	208.596.096.993,00

Pendapatan non air unit SPAM Hilir sebesar Rp 48.415.469.592,00

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pemeliharaan Meter Air	38.853.839.500,00
2	Pemasangan Baru	8.227.227.068,00
3	Penggantian Meter	879.328.000,00
4	Penyambungan Kembali	153.004.500,00
5	Pendapatan Lainnya	302.070.524,00
	Jumlah	48.415.469.592,00

E.1.2.2.2. Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.133.678.757,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Fasilitas dan Lingkungan	965.549.617,00
2	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	525.243.170,00
3	Rumah Sakit BP Batam	642.885.970,00
	Jumlah	2.133.678.757,00

(Rincian Pendapatan Sewa dapat dilihat pada Lampiran 39).

Pendapatan sewa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.131.013.562,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan sewa **Fasilitas dan Lingkungan** sebesar Rp965.549.617,00.
2. Pendapatan sewa **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** sebesar Rp525.243.170,00 merupakan pendapatan sewa listrik sebesar Rp523.243.170,00 dan pendapatan sewa forklift sebesar Rp2.000.000,00.
3. Pendapatan sewa **Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam** sebesar Rp642.885.970,00 merupakan pendapatan sewa ruang ATM, ruang rapat, ruang fotocopy dan kantin sebesar Rp607.876.385,00, pendapatan sewa listrik sebesar Rp28.833.173,00 dan pendapatan sewa lainnya sebesar Rp6.176.412,00.

E.1.2.2.3. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan

Pendapatan jasa lembaga keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.715.416.788,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	23.336.203.992,00
2	Fasilitas dan Lingkungan	37.709.757,00
3	BUBU Hang Nadim	81.190.519,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	110.565.334,00
5	Rumah Sakit BP Batam	91.659.988,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	2.200.512,00
7	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	1.055.886.686,00
	Jumlah	24.715.416.788,00

Pendapatan jasa lembaga keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.715.416.788,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Kantor Pusat** sebesar Rp23.336.203.992,00 merupakan pendapatan jasa giro dan pendapatan bunga jangka pendek.
2. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Fasilitas dan Lingkungan** sebesar Rp37.709.757,00 merupakan pendapatan jasa giro.
3. Pendapatan jasa lembaga keuangan **BUBU Hang Nadim** sebesar Rp81.190.519,00 merupakan pendapatan dari jasa giro.
4. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam** Badan Pengusahaan Batam sebesar Rp110.565.334,00 merupakan pendapatan bunga bank dari rekening.
5. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam** sebesar Rp91.659.988,00 merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro bank.
6. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Kantor Perwakilan Jakarta** sebesar Rp2.200.512,00 merupakan pendapatan dari jasa giro bank.
7. Pendapatan jasa lembaga keuangan **Badan Usaha SPAM** sebesar Rp1.055.886.686,00 merupakan pendapatan dari jasa giro

E.1.2.2.4. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan jasa lain-lain sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.769.612.799,00 terdiri dari:

No	Unit	Jumlah (Rp)
1	Kantor Pusat	12.033.598.725,00
2	Fasilitas dan Lingkungan	101.394.981,00
3	Badan Usaha Bandar Udara	2.422.642.884,00
4	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	178.716.941,00
5	Rumah Sakit BP Batam	1.877.942.126,00
6	Kantor Perwakilan Jakarta	6.617.224,00
7	Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum	148.699.918,00
	Jumlah	16.769.612.799,00

Pendapatan jasa lain-lain sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.769.612.799,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

E.1.2.2.4.1. Kantor Pusat

Pendapatan jasa lain-lain Kantor Pusat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.033.598.725,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Denda UWTO	13.239.241,00
2	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda Lainnya	3.732.059.351,00
3	Pendapatan Lain-lain	8.288.300.133,00
	Jumlah	12.033.598.725,00

1. Pendapatan Denda UWTO sebesar Rp13.239.241,00 merupakan denda atas keterlambatan pembayaran UWTO yang diterima Direktorat Pengelolaan Lahan sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda sebesar Rp3.732.059.351,00.
3. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp8.288.300.133,00.

E.1.2.2.4.2. Fasilitas dan Lingkungan

Pendapatan jasa lain-lain Fasilitas dan Lingkungan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp101.394.981,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda	40.011.274,00
2	Pendapatan Lain-lain	61.383.707,00
	Jumlah	101.394.981,00

1. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda sebesar Rp40.011.274,00 terdiri dari pendapatan denda pemukiman sebesar Rp22.645.178,00, pendapatan denda pengelolaan lingkungan sebesar Rp5.688.468,00 dan pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda lainnya sebesar Rp11.677.628,00.
2. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp61.383.707,00 merupakan pendapatan dari Wifi rumah susun.

E.1.2.2.4.3. Badan Usaha Bandar Udara

Pendapatan jasa lain-lain Badan Usaha Bandar Udara sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.422.642.884,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas sanksi, klaim dan denda	2.422.642.884,00
	Jumlah	2.422.642.884,00

1. Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda lainnya sebesar Rp2.422.642.884,00 terdiri dari pendapatan denda jasa non Aeronautika sebesar Rp613.214.694,00 dan pendapatan atas sanksi, klaim dan denda lainnya sebesar Rp1.809.428.190,00.

E.1.2.2.4.4. Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam

Pendapatan jasa lain-lain Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp178.716.941,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Lain-lain	12.671.476,00
2	Pendapatan Air Bersih Untuk Property	89.727.461,00
3	Pendapatan Denda KSO	2.357.259,00
4	Pendapatan Denda Jasa Pelabuhan	4.000.000,00
5	Pendapatan Denda Pengadaan Barang dan Jasa	6.193.800,00
6	Pendapatan Lainnya dari Pengadaan Barang dan Jasa	63.766.945,00
	Jumlah	178.716.941,00

1. Pendapatan Lain-lain sebesar Rp12.671.476,00.
2. Pendapatan air bersih untuk property dan kapal sebesar Rp89.727.461,00.
3. Pendapatan denda KSO sebesar Rp2.357.259,00.
4. Pendapatan denda jasa pelabuhan sebesar Rp4.000.000,00
5. Pendapatan denda pengadaan barang dan jasa sebesar Rp6.193.800,00.
6. Pendapatan lainnya dari pengadaan barang dan jasa sebesar Rp63.766.945,00

E.1.2.2.4.5. Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam

Pendapatan jasa lain-lain Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.877.942.126,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan Lain-lain	1.877.942.126,00
	Total	1.877.942.126,00

E.1.2.2.4.6. Kantor Perwakilan Jakarta

Pendapatan jasa lain-lain pada Kantor Perwakilan Jakarta sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.617.224,00 merupakan pendapatan dari selisih pembulatan uang kas bendahara pengeluaran.

E.1.2.2.4.7. Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum

Pendapatan jasa lain-lain pada Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp148.699.918,00 terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pendapatan atas sanksi, klaim dan denda	139.686.356,00
2	Pendapatan lain-lain	9.013.562,00
Total		148.699.918,00

1. Pendapatan atas sanksi, klaim dan denda sebesar Rp139.686.356,00 merupakan pendapatan denda kantor air.
2. Pendapatan lain-lain sebesar Rp9.013.562,00

Keuntungan Lainnya Rp180.044

E.1.2.3. Keuntungan Lainnya

Keuntungan lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp180.044,00 merupakan kelebihan pembayaran pada Kantor Bandara Hang Nadim terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kelebihan pembayaran pas Sakera tour & travel	100.000,00
2	Kelebihan pembayaran pas Citilink	50.000,00
3	Kelebihan pembayaran a.n Prestasi Suksesindo	7,00
4	Kelebihan pembayaran PT Putri Nawa	42,00
5	Kelebihan pembayaran PT Air Glona	29.995,00
Total		180.044,00

Beban Pegawai Rp524.154.255.606

E.2. Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp524.154.255.606,00 dan Rp521.658.494.810,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai terdiri dari:

Uraian		31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
A. Beban Pegawai - Usaha			
1	Biaya Gaji/Upah	124.220.832.199,00	181.369.278.792,00
2	Biaya Gaji/Upah Lainnya	0,00	21.760.972.170,00
3	Biaya Tunjangan Jabatan	3.561.415.000,00	5.244.550.000,00
4	Biaya Tunjangan Uang Makan	9.891.297.000,00	12.290.536.000,00
5	Biaya Tunjangan Pajak	0,00	203.605.938,00
6	Biaya Tunjangan Uang Duka	13.376.737,00	19.282.016,00
7	Biaya Tunjangan Hari Raya	2.249.670.392,00	13.248.558,00
8	Biaya Tunjangan Lainnya	110.862.127.374,00	82.358.833.404,94
9	Biaya Lembur	2.485.578.800,00	2.832.369.000,00
10	Biaya Bantuan Uang Duka	16.776.701,00	47.292.342,00
11	Biaya BPJS Kesehatan	0,00	11.157.344,00
12	Biaya BPJS Tenaga Kerja	418.776.624,00	409.914.093,00
13	Biaya Honor Tetap	28.608.000,00	0,00
	Jumlah (A)	253.748.458.827,00	306.561.039.657,94
B. Beban Pegawai Umum dan Adm.			
1	Biaya Gaji/Upah	132.923.323.138,00	96.467.151.409,08
2	Biaya Gaji/Upah Lainnya	0,00	1.615.762.556,00
3	Biaya Tunjangan Jabatan	4.380.530.000,00	1.796.220.000,00
4	Biaya Tunjangan Uang Makan	8.543.356.000,00	3.587.576.000,00
5	Biaya Tunjangan Pajak	158.933.730,00	4.404.325.737,00
6	Biaya Tunjangan Lainnya	116.026.158.672,00	101.121.827.129,48
7	Biaya Honor Tetap	0,00	14.400.000,00
8	Biaya Lembur	3.718.401.000,00	1.375.061.000,00
9	Biaya Uang Duka	61.304.679,00	53.993.090,00
10	Biaya BPJS Tenaga Kerja	1.478.673.247,00	1.650.263.543,00
11	Biaya BPJS Kesehatan	3.115.116.313,00	3.010.874.687,00
	Jumlah (B)	270.405.796.779,00	215.097.455.151,56
	Jumlah Beban Pegawai (A+B)	524.154.255.606,00	521.658.494.810,00

Terdapat UJK BPK RI TA 2022 koreksi tambah sebesar Rp13.563.098.941,00, merupakan mencatat BYMHD Atas kinerja Pegawai Tetap bulan Desember yang dibayarkan dibulan Januari 2023 Periode Desember 2022 (BYMHD), Koreksi tambah sebesar Rp367.969.800,00 Mencatat BYMHD Atas kinerja P2K bulan Desember yang dibayarkan dibulan Januari 2023 Periode Desember 2022 (BYMHD), koreksi tambah sebesar Rp94.525.000,00 Mencatat BYMHD Atas kinerja Dewan Pengawas bulan Desember yang dibayarkan dibulan Januari 2023 Periode Desember 2022 (BYMHD),

dan koreksi kurang sebesar Rp1.206.566.247,00 Koreksi BYMHD (Tunjangan Purna Jabatan) yang telah dibayarkan sesuai BK No 2022/12/000701 Utang Usaha Biro SDM dan Organisasi sesuai Hasil Reviu SPI ND No 34/LHR/SPI/12/2021 Periode Desember 2022 (BYMHD).

Beban Persediaan
Rp14.384.704.292

E.3. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.384.704.292,00 dan Rp66.919.278.404,00 merupakan beban atas barang-barang persediaan dan habis pakai yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional. Rincian Beban Persediaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Beban Persediaan Konsumsi	12.643.063.173,00	14.793.236.672,00
2	Beban Persediaan Bahan Baku	717.718.600,00	1.139.558.665,00
3	Persediaan Lainnya	1.023.922.519,00	50.986.483.067,00
	Jumlah	14.384.704.292,00	66.919.278.404,00

Beban Barang dan
Jasa
Rp448.238.429.813

E.4. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp448.238.429.813,00 dan Rp430.020.306.377,00 merupakan biaya barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional. Rincian beban barang dan jasa terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Beban Barang	131.621.052.068,00	93.194.793.135,00
2	Beban Jasa	313.154.659.791,00	322.212.441.236,00
3	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3.077.986.654,00	4.577.682.609,00
4	Beban Barang BLU-Penanganan Pandemi COVID-19	64.387.000,00	9.401.142.459,00
5	Beban Jasa BLU-Penanganan Pandemi COVID-19	17.293.000,00	634.246.938,00
6	Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	198.180.000,00	0,00
7	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin - BLU	104.871.300,00	0,00
	Jumlah	448.238.429.813,00	430.020.306.377,00

Beban
Pemeliharaan
Rp85.873.587.571

E.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp87.500.749.689,00 dan Rp289.284.681.026,00 merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Beban pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	112.667.893.000,00
2	Beban pemeliharaan Jaringan	0,00	47.419.909.350,00
3	Beban pemeliharaan	85.873.587.581,00	127.381.672.362,00
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	557.904.500,00	475.790.500,00
5	Beban Persediaan Suku Cadang	1.069.257.608,00	1.339.415.814,00
Jumlah		87.500.749.689,00	289.284.681.026,00

Terdapat Koreksi tambah UJK BPK RI TA 2022 sebesar Rp36.000.000,00 merupakan Koreksi salah catat yang seharusnya dicatat pada Biaya Pemeliharaan tapi dicatat sebagai Biaya perjalanan dinas atas BAST/67/PPK-PNBP/5126.CCB/5/2022 (PEST CONTROL), sebesar Rp45.000.000,00 merupakan Utang Pemeliharaan atas Tagihan PT Rumah Sakit PELNI (Maintenance PHIS 2nd Generation bulan November dan Desember 2022 sesuai Nota Dinas Kepala SPI nomor 95/SPI/PI.00.05/03/2023 tanggal 2 Maret 2023 hal Laporan Hasil Reviu Utang TA 2022.

Beban Perjalanan
Dinas
Rp33.984.336.410

E.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp33.984.336.410,00 dan Rp23.755.518.373,00 merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, Uraianya sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Biaya Perjalanan Dalam Negeri Lainnya	6.983.994.787,00	5.721.123.356,00
2	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.876.012.739,00	3.186.628.742,00
3	Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota	467.485.000,00	921.275.562,00
4	Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Lainnya	4.213.779.017,00	2.348.636.427,00
5	Perjalanan Dinas Batam - Jakarta (PP)	14.068.584.160,00	9.133.422.982,00
6	Perjalanan Dinas Batam Pekanbaru (PP)	232.983.590,00	160.699.515,00
7	Perjalanan Dinas Batam Singapore (PP)	547324853,00	0,00
8	Perjalanan Dinas Batam Tanjung Pinang (PP)	941.183.095,00	558.181.947,00
9	Perjalanan Dinas Jakarta - Batam (PP)	2.317.155.369,00	1.656.691.842,00
10	Perjalanan Dinas Jakarta Tanjung Pinang (PP)	88.993.800,00	8.858.000,00
11	Biaya transportasi dalam kota	246.840.000,00	60.000.000,00
	Jumlah	33.984.336.410,00	23.755.518.373,00

Terdapat koreksi Tambah dan Kurang BPK RI TA 2022 sebesar Rp10.425.390,00 merupakan Hutang Biro Humas, Promosi dan Protokol sesuai revidi SPI No 35/SPI/03/2023 Periode Desember 2022 (BYMHD), sebesar Rp36.000.000,00 merupakan Koreksi salah catat yang seharusnya dicatat pada Biaya Pemeliharaan tapi dicatat sebagai Biaya perjalanan dinas atas BAST/67/PPK-PNBP/5126.CCB/5/2022 (PEST CONTROL).

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp877.961.612.012*

E.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp878.503.359.255,00 dan Rp888.223.890.778,00 merupakan beban untuk mencatat nilai penyusutan aset tetap. Aset lainnya dan cadangan pada aset lain-lain dalam suatu periode. Rincian beban penyusutan dan amortisasi terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	166.999.993.258,00	159.699.129.039,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	92.888.199.038,00	89.369.186.675,00
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	371.936.501.038,00	388.351.081.631,00
4	Beban Penyusutan Irigasi	154.662.957.034,00	156.018.339.614,00
5	Beban Penyusutan Jaringan	85.101.273.680,00	86.410.703.304,00
6	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	30.255.000,00	20.676.250,00
7	Beban Amortisasi Software	2.485.277.713,00	3.421.555.224,00
8	Beban Amortisasi Lisensi	1.013.104.177,00	1.006.104.176,00
9	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	949.698.220,00	1.376.806.766,00
10	Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	2.436.100.097,00	2.550.308.099,00
	Jumlah	878.503.359.255,00	888.223.890.778,00

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp568.970.432

E.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban penyisihan piutang tak tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp568.970.432,00 dan Rp24.713.096.027,00 yang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Kantor Pusat	(19.334.000,00)	198.842.688,00
2	Badan Pengelola Pelabuhan Laut Batam	229.598.885,00	21.591.282.052,00
3	Rumah Sakit BP Batam	0,00	1.001.758.791,00
4	BUBU Hang Nadim	56.552.708,00	1.528.079.610,00
5	Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan	302.152.839,00	393.132.886,00
	Jumlah	568.970.432,00	24.713.096.027,00

Pendapatan
Pelepasan Aset
Non Lancar
Rp2.432.359.160

E.9. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan pelepasan aset non lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.432.359.160,00 dan Rp1.845.035.051,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Pendapatan Pemindahtanganan BMN lainnya.

Beban Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp16.393.580.739

E.10. Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban pelepasan aset non lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp16.393.580.739,00 dan Rp189.320.721.803,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan Beban Kerugian Pelepasan Aset.

Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp133.347.458.508

E.11. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp133.347.458.508,00 dan Rp14.173.512.767,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu	2.627.250.489,00	872.272.834,00
2	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU	4.827.808.255,00	386.182.414,00
3	Pendapatan perolehan aset lainnya	116.155.940.464,00	12.915.057.519,00
4	Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	400.373.805,00	0,00
5	Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	9.336.055.495,00	0,00
	Jumlah	133.347.428.508,00	14.173.512.767,00

*Beban dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
Rp14.999.429.108*

E.12. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban dari kegiatan non operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.999.429.108,00 dan Rp3.417.537.205,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Penyetoran PNPB oleh BLU ke kas Negara	14.796.038.949,00	2.717.307.885,00
2	Kerugian persediaan rusak/usang	82.805.564,00	89.449.678,00
3	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi BLU	120.584.595,00	610.779.642,00
	Jumlah	14.999.429.108,00	3.417.537.205,00

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp51.502.116.780.170

F.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp51.502.116.780.170,00 dan Rp51.879.818.437.894,00.

Surplus (Defisit) LO
Rp682.031.079.219

F.2. Surplus (Defisit) LO

Jumlah defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp696.809.411.123,00 dan Rp1.073.551.614.714,00. Surplus (defisit) LO merupakan selisih lebih/kurang kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

F.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp3.516.500,00.

Koreksi Atas
Reklasifikasi
Rp72.500

F.4. Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing Rp72.500,00 dan Rp8.448.551.583,00. Koreksi atas reklasifikasi tersebut merupakan koreksi atas reklasifikasi antara UAPKPB terhadap aset tetap dan akumulasi penyusutan.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp34.397.337.641

F.5. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Aset Lainnya Non Revaluasi

Koreksi nilai aset tetap non revaluasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp34.397.337.641,00 dan Rp183.412.226.767,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi terdiri dari koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar (Rp6.704.707.868,00) dan koreksi nilai aset lainnya non revaluasi sebesar Rp41.102.045.509,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi tersebut merupakan koreksi perubahan yang berasal dari

hasil reklasifikasi perubahan nilai akumulasi penyusutan pada sistem SAKTI modul Aset Tetap dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Saldo Awal	46.163.280.160,00
2	Reklasifikasi Masuk	1.237.537.510,00
3	Perolehan Lainnya	(59.502.960,00)
4	Koreksi Susulan	298.167.054,00
5	Koreksi Pencatatan	(4.981.897.371,00)
6	Koreksi Nilai KDP	42.556.176.925,00
7	Koreksi Pencatatan KDP	(165.361.480,00)
8	Koreksi Nilai KDP Berkurang	(54.955.959.556,00)
9	Transaksi Normalisasi BMN	(174.520.860,00)
10	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	4.479.418.219,00
Jumlah		34.397.337.641,00

Koreksi Lain-lain
Rp40.746.337.470

F.6. Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp40.746.337.470,00 dan Rp85.104.163.885,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi pembatalan piutang, reklasifikasi biaya yang masih harus dibayar, koreksi hasil konversi data transaksi dari FBMS ke SAKTI

Transaksi Antar Entitas
(Rp5.567.520.811)

F.7. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp5.567.520.811,00) dan Rp418.881.498.255,00. Rincian transaksi antar entitas terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2022 (Audited)	31 Desember 2021 (Audited)
1	Transfer Masuk	0,00	778.288.857.023,00
2	Transfer Keluar	(5.567.520.811,00)	(359.407.358.768,00)
Jumlah		(5.567.520.811,00)	418.881.498.255,00

Transaksi antar entitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Transfer keluar sebesar Rp5.567.520.811,00 terdiri dari:

- Sebesar Rp4.975.689.700,00 Merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke Kementerian Pertahanan Sesuai dengan Berita Acara BA 185/A1/12/2022
- Sebesar Rp948.742.957,00 merupakan Transfer Keluar dari UAPKPB Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan ke Kementerian Pertahanan Sesuai dengan Berita Acara BA 185/A1/12/2022
- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp356.911.846,00)

Ekuitas Akhir
Rp50.874.883.595.847

F.8. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp50.874.883.595.847,00 dan Rp51.502.116.780.170,00. Ekuitas akhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan penambahan Ekuitas awal sebesar Rp51.502.116.780.170,00 yang terdiri dari Defisit-LO sebesar (Rp696.809.411.123,00) terdiri Koreksi Atas Reklasifikasi sebesar Rp72.500,00, ditambah Koreksi Nilai Aset tetap/aset lainnya Non Revaluasi sebesar Rp34.397.337.641,00 dan ditambah Koreksi Lain-Lain sebesar Rp40.746.337.470,00, Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp5.567.520.811,00). Dengan demikian terdapat penurunan Ekuitas sebesar Rp627.233.184.323,00 sehingga Ekuitas Akhir Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp50.874.883.595.847,00.

G. PENJELASAN ATAS POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.063.978.404.386,00 dan Rp640.490.924.179,00. Arus kas akhir sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan penambahan Arus kas awal sebesar Rp640.490.924.179,00 yang terdiri atas dari Arus kas masuk operasi sebesar Rp2.024.770.407.400,00 ditambah Arus kas investasi sebesar Rp2.432.359.160,00 di tambah arus masuk kas transitoris sebesar Rp77.551.530.310,00 dikurangi arus keluar kas operasi sebesar Rp1.085.896.018.032,00, arus keluar kas investasi sebesar Rp566.764.739.310,00, arus keluar kas transitoris sebesar Rp28.606.059.321,00 sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp423.487.480.207,00 sehingga saldo akhir arus kas sebesar Rp1.063.978.404.386,00. Rincian Arus kas sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari :

G.1 Arus Kas Aktivitas Operasi

Nilai Arus Kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp938.874.389.368,00 dan Rp429.934.714.993,00. Arus kas dari aktivitas operasi terdiri dari:

G.1.1 Pendapatan dari alokasi APBN

Pendapatan dari alokasi APBN selama periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp49.241.880.694,00 merupakan pendanaan atas realisasi belanja modal yang bersumber dari pendanaan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dan tidak merupakan bagian dari pengurangan saldo anggaran lebih awal.

No	Uraian	Tahun 2022 (Audited) (RP)
1	Belanja Barang yang berasal dari PHLN	49.241.880.694,00
	Jumlah	49.241.880.694,00

G.1.2 Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat

Pendapatan dari Jasa Layanan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp1.963.164.846.917,00 dan Rp 1.423.077.691.808,00.

G.1.3 Pendapatan PNBP Umum

Pendapatan dari PNBP umum untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp12.363.679.789,00 dan Rp872.272.834,00.

G.1.4 Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp511.335.228.111,00 dan Rp520.196.633.880,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

G.1.5 Pembayaran Barang

Pembayaran Barang untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp127.909.976.656,00 dan Rp162.339.940.680,00.

G.1.6 Pembayaran Jasa

Pembayaran Jasa untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing masing sebesar Rp306.047.692.960,00 dan Rp316.287.607.001,00.

G.1.7 Pembayaran Pemeliharaan

Pembayaran pemeliharaan untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp87.885.450.609,00 dan Rp297.781.264.114,00.

G.1.8 Pembayaran Perjalanan Dinas

Pembayaran Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp34.054.716.170,00 dan Rp23.741.158.020,00.

G.1.9 Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU

Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.866.914.577,00 dan Rp4.577.682.609,00.

G.1.10 Penyetoran PNBP ke Kas Negara

Pembayaran Penyetoran PNBP ke Kas Negara untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp14.796.038.949,00 dan Rp2.717.307.885,00. Penyetoran PNBP ke Kas Negara untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 merupakan penyetoran PNBP ke Kas Negara (BUN) yang diperoleh oleh BP Batam.

G.2 Arus Kas Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas bersih dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp(564.332.380.150,00) dan Rp(702.409.752.267,00). Arus kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

G.2.1 Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya untuk

periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp2.432.359.160,00 dan Rp1.845.035.051,00. Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya merupakan pendapatan pemindahtanganan BMN lainnya.

G.2.2 Perolehan atas Tanah

Perolehan atas Tanah untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp899.600.975,00 dan Rp1.537.260.370,00.

G.2.3 Perolehan atas Peralatan dan Mesin

Perolehan atas Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp101.317.527.089,00 dan Rp148.396.240.387,00.

G.2.4 Perolehan atas Gedung dan Bangunan

Perolehan atas Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp198.119.857.503,00 dan Rp190.050.029.409,00.

G.2.5 Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp265.041.869.443,00 dan Rp351.950.400.501,00.

G.2.5 Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya

Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.385.884.300,00 dan Rp12.320.856.651,00.

G.3 Arus Kas Aktivitas Transitoris

Nilai Arus Kas bersih dari aktivitas transitoris untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp48.945.470.989,00 dan Rp63.322.122.413,00. Arus kas dari aktivitas transitoris terdiri dari:

G.3.1 Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp77.551.530.310,00 dan Rp109.617.943.729,00.

G.3.2 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga untuk periode yang berakhir dengan 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp28.606.059.321,00 dan Rp46.295.824.316,00.

G. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

G.1 IKATAN DAN KONTIJENSI

G.1.1 Perjanjian sewa menyewa tangki timbun Kabil, no. 07/PERJ/KA/IV/2005 tanggal 27 april 2005 antara otorita batam dengan PT. Patra niaga. Jangka waktu perjanjian adalah 15 tahun. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Patra niaga wajib membayar kepada otorita Batam biaya sewa sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) per tahun. Apabila terdapat surplus atau peningkatan pemakaian tangki timbul sehingga pemakaian tangki melebihi volume 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah ribu) MT per tahun, maka atas kelebihan tersebut Otorita batam berhak atas insentif sebesar US 1,20 (USD satu poin dua puluh sen) per MT.

PT Patra Niaga juga wajib menyerahkan jaminan kinerja kepada Otorita Batam sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang akan dikembalikan pada saat perjanjian terakhir. Pembayaran sewa akan dibayarkan dimuka setiap 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran atas insentif akan dilaksanakan 3(tiga) bulan setelah tutup buku dan dilaksanakannya audit oleh Kantor Akuntan Publik

Perubahan terhadap perjanjian sewa menyewa tangki timbun kabil melalui Nomor 804/SPJ/A1/12/2014 – 004/PN000/Perj/2005 pada tanggal 22 Desember 2014. Perjanjian sewa tangki diperpanjang dengan perjanjian nomor 852/SPJ/KA/12/2020 dengan jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan 25 April 2025. Pada addendum perjanjian tarif sewa dikenakan sebesar Rp10.290.795.319,11 dengan dibayar pada tanggal 25 April tiap tahunnya. Pada pasal 8 tentang through put fee akan dikenakan dalam hal terdapat peningkatan pemakaian tangki timbun melebihi volume 700.000 MT per tahun.

G.1.2 Perjanjian kerjasama Penyelenggaraan pelabuhan umum lepas pantai Kabil, No. 005/PERJ-KA/IV/2004 – 002/PC/IV/2004 tanggal 22 April 2004 antara Otorita Batam dengan PT. Semblog Citranusa. Jangka waktu perjanjian adalah 25 (dua puluh lima tahun).

Berdasarkan Perjanjian tersebut PT Semblog Citranusa wajib melakukan pembangunan dan menyelenggarakan pelabuhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam waktu 2 (dua) tahun. Setelah pembangunan selesai dilaksanakan, PT Semblog Citranusa berhak melaksanakan kegiatan operasional, sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pengoperasian Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil;
2. Pemasaran kegiatan dan jasa Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil;
3. Penyediaan, pengoperasian, bongkar muat alat-alat penunjang perminyakan;
4. Bongkar muat;
5. Kegiatan operasional.

PT Semblog Citranusa juga diperkenankan melakukan usaha kegiatan penunjang yang lainnya. Pembagian pendapatan yang diperoleh selama penyelenggaraan Pelabuhan adalah sebagai berikut :

1. Jasa Labuh, sepenuhnya menjadi hak Otorita Batam
2. Jasa Tambat, masing-masing pihak menerima 50% dari pendapatan
3. Jasa Dermaga, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan
4. Pendapatan lain-lain, Otorita Batam menerima 10% dari pendapatan

Selama 2 (dua) tahun sejak perjanjian ditandatangani, PT Semblog Citranusa berhak atas 100% (seratus persen) dari pendapatan jasa Dermaga dan Pendapatan lain-lain, sedangkan untuk tahun ketiga dan seterusnya berlaku ketentuan seperti tersebut diatas. Perjanjian kerjasama ini dilakukan perubahan perjanjian dengan mengubah nama terhadap pihak kedua dari sebelumnya PT. Semblog Citranusa menjadi PT. Sarana Citra Nusa Kabil dan perubahan terhadap penyebutan nama dari sebelumnya Pelabuhan Umum Lepas Pantai Kabil menjadi Pelabuhan Umum Citranusa Kabil. Hal ini dituangkan dalam perubahan perjanjian yang ditanda tangani kedua pihak pada tanggal 31 Maret 2009.

G.1.3 Perjanjian kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Ferry Internasional Batam Center No. 04/PREJ-KA/VII/2002– 110/OB-ST/SPBC/VII/02 tanggal 02 Juli 2002 antara Otorita Batam dengan PT. Sinergy Tharada. Jangka waktu perjanjian 15 tahun sejak perjanjian ditandatangani. 04/PERJ-KA/XII/2005 – 258/OB-ST/SPAD/XII/2005 terjadi penambahan terkait penerimaan laporan bulanan yang diserahkan awal bulan berikutnya dan menghapus pasal parkir taksi yang ditempatkan diluar terminal serta perjanjian terkait investasi. Perpanjangan dengan addendum perjanjian No. 118/SPJ/KA/12/2011 – 014/BCP-KSO/Add.II/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011. Sehingga jangka waktu perjanjian ini berakhir tanggal 1 Agustus 2024.

Otorita Batam wajib menyerahkan pengelolaan aset. PT Sinergy Tharada berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan baik dan mengacu kepada standar internasional pengelolaan terminal Ferry. PT Sinergy Tharada juga wajib menyerahkan laporan keuangan bulanan, semester dan tahunan. Laporan keuangan tahunan wajib diaudit oleh akuntan publik terdaftar yang ditunjuk bersama. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit wajib diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 7 bulan ke 6 (enam) setiap 1 (satu) tahun buku. Terhadap keterlambatan penyampaian laporan keuangan bulanan dan/atau laporan keuangan tahunan yang wajib disampaikan, pihak kedua dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari dari tanggal 8 sampai tanggal 14, apabila melewati tanggal 14 dikenakan denda sebesar 1^{0/00} (satu per mil) per hari dari nilai royalti sebelumnya berlaku sampai dengan 50 hari.

Otorita Batam berhak memperoleh royalti dari gross revenue yang besarnya ditetapkan secara progressif sebagai berikut:

Gross revenue per tahun	%
1) Sampai dengan Rp. 15.000.000.000	10%
2) Rp 15.000.000.001 – Rp 20.000.000.000	20%
3) Lebih dari Rp 20.000.000.000	30%

G.1.4 Perjanjian kerjasama No. 1/PERJ-KA/I/2010 dan 010/IDC-BO/ADD/BOT-SKP/I/2010 tanggal 11 januari 2010 kerjasama membangun, mengelola dan memelihara Terminal Ferry International Sekupang dengan mekanisme Bangun Serah Guna (BOT) antara Otorita Batam dengan PT. Indodharma Corpora. Jangka waktu perjanjian adalah 28 tahun mulai 20 Agustus 2004 sampai dengan 19 Agustus 2032. Perjanjian ini merupakan perubahan perjanjian kerjasama No. 12/PERJ-KA/VIII/2004 dan 111/DC-OB/SP/BOT-SKP/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004. Berdasarkan perjanjian tersebut Otorita Batam menunjuk dan memberikan kuasa kepada PT. Indodharma Corpora untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan terminal baru, pengoperasian dan pemeliharaan terminal Ferry Internasional Sekupang dan penyerahan kembali pada saat perjanjian berakhir, dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT).

PT. Indodharma Corpora berkewajiban untuk, antara lain:

1. Membayar Biaya konsesi
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh investasi dan realisasi biaya pekerjaan pembangunan Terminal Ferry Internasional Sekupang.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dengan baik dan mengacu standar internasional pengelolaan terminal ferry.
4. Menyerahkan laporan-laporan yang telah ditentukan antara lain:
 - Laporan hasil kinerja
 - Laporan keuangan tengah tahun
 - Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor Akuntan yang terdaftar.
5. Selambat-lambatnya 90 hari sejak saat berakhirnya perjanjian, menyerahkan kembali seluruh barang milik Negara berikut seluruh kompleks terminal ferry sekupang

Berdasarkan perjanjian tersebut, pihak pertama dalam hal ini adalah BP Batam berhak atas royalti dari gross revenue yang besarnya ditetapkan secara progressive (meningkat) yang dihitung dan dibayar oleh pihak kedua yang dihitung sejak 1 januari berdasarkan perhitungan berikut:

- a. Gross revenue sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) setahun, besarnya royalty adalah 10 % (sepuluh persen) dari gross revenue tersebut;
- b. Gross revenue diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) setahun, maka selain hak atas penerimaan royalty menurut perhitungan huruf (a) diatas, pihak pertama berhak atas tambahan royalty sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai gross revenue diatas angka Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) tersebut;
- c. Gross revenue diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak atas penerimaan royalty menurut perhitungan huruf (a) dan huruf (b) diatas, pihak pertama berhak atas tambahan royalty 30% (tiga puluh persen) dari nilai kenaikan gross revenue diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) tersebut;
- d. Gross revenue diatas Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) setahun, maka selain hak diatas penerimaan royalty menurut perhitungan huruf (a),(b) , dan huruf (c) diatas, pihak pertama berhak atas tambahan royalty sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kenaikan gross revenue diatas angka Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) tersebut.

PT. Indo dharma Corpora wajib membayar royalty kepada BP Batam c.q Badan Usaha Pelabuhan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Seluruh pendapatan harian atas pas pelabuhan sesuai dengan persentase atau sekurang-kurangnya 10%
- b. BP Batam c.q Badan Usaha Pelabuhan akan menerbitkan tagihan berdasarkan Laporan bulanan yang wajib dibayar dalam waktu 7 hari kalender sejak diterimanya tagihan tersebut oleh PT. Indodharma Corpora.
- c. Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik maka akan dihitung royalty dan diterbitkan invoice.

Selama periode 01 Januari 2022 s.d 31 Oktober 2022 PT. Indodharma Corpora tidak melakukan kegiatan operasional. Kemudian dilakukan Perubahan kedua atas perjanjian Kerjasama ini dengan nomor 976/SPJ/A4/ADD/10/2022 – 056/IDC-OB/ADD/BOT-SKP/X/2022 untuk memulai pengoperasian Kembali kegiatan di pelabuhan dengan menambah perjanjian pembukaan rekening giro Bersama, yang digunakan untuk menampung hasil seluruh Pendapatan Bruto yang terdiri dari pendapatan seaport tax dan pendapatan lain-lain. Penerimaan pada rekening Bersama atas pendapatan seaport tax selambat-lambatnya akan diterima secara otomatis didistribusikan kepada para pihak setiap harinya. Sedangkan pendapatan lain-lain akan dilakukan berdasarkan surat sharing setiap bulannya.

G.1.5 Perjanjian Nomor 009/CT-HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2012 – 156/SPJ/KA/7/2012 Tanggal 18 Juli 2012 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Pelabuhan dengan PT. Citra Tritunas Tentang Kerjasama Pengelolaan Terminal Penumpang Harbour Bay. Masa berlaku perjanjian akan berakhir pada saat berakhirnya masa berlaku Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

Berdasarkan perjanjian tersebut Kewajiban dan Hak Kanpel BP Batam:

1. BP Batam dapat memberikan saran dan masukan yang diperlukan bagi kepentingan kemajuan pengelolaan Terminal Penumpang Harbour Bay.
2. Kegiatan Pengawasan pelayaran dan lalu lintas kapal diatur oleh Kanpel BP Batam sesuai dengan kewenangannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kanpel BP Batam berhak atas pendapatan dari Jasa Labuh, Jasa Tambat, dan Royalti Pass Penumpang sesuai perjanjian ini.
4. Kanpel BP Batam berhak mengajukan usulan maupun pertimbangan bagi kepentingan kemajuan pengelolaan dan eksistensi Perjanjian, termasuk teguran apabila dalam melaksanakan kegiatannya PT. Citra Tri Tunas tidak mengindahkan ketentuan, menimbulkan dampak negatif, atau tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan fungsi pelayanan pelabuhan umum.

5. Kanpel BP Batam berhak untuk dari waktu ke waktu menetapkan/mengubah tarif Pass Penumpang sesuai dengan ketentuan atau perundangan yang berlaku.
6. Kanpel BP Batam berhak menempatkan 1(satu) orang perwakilan untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan PT. Citra Tri Tunas terhadap kewajibannya selaku penyelenggara pelabuhan umum, dan segala biaya yang timbul atas penempatan tersebut dibebankan kepada PT. Citra Tri Tunas.

Sedangkan Kewajiban dan Hak PT. Citra Tri Tunas adalah:

1. Wajib melaksanakan kegiatan Pengelolaan dengan baik dan mengacu kepada standard internasional pengelolaan Terminal Penumpang.
2. Wajib membuat dan menyerahkan laporan bulanan operasional kepada Kanpel BP Batam secara periodic.
3. Wajib menyetorkan royalty pass penumpang ke rekening Kanpel BP Batam sesuai pola perhitungan royalty yang disepakati bersama dengan rincian sebagai berikut:

- Jasa Labuh dan Jasa Tambat

JASA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jasa Labuh	100%	0%
Jasa Tambat	50%	50%

- Royalti Pass Penumpang

TAHUN	ROYALTI
Tahun ke-0 s/d ke-5	10% revenue pass penumpang
Tahun ke-6 s/d ke-10	15% revenue pass penumpang
Tahun ke-11 s/d seterusnya	20% revenue pass penumpang

4. Bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan ruangan, gedung, ponton ferry dan fasilitas lainnya, termasuk penerangan, jalan, dan jembatan pada area Kompleks Terminal Penumpang dan wajib memperbaiki setiap kerusakan yang ada atas biaya dan upaya PT. Citra Tri Tunas.

5. Wajib membuat dan menyerahkan Laporan Keuangan Tahunan yang menguraikan Revenue/Pendapatan dari Pass Penumpang selama 1(satu) tahun yang dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntansi Publik yang mempunyai reputasi Internasional dan disetujui oleh BP Batam.
6. Berhak atas keuntungan operasional setelah dikurangi kewajiban pembayaran Royalti Pass Penumpang yang merupakan hak Kanpel BP Batam, dan PT. Citra Tri Tunas bertanggung jawab atas pembayaran pajak serta biaya lainnya bagi kepentingan operasional Terminal Penumpang.

Perjanjian antara BP Batam dengan PT. Citra Tri Tunas di addendum pada tanggal 31 Juli 2013 dengan Perjanjian No. 453/SPJ/KA/7/2013-015/CT/HB/TERMINAL-KERJASAMA/VII/2013 dengan menambahkan perjanjian untuk pengelolaan terminal domestik yang mengatur tentang pengenaan dasar perhitungan *Royalty pass* penumpang untuk terminal domestik sebesar 10% dari pendapatan pass penumpang untuk diserahkan kepada BP Batam.

- G.1.6 Perjanjian Kerjasama Nomor 213/SPJ/A1/10/2012 – 012/DIR-BDP/X/2012 antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha Pelabuhan dengan PT. Bias Delta Pratama selaku Badan Usaha Pelabuhan Tanggal 4 Oktober 2012 Tentang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemanduan di Perairan Wajib Pandu pada Perairan Tanjung Uncang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. Jangka waktu perjanjian 5 tahun sejak perjanjian ditandatangani. Diperpanjang melalui perjanjian dengan Nomor 1262/SPJ/A3/9/2017 – 0068/BDP-DIR/X/2017 pada tanggal 8 Desember 2017 dengan jangka waktu tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017. Diperpanjang kembali dengan perjanjian dengan nomor 1747/SPJ/A3/12/2017 pada tanggal 29 Desember 2017 dengan jangka waktu 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2018.

Perjanjian Kerjasama antara BP Batam dan PT. Bias Delta Pratama tentang operasional jasa pemanduan di perairan wajib pandu dilingkungan kerja badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam diperpanjang dengan nomor perjanjian 555/SPJ/A3/9/2018 & 0036/BDP-IDR/IX/2018 pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018. Jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai 31 Juli 2019. Diperpanjang dengan berita acara nomor 10/BA/A3.2/07/2019 dengan dibuat sebagai pendukung proses perpanjangan perjanjian kerjasama. Dengan perhitungan Bagi Hasil/Sharing berdasarkan persentase atas Gross Revenue adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sebesar 20% dari Gross Revenue.
2. Pendapatan PT. Bias Delta Pratama sebesar 75% dari Gross Revenue.
3. PNBP Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan adalah sebesar 5% dari Gross Revenue.

Perjanjian Kerjasama antara BP Batam dan PT. Bias Delta Pratama tentang operasional jasa pemanduan di perairan wajib pandu dilingkungan kerja badan perusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam diperpanjang dengan nomor perjanjian 809/SPJ/A4/11/2020 - 053/BDP-DIR/XI/2020 dengan jangka waktu 5 tahun pada perjanjian ini objek Kerjasama bertambah menjadi Kerjasama Pemanduan dan Penundaan Kapal. Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue:
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user system hos-to-host kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan
4. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional secara elektronik Bersama pihak kedua.

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pandu dari pihak kedua
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
3. Menyediakan petugas pandu sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;

5. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
6. Pemberdayaan sumberdaya manusia sertifikasi pandu yang ada bekerja pada pihak kesatu;
7. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf a perjanjian kerjasama;
8. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional pemanduan dan penundaan pihak kedua secara elektronik Bersama pihak kesatu,

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan pemanduan dan penundaan diperairan wajib dilingkungan kerja BP Batam
3. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b perjanjian Kerjasama;
4. Monitor sistem host to host pihak kesatu dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan yang dilaksanakan pihak kesatu.

G.1.7 Perjanjian kerjasama antara BP Batam dengan PT. Port Sekupang Batam dan PT. Daily Express tentang Pengelolaan Terminal Roro Sekupang nomor 190/SPJ/A3/8/2014 – 001/PKS-PSB/VIII/2014 – 001/PKS-DE/VIII/2014 pada tanggal 1 Agustus 2014. Jangka waktu perjanjian berakhir sampai tanggal 20 Mei 2031. Sebelumnya telah dilakukan perjanjian antara PT. Daily Express dan PT. Port Sekupang Batam tentang pengelolaan Terminal Roro Sekupang nomor PJS/DE/001/2010 – PJS/PSB/01/2010 Pada tanggal 08 Desember 2010. Jangka waktu perjanjian berakhir sampai tanggal 20 Mei 2031. Pembagian pendapatan diatur dalam persentase sebagai berikut:

NO	JENIS PENDAPATAN		BP BATAM	Port Sekupang Batam
1	LABUH		100%	-
2	TAMBAT		50%	50%
3	UANG DERMAGA		10%	90%

4	CHASIS FEE		50%	50%
5	PENUMPUKAN		-	100%
6	SEWA GEDUNG		-	100%

G.1.8 Perjanjian Nomor 21/SPJ/KA/VI/1993 tanggal 9 Juni 1993 tentang Pengalokasian Tanah untuk keperluan Pembangunan, Pengelolaan, Penyerahan kembali (Build, Operate & Transfer) Tanah dan Terminal Ferry Penumpang di Nongsa antara Otorita Batam dengan PT. Nongsa Terminal Bahari. Adapun perjanjian tersebut berlaku selama 30 tahun sampai tanggal 9 Juni 2023.

Berdasarkan perjanjian tersebut Kewajiban dan Hak PT. Nongsa Terminal Bahari adalah sebagai berikut:

1. Wajib membangun Terminal Ferry Penumpang di atas tanah mentah atas bagian-bagian tanah Hak Pengelolaan Otorita Batam mulai tanggal efektif diterimanya Surat Izin membangun dari Otorita Batam
2. Terhitung sejak tanggal efektif diterimanya Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Otorita Batam sampai dengan tanggal penyerahan kembali tanah & Terminal Ferry Penumpang. PT. Nongsa Terminal Bahari berhak untuk menjaminkan / menggunakan sebagai anggunan hak-hak yang timbul dari perjanjian ini kepada Bank/Lembaga Keuangan dan Penyandang dana tersebut diizinkan untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai penerima Hak-hak tersebut dengan syarat bahwa pihak yang akan ditunjuk akan tunduk pada syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.
3. Otorita Batam memberikan hak tunggal kepada PT. Nongsa Terminal Bahari untuk mengelola Terminal Ferry Penumpang beserta fasilitas penunjangnya untuk Wilayah Pantai Timur Sub Wilayah Nongsa sejak tanggal selesai pembangunan sampai dengan tanggal penyerahan kembali tanah dan terminal Ferry Penumpang.
4. Selama Jangka waktu mengelola, Otorita Batam setuju untuk memberi hak tunggal kepada PT. Nongsa Terminal Bahari untuk menguasai, mengelola, menempati, menggunakan dan menyewakan Tanah dan Terminal Ferry Penumpang serta Fasilitas lainnya, baik sebagian maupun seluruhnya, menurut

harga dan syarat yang dianggap baik oleh PT. Nongsa Terminal Bahari dan menerima seluruh penghasilan apapun dari penyewa dan atau pengelolaan tersebut.

5. PT. Nongsa Terminal Bahari wajib membayar:
 - Biaya Perawatan dan perbaikan Terminal Ferry Penumpang
 - Biaya pemakaian semua fasilitas antara lain listrik, air segala jenis dan bentuk pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah.
6. PT. Nongsa Terminal Bahari berhak menarik semua pungutan antara lain berupa Terminal Fee yaitu Pass Penumpang untuk tujuan luar negeri dan menyewakan ruangan serta fasilitas dalam arti yang menyangkut aktivitas pelabuhan.
7. PT. Nongsa Terminal Bahari berhak sepenuhnya untuk memiliki hasil pungutan lainnya yang diperoleh dari pengelolaan Terminal Ferry Penumpang selama jangka waktu berlakunya perjanjian ini, kecuali uang Labuh Tambat adalah menjadi hak Otorita Batam.
8. PT. Nongsa Terminal Bahari Bertanggung jawab atas biaya Pemeliharaan Terminal Ferry Penumpang serta pengerukan alur pelayaran mulai dari muara sungai Nongsa sampai di Terminal sehingga alur pelayaran tersebut dapat dilayari oleh Ferry/ kapal-kapal dengan lancar dan aman.
9. PT. Nongsa Terminal Bahari menjamin agar selama perjanjian berlaku Pihak Kedua wajib tetap terikat dan menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dengan baik, meskipun terjadi perubahan / penggantian pengurus, anggaran dasar atau struktur pemilikan saham dan PT. Nongsa Terminal Bahari wajib segera memberitahukan secara tertulis setiap perubahan / penggantian demikian kepada Otorita Batam.

Sedangkan Hak & Kewajiban Otorita Batam adalah:

1. Otorita Batam Wajib untuk mengusahakan didapatkannya dan atau mengeluarkannya semua izin-izin dan persetujuan yang diperlukan dan disyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Terminal Ferry Penumpang.

2. Otorita Batam Bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan rambu-rambu navigasi dan pengerukan alur pelayaran yang berada di luar muara sungai Nongsa (dilaut).
 3. Otorita Batam Wajib tetap terikat dan menjalankan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian dengan baik, dan apabila ternyata terjadi perubahan pejabat atau susunan organisasi Otorita Batam yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian ini, Otorita Batam wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT. Nongsa Terminal Bahari.
 4. Otorita Batam mengkoordinir dan menjamin agar pelaksanaan dari perjanjian ini memperoleh dukungan dari instansi Pemerintah terkait, termasuk dan tidak terbatas pada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Kehakiman, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Departemen Kesehatan.
 5. Otorita Batam membantu secara layah PT. Nongsa Terminal Bahari atau Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh PT. Nongsa Terminal Bahari dalam pengurusan perizinan atau penyelesaian surat-surat yang diperlukan oleh Instansi yang berwenang yang berhubungan dengan tanah dan pembangunan Terminal Ferry Penumpang.
- G.1.9 Perjanjian Kerjasama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) tentang Operasional Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu di Lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam nomor 595/SPJ/KA/9/2018 – UM.57/38/1/PI-18.TU pada hari senin tanggal 1 Oktober 2018. Jangka waktu perjanjian ini berlaku 2 tahun terhitung sejak di tandatangani. Pada tanggal 16 Oktober 2020 dilakukan perpanjangan perjanjian dengan nomor 763/SPJ/A4/10/2020 dan UM.57/31/13/PI-20.TU dengan masa berlaku perjanjian selama 5 tahun.
- Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Hak pihak kesatu sebagai berikut:

1. Mendapatkan Jasa Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian kerjasama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta Petugas Pandu dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan Pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan pembagian Gross Revenue dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan pemanduan di perairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
3. Mendapatkan bagi hasil atas jasa pemanduan dan penundaan kapal dari Gross Revenue.
4. Memonitor system host to host dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan.

Kewajiban Pihak kesatu sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervise terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal yang dilaksanakan oleh Pihak kedua;
3. Memberikan user system host to host kepada pihak kedua.
4. Melakukan integrasi antar system.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan kapal di perairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai pada Perjanjian Kerjasama;
3. Menyediakan Petugas Pandu sesuai ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa pemanduan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
5. Harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pemberdayaan SDM sertifikasi pandu yang ada bekerja pada pihak kesatu;
7. Memberikan pembagian Gross Revenue kepada pihak kesatu dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal;
8. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data.

G.1.10 Perjanjian kerjasama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT. Bintang Sembilan Sembilan Persada (BSSP) nomor 971/SPJ/KA/12/2018 – 999/BSSP/S.PMH/XII/2018 pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2018. Perjanjian ini mengenai kerjasama konsesi kegiatan perusahaan pelabuhan umum di batu ampar wilayah pengembangan sungai panas. Perjanjian ini diperpanjang berdasarkan perjanjian nomor 15/SPJ/KA/3/2022 – 001/BSSP/PKS/IV/2022 dengan penambahan jangka waktu perjanjian menjadi 40

tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan pada perjanjian tahun 2018. Ruang lingkup perjanjian ini mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengusahaan pelabuhan;
2. Pemeliharaan, perbaikan dan pengembangan fasilitas di area konsesi;
3. Pembiayaan untuk investasi dan realisasi biaya untuk operasional termasuk seluruh biaya pemeliharaan pelabuhan dengan mengacu kepada Business Plan;
4. Pembayaran Pendapatan konsesi;
5. Penyerahan asset hasil konsesi.

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka pendapatan pihak pertama dalam hal ini yaitu:

Jenis Jasa/Pendapatan	%
Jasa Labuh	100%
Jasa Tambat	50%
Jasa Chasis Fee	50%
Jasa Dermaga	10%
Jasa Bongkar Muat	10%
Jasa Kepil	10%
Jasa Penumpukan dan Gudang	10%
Pendapatan Lain-lain	10%
Pendapatan dari BBM, Air dan Listrik	10% dari selisih harga jual dan harga bahan
Jasa Penumpang	10%

Pembayaran untuk layanan Jasa Labuh, Jasa Tambat dan chasis, dermaga, bongkar muat, kepil, penumpukan dan gudang dilaksanakan dengan system Host to Host mengacu pada Peraturan Kepala BP Batam, pembayaran dari pihak kedua kepada BP Batam untuk pendapatan kontribusi tetap dilaksanakan setiap tahun dan paling lambat setelah 1 (satu) tahun berjalan diterima didasarkan pada nilai UWT sesuai Perka BP Batam tentang tarif UWT pada tahun bersangkutan. Untuk tahun pertama (2021) nilainya sebesar luas lahan yang dikerjasamakan dikali nilai UWT tahun 2021 sebesar Rp380.773.000,00. Pihak kedua memberikan laporan pendapatan atas pendapatan lain-lain beserta invoice penjualan kepada pihak kesatu setiap tanggal

10 bulan berikutnya dan apabila selisih pembayaran dari jumlah yang harus dibayar maka pihak kedua wajib melakukan penyesuaian

Pihak kedua harus menyerahkan kepada pihak kesatu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pihak kedua dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1^{0/00} (satu permil) perhari keterlambatan dari nilai/besarnya tagihan sejak jatuh tempo tagihan.

G.1.11 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan PT. Energi Unggul Persada tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan nomor 851/SPJ/A4/12/2020 – 0067/HR-EUP/XII/2020 pada tanggal 31 Desember 2020 dengan jangka waktu terhitung tanggal 28 November 2020 sampai dengan 27 November 2022. Uang sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Sewa tanah 1.105,5 m² x NJOP Rp184.200,00 x 2 tahun = Rp407.266.200,00
2. Sewa Rak Pipa 725 m² x Rp10.000,00 x 2 Tahun = Rp14.500.000,00

Objek sewa dalam perjanjian yaitu:

1. Tanah seluas 1.105,5 m²
2. Rak pipa bersama seluas 662 m²
3. Rak Pipa Loading 1, 2, 3 masing-masing seluas 21 m²

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua dikenakan sanksi denda sebesar 1^{0/00} (satu permil) perhari dari total Uang Sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dengan dikembalikannya objek sewa kepada pihak pertama.

G.1.12 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan PT. Teckno Dua Indonesia tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan nomor perjanjian 760/SPJ/A4/12/2019 dan 38/HR/XII/2019/TDI pada hari Selasa

tanggal 31 Desember 2019. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai 15 Agustus 2021. Objek sewa dalam perjanjian yaitu:

1. Tanah lokasi 1 seluas 2.154,25 m²
2. Tanah lokasi 2 seluas 679,32 m²
3. Rak pipa seluas 3.265 m²
4. Rak Pipa Loading 1 dan 2 masing-masing seluas 159 m²

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua dikenakan sanksi denda sebesar 1^{0/00} (satu permil) perhari dari total Uang Sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dengan dikembalikannya objek sewa kepada pihak pertama.

Berdasarkan surat permohonan PT. Teckno Dua Indonesia nomor 30/HR/VI/2021/TDI tanggal 14 Juni 2021 telah dilakukan proses perpanjangan perjanjian dengan masa jangka waktu sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai 15 Agustus 2026 dengan rincian harga sewa sebagai berikut:

1. Sewa tanah 2,833.57 m² x 30 % NJOP Rp184.200,00 x 5 tahun = Rp2.609.717.970,00
2. Sewa Rak Pipa 3.583 m² x Rp10.000,00 x 5 Tahun = Rp179.150.000,00.

G.1.13 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan PT. Synergy Oil Nusantara tentang sewa rak-rak pipa dan tanah diterminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan nomor perjanjian 850/SPJ/A4/12/2020 – 025/OL-GA/XII/2020 pada tanggal 29 Desember 2020 dengan jangka waktu 3 tahun terhitung tanggal 11 November 2020 sampai dengan 10 November 2023. Objek sewa dalam perjanjian yaitu:

1. Tanah seluas 840 m²
2. Rak pipa seluas 294,3 m²
3. Rak Pipa seluas 3.160 m²

Pihak kedua wajib membayar uang sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Sewa tanah $840 \text{ m}^2 \times 30 \% \text{ NJOP Rp}184.200,00 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}464.184.000,00$
2. Sewa Rak Pipa $3.454,3 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00 \times 3 \text{ Tahun} = \text{Rp}103.629.000,00$

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua dikenakan sanksi denda sebesar $1^{0/00}$ (satu permil) perhari dari total Uang Sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dengan dikembalikannya objek sewa kepada pihak pertama.

G.1.14 Perjanjian sewa menyewa antara BP Batam dan PT. Musim Mas tentang sewa rak-rak pipa dan tanah di terminal umum curah cair kabil pelabuhan laut dengan nomor perjanjian 761/SPJ/A4/12/2019 dan 091/SPK/MM/XII/2019 pada hari selasa tanggal 31 Desember 2019. Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai 31 Agustus 2023. Objek sewa dalam perjanjian yaitu:

1. Tanah lokasi I seluas 195 m^2
2. Tanah lokasi A seluas 36 m^2
3. Tanah lokasi D seluas 813 m^2
4. Tanah lokasi E seluas 1.947 m^2
5. Rak pipa Daerah II seluas 525 m^2
6. Rak pipa Daerah III seluas 1.310 m^2
7. Rak pipa Daerah IV seluas 1.955 m^2
8. Rak pipa Daerah B seluas 90 m^2
9. Rak pipa Daerah C masing-masing seluas 72 m^2

Pihak kedua wajib membayar uang sewa dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Sewa tanah $2.991 \text{ m}^2 \times 30 \% \text{ NJOP Rp}139.200,00 \times 5 \text{ tahun} = \text{Rp}2.081.736.000,00$
2. Sewa Rak Pipa $4.024 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,00 \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}201.200.000,00$

Pihak kedua wajib mengasuransikan Objek sewa pada perusahaan asuransi yang ditunjuk pihak pertama dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua dikenakan sanksi denda sebesar 1^{0/00} (satu permil) perhari dari total Uang Sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dengan dikembalikannya objek sewa kepada pihak pertama.

- G.1.15 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Pengusahaan Batam dan PT. Blackgold Indonesia tentang sewa lahan dipelabuhan macobar batu ampar dengan nomor 771/SPJ/A4/10/2020 – 01/BGI-BPL/10.20 pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan jangka waktu perjanjian sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai 31 Desember 2025. Objek sewa perjanjian adalah lahan yang digunakan sebagai jalur pipa milik pihak kedua seluas 318 m² dengan ketentuan uang sewa adalah luas tanah x 30 % NJOP x jangka waktu. Tagihan terhadap sewa lahan diterbitkan setiap satu tahun sekali selama periode sewa.

Pihak kedua wajib mengasuransikan objek sewa dengan biaya asuransi dibebankan kepada pihak kedua dan melaksanakan biaya pemeliharaan atas objek sewa. Keterlambatan penyerahan kembali objek sewa setelah berakhirnya perjanjian oleh pihak kedua sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dikenakan sanksi denda sebesar 1^{0/00} (satu permil) perhari dari total uang sewa yang dihitung mulai saat berakhirnya jangka waktu sewa sampai dikembalikannya objek sewa.

- G.1.16 Perjanjian Kerjasama operasional antara Badan Pengusahaan Batam dan PT. Segara Catur Perkasa nomor 688/SPJ/A4/4/2021 – 009/PKS-BP/KSOP/IV/2021 tanggal 24 April 2021 tentang jasa penundaan diperairan wajib pandu dilingkungan kerja badan perusahaan Kawasan perdagangan bebas dan Pelabuhan bebas batam antara dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian Kerjasama. Pada tanggal 04 Juli 2022 dilakukan perubahan perjanjian dengan menambah objek perjanjian yaitu Kerjasama operasi Pemanduan tertuang pada

perjanjian nomor 802/SPJ/A4/7/2022. Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

1. PNBK Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user system hos-to-host kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional secara elektronik Bersama pihak kedua.

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pelaksanaan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dari jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
3. Menyediakan petugas pelaksana pemanduan dan penundaan sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
5. Menjaga kapal dalam kondisi layak;
6. Melaporkan kepada pihak kesatu apabila terjadi penambahan atau perubahan kapal-kapal ataupun petugas pandu;
7. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
8. Pemberdayaan sumber daya manusia personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bekerja pada pihak kesatu;
9. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf a perjanjian kerjasama;
10. Membayarkan PNBK sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
11. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional pemanduan dan penundaan pihak kedua secara elektronik Bersama pihak kesatu

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan penundaan diperaian wajib dilingkungan kerja BP Batam;
3. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b perjanjian Kerjasama;

4. Monitor sistem host to host pihak kesatu dalam hal kegiatan pemanduan dan penundaan yang dilaksanakan pihak kesatu.

G.1.17 Perjanjian Kerjasama operasional antara Badan Pengusahaan Batam dan PT. Gema Samudera Sarana tentang Jasa Penundaan Perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 755/SPJ/A4/6/2021 – 009/GSS-Dir/VI/2021 pada tanggal 21 Juni 2021. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan 02 Mei 2026. Pada tanggal 15 Desember 2022 dilakukan perubahan perjanjian dengan menambah objek perjanjian yaitu Kerjasama operasi Pemanduan tertuang pada perjanjian nomor 968/A4/SPJ/9/2022 – 005/GSS-Dir/IX/2022.

Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

1. PNBK Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user system hos-to-host kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional secara elektronik Bersama pihak kedua

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana pemanduan dan penundaan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sesuai Perjanjian ini.

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melayani jasa pemanduan dan penundaan kapal dalam satu paket kegiatan;
3. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
4. Menyediakan petugas pelaksana pemanduan dan penundaan sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal;
5. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;
6. Menjamin kondisi kapal layak dan berfungsi dengan baik;
7. Melaporkan kepada pihak kesatu apabila terjadi penambahan maupun perubahan rincian kapal, SDM, saran bantu dan prasarana;
8. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
9. Pemberdayaan sumber daya manusia personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bekerja pada pihak kesatu;
10. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sesuai perjanjian ini;
11. Menyetorkan PNBP Dirjen Perhubungan sesuai perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan;
12. Mengunggah dokumen bukti penggunaan jasa layanan melalui system;

13. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan atas kapal pandu dan kapal tunda
14. Mengganti kapal pandu dan kapal tunda yang rusak dengan jenis dan spesifikasi yang sesuai standar;

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan bagi hasil sesuai perjanjian ini;
2. Memperoleh hak akses pengguna dari pihak kesatu ke dalam system untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;

G.1.18 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Usaha Pelabuhan dan PT. Anchor Marine Services tentang sewa Gudang A Dermaga Selatan Batu Ampar dengan nomor 15/APJ/A4.5/07/2021 – WH002/AMS-BTM/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 dengan jangka waktu sejak tanggal 01 Agustus 2021 sampai 31 Juli 2022 dan diperpanjang dengan perjanjian nomor 82/SPJ/A4.5/9/2022 tanggal 20 September 2022 dengan jangka waktu sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai 31 Juli 2023. Harga sewa atas objek sewa dihitung sebagai berikut $200 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000,00 \times 12 = \text{Rp}240.000.000,00$

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan /atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

G.1.19 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Pengusahaan Batam dan PT. Siemens Indonesia tentang sewa lahan bagian tertentu di Kawasan Pelabuhan batu ampar dengan nomor 837/SPJ/A4/10/2021 – 01/LI-ORG/SRE/XII/2021 tanggal 22 Oktober 2021 dengan jangka waktu sejak tanggal 01 Mei 2021 sampai 30 Oktober 2021. Objek

sewa adalah lahan seluas 24.139 m² yang terletak di jalan Hiu Batu Ampar. Pada bulan November 2021 telah dilakukan proses perpanjangan perjanjian dengan masa jangka waktu sejak tanggal 01 November 2021 sampai 30 April 2022. Harga sewa lahan dihitung sebagai berikut $24.139 \text{ m}^2 \times (\text{Rp}1.274.000,00 \times 30\%) : 2 = \text{Rp}4.612.962.900,00$.

Kewajiban pihak kesatu sebagai berikut:

1. Menyerahkan objek sewa kepada pihak kedua sepanjang pihak kedua dapat memenuhi kewajiban;
2. Pihak kesatu cq Badan Usaha Pelabuhan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perjanjian;
3. Memberikan teguran berupa peringatan tertulis kepada pihak kedua apabila lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Hak pihak kesatu sebagai berikut:

1. Mendapatkan pembayaran atas objek sewa sesuai perjanjian dan peraturan perundang-undangan;
2. Melaksanakan pemeriksaan dan mengawasi pelaksanaan atas objek sewa;
3. Menerima objek sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.

Kewajiban pihak kedua sebagai berikut:

1. Wajib melakukan pembayaran atas objek sewa kepada pihak kesatu;
2. Wajib menggunakan objek sewa sesuai peruntukan dan penggunaan objek sewa;
3. Melaksanakan segala ketentuan dalam pemeliharaan, pengamanan dan penyerahan Objek sewa;
4. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan terkait penggunaan/pemakaian objek sewa dan fasilitasnya;
5. Wajib melaporkan atas perubahan kedudukan domisili perusahaan;
6. Menanggapi dan melaksanakan surat peringatan;
7. Melengkapi dan menyediakan sendiri fasilitas dan perlengkapan lainnya;

8. Membayar biaya operasional sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian selama sewa berlangsung;
9. Apabila terjadi kerusakan objek sewa yang diakibatkan oleh pemakaian dan/atau kelalaian pihak kedua dan/atau pihak yang berada dibawah tanggung jawab pihak kedua, maka pihak kedua wajib memperbaiki atas biaya dan upaya

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan /atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

G.1.20 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Usaha Pelabuhan dengan PT. Musim Mas tentang sewa rak-rak pipa dermaga 2 di terminal umum curah cair kabil Pelabuhan dengan nomor perjanjian 22/SPJ//A4.5/10/2021 – 103/SPK/MM/X/2021 pada hari jumat tanggal 15 Oktober 2021 dengan jangka waktu 01 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2026.

Uang sewa untuk Objek Sewa rak dengan perhitungan $1.456 \text{ m}^2 \times \text{Rp}10.000,- \times 5 \text{ Tahun} = \text{Rp}72,800,000,-$ dengan Objek sewa dalam perjanjian ini adalah rak-rak pipa milik pihak BP Batam yang terletak di Kawasan Umum Curah Cair Kabil seluas 1.456 m^2 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rak pipa A (Jalur utama), seluas 440 m^2
2. Rak pipa B (jalur trestle), seluas 957 m^2
3. Rak pipa C dan D (loading point), masing-masing seluas $29,2 \text{ m}^2$

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak

dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan

G.1.21 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Usaha Pelabuhan dengan PT. Cosmic Indonesia tentang Sewa lahan bagian tertentu di Kawasan Pelabuhan Batu Ampar nomor perjanjian 975/SPJ/WK/10/2022 – 033/BPBATAM-PTCI/2022 tanggal 25 Oktober 2022. Jangka waktu perjanjian sejak 01 Januari 2021 s.d 31 Desember 2022.

Tarif sewa lahan yaitu:

Luas lahan x 30% NJOP x Tahun

$5.116,59 \text{ M}^2 \times (\text{Rp}1.274.000,00 \times 30\%) \times 2 = \text{Rp}3.911.121.396,00$ yang di bagi menjadi 2 kali penagihan tahun 2021 dan 2022

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan.

G.1.22 Perjanjian Kerjasama antara BP Batam dan PT. Dermaga Baruna Makmur Indonesia tentang penyediaan dan pengoperasian peralatan bongkar muat didermaga utara terminal batu ampas Pelabuhan Batam nomor 2/SPJ/KA/1/2022 – DBMI-BP/C-001/I/2022 pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 dengan jangka waktu perjanjian 1 (satu) tahun.

Hak pihak kesatu sebagai berikut:

- a. Menerima bagi hasil pendapatan bongkar/muat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- b. Berhak sewaktu-waktu mengadakan pemeriksaan atas pengelolaan bongkar/muat;
- c. Mendapatkan jasa pelayanan bongkar muat sesuai dengan perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana, prasarana dan operator bongkar muat serta tenaga kerja bongkar muat dari pihak kedua

Kewajiban pihak kesatu sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan kepada pihak kedua sehingga dapat meningkatkan kapasitas kegiatan bongkar muat.
- b. Membantu memasarkan kegiatan bongkar muat pada pengguna jasa
- c. Menjaga keamanan dan ketertiban serta kelestarian lingkungan Pelabuhan
- d. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervise terhadap kegiatan pelayanan jasa bongkar muat

Hak pihak kedua sebagai berikut:

- a. Menerima bagi hasil pendapatan bongkar/muat sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- b. Melakukan pengelolaan bongkar/muat didermaga utara dan area pendukung terminal batu ampar
- c. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait bongkar muat diterminal batu ampar
- d. Dibebaskan dari biaya penumpukan/pass alat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat

Kewajiban pihak kedua sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan jasa bongkar muat sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan perundang-undangan

- b. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan pengelolaan bongkar muat
- c. Berkewajiban untuk merawat dan melakukan Tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga agar pengelolaan bongkar muat berjalan dengan baik
- d. Berkewajiban untuk memelihara lingkungan Pelabuhan dari pencemaran dan kerusakan lainnya akibat pengelolaan bongkar muat
- e. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyediakan sarana dan prasarana, melaksanakan standar SOP, Membiayai seluruh biaya operasional, menyediakan petugas pengawasan operasional dan tenaga kerja bongkar muat, melaksanakan kegiatan bongkar muat selama 24 jam, mengasuransikan fasilitas atas kerusakan dan tidak terbatas pada kerusakan dermaga, lapangan dan utilitas.
- f. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan bongkar muat, mendatangkan kargo/kapal peti kemas dan mengupayakan peningkatan pasar.

Tarif pelayanan bongkar muat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada BP Batam, dengan bagi hasil pendapatan untuk pihak BP Batam sebesar 20% dan pihak kedua 80%

G.1.23 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Usaha Pelabuhan dan PT. Sepatim Batamtama tentang sewa lahan untuk jalur pipa didermaga selatan Pelabuhan Batu Ampar nomor 23/SPJ/A4.5/3/2022 – 011/SPT-UM/III.2022 pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 dengan jangka waktu perjanjian 2 (dua) tahun sejak 28 Februari 2021 s.d 27 Februari 2023. Objek sewa adalah lahan yang digunakan sebagai jalur pipa milik pihak kedua seluas 180 m² Nilai uang sewa sebesar Rp137.592.000,00 dengan rincian:

Luas lahan x 30% NJOP x Tahun

180 m² x (Rp1.274.000,00 x 30%) x 2

Pihak kedua dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan dalam hal tidak melaksanakan pembayaran sewa, perbaikan dan/atau penggantian akibat tidak dilaksanakannya pengamanan dan pemeliharaan atas objek sewa serta belum

mengembalikan objek sewa saat perjanjian berakhir. Apabila setelah surat peringatan tidak melakukan pembayaran maka perjanjian dinyatakan batal dan apabila dalam hal perbaikan, penggantian, dan/atau penyerahan objek sewa sejak 14 hari kerja diterbitkannya surat peringatan ketiga belum dilaksanakan, maka dikenakan denda sebesar 2% per bulan dari nilai sewa atau perbaikan dan dikenakan paling lama 3 bulan

G.1.24 Perjanjian sewa menyewa antara Badan Usaha Pelabuhan dan PT. Ecogreen Oleochemicals tentang Perjanjian sewa rak pipa dan tanah untuk jalur pipa dari terminal jetty ke lokasi perusahaan nomor perjanjian 024/UM-PERJ/VI/1996 tanggal 28 Juni 1996 diaddendum melalui perjanjian nomor 03/ADD/KA/X/2005 tanggal 25 Oktober 2005. Dilakukan perubahan perjanjian melalui nomor 970/SPJ/A4/9/2022 – 2022-039/IX/HRPE-RT tanggal 23 September 2022. Jangka waktu perjanjian 30 tahun sejak tahun 1994. Perhitungan tarif sewa = $3.065 \times (\text{US\$ } 6,44 + \text{US\$ } 9,18)$. Untuk setiap cargo yang masuk dan keluar melalui pipa milik pihak kedua yang ada di Pelabuhan CPO Kabil akan dikenakan throughput fee sesuai tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

G.1.25 Perjanjian Kerjasama antara BP Batam dan PT. Maccahma Dhina Hartiendspin tentang jasa pemanduan dan penundaan diperairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan perjanjian nomor 763/SPJ/A4/4/2022 – 037/SK/MDH-GNR/IV/2022 pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun terhitung sejak ditanda tangani perjanjian ini oleh kedua pihak.

Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberi user system hos-to-host kepada pihak kedua untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional secara elektronik Bersama pihak kedua

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian Kerjasama dan peraturan perundang-undangan;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana serta petugas pelaksana penundaan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebut pada pasal 8 ayat (2) huruf a dari jasa pelayanan penundaan kapal

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa penundaan kapal di perairan Wajib Pandu di Lingkungan Kerja BP Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Menyediakan sarana dan prasarana selama jangka waktu sesuai perjanjian;
3. Menyediakan petugas pelaksana penundaan sesuai dengan ketentuan untuk menunjang kegiatan pelayanan jasa penundaan kapal;
4. Berkoordinasi dengan pihak kesatu dalam setiap melaksanakan kegiatan jasa pemanduan kapal dan melaksanakan segala peraturan/keputusan yang ditetapkan oleh pihak kesatu;

5. Menjaga kapal dalam kondisi layak dan dapat dioperasikan
6. Melaporkan kepada pihak BP Batam apabila terjadi penambahan maupun perubahan kapal dan petugas.
7. Memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan;
8. Pemberdayaan sumber daya manusia personil yang memiliki kualifikasi dan kompetensi bekerja pada pihak kesatu;
9. Memberikan bagi hasil pihak kesatu sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf a perjanjian kerjasama;
10. Membayarkan PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan sesuai perundang-undangan
11. Melakukan integrasi antar system untuk penyampaian data operasional pemanduan dan penundaan pihak kedua secara elektronik Bersama pihak kesatu

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu mengenai kedatangan dan keberangkatan kapal;
2. Mendapatkan informasi dari pihak kesatu tentang kegiatan yang terkait dengan penundaan diperairan wajib dilingkungan kerja BP Batam;
3. Mendapatkan bagi hasil sebagaimana disebutkan pada pasal 8 ayat (2) huruf b perjanjian Kerjasama;
4. Monitor sistem host to host pihak kesatu dalam hal kegiatan penundaan yang dilaksanakan pihak kesatu

G.1.26 Perjanjian Kerjasama antara BP Batam dan PT. Snepac Indo Service tentang jasa pemanduan dan penundaan diperairan wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan perjanjian nomor 967/A4/SPJ/9/2022 – 009/SIS/IX-PMD/2022 pada hari kamis, tanggal 15 Desember 2022. Jangka waktu perjanjian selama 5 tahun terhitung sejak ditanda tangani perjanjian ini oleh kedua pihak.

Bagi hasil/Sharing dalam perjanjian ini berdasarkan persentase atas Gross Revenue sebagai berikut:

1. PNBP Kementerian Perhubungan sebesar 5% dari Gross Revenue
2. Bagi hasil para pihak setelah dikurangi PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pihak kesatu sebesar 20%
 - Pendapatan Pihak kedua sebesar 80%

Kewajiban BP Batam sebagai berikut:

1. Pihak kesatu melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perjanjian;
2. Melakukan pembinaan, pengawasan/supervisi terhadap kegiatan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang dilaksanakan oleh pihak kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Memberikan hak akses pengguna kepada pihak kedua ke dalam system untuk memonitor setiap realisasi kegiatan;
4. Melakukan integrasi antar system pihak kesatu dan pihak kedua untuk penyampaian data operasional secara elektronik

Hak BP Batam sebagai berikut:

1. Mendapatkan jasa pelayanan pemanduan dan penundaan kapal sesuai dengan perjanjian;
2. Mendapatkan jaminan ketersediaan kapal pandu dan tunda, SDM, sarana dan prasarana pemanduan dari pihak kedua;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pemanduan dan penundaan dengan instansi terkait guna menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, ketertiban serta kelancaran lalu lintas kapal di Perairan Wajib Pandu;
4. Mendapatkan bagi hasil sesuai perjanjian ini

Kewajiban Pihak kedua sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di perairan Wajib Pandu sesuai dengan standar kinerja pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Melayani jasa pemanduan dan penundaan kapal dalam satu paket kegiatan;
3. Menyediakan sarana bantu pemanduan, dan prasarana pemanduan sesuai dokumen perizinan;
4. Melakukan koordinasi kepada pihak kesatu dalam pelaksanaan kegiatan jasa pemanduan dan penundaan kapal;
5. Menjamin kondisi kapal layak dan berfungsi dengan baik sehingga dapat dioperasikan;
6. Melaporkan kepada pihak kesatu apabila terjadi penambahan maupun rincian data kapal pandu, kapal tunda, SDM Pemanduan, Sarana Bantu pemanduan dan prasarana pemanduan;
7. Mematuhi segala peraturan dan/atau keputusan yang diterbitkan oleh pihak kesatu serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
8. Menyediakan SDM Pemanduan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu
9. Memperoleh bagi hasil sesuai perjanjian ini;
10. Menyetorkan PNBPD Direktorat Jenderal Perhubungan sesuai perjanjian;
11. Mengunggah dokumen bukti penggunaan jasa layanan pemanduan dan penundaan kapal melalui system
12. Melakukan pemeliharaan, perbaikan kapal dan mengganti kapal yang rusak

Hak pihak kedua sebagai berikut:

1. Memperoleh bagi hasil sesuai perjanjian;
2. Memperoleh hak akses pengguna dari pihak kesatu ke dalam system untuk monitor setiap realisasi kegiatan

G.1.27 **PT Moya Indonesia**

Perjanjian Kerjasama Nomor: 698/SPJ/KA-A4/9/2020 Nomor MI BPBATAM /LGL/PJ/20.09/013 tanggal 14 Desember 2020 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Operasi Dan Pemeliharaan Selama Masa Transisi Penyediaan Air Minum (SPAM) Batam antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT. Moya Indonesia. Jangka waktu Perjanjian kerjasama penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan air minum adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan 14 Mei 2021

Perjanjian tersebut sudah dilakukan Amandemen Pertama dengan Nomor 715/SPJ/A.4/5/2021 dan Nomor MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.05/012 tentang Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan selama masa transisi Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Batam Nomor 698/SPJ/KA-A4/9/2020 dan Nomor MI-BPBATAM/LGL/PJ/20.09/013 tanggal 10 Mei 2021, dimana terjadi beberapa perubahan pasal diantaranya masa transisi pengoperasian air dan pemeliharaan dalam rangka pemilihan mitra kerjasama Jangka Panjang, masa orientasi maka terpilih mulai tanggal 15 November 2020 s/d 31 Oktober 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Selanjutnya dilakukan Perjanjian Amandemen Kedua dengan Nomor 41/SPJ/KA/2021 dan Nomor MI-BPBATAM/LGL/ADD/21.10/026 tanggal 28 Oktober 2021, berisikan tentang perubahan beberapa pasal dan jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir pada 30 April 2022.

Dan telah dilakukan juga Perjanjian Amandemen Ketiga dengan Nomor 20/SPJ/KA/4/2022 dan Nomor MI-BPBATAM/LGL/ADD/22.04/019 tanggal 28 April 2022, berisikan tentang perubahan beberapa pasal dan jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir pada 31 Juli 2022.

Beberapa perubahan pasal di amandemen ketiga sebagai berikut:

1. Belanja SPAM Lainnya adalah pengeluaran biaya-biaya berupa biaya Asuransi dan biaya untuk kegiatan-kegiatan di luar dari Belanja SPAM, Water Charge, Penggantian Meter, Pemasangan Baru, sepanjang disepakati oleh Para Pihak.
2. Hak Pendapatan Pihak Kedua adalah: (i) Water Charge; (ii) Biaya Meterai yang dibebankan kepada pelanggan; (iii) pendapatan uji lab; (iv) penggantian meter air; (v) sambungan pelanggan baru; (vi) Belanja SPAM; (vii) Belanja SPAM Lainnya; (viii) pendapatan dari pemutusan sambungan ilegal dan pemakaian (konsumsi) ilegal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21.9 dari Perjanjian ini; (ix) pekerjaan pembangunan jaringan dan infrastruktur pendukung SPAM; (x) infrastruktur pendukung SPAM dan pekerjaan lainnya yang menjadi beban pihak lain; serta (xi) memperoleh bagian atas Tarif Pembukaan Segel Meter Air, Tarif Balik Nama dan Tarif Sambungan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 4 dari Perka 3/2022 sebesar 50% (lima puluh persen)
3. Menerima dana bagi hasil yang ada di Rekening Giro Bersama dengan ketentuan: (i) untuk volume penjualan Air Minum di atas 10 m³ (sepuluh meter per kubik) akan dihitung berdasarkan volume terbayar dikali Water Charge sesuai Surat Instruksi Transfer Dana; (ii) untuk volume penjualan air minum dibawah 10 m³ (sepuluh meter per kubik), maka bagian pendapatan Pihak Kedua adalah 50% (lima puluh persen) dari selisih volume terbaca dengan volume terbayar dikalikan dengan tarif pelanggan untuk setiap pelanggannya dan ditambah dengan volume terbaca dibawah 10 m³ (sepuluh meter per kubik) dikali Water Charge yang berlaku untuk kinerja 1 November 2021 sampai dengan 31 Juli 2022 dan (iii) untuk memperoleh pendapatan dari pemutusan sambungan ilegal dan pemakaian (konsumsi) ilegal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21.9 dari Perjanjian ini.
4. Perjanjian kerjasama mitra transisi telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, tetapi berdasarkan perjanjian rekening giro bersama amandemen ke-3 tersebut akan ditutup pada tanggal 31 Januari 2023

G.1.28 **PT Adhya Tirta Batam (ATB)**

Sehubungan dengan Perjanjian Konsesi tentang Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam No.009/UM-PERJ/IV/95 tertanggal 17 April 1995 yang telah berakhir pada tanggal 14 November 2020, bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kedua belah Pihak dimana BP Batam diwakili oleh Tim Pengakhiran Perjanjian Konsesi. Menunjuk Berita Acara Rapat Finalisasi Uang Jaminan Konsumen dan Tagihan ATB kepada Pelanggan Sampai Dengan Tanggal 14 November 2020 antara BP Batam dan PT ATB Nomor 104/A1/3/2021 dan L-053/ATB-DT/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 bahwa BP Batam telah sepakat untuk membayar kepada PT ATB atas tagihan terakhir PT ATB kepada Pelanggan s.d tanggal 14 November 2020 sebesar Rp50.400.000.000,00 dengan rincian:

1. Tagihan terakhir sebesar Rp43.750.000.000,00 melalui mekanisme transfer yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap Pertama akan dilaksanakan pada 22 Maret 2021 sebesar Rp36.000.000.000,00 (telah dibayarkan pada tanggal 9 April 2021 yang dananya bersumber dari Rekening Giro Bersama BP Batam dan PT Moya Indonesia).
 - b. Tahap Kedua akan dilaksanakan pada 10 April 2021 sebesar Rp7.750.000.000,00 sampai dengan 31 Desember 2022, Pembayaran atas tahap 2 belum dilaksanakan karena masih terdapat perhitungan hak dan kewajiban pihak PT Adhya Tirta Batam dan Pihak Lainnya (BP Batam dan PT. Moya Indonesia) atas nilai piutang tersebut, yang tertagih adalah sebesar 6.928.116.976,94 dan dana tersebut ditahan pada rekening giro bersama Bank Mandiri a.n KSO BP BATAM - PT. MOYA INDONESIA dengan no rek: 109.001859035.6

Berdasarkan **point b** di atas dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penjelasan Tagihan Pelanggan PT ATB Tahap 2 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021, terdapat penambahan biaya catat meter, biaya penagihan, biaya *key account* dan pembersihan/pengangkutan limbah pasir yang dibahas pada rapat selanjutnya yaitu bulan Desember 2021, sehingga dana sebesar Rp7.750.000.000,00 tersebut belum dapat dilakukan

pembayaran kepada PT ATB karena masih terdapat kewajiban PT ATB kepada BP Batam yang belum diselesaikan, dengan alasan:

- Masih terdapat rincian perhitungan kewajiban PT ATB sebesar Rp5.365.982.430,00 (rincian terlampir).
 - Adanya permintaan biaya penagihan PT Moya Indonesia atas tagihan PT ATB yang harus dibicarakan lebih lanjut dengan PT ATB.
 - Adanya penyelesaian Pengakhiran Konsesi antara PT ATB dan BP Batam pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
 - Dari Rp7.750.000.000,00 berdasarkan Berita Acara Pembagian Escrow per 31 Desember 2021, bahwa sisa tagihan yang belum dibayarkan pelanggan sebesar Rp270.805.835,00
2. Tagihan dengan umur 1 sd 6 bulan sebesar Rp6.650.000.000,00 (piutang tidak tertagih PT ATB yang bukan merupakan kewajiban BP Batam. Penyelesaian masalah pengakhiran Kerjasama antara BP Batam dan PT. Adha Tirta Batam sebelumnya dilakukan di BANI. BP Batam mengajukan gugatan pembatalan putusan BANI ke PN Batam, dan dikabulkan. BP Batam mengajukan gugatan pembatalan putusan BANI ke Pengadilan Negeri Batam dan dikabulkan. ATB memiliki hak untuk mengajukan banding ke Agung, paling lambat tanggal 26 Agustus 2022. Pada saat ini PT Adha Tirta Batam mengajukan penyelesaian masalah melalui Mahkamah Agung

G.1.29 **PT Air Batam Hulu**

Perjanjian Kerjasama Nomor 35/SPJ/KA/7/2022 dan ABHU-BP/PJ/22.07 /040 tanggal 29 Juli 2022 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT Air Batam Hulu. Jangka waktu perjanjian kerjasama penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan air minum adalah 15 (lima belas) tahun terhitung sejak penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan SPAM Hulu berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2037.

Ruang Lingkup Kerjasama Penyelenggaraan SPAM Hulu sebagai berikut:

1. Operasi, Pemeliharaan dan Pengamanan Unit Produksi sampai dengan Titik Serah Air Curah sesuai kapasitas terpasang instalasi Pengolahan Air (IPA)
2. Inspeksi (Mutual Check) dan *Commissioning Test* dilakukan bersama terhadap kapasitas terpasang dan kapasitas efektif

Hak dan kewajiban PT Air Batam Hulu:

- Harga jual air curah pada Titik Serah Air Curah adalah sebesar 1.429/m³
- Jasa Pengoperasian DTA Waduk dan bendungan sebesar Rp245,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Kegiatan Berbasis Biaya Tetap

A Kegiatan Berbasis Biaya Tetap: volume air baku bulan berjalan x Rp 163/m ³								
No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan	Perkiraan Volume Pekerjaan	Jumlah Rp/tahun	Jumlah Rp/bulan	Bobot	Nilai
1	Personil (75 Orang)	Rp/tahun	7.016.025.211	1	7.016.025.211	584.668.768	100	65
2	Operasional Listrik STTR	Rp/tahun	200.954.520	1	200.954.520	16.746.210		2
a	Listrik						100	
3	Operasional Intake antar Waduk	Rp/tahun	5.177.005.844	1	5.177.005.844	431.417.154		
a	Listrik						70	
b	Operasional						10	48
c	Pengamanan						10	
d	Pemeliharaan						10	
4	Pemeliharaan Waduk dan Bangunan Pelengkap	Rp/tahun	2.884.177.005	1	2.884.177.005	240.348.084		
a	Pengoperasian							
i	Pemantauan Tinggi Muka Air Waduk							
ii	Pemantauan Instrumentasi							45
iii	Pemeriksaan Visual Tubuh Bendungan							
iv	Pengoperasian <i>Permanent Bottom Outlet</i> (Tembesi & DK)							
v	PLN & Others (Pos Jaga)						5	
b	Pemeliharaan							
i	Pembersihan Puncak Bendungan						2	27
ii	Pekerjaan Sipil Bendungan (Pengecatan, <i>Signing safety board</i> , marka as puncak)						12	
iii	Maintenance Bendungan dan Bangunan Pelengkap						4	
iv	Pemeliharaan STTR						2	
c	Pengamanan dan lain-lain							
i	Patroli Rutin & Sosialisasi (Operasi <i>Green-Belt</i>)						21	
ii	Penertiban Aktivitas Ilegal						9	
5	Kendaraan Operasional	Rp/tahun	2.293.668.000	1	2.293.668.000	191.139.000		
a	Sewa (DC 55%, MB 30%, Mo 15%)						70	
	Double Cabin 4x4 : 2 unit							
	Mini Bus : 3 unit							
	Motor Trail : 7 unit							
b	Operasional						10	21
c	Pengamanan						10	
d	Pemeliharaan						10	
Total						17.571.830.580	1.464.319.216	163

- Kegiatan Berbasis Output

B Kegiatan Berbasis Output: volume pekerjaan x harga satuan					
No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Harga Satuan Pekerjaan	Jumlah Rp/tahun	Nilai
1	Pembersihan Eceng Gondok	Rp/m ²	1.020	8.886.670.202	9
2	Pemeliharaan Pagar Pengaman	Rp/m	94.050		4
3	Pemotongan Rumput	Rp/Ha	9.200.000		5
4	Reboisasi DTA	Rp/Ha	17.953.719		12
5	Pengerukan Sedimen Waduk	Rp/m ³	71.165		52
Total					82

- PT Air Batam Hulu wajib menyediakan Biaya OP yang dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang terdiri dari:
 - Biaya Operasi, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pegawai, biaya administrasi umum, biaya bahan kimia, biaya energi listrik, biaya transportasi darat dan air, operasional perkantoran, biaya pemeriksaan dan pengujian kualitas Air Curah, serta biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengamanan seluruh instalasi dan sarana pengambilan Air Baku (intake) dari Unit Air Baku ke IPA sampai dengan Titik Serah Air Curah
 - Biaya Pemeliharaan, termasuk namun tidak terbatas pada bagian/unit seluruh instalasi dan sarana pengambilan Air Baku (intake) dari Unit Air Baku ke IPA sampai Titik Serah Air Curah, baik dalam bentuk Pemeliharaan Rutin maupun Pemeliharaan Berkala sebagaimana yang diperlukan agar sarana pengambilan dan pengolahan Air Baku dapat beroperasi secara lancar tanpa adanya gangguan
 - Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Biaya Operasi dan Biaya Pemeliharaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini
 - Biaya Perbaikan atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - Biaya Penggantian atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

rupiah), yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

- Biaya Pengadaan, paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Peralatan dan Mesin, yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
 - Biaya penanganan Keadaan Mendesak, paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin, Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Perbaikan, Penggantian atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- PT Air Batam Hulu bertanggung jawab dalam Operasi, Pemeliharaan, Perbaikan dan Pengamanan Waduk, Bendungan dan Bangunan Pelengkap, Stasiun Pompa Transfer Air Baku, serta IPA Muka Kuning, IPA Duriangkang, IPA Sei Harapan, IPA Sei Ladi, IPA Nongsa dan IPA Tanjung Piayu
 - BP Batam wajib membayar belanja SPAM dan belanja SPAM lainnya yang ditalangi oleh PT Air Batam Hulu, serta nilai manfaat belanja SPAM dan Belanja SPAM lainnya apabila pembayaran kembali atas Belanja SPAM dan Belanja SPAM lainnya dilakukan 1 (satu) tahun atau lebih sejak tanggal penyerahan bukti penagihan dan dokumen pendukung dinyatakan lengkap oleh BP Batam

G.1.30 **PT Air Batam Hilir**

Perjanjian Kerjasama Nomor 36/SPJ.KA.7/2022 dan ABHILIR-BP/PJ/22.07/041 tanggal 29 Juli 2022 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam dan PT Air Batam Hilir. Jangka waktu Perjanjian kerjasama penyelenggaraan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan air minum adalah 15 (lima belas) Tahun dihitung sejak penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan SPAM Hilir berlaku efektif pada tanggal 1 Agustus 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2037.

1. Operasi dan Pemeliharaan terhadap seluruh pompa distribusi, sistem pipa transmisi Air Minum ke Reservoir, jaringan distribusi utama, jaringan distribusi pembawa, jaringan distribusi pembagi, Booster Pump, meter air DMZ, meter air Sub DMZ, meter induk dan meter air pelanggan serta seluruh Chamber dan bangunan penunjang lainnya yang terdapat dalam sistem distribusi hingga daerah pelayanan
2. Operasi dan Pemeliharaan terhadap pengendalian sistem pendistribusian air berdasarkan DMZ dan Sub DMZ yang memenuhi standar minimum pelayanan
3. Operasi dan Pemeliharaan terhadap Pengendalian terhadap tingkat kehilangan air pada setiap DMZ untuk mencegah Technical Losses yang disebabkan termasuk namun tidak terbatas pada kebocoran pipa dan mencegah Commercial Losses yang disebabkan termasuk namun tidak terbatas pada sambungan liar atau sambungan ilegal serta ketidakakuratan alat ukur.
4. Operasi dan Pemeliharaan terhadap seluruh aksesoris, hidran kebakaran dan hidran umum/kios air yang terdapat dan digunakan dalam sistem jaringan pipa distribusi

Hak dan Kewajiban PT Air Batam Hilir:

- Harga jual air minum pada Titik Serah Air minum adalah sebesar 887,2/m³ dari tagihan terbaca dan terbayar pelanggan.
- PT Air Batam Hilir wajib menyediakan Biaya OP yang dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang terdiri dari:
 - Biaya Operasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pegawai, biaya administrasi umum, biaya bahan kimia, biaya energi listrik, biaya transportasi, operasional perkantoran, biaya pemeriksaan dan pengujian kualitas Air Minum, serta biaya operasional lainnya yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengamanan di Unit Distribusi dan Unit Pelayanan Pelanggan
 - Biaya Pemeliharaan termasuk namun tidak terbatas pada bagian/unit seluruh instalasi dan sarana seluruh pompa distribusi, sistem pipa transmisi

Air Minum, Reservoir distribusi, jaringan distribusi utama, jaringan distribusi pembawa, jaringan distribusi pembagi, perbaikan pipa bocor, perbaikan meter dan seluruh bangunan penunjang yang terdapat dalam sistem distribusi hingga daerah pelayanan baik pemeliharaan rutin maupun pemeliharaan berkala sebagaimana yang diperlukan agar sarana pendistribusian Air Minum dapat beroperasi secara lancar tanpa adanya gangguan

- Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam Biaya Operasi dan Biaya Pemeliharaan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Perjanjian ini
- Biaya Perbaikan atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan dari Unit Distribusi sampai dengan Unit Pelayanan Pelanggan, paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- Biaya Penggantian atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan dari Unit Distribusi sampai dengan Unit Pelayanan Pelanggan, paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- Biaya Pengadaan paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Peralatan dan Mesin, yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- Biaya penanganan Keadaan Mendesak paling banyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Pengadaan Peralatan dan Mesin, atau Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Perbaikan, Penggantian atau pemeliharaan bangunan, gedung, tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

- PT Air Batam Hilir harus menyiapkan dana untuk cadangan pembiayaan Belanja SPAM dan Belanja SPAM Lainnya paling sedikit sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) setiap tahunnya, yang ditambah berdasarkan kesepakatan para pihak

G.1.31 **BPJS Kesehatan Cabang Batam**

Sesuai dengan perjanjian kerjasama Nomor 69/KTR/II-03/1222 dan Nomor 92/SPJ/A4.6/12/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ruang lingkup perjanjian meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan berupa upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang terdiri dari rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.

G.1.32 **BPJS Ketenagakerjaan**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor PER/13/1231 Desember 2021 dan 843/SPJ/A4/12/31 Desember 2021 tanggal 22 Desember 31 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Prosedur pelayanan kesehatan bagi peserta;
2. Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan;
3. Hak dan kewajiban;
4. Administrasi;
5. Sanksi.

G.1.33 **PT. Jasa Raharja**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor P/33/SP/2022 dan 87/SPJ/A4.6/10/2022 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penanganan dan Penyelesaian Santunan Korban

Kecelakaan Penumpang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Jalan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun yang berakhir sampai Oktober 2027.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Pertukaran informasi dan pemutakhiran data;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan korban;
3. Peningkatan kemudahan proses penyelesaian santunan;
4. Penanganan dan identifikasi pelayanan korban;
5. Sistem penjaminan korban

G.1.34 Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 00063.PJ/SDM.06.03/DIRKEUSD/2021 dan 834/SPJ/A4/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Pelayanan Kesehatan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Pemberian fasilitas pelayanan kesehatan tingkat II;
2. Pemberian fasilitas pelayanan UGD untuk kasus emergency;
3. Pemberian pelayanan harus menggunakan surat rujukan dari dokter umum;
4. Surat rujukan dapat dipergunakan 1 (satu) kali ke sarana pelayanan kesehatan yang akan dituju;
5. Pelayanan keluarga berencana dan imunisasi anak;
6. Pemberian vitamin untuk tumbuh kembang anak dan masa penyembuhan penyakit

G.1.35 **PT. Sebastian Citra Indonesia**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 75/SPJ/A4.6/8/2021 dan 079/PSM/LGL-SCI/VI/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Sewa Ruangan di RSBP Batam, dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2023.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Penyewaan ruangan terletak di Gedung B;
2. Penyewaan ruangan digunakan untuk menjalankan kegiatan di Bidang Kuliner dengan merek "Roti O" ;

3. Ruang yang disewakan tidak termasuk fasilitas listrik, air, telepon dan pendingin ruangan

Tarif sewa dan konsesi fee meliputi:

1. Ruang/tempat Roti O yang disewakan adalah "Ruang Tertutup" yang terletak di Lantai Dasar Blok 2 Gedung B RSBP Batam dengan luas $7,8 \text{ M} \times 6 \text{ M} = 46,8 \text{ M}^2$;
2. Harga yang disepakati untuk setiap 1 M^2 (meter persegi) per 1 (satu) bulan sebesar $46,8 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 150.000,00 = \text{Rp}7.020.000,00$ (tujuh juta dua puluh ribu rupiah);
3. Pihak Kedua wajib membayar biaya tambahan berupa Konsesi sebesar 5% dari total penjualan Bruto setiap bulan;
4. Jumlah harga sewa, belum termasuk sewa pemakaian listrik dan air

G.1.36 **PT. Indomarco Prismatama**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 4/SPJ/A4.6/12/2021 dan 031/CLG-OPR/I/2022 tanggal 25 Januari 2022 tentang Sewa Ruang di RSBP Batam, dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2025.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Penyewaan ruang terletak di Gedung B;
2. Penyewaan ruang digunakan untuk menjalankan kegiatan di Bidang Perdagangan/Jasa dengan merek "Indomaret" ;
3. Ruang yang disewakan tidak termasuk fasilitas listrik, air, telepon dan pendingin ruangan

Tarif sewa dan konsesi fee meliputi:

1. Ruang/tempat Indomaret yang disewakan adalah Ruang Tertutup yang terletak di Lantai Dasar Blok 2 Gedung B RSBP Batam dengan luas $7,77 \text{ M} \times 5,89 \text{ M} = 45,77 \text{ M}^2$;
2. Harga yang disepakati untuk setiap 1 M^2 (meter persegi) per 1 (satu) bulan sebesar $45,77 \text{ M}^2 \times \text{Rp}150.000,00 = \text{Rp}6.865.500,00$ (enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

3. Pihak Kedua wajib membayar biaya tambahan berupa Konsesi sebesar 5% dari total penjualan Bruto setiap bulan;
4. Uang sewa selama 3 (tiga) tahun ditetapkan sebesar Rp247.158.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

G.1.37 **PT. Bank Mandiri**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 109/SPJ/A4.6/8/2021 dan 1/Ar.BTM/ECO.K/034/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Penempatan 1 (Satu) Unit Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2021 s/d 14 Agustus 2023.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Sewa atas lokasi ruangan dilingkungan Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam;
2. Lokasi hanya dapat dipergunakan sebagai tempat mesin ATM dan tidak dipergunakan untuk keperluan atas usaha lain yang menyimpang dari yang telah ditentukan dalam perjanjian;
3. PT. Bank Mandiri dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri dapat melengkapi perlengkapan atau jaringan fasilitas lainnya yang diperlukan;
4. PT. Bank Mandiri memberikan hak kewenangannya kepada BURS BP Batam untuk memeriksa pemakaian jaringan fasilitas secara berkala;
5. Semua perlengkapan yang dipasang untuk mesin ATM harus terbuat dari bahan berkualitas baik

Tarif sewa meliputi:

1. Membayar sewa sebesar Rp22.000.000,00 per tahun, sudah termasuk biaya listrik, PPh 10%, sewa lokasi dan keamanan;
2. Biaya sewa tersebut tidak termasuk biaya jaringan internet;
3. Keseluruhan biaya sewa dibayar sekaligus selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah invoice

G.1.38 **PT. Bank Syariah Indonesia**

Sesuai dengan Perjanjian Sewa Menyewa Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 26 September 2022 s/d 26 September 2024.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Sewa atas ruangan Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam yang sudah termasuk fasilitas listrik selama 24 jam, AC dan keamanan lingkungan diluar ruangan ATM;
2. Lokasi hanya dapat dipergunakan sebagai tempat mesin ATM dan tidak dipergunakan untuk keperluan atas usaha lain yang menyimpang dari yang telah ditentukan dalam perjanjian;
3. PT. Bank Syariah Indonesia dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri dapat melengkapi perlengkapan atau jaringan fasilitas lainnya yang diperlukan;
4. PT. Bank Syariah Indonesia memberikan hak kewenangannya kepada BURS BP Batam untuk memeriksa pemakaian jaringan fasilitas secara berkala;
5. Semua perlengkapan yang dipasang untuk mesin ATM harus terbuat dari bahan berkualitas baik.

Tarif sewa meliputi:

1. Membayar biaya sewa sebesar Rp26.500.000,00 per tahun;
2. Biaya sewa tersebut sudah termasuk biaya listrik dan jaringan internet yang digunakan;
3. Keseluruhan biaya sewa dibayar sekaligus selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah invoice

G.1.39 **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Cabang Batam**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 165/SPJ/A4.6/9/2021 dan 828/BAT-OJA/PSM/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Penempatan 1 (Satu) Unit Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), dengan jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 s/d 30 September 2023.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Sewa atas ruangan Badan Usaha Rumah Sakit BP Batam yang sudah termasuk fasilitas listrik selama 24 jam, AC dan keamanan lingkungan diluar ruangan ATM;
2. Lokasi hanya dapat dipergunakan sebagai tempat mesin ATM dan tidak dipergunakan untuk keperluan atas usaha lain yang menyimpang dari yang telah ditentukan dalam perjanjian;
3. PT. BPD Jabar dan Banten dengan biaya dan tanggung jawabnya sendiri dapat melengkapi perlengkapan atau jaringan fasilitas lainnya yang diperlukan;
4. PT. BPD Jabar dan Banten memberikan hak kewenangannya kepada BURS BP Batam untuk memeriksa pemakaian jaringan fasilitas secara berkala;
5. Semua perlengkapan yang dipasang untuk mesin ATM harus terbuat dari bahan berkualitas baik

Tarif sewa meliputi:

1. Membayar sewa sebesar Rp22.000.000,00 per tahun;
2. Biaya sewa tersebut tidak termasuk biaya listrik dan jaringan internet yang digunakan;
3. Keseluruhan biaya sewa dibayar sekaligus selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah invoice.
4. Biaya pemakaian listrik ditagihkan setiap bulannya sesuai dengan harga pemakaian listrik ditetapkan berdasarkan catu daya

G.1.40 **PT. Telekomunikasi Selular**

Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 66/SPJ/A4.6/3/2022 dan PKS.227/LG.05/KU.03/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Sewa Menyewa Tempat untuk Pemasangan dan Penempatan Perangkat Sistem Telekomunikasi Selular dan Perangkat Pendukung dengan jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2022.

Ruang lingkup perjanjian meliputi:

1. Menyewakan tempat untuk pemasangan dan penempatan perangkat sistem telekomunikasi selular dan perangkat pendukungnya;

2. Biaya sewa tersebut sudah termasuk penambahan dan atau penggantian perangkat telekomunikasi dan perangkat pendukung yang ditempatkan pada tempat yang disewa tanpa dikenakan biaya tambahan apapun dengan ketentuan penambahan tersebut tidak melebihi dari ukuran luas tempat yang disewa, tidak melebihi kapasitas gedung dan memperhatikan aspek keamanan, kekuatan konstruksi dan estetika dari gedung dimana tempat yang disewa berada

Tarif sewa meliputi:

1. Harga sewa tempat sebesar Rp50.000.000,00 per tahun;
2. Penyewa selama jangka waktu sewa berhak untuk menempatkan semua perangkat sistem telekomunikasi selular dan perangkat pendukung lainnya

G.1.41 **Perjanjian Sewa Menyewa Tangki Avtur FDS Kabil dengan PT. Pertamina Patra Niaga**

Pada tanggal 8 Januari 2022 dilakukan Penandatanganan Perjanjian antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang sewa Menyewa *Fuel Distribution System* (FDS) Avtur Kabil dan Bandar Udara Hang Nadim BP Batam nomor 723/SPJ/A4/1/2022, dengan jangka waktu selama 1 tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2022 sampai 11 Januari 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp 15.000.000.000,00.

G.1.42 **Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir dengan PT. Adhil Sukses Pratama**

Pada tanggal 12 Oktober 2020 BP Batam melalui BUBU mengadakan Adendum IX tentang kerja sama dengan Pt. Adhil Sukses Pratama dengan nomor 09/ADD/A4.4/10/2020.

Berdasarkan addendum tersebut para pihak sepakat untuk:

1. Jangka waktu perjanjian diperpanjang terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan Para Pihak.

2. Pihak Pertama berhak untuk memperoleh pendapatan Biaya masuk yang besarnya sesuai dengan peraturan Kepala BP Batam Nomor 18 tahun 2016.
3. Menghapus royalty Pihak Pertama

G.1.43 **Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Parkir dengan PT. Harmoni Trisekawan Asia Abadi**

Pada tanggal 31 Maret 2021 BP Batam mengadakan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir dengan PT. Harmoni Trisekawan Asia Abadi dengan nomor : 712/SPJ/A4/3/2021 dan nomor 001/HTAA/III/2021. Jangka waktu perjanjian adalah 3 tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian.

Selanjutnya mengenai Pendapatan dan Bagi hasil ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Jangka waktu perjanjian terhitung mulai tanggal 1 April 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai kesepakatan Para Pihak.
2. Para Pihak sepakat bahwa remunerasi pengelolaan perparkiran dalam perjanjian kerja sama ini adalah berdasarkan struktur “Sistem bagi hasil/ Revenue Sharing”
3. Pihak kesatu berhak memperoleh penerimaan Royalti sebesar 30% dari Gross Revenue pendapatan tarif parkir setiap bulannya, sesuai jangka waktu perjanjian.
4. Pihak Kesatu berhak atas seluruh penerimaan Pas masuk kendaraan yang harus dibayarkan oleh pihak kedua selaku pengelola parkir
5. Pihak Kedua berhak atas keuntungan operasional bersih (net profit) setelah melakukan pembayaran royalty, penyeteroran pass masuk kendaraan serta pembayaran retribusi parkir kepada Pemerintah Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah.

G.1.44 **Berita Acara Kesepakatan Pengelolaan GSE dengan PT. Gemalindo Air Support**

Pada tanggal 5 Mei 2017, BP Batam melalui BUBU mengadakan Berita Acara Kesepakatan dengan PT. Gemalindo Air Support sebagai pengganti sementara selama

Perjanjian Kerjasama dalam proses pembuatan TMT 01 Januari 2017. Mengenai Pendapatan dan Bagi hasil ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pihak Pertama menerima Royalty untuk GSE sebesar 4% dan Konsesi Fee Pendapatan 5%;
2. Tarif Shelter Sementara ditetapkan sebesar Rp58.000,00/m² sesuai tariff pergudangan berdasarkan Perka nomor 18 tahun 2016;
3. Apabila tarif yang ditetapkan dari hasil penilaian DJKN Kanwil Riau lebih rendah maka akan dilakukan penagihan kurang tagih dan apabila tariff yang ditagihkan lebih tinggi maka akan dilakukan konversi pada penagihan periode berikutnya.

G.1.45 Perjanjian Kerjasama untuk Desain Pembangunan, Pembiayaan, Pengalihan Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim antara BP Batam dan PT Bandara Internasional Batam

Pada Tanggal 21 Desember 2021 telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama untuk Desain Pembangunan, Pembiayaan, Pengalihan Pengoperasian dan Pemeliharaan Bandar Udara Hang Nadim antara BP Batam dan PT Bandara Internasional Batam, dimana disepakati sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) rekening terpisah untuk rekening escrow (bersama) untuk pendapatan operasional dan pendapatan kargo
2. Tahun pertama 2022 bagi hasil sesuai dengan perjanjian KPBU disepakati kedua belah pihak bp batam menerima rsp minimum sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan operasional 30% dan kargo 65%.

G.1.46 Pada Tahun 2022, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mengasuransikan barang milik negara berupa gedung dan bangunan di lingkungan BP Batam. Pengasuransian barang milik negara merupakan wujud implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 perubahan terakhir Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2020 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang selanjutnya untuk pedoman pengasuransian barang milik negara dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 297 tahun 2018 sebagaimana

perubahan terakhir Peraturan Menteri Keuangan nomor 97 tahun 2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Asuransi Barang Milik Negara dengan Nomor Polis **201.235.110.22.00056/000/000**, Jangka waktu mulai 01 Maret 2022 jam 00.00 Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 jam 24.00 waktu setempat, nilai polis sebesar **Rp771.410.862,00** Nama Perusahaan Asuransi **PT Asuransi Jasa Indonesia Untuk dan atas nama, Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.**

Daftar Rincian Pengasuransian BMN Tahun 2022, Sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Lokasi	Tahun Pembangunan
1	2	3	4	6	7
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	17	Jl. Jenderal Sudirman, Batam Centre	1988
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	18	Jl. Jenderal Sudirman, Batam Centre	1988
3	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	59	Jl. Jenderal Sudirman, Batam Centre	2012
4	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	62	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2013
5	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14	Jl. Engku Putri Batam Korta	2009
6	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	11	Jl. Yos Sudarso, Batu Ampar	2002
7	4010118002	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	14	Jl. RE Martadinata, Sekupang	2017
8	4010118002	Bangunan Gedung/ Terminal/ Pelabuhan/Bandara	13	Jl. Pelabuhan Telaga Punggur	2017
9	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	2	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	1997
10	4010106001	Bangunan Rumah Sakit Umum	6	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2018
11	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya	4	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	1975
12	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya	5	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2016
13	4010106999	Bangunan Kesehatan Lainnya	6	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2016
14	4010106009	Bangunan Rumah Sakit Bersalin dan Lain-Lain	1	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang	2005
15	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Jl. Jenderal Sudirman, Batam Kota	1986
16	4010205001	Asrama Permanen	7	Jl. Engku Putri Batam Korta	1999
17	4010204001	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	1	Jl. Perintis No. 6, Kuningan Timur, Jakarta Selatan	1986

G.1.47 Aset Konsesi Jasa

Rincian Aset Konsesi Jasa per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (Audited) BP Batam:

Mitra Konsesi Jasa	31 Desember 2022 Audited	31 Desember 2021 Audited	Kenaikan/Penurunan	%
PT Bandara Internasional Batam	2.913.569.748.338,00	0,00	2.913.569.748.338,00	88%
Pt Sinergy Tharada	126.659.461.086,00	0,00	126.659.461.086,00	4%
PT Indodharma Corpora	32.981.794.000,00	0,00	32.981.794.000,00	1%
PT Sarana Citranusa Kabil	241.107.781.000,00	0,00	241.107.781.000,00	7%
Total	3.314.318.784.424,00	0,00	3.314.318.784.424,00	100%

- Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Laut merupakan perjanjian konsesi jasa berupa Pengelolaan Terminal Ferry International Batam Centre yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan Laut dengan PT Sinergy Tharada dengan perjanjian nomor 118/SPJ/KA/12/2011;014/BCP-KSO/Add.II/XII/211, rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited
- Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerjasama penyelenggaraan Pelabuhan Umum Curah Padat (General Cargo) yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan dan PT Bintang Sembilan Sembilan Persada dengan nomor perjanjian 1261/SPJ/A3/10/2017;99/BSSP/D/X/2017, rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited
- Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pengelola Logistik Aerocity merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerjasama untuk Desain, Pembangunan, Pembiayaan, Pengalihan, Pengoperasian, dan Pemeliharaan Badar Udara Hang Nadim yang terdiri dari Badan Usaha Pengelolaan Logistik Aerocity dan PT Bandara Internasional Batam dengan nomor perjanjian 47/SPJ/KA/12/2021;0001/BIB/2021, rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited
- Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Laut merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerja sama membangun, mengelola, dan memelihara Terminal Ferry International Sekupang dengan mekanisme Bangun Guna Serah (BOT) yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan Laut dan PT Indodharma Corpora dengan nomor perjanjian 1/PERJ-KA/1/2010;010/IDC-OB/ADD/BOT-KSP/I/2010,

rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited

- Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Laut merupakan perjanjian konsesi jasa berupa pengalokasian tanah untuk keperluan pembangunan, pengelolaan, penyerahan kembali (Build, Operate & Transfer) Tanah dan Terminal Ferry Penumpang di Nongsa yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan Laut dan PT Nongsa Terminal Bahari dengan nomor perjanjian 21/SPJ/KA/VI/1993, rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited
- Aset Konsesi Jasa pada Badan Usaha Pelabuhan Laut merupakan perjanjian konsesi jasa berupa kerjasama penyelenggaraan pelabuhan umum lepas pantai Kabil yang terdiri dari Badan Usaha Pelabuhan dan PT Semblog Citranusa dengan nomor perjanjian 05/PERJ-KA/IV/2004;002/SC/IV/2004 rincian data pendukung sebagaimana terlampir pada Lampiran yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Tahun 2022 Audited

G.1.48 **Aset Properti Investasi**

Aset Properti Investasi menurut PMK No 85/PMK.05/2021 adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administrative; atau
- b) Dijual dan/ diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nama Mitra Properti Investasi	31 Desember 2022 Audited	31 Desember 2021 Audited	Kenaikan/Penurunan	%
PT Graha Wisata Kita	122.068.810.000,00	0,00	122.068.810.000,00	100%
Total	122.068.810.000,00	0,00		

Daftar Aset Properti Investasi pada BP Batam sebagai berikut:

- Aset Properti Investasi pada Kantor Perwakilan Jakarta merupakan Perjanjian berupa kerjasama sewa bangunan dan ruang operasional lainnya pada kuningan



Guest House yang **terdiri dari Kantor Perwakilan Jakarta dan PT Graha Wisata Kita dengan Nomor Perjanjian 978/SPJ/AI/10/2022,01/SPJ-GWA/X/2022**



BP BATAM
Badan Pengusahaan Batam

2022

LK BLU BP BATAM

untuk periode yang berakhir
31 Desember 2022

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)
AUDITED



Batam Office

**Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Centre. Batam
Kepulauan Riau, Indonesia, 29400**

**(0778) 462047 / 462048
humas@bpbatam.go.id**